

PELAJARAN DARI PENGALAMAN PROYEK PESISIR 1997 - 2000 LESSONS FROM PROYEK PESISIR EXPERIENCE 1997 - 2000

PROSIDING LOKAKARYA
HASIL PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN PROYEK PESISIR

EDITOR:
M. FEDI A. SONDITA
NEVIATY P. ZAMANI
BURHANUDDIN
BAMBANG HARYANTO
AMIRUDDIN TAHIR



ISBN 979-9336-05-8

KERJASAMA
PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN - INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PROYEK PESISIR - COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT
COASTAL RESOURCES CENTER - UNIVERSITY OF RHODE ISLAND

PELAJARAN DARI PENGALAMAN PROYEK PESISIR 1997 - 2000

Lessons from Proyek Pesisir Experience in 1997 - 2000

**Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian
Kegiatan Proyek Pesisir
Bogor, 21 - 24 Maret 2000**

Editor:

M. Fedi A. Sondita

Neviaty P. Zamani

Burhanuddin

Bambang Haryanto

Amiruddin Tahir

Diterbitkan oleh:

**PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

dan

**PROYEK PESISIR - COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT
COASTAL RESOURCES CENTER - UNIVERSITY OF RHODE ISLAND**

PELAJARAN DARI PENGALAMAN PROYEK PESISIR 1997 - 2000

Lessons from Proyek Pesisir Experience in 1997 - 2000

Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian
Kegiatan Proyek Pesisir
Bogor, 21 - 24 Maret 2000

Citation:

M. F. A. Sondita, N. P. Zamani, Burhanuddin, B. Haryanto, dan A. Tahir (editors). 2000. Pelajaran dari Pengalaman Proyek Pesisir 1997 - 2000. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir, Bogor, 21 - 24 Maret 2000. PKSPL - Institut Pertanian Bogor dan CRC - University of Rhode Island

CREDITS

All cover photos	: Learning Team PKSPL IPB
Map	: Proyek Pesisir Sulawesi Utara, Lampung dan Kalimantan Timur
Layout	: Production House PKSPL IPB
Style Editor	: Learning Team
ISBN	: 979-95617-xx

Funding for preparation and printing of this document was provided by USAID as part of the USAID/BAPPENAS Natural Resources Management Program and the USAID-CRC/URI Coastal Resources Management (CRM) Program

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar gambar	
Daftar lampiran	
Ucapan terima kasih	
Daftar istilah	
Ringkasan eksekutif	
<i>Executive summary</i>	
Pidato sambutan <i>Chief of Party</i> Proyek Pesisir	
Pidato sambutan Program Koordinator Proyek Pesisir PKSPL - IPB	
Pidato penutupan <i>Chief of Party</i> Proyek Pesisir	
1. Perspektif pembelajaran dalam Proyek Pesisir dan proses kegiatan Learning Team 1999/2000	
2. Daerah perlindungan laut sebagai contoh pengelolaan pesisir terpadu: Pengalaman dan pelajaran dari upaya pengelolaan berbasis masyarakat di Minahasa, Sulawesi Utara	
3. Proses pengembangan tambak ramah lingkungan dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat secara terpadu di Desa Pematang Pasir Lampung Selatan	
4. Pengalaman dan pembelajaran dalam penyusunan atlas sebagai profil sumberdaya wilayah pesisir Lampung	
5. Penyusunan profil sumberdaya pesisir oleh masyarakat desa: Pengalaman dan pelajaran dari upaya pengelolaan berbasis masyarakat di Minahasa, Sulawesi Utara	
6. Penyusunan profil Teluk Balikpapan	
7. Diskusi	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Tim survei dan masyarakat desa Pematang Pasir, Lampung membuat peta pemilikan lahan tambak secara bersama-sama	
2. <i>Learning workshop</i> yang membahas hasil kunjungan lapangan di desa lokasi Proyek Pesisir Sulawesi Utara	
3. Salah satu kondisi Teluk Balikpapan yang terdiri dari daerah industri	
4. Lokakarya hasil pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir yang diadakan di Bogor tanggal 21 - 24 Maret 2000	

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Daftar peserta lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir 1997 - 2000 yang diundang	
2. Daftar peserta lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir 1997 - 2000 yang hadir	
3. Daftar acara Lokakarya hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir 1997-2000	

UCAPAN TERIMA KASIH

Learning Team Proyek Pesisir PKSPL - IPB menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan dan dukungan berbagai pihak sejak dari penyusunan proposal pendokumentasian hingga tersusunnya prosiding ini kepada:

- ◆ *Chief of Party* dan para staf Proyek Pesisir di Jakarta;
- ◆ Kepala PKSPL - IPB dan *Project Coordinator* Proyek Pesisir PKSPL - IPB serta seluruh staf Proyek Pesisir PKSPL - IPB;
- ◆ Para manajer dan seluruh staf Proyek Pesisir Sulawesi Utara, Lampung dan Kalimantan Timur atas bantuan dan kerjasamanya dalam kegiatan pendokumentasian dilaksanakan, baik saat tim berada di lapangan, pada saat *internal* dan *external* workshop maupun dalam proses penulisan prosiding;
- ◆ Dr. Kem Lowry dari University of Hawaii atas pembinaan teknis yang diberikan kepada *Learning Team*;
- ◆ Brian Needham dan Brian Crawford dari CRC - URI atas pembinaan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas *Learning Team*;
- ◆ Para peserta Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir tanggal 21 - 24 Maret 2000.

Kami berharap bahwa prosiding ini akan bermanfaat bagi Proyek Pesisir dan berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Indonesia dan luar negeri.

Bogor, 8 Mei 2000

M. Fedi A. Sondita
Koordinator *Learning Team*
Proyek Pesisir PKSPL - IPB

GLOSSARY/DAFTAR ISTILAH

1. *brain storming*: sebuah cara diskusi untuk ide dengan cara melontarkan setiap gagasan yang terpikir dan memasukkannya dalam sebuah daftar;
2. BUMD:Badan Usaha Milik Daerah; state-owned companies;
3. BUMN:Badan Usaha Milik Negara; provincial government-owned companies;
4. *coastal green-belt* (lihat jalur hijau);
5. *community health center* lihat “Puskesmas”;
6. daerah aliran sungai: akronim dari daerah aliran sungai, yaitu suatu daerah/wilayah sekitar yang mempengaruhi atau terpengaruh aliran sungai;
7. DAS: lihat “daerah aliran sungai”;
8. *early actions*: lihat “pelaksanaan awal”;
9. *Geographical Information System*: lihat “sistem informasi geografi”;
10. GIS: sistem informasi geografi, suatu sistem mengenai informasi/data keruangan.
11. *grass-root society*: lihat “masyarakat bawah”;
12. Jalur hijau: Suatu jalur vegetasi sepanjang perbatasan zona peralihan, yang memisahkan suatu tipe daerah sumberdaya dari daerah lainnya: jalur hijau yang harus ada di sepanjang pantai, lebarnya 100 meter dari garis pantai ke arah dalam;
13. KAPET SASAMBA: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu mencakup wilayah Sanga-sanga, Samarinda dan Balikpapan di propinsi Kalimantan Timur;
14. Kepala Keluarga (KK): Satuan kumpulan orang yang berada di dalam satu rumah, boleh dalam bentuk keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak, atau terdiri dari siapa saja yang tinggal di dalam rumah tersebut;
15. KK: lihat “Kepala Keluarga”;
16. KTF: *Kabupaten Task Force*, kelompok kerja di tingkat kabupaten yang bertujuan untuk memfasilitasi kelancaran kegiatan-kegiatan Proyek Pesisir sekaligus menerapkan praktek-praktek koordinasi yang baik diantara instansi pemerintah dan *stakeholders* pesisir dan lautan;
17. Lembaga swadaya masyarakat: Organisasi non pemerintah yang pendiriannya dimaksudkan bukan untuk mencari keuntungan tetapi lebih bersifat pelayanan kepada masyarakat;
18. LSM: lihat “Lembaga Swadaya Masyarakat”;
19. Madrasah Ibtida’iyah: Lembaga pendidikan formal yang berdasarkan agama Islam, setingkat dengan sekolah dasar;
20. Madrasah Tsanawiah: Lembaga pendidikan formal yang berdasarkan agama Islam, setingkat dengan sekolah menengah pertama;
21. Management plan: lihat “Rencana pengelolaan”;
22. Masyarakat bawah: Barisan/kelompok masyarakat paling bawah, biasanya dipedesaan-pedesaan;
23. OECF: the Overseas Economic Cooperation Fund, dana bantuan pembangunan ekonomi dari lembaga donor Jepang;
24. Padi gogo rancah: jenis tanaman padi yang tidak membutuhkan banyak air;
25. *Participatory rapid appraisal*: sebuah metode survey yang berlangsung singkat dengan cara melibatkan orang atau pihak setempat dalam pengumpulan data / informasi;
26. Pelaksanaan awal: Jenis kegiatan yang mengawali kegiatan utama suatu proyek dengan tujuan untuk memperkenalkan proyek dan program-programnya kepada masyarakat sehingga mendapat dukungan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, sebagai percobaan pelaksanaan kegiatan utama dalam skala kecil;

27. Pertambahan inti rakyat (PIR): Suatu model pertambahan terpadu (mulai dari produksi sampai pemasaran) baik dikelola oleh pemerintah ataupun swasta dengan pemberdayaan masyarakat
28. PRA: lihat “*Participatory rapid appraisal*”;
29. Profil sumberdaya pesisir: suatu deskripsi tentang kondisi sumberdaya pesisir dan isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya tersebut;
30. Profil: suatu keterangan tentang suatu obyek;
31. Profiling: kegiatan untuk mendiskripsikan suatu obyek;
32. Proyek Pesisir Kalimantan Timur - PP KALTIM: satuan pengelolaan Proyek Pesisir di Propinsi Kalimantan Timur, kantor di Balikpapan;
33. Proyek Pesisir Lampung - PP Lampung: satuan pengelolaan Proyek Pesisir di Propinsi Lampung, kantor di Banda Lampung;
34. Proyek Pesisir Sulawesi Utara - PP SULUT: satuan pengelolaan Proyek Pesisir di Propinsi Sulawesi Utara, kantor di Manado;
35. PSC: *Provincial Steering Committee*, yaitu lembaga pengarah dalam pengelolaan pesisir dan lautan tingkat propinsi;
36. PTF: *Provincial Task Force*, adalah lembaga koordinasi program/proyek pengelolaan pesisir dan lautan tingkat propinsi;
37. Puskesmas: Pusat kesehatan masyarakat;
38. Puso: Tanaman padi yang mengalami gagal panen;
39. Rencana pengelolaan: yaitu rencana untuk menangani isu-isu (masalah dan potensi pengembangan) yang teridentifikasi penting untuk masyarakat dan *stakeholder*;
40. Role play: bermain peran, tujuannya untuk mendapatkan pengalaman memerankan posisi tertentu melalui proses permainan (simulasi) agar peserta memahami peran dan persoalan sesungguhnya;
41. RT: lihat “Rukun Tetangga”;
42. Rukun Tetangga: Unit terkecil dari struktur organisasi masyarakat yang bersifat tidak resmi namun diakui;
43. Rukun Warga: Kumpulan dari beberapa RT;
44. RW lihat “Rukun Warga”;
45. *Stakeholder*: pihak-pihak (perorangan, lembaga, badan hukum) yang terlibat, berkepentingan, yang mempengaruhi atau terpengaruh oleh hasil (*outcomes*) suatu program/proyek.
46. Strategic Plan : Rencana strategis;
47. Tambak intensif: Praktek budidaya tambak yang menggunakan input produksi, seperti pakan, obat-obatan, bibit dan teknologi, secara intensif;
48. Tambak tradisional: Praktek budidaya tambak yang menggunakan teknologi dan input produksi secara sederhana dan alamiah;
49. Tokoh kunci: Anggota masyarakat yang dihormati dan dipercaya masyarakat, biasanya memiliki status sosial yang lebih tinggi, baik karena menduduki suatu jabatan penting seperti kepala desa, carik, pemuka adat dan agama ataupun orang yang dituakan;
50. Watershed area: lihat “daerah aliran sungai”;

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. PENDIRIAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT DI DESA BLONGKO, MINAHASA, SULAWESI UTARA

1. Apa yang dimaksud dengan daerah perlindungan laut?

Daerah perlindungan laut (DPL) adalah kawasan laut yang ditetapkan dan diatur sebagai daerah “larang ambil”, secara permanen tertutup bagi berbagai aktivitas pemanfaatan yang bersifat ekstraktif (pengambilan).

2. Apa yang dimaksud dengan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat?

DPL berbasis masyarakat (DPL-BM) adalah DPL yang dikelola oleh masyarakat setempat. Perencanaan dan pengelolaan adalah tanggungjawab utama masyarakat. Pengertian berbasis masyarakat disini adalah masyarakat dan pemerintah setempat secara bersama-sama (kolaboratif) berperan dalam proses perencanaan dan pengelolaan.

3. Apa manfaat DPL bagi masyarakat?

Manfaat DPL bagi masyarakat adalah meningkatkan produksi perikanan (terutama ikan yang berasosiasi dengan terumbu karang), memelihara potensi pariwisata dan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya alam di lingkungan mereka.

4. Apa manfaat DPL terhadap konservasi dan perlindungan lingkungan laut?

Manfaat DPL bagi lingkungan adalah meningkatkan kelimpahan biota ikan, tutupan karang, jumlah spesies dan keragaman sumberdaya, serta perlindungan ekosistem terumbu karang dan habitat lainnya (seperti padang lamun dan bakau).

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan DPL-BM dan mengapa?

Proses pembentukan DPL memerlukan waktu minimal satu tahun. Pendirian DPL berbasis masyarakat yang efektif memerlukan proses partisipatif dan dukungan yang tinggi dari mayoritas masyarakat. Oleh karena itu diperlukan waktu yang relatif lama. Apabila dibentuk dalam waktu kurang dari satu tahun maka kelanjutan dan efektivitas DPL akan sulit dicapai atau dipertahankan. Pengalaman di berbagai negara, seperti Filipina, pembangunan komitmen dan kemampuan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan DPL memerlukan waktu yang panjang.

6. Bagaimana lokasi DPL ditetapkan?

Penetapan lokasi DPL merupakan keputusan masyarakat, berdasarkan kompromi antara pertimbangan ilmiah, teknis dan keinginan masyarakat. Beberapa kriteria untuk penetapan lokasi DPL antara lain: luasnya mencakup sekitar 30% dari total terumbu karang di desa, tutupan karang yang ada dalam kondisi cukup baik, lokasi tidak jauh dari pemukiman untuk memudahkan masyarakat mengawasinya, lokasi seyogyanya bukan lokasi penting bagi perikanan masyarakat setempat.

7. Kapan hasil perbaikan lingkungan dan sumberdaya akibat adanya DPL dapat dilihat secara nyata?

Peningkatan atau perubahan kelimpahan ikan, keanekaragaman spesies dan tutupan karang dapat dilihat minimal satu tahun setelah pendiriannya. Hingga kini belum ada pengalaman dari Indonesia. Namun pengalaman di negara lain, seperti di Filipina dan Pasifik Selatan, menunjukkan bahwa produksi perikanan di sekitar DPL meningkat nyata dalam kurun waktu sekitar 3 hingga 5 tahun setelah DPL ditetapkan.

8. Apa peran masyarakat yang diharapkan dalam proses pendirian dan pelaksanaan DPL?

Peranan masyarakat dalam pendirian DPL-BM adalah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut lokasi, luasan areal, jenis kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang, pengawasan, sanksi dan penegakan aturan, struktur organisasi pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan batas dan pelampung, pemantauan dan evaluasi DPL serta sumbangan sukarela dalam bentuk tenaga, waktu dan material yang tersedia di desa.

9. Apa peran pemerintah setempat dalam pendirian DPL?

Peran pemerintah setempat dalam pendirian DPL antara lain memberikan bantuan teknis dan dana untuk perencanaan dan pelaksanaan serta pelaksanaan awal (*early actions*), pelatihan dan penyuluhan. Pemerintah juga berperan dalam mendorong dan memfasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan serta mengawasi lembaga yang mendampingi masyarakat dalam proses pembentukan, perencanaan dan pelaksanaan DPL. Pengakuan dan pengesahan formal lokasi dan aturan DPL yang disepakati oleh masyarakat dilakukan dengan pembuatan surat keputusan.

10. Apa peran penyuluh lapangan dalam pendirian DPL?

Peran penyuluh lapangan adalah sebagai fasilitator, katalisator, organisator dan pendorong utama dalam perencanaan dan pelaksanaan serta sebagai koordinator awal bagi terjadinya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah serta *stakeholder* yang terlibat. Penyuluh lapangan juga bertanggung jawab terhadap pengembangan kapasitas dan kepemimpinan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan DPL.

11. Apa syarat utama penyuluh lapangan?

Ketrampilan dan komitmen penyuluh lapangan merupakan syarat utama bagi keberhasilan program.

12. Mengapa perlu ada pelaksanaan awal dalam pendirian DPL-BM?

Pelaksanaan awal perlu dilakukan untuk membangun dukungan masyarakat terhadap konsep dan pelaksanaan DPL, menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang membantu masyarakat dalam proses dan membantu meningkatkan kemampuan kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan DPL. Pelaksanaan awal juga berperan sebagai uji coba pelaksanaan pengelolaan dan proses belajar masyarakat dalam pengelolaan DPL.

13. Apa jenis pelaksanaan awal yang sesuai untuk pendirian DPL-BM?

Mengingat tujuan pelaksanaan awal di atas, maka jenis kegiatannya tidak terlalu penting tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat dan proses penentuan jenis pelaksanaan awal tersebut. Oleh karena itu, kegiatan seperti MCK, pendirian pusat informasi, perbaikan sarana penyediaan air bersih, upaya meningkatkan mata pencaharian tambahan dan lain-lain cocok untuk dipilih sebagai kegiatan pelaksanaan awal.

14. Mengapa proyek memerlukan waktu yang cukup untuk memfasilitasi pendirian DPL?

Proyek sebagai lembaga yang terlibat dalam penyiapan pendirian DPL perlu berkerjasama dan melibatkan masyarakat sampai DPL berkembang mencapai tahap pelaksanaan dan berjalan dengan baik. Proyek yang terlibat harus berada di lokasi hingga masyarakat benar-benar siap dan memiliki kapasitas yang cukup untuk secara mandiri mengelola DPL. Badan pengelola DPL yang dibentuk sudah harus efektif dan berjalan dengan baik sebelum proyek ditarik keluar dari masyarakat. Penarikan proyek dari desa harus dilakukan secara bertahap dan perlahan-lahan.

15. Metode partisipasi apa yang dipakai dalam pendirian DPL-BM dan mengapa?

Partisipasi masyarakat harus difasilitasi dengan pendekatan formal dan informal. Pendekatan formal dilakukan melalui pertemuan masyarakat, diskusi dan presentasi melalui lembaga formal yang ada di desa, termasuk sekolah, organisasi keagamaan, arisan, dll. Pendekatan secara informal dilakukan melalui diskusi tatap muka perorangan, dari rumah ke rumah, di tepi pantai dan jalan, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial (seperti dalam pesta kawin, ulang tahun, kematian) maupun dalam kegiatan ekonomi (seperti saat menangkap ikan, panen dan lain-lain).

16. Seberapa penting metode partisipatif informal tersebut?

Metode atau pendekatan informal memiliki nilai yang sama dan bahkan lebih penting dari pendekatan formal. Namun metode informal memerlukan waktu yang lebih panjang tetapi kadangkala lebih efektif daripada pendekatan formal.

17. Apa yang dapat dipelajari dari pengalaman pendirian pengelolaan berbasis masyarakat di Indonesia?

Pendekatan berbasis masyarakat seperti DPL-BM dapat diadaptasikan untuk pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia, seperti sudah diterapkan oleh Proyek Pesisir di Sulawesi Utara. Ciri berbasis masyarakat ini sejalan dengan semangat reformasi serta sesuai dengan UU No 22/1999. Oleh karena itu pengelolaan pesisir dengan pendekatan berbasis masyarakat ini akan lebih mudah dan cepat diadaptasikan untuk diterapkan di Indonesia.

B. PROSES PENGEMBANGAN TAMBAK RAMAH LINGKUNGAN DAN REHABILITASI MANGROVE BERBASIS MASYARAKAT DI DESA PEMATANG PASIR, LAMPUNG SELATAN

1. Apa yang dimaksud dengan tambak ramah lingkungan?

- suatu kegiatan pertambakan yang tidak mengejar produksi dalam skala besar;
- sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam;
- teknologinya bisa dilakukan oleh masyarakat;
- tidak menggunakan bahan-bahan yang akan mencemari lingkungan;
- kegiatannya dapat berkelanjutan.

2. Apa yang dimaksud dengan berbasis masyarakat?

Masyarakat memainkan peran utama dalam setiap tahapan pengelolaan namun tetap melakukan koordinasi dan keterpaduan dengan *stakeholder* lainnya, seperti instansi pemerintah yang terkait.

3. Apa dasar pemikiran dari pengembangan tambak ramah lingkungan dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat?

- keberlanjutan (*sustainability*) baik dari sisi sosial-ekonomi maupun sisi lingkungan hidup;
- bersifat merakyat, dimana contoh dan bentuk-bentuk kegiatan didasarkan pada kebutuhan, kemampuan dan kesepakatan masyarakat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada.

4. Apa tujuan dari program ini?

- mengembangkan suatu bentuk pengelolaan pesisir terpadu dimana masyarakat menjadi pelaku utama (subyek) dalam pemanfaatan lahan mangrove sebagai areal pertambakan secara berkelanjutan;
- menumbuhkan dan mengembalikan tanggung jawab kepada masyarakat dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya alam di lingkungan mereka.

5. Bagaimana strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan dari program ini?

- Mengembangkan tambak dengan teknik-teknik yang tidak mengejar produksi dalam skala besar (padat penebaran benih < 10.000 benur / ha). Pengembangan tambak ini lebih mengarah pada kesinambungan usaha sesuai dengan potensi dan daya dukung sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada dengan cara tetap menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan disekitarnya;
- Membangun suatu mekanisme rehabilitasi dan perlindungan mangrove berbasis masyarakat.

6. Apa sasaran yang hendak dilakukan dalam mewujudkan strategi diatas?

Pengembangan teknik dan pola tambak yang tepat guna serta rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat

7. Apa hasil (outcome) yang diharapkan dari pengembangan program ini?

- Meningkatkan kepedulian dan kesadaran akan arti penting hutan mangrove dalam menunjang keberlanjutan usaha pertambakan
- Meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi dan masalah yang dihadapi, dan mengangkatnya sebagai program yang baik;
- Meningkatkan kemampuan dalam memberikan pendapat dan argumentasi secara aktif dan berani;
- Meningkatkan kemampuan dalam bermusyawarah dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan penyempurnaan program bersama;
- Meningkatkan kemandirian dan kemampuan dalam menyusun, mengembangkan, menerapkan dan membudayakan program-program yang sustainable dan ramah lingkungan ke dalam praktek kehidupan sehari-hari.

8. Mengapa peran masyarakat dalam program ini dianggap penting?

- menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat;
- menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan;
- menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap intervensi luar.

9. Kapan tepatnya masyarakat mulai dilibatkan dalam program ini?

Semakin awal masyarakat dilibatkan akan semakin baik. Namun dalam hal penggalan informasi ataupun studi yang bersifat cepat dan partisipatif (seperti penerapan metode *participatory rapid appraisal* PRA) harus didahului dengan sosialisasi yang jelas mengenai dari tujuan studi dan serta telah ada rasa percaya masyarakat terhadap tim survey ataupun fasilitator.

10. Mengapa pendekatan yang baik terhadap masyarakat dianggap penting?

Pendekatan yang baik dalam pencarian informasi dari masyarakat, khususnya dengan metode PRA yang hanya memiliki waktu singkat, sangat diperlukan agar informasi yang diberikan akurat. Pendekatan yang salah akan menimbulkan rasa curiga sehingga informasi yang diberikan lebih mengarah pada penyelamatan diri, bukan untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya.

11. Mengapa keterlibatan dan partisipasi pemerintah daerah sejak awal dianggap penting?

Semakin awal pemerintah setempat mengetahui dan terlibat dengan program ini akan mempermudah untuk mendapatkan dukungan dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program. Dukungan dan komitmen pemerintah ini akan menumbuhkan semangat, komitmen dan kepercayaan masyarakat.

12. Mengapa perlu dibentuk dan dikembangkan suatu tim pendamping gabungan antara Proyek Pesisir dan mitra LSM-nya?

Tim gabungan yang terdiri dari perwakilan Proyek Pesisir dan perwakilan LSM akan bermanfaat untuk pengembangan kapasitas masyarakat dan *stakeholder* dalam menindaklanjuti dan mereplikasi program di tingkat lokal agar mereka dapat menindak-lanjuti upaya-upaya yang mereka lakukan walaupun proyek telah berakhir. Hal ini juga berkaitan dengan misi Proyek Pesisir dalam rangka desentralisasi dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan pesisir.

13. Komponen apakah yang perlu diperhatikan dalam pembentukan tim pendamping?

- Dalam pembentukan tim pendamping perlu dilihat komposisi gender terutama di wilayah yang kehidupan religiusnya tinggi, seperti adanya pemisahan laki-laki dan wanitanya dalam kegiatan agama;
- Budaya dan bahasa masyarakat setempat perlu dipahami oleh tim pendamping.

14. Apa manfaat dari pendampingan dalam memfasilitasi dan mengorganisasikan kegiatan?

Peran tim pendamping dalam memfasilitasi dan mengorganisasikan kegiatan serta memberi dukungan pada masyarakat dalam setiap proses tahapan kegiatan sangat penting dalam membantu menjembatani kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya.

15. Mengapa penjelasan tentang tujuan dan peran fasilitator atau tim pendamping dalam kegiatan sosialisasi dianggap penting?

Dalam kegiatan sosialisasi harus dijelaskan tujuan kegiatan dan peran fasilitator sehingga masyarakat benar-benar memahami peran mereka dan tidak terjadi ketergantungan masyarakat kepada mereka.

16. Mengapa perlu dibangun kesamaan persepsi di antara anggota tim pendamping?

Hal ini sangat penting dalam rangka menentukan dan memfokuskan arah kegiatan. Penyamaan persepsi di antara anggota tim ini merupakan komponen penting agar tidak membingungkan dan menimbulkan kerancuan bagi masyarakat. Jika terdapat ketidakjelasan maka pada akhirnya menghambat kelancaran dan keberhasilan kegiatan tersebut.

17. Apa saja manfaat dari kegiatan sosialisasi?

- Untuk menjelaskan tujuan kegiatan,
- Untuk mencari penghubung dan menggali berbagai isu dalam masyarakat.

18. Apakah ada batasan waktu untuk sosialisasi?

Kegiatan sosialisasi tidak dapat dibatasi oleh waktu dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan tahapan kegiatan yang ada.

19. Siapa pihak yang dianggap dapat membantu dalam kelancaran kegiatan ini?

Tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam masyarakat seperti kepala desa, pemuka adat dan agama merupakan penghubung (*contact person*) sekaligus tokoh kunci (*key person*) yang baik dalam membantu kelancaran komunikasi antara sesama masyarakat dan tim pendamping.

20. Apa manfaat dari kegiatan studi banding ke lokasi-lokasi yang relevan terhadap pemberdayaan masyarakat?

- Meningkatkan dan membangun kemampuan *masyarakat (capacity building)*;
- Membuka wawasan masyarakat;
- Menumbuhkan dan mengembangkan ide-ide masyarakat;
- Menyadarkan masyarakat akan dampak pemanfaatan sumberdaya alam yang merusak.

21. Mengapa perlu melakukan pelaksanaan awal yang relevan dan dibutuhkan masyarakat?

Pelaksanaan awal yang sesuai dan relevan dengan tujuan program sangat membantu dan penting dalam pengembangan kapasitas masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan membuka wawasan, sehingga akan sangat membantu masyarakat dalam pengembangan program yang bersifat partisipatif.

C. PROSES PENYUSUNAN PROFIL SUMBERDAYA PESISIR DI LINGKUP DESA, KAWASAN EKOLOGIS DAN WILAYAH ADMINISTRATIF

1. Apakah yang dimaksud dengan profil dan apa bentuknya?

Profil adalah gambaran umum tentang suatu obyek yang dilengkapi dengan sejumlah informasi tertentu. Profil wilayah atau kawasan pesisir adalah gambaran umum yang berisi informasi tentang permasalahan atau isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan dan sumberdaya wilayah pesisir. Suatu profil dihasilkan dari kegiatan penyusunan profil (*profiling*). Profil yang dihasilkan tersebut dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari dokumen cetak (seperti peta atau atlas dan buku) dan dokumen elektronik (seperti *compact disc* CD, kaset video, foto slide).

2. Apa yang dimaksud dengan isu?

Isu adalah kondisi atau keadaan yang ingin diubah oleh masyarakat. Keinginan perubahan tersebut dapat diwujudkan dalam rangka pemanfaatan potensi ataupun pemecahan masalah. Isu yang memberikan peluang peningkatan pemanfaatan potensi digolongkan sebagai isu yang bersifat positif sedangkan isu yang memerlukan pemecahan masalah digolongkan sebagai isu yang bersifat negatif.

3. Apa yang dimaksud dengan profil isu?

Profil isu adalah gambaran umum yang berisi isu-isu yang berkaitan dengan potensi pemanfaatan, permasalahan yang perlu ditangani dalam konteks pengelolaan sumberdaya.

4. Apa manfaat profil isu?

Profil isu bermanfaat untuk dijadikan a) sebagai dasar penyusunan perencanaan strategi pengelolaan sumberdaya, b) sebagai data dasar untuk menilai dampak penerapan suatu strategi pengelolaan sumberdaya, c) menambah pengetahuan masyarakat tentang lingkungan dan dirinya, d) membangun konstituensi pengelolaan sumberdaya dan menggalang partisipasi stakeholder, dan e) membangun konsensus atau kesepakatan dan komitmen berbagai pihak (*stakeholders*).

5. Siapa saja pihak/kalangan yang terlibat dalam penyusunan profil?

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan profil secara umum adalah masyarakat (baik di tingkat desa hingga yang lebih tinggi yang diwujudkan dalam perwakilan, tenaga ahli atau konsultan (termasuk dari kalangan universitas), instansi pemerintahan setempat, lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan swasta. Jenis dan intensitas peranan masing-masing kelompok tergantung pada kesiapan masing-masing dan kesepakatan bersama.

6. Bagaimana peran pihak/kalangan tersebut di atas, dalam penyusunan profil?

Jenis peran dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan profil dapat dibedakan menjadi tiga kelompok partisipan, yaitu: a) sebagai penyedia data atau informasi (partisipan A), b) sebagai penyedia data dan ikut serta dalam pengumpulan data (partisipan B), c) sebagai penyedia data,

pengumpul data dan aktif dalam kegiatan analisis (partisipan C). Di Sulawesi Utara, masyarakat desa tergolong sebagai partisipan tingkat C, pemerintah dan perguruan tinggi sebagai partisipan tingkat B, sedangkan LSM dan perusahaan swasta berperan sebagai partisipan A. Dalam penyusunan profil teluk di Kalimantan Timur dan profil tingkat propinsi di Lampung, perguruan tinggi/konsultan berperan sebagai partisipan C, pemerintah dan LSM berperan sebagai partisipan B sedangkan masyarakat dan perusahaan swasta berperan partisipan A.

7. Bagaimana proses penyusunan profil dilakukan oleh Proyek Pesisir?

Secara umum, proses profiling yang dilakukan di tiga propinsi lokasi proyek terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengesahan, serta tahap publikasi, diseminasi dan pemanfaatan profil.

Atlas sumberdaya wilayah pesisir Lampung Profil yang dihasilkan *stakeholders* pesisir Propinsi Lampung pada saat kegiatan pendokumentasian ini sudah dicetak dan disebarluaskan. Proses penyusunannya secara umum terdiri dari (1) kegiatan-kegiatan konsultasi dengan *stakeholders*; (2) pelatihan staf proyek dan mitra kerja yang akan berperan besar dalam *profiling*; (3) survei awal dan kajian (review) data sekunder dan informasi lain yang tersedia; (4) pemilihan jenis informasi yang akan disajikan dalam profil. Setelah informasi tersebut terkumpul, tahap selanjutnya adalah (1) pembuatan peta dasar secara manual, (2) survei lapang, (3) analisis data lapang, (4) pembuatan peta dengan proses digitasi untuk menyusun peta dasar dan peta tematik, (5) drafting atlas, serta (6) verifikasi oleh *stakeholders* terhadap data dan informasi dalam bentuk lokakarya, konsultasi publik dan pengiriman draft. Pengesahan profil dilakukan setelah para *stakeholders* dapat menerima substansi dan informasi rinci yang tercantum di dalamnya. Pengesahan resmi dilakukan oleh Gubernur. Diseminasi profil pesisir dilakukan melalui kegiatan sosialisasi seperti penulisan artikel dalam jurnal, presentasi di sejumlah seminar dan lokakarya, pembuatan brosur dan publikasi lewat fasilitas

internet (website). Atlas disampaikan kepada para partisipan yang terlibat, *stakeholders* termasuk sekolah-sekolah menengah umum, pemerintah daerah propinsi lain dan mitra Pemda Propinsi Lampung di luar negeri. Informasi yang terkandung di dalam profil ini telah dimanfaatkan sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir Propinsi Lampung (Renstra Pesisir Lampung), masukan informasi untuk revisi atau perbaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), masukan informasi untuk perencanaan lintas sektoral di propinsi Lampung, bahan bacaan atau pelajaran untuk program pendidikan sekolah menengah dan perguruan tinggi, dan contoh nasional bagi propinsi lain dalam proses pengelolaan sumberdaya pesisir.

Profil Teluk Balikpapan Berbeda dengan penyusunan profil di tempat lain, hingga saat lokakarya ini perkembangan penyusunan profil Teluk Balikpapan yang difasilitasi oleh Proyek Pesisir Kalimantan Timur belum sampai tahap produksi atau percetakannya. Dalam tahap persiapannya, kegiatan yang dilakukan adalah (a) penentuan jenis dan spesifikasi data serta informasi; (b) sosialisasi, konsultasi dan koordinasi rencana penyusunan profil dengan instansi pemerintahan dan lembaga non-pemerintah (LSM, universitas, perusahaan swasta), termasuk *Provincial Task Force* PTF; (c) penetapan rencana pengumpulan data; (d) merintis kerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan penelitian dan kajian teknis terhadap aspek tertentu yang akan disajikan dalam profil. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah: (a) identifikasi isu atau permasalahan; (b) pengumpulan data melalui sejumlah survei lapangan; pengumpulan data sekunder pada berbagai pihak; (c) pelaksanaan penelitian dan pengkajian teknis; (d) verifikasi hasil penelitian dan kajian-kajian teknis melalui lokakarya *stakeholders* dan (e) kompilasi hasil-hasil penelitian dan kajian-kajian teknis.

Proyek sumberdaya pesisir desa di Minahasa, Sulawesi Utara Perkembangan penyusunan profil sumberdaya pesisir tiga lokasi proyek di Sulawesi Utara sudah memasuki tahap produksi (pencetakan). Tahap

persiapan yang dilakukan adalah: (a) merangkum isu-isu yang teridentifikasi dalam kajian teknis dan diskusi-diskusi yang melibatkan anggota masyarakat desa, (b) identifikasi calon anggota yang dilanjutkan dengan pembentukan kelompok inti yang akan berperan besar dalam penyusunan profil sumberdaya pesisir desa, (c) pembentukan tim pendukung teknis, dan (d) pelatihan bagi kelompok inti dan tim pendukung teknis untuk mempersiapkan kemampuan yang diperlukan dalam penyusunan profil sumberdaya desa. Tahap pelaksanaan berupa bebragai hingga penyusunan draft profil sumberdaya desa dilakukan oleh kelompok inti. Pengakuan atau perimaan terhadap isu-isu permasalahan pengelolaan sumberdaya pesisir yang tertulis dalam draft profil dilakukan setelah draft tersebut dikaji secara seksama oleh masyarakat desa dan tim teknis. Setelah itu draft profil diperbaikani berdasarkan kajian tersebut. Setelah isi draft tersebut disetujui oleh masyarakat desa, profil sumberdaya pesisir desa dicetak dan disebarluaskan. Dokumen profil desa ini dikirim instansi-instansi pemerintah, desa-desa lokasi proyek, desa-desa tetangga dan pihak-pihak lainnya.

8. Apa saja perbedaan-perbedaan dalam proses profiling di ketiga propinsi lokasi proyek?

Perbedaan proses penyusunan profil pesisir di antara ketiga propinsi lokasi proyek (wilayah desa pantai, kawasan teluk dan tingkat propinsi) adalah mekanisme partisipasi *stakeholders*, tenaga ahli yang terlibat dan jumlahnya, jenis informasi yang disajikan, penguatan kelembagaan, metode penyusunan profil dan waktu yang diperlukan untuk penyusunan profil.

Mekanisme partisipasi masyarakat lokal Dalam penyusunan profil sumberdaya pesisir di tingkat desa di Sulawesi Utara, partisipasi masyarakat diwujudkan dalam pertemuan-pertemuan atau acara tatap muka penduduk desa. Termasuk dalam jenis pertemuan ini adalah kunjungan anggota kelompok inti ke rumah-rumah penduduk (*door-to-door approach*). Dalam penyusunan profil sumberdaya wilayah pesisir Lampung, partisipasi masyarakat desa diwakili oleh tokoh-tokoh

masyarakat desa (*key persons*), staf pemerintahan desa dan perwakilan pengguna sumberdaya. Sedangkan dalam penyusunan profil Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, partisipasi masyarakat desa juga diwakili oleh wakil-wakil wilayah desa atau kelurahan yang dipilih pemilihannya berdasarkan berdasarkan kriteria tertentu.

Jenis dan jumlah tenaga ahli yang terlibat dalam penyusunan profil Jenis keahlian dari konsultan yang diperlukan ditentukan oleh jenis permasalahan atau isu khusus yang ada di lokasi proyek. Untuk Sulawesi Utara (5 jenis), Lampung (11 orang), Kalimantan Timur (9 jenis). Sedangkan, jumlah tenaga ahli atau konsultan ditentukan cakupan luas wilayah, selain oleh jenis permasalahan atau isu dan informasi yang akan disajikan. Ada 8 orang terlibat untuk profil desa di Sulawesi Utara; 26 orang untuk profil pesisir Propinsi Lampung dan 14 orang untuk profil Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur.

Persiapan tim yang akan bertanggungjawab dan terlibat dalam penyusunan profil Untuk mempersiapkan tim dan pihak-pihak setempat yang akan terlibat dalam penyusunan profil, Proyek Pesisir mengadakan kegiatan pelatihan dan sejumlah kegiatan lainnya yang sifatnya untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok. Sesuai dengan skala geografi dan cakupan wilayah administratif, pendekatan yang diterapkan dalam penguatan kelembagaan tersebut berbeda antar lokasi proyek. Materi dan strategi pelatihan disesuaikan dengan karakteristik partisipan kegiatan profiling.

Metode pengumpulan informasi dan data Pada prinsipnya metode pengumpulan informasi dan data di antara ketiga propinsi lokasi proyek adalah sama, yaitu dengan melakukan kajian seksama terhadap informasi atau data sekunder, survei lapangan, perbandingan antara temuan dari survei dan data sekunder, validasi data dan informasi melalui konsultasi dengan pihak-pihak sumber data. Namun strategi pengumpulan data dan informasi tersebut berbeda di antara lokasi proyek karena adanya

perbedaan skala geografi dan wilayah administrasi yang tercakup dalam profil ada perbedaan nyata di antara ketiga lokasi proyek. Pengumpulan data dan informasi untuk profil skala desa (Sulawesi Utara) dilakukan secara intensif. Sedangkan untuk profil skala propinsi (Lampung), pengumpulan data dan informasi yang lebih rinci difokuskan di lokasi yang tingkat permasalahannya relatif tinggi (*hot-spots*). Untuk profil Teluk Balikpapan (Kalimantan Timur), pendekatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dan informasi merupakan kombinasi pendekatan yang dilakukan oleh Proyek Pesisir di Sulawesi Utara (tingkat desa) dan Lampung (wilayah administrasi yang lebih luas, tapi tidak sampai skala propinsi).

Lama waktu penyusunan profil Cakupan luas wilayah dan tingkat kerincian data atau informasi yang diperlukan, kesiapan tim yang akan bertanggungjawab dan proses validasi untuk mencapai kesepakatan terhadap informasi yang terkandung dalam profil. Selain itu, lama waktu yang diperlukan juga ditentukan oleh tingkat kesibukan dan kapasitas proyek, seperti terjadi dengan Proyek Pesisir Sulawesi Utara yang memfasilitasi penyusunan 3 (tiga) buah profil desa. Proses validasi yang melibatkan masyarakat dan berbagai pihak memerlukan perhatian besar mengingat profil ini memuat kesepakatan tentang kondisi saat ini dan persoalan yang akan ditangani oleh suatu rencana pengelolaan (*management plan*). Waktu yang diperlukan untuk menyusun profil desa di Sulawesi Utara dan profil Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur masing-masing 2 (dua) tahun sedangkan untuk profil sumberdaya pesisir Propinsi Lampung sekitar 1 (satu) tahun.

9. Bagaimana cara proyek mendorong partisipasi masyarakat dan *stakeholders* dalam proses penyusunan profil?

Strategi yang diterapkan untuk merangsang masyarakat atau *stakeholders* berpartisipasi dalam proses penyusunan profil secara umum adalah melalui kegiatan penyuluhan dengan bahan yang diperoleh dari lingkungan setempat, kegiatan pelaksanaan awal (*early actions*), membangun

kemitraan dengan *stakeholder* lain, bekerjasama dengan tokoh kunci (*key persons*), terlibat dan memposisikan proyek sebagai salah satu *stakeholder* dari program lembaga atau instansi lain. Dalam melakukan kontak dengan masyarakat dan *stakeholders*, proyek menyediakan waktu yang cukup untuk komunikasi, mendengarkan masyarakat dan *stakeholder*. Pada prinsipnya, proyek lebih bersifat akomodatif terhadap keinginan masyarakat. Proyek selalu mencoba menerapkan cara terbaik dalam menjelaskan suatu ide namun dengan tetap menerapkan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan pendapat. Bentuk dan strategi ini disesuaikan dengan forum dan partisipan dari pertemuan yang diselenggarakan. Untuk masyarakat di lingkungan desa, contoh-contoh visual cukup intensif digunakan dalam pertemuan umum. Pertemuan dalam bentuk seminar dan lokakarya banyak dilakukan untuk pertemuan yang melibatkan staf instansi pemerintahan dan perusahaan swasta serta lembaga swadaya masyarakat.

10. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan profil?

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan profil teluk di Kalimantan Timur dan profil pesisir Propinsi Lampung adalah akurasi data sekunder yang rendah, cakupan wilayah geografis yang luas, sarana pembuatan profil yang terbatas (seperti GIS), kapasitas *stakeholder* dalam pengelolaan pesisir dan lautan masih terbatas, waktu yang tersedia terbatas dan kecurigaan beberapa pihak terhadap kegiatan ini serta pihak-pihak yang apatis dan menempatkan diri sebagai oposisi terhadap kegiatan ini. Secara umum kendala yang ditemukan dalam penyusunan profil desa di Sulawesi Utara adalah sama dengan di tempat lain. Namun luasan wilayah dan sarana GIS bukan merupakan kendala karena profil pesisir desa luasannya kecil dan penyusunannya tidak memerlukan sarana canggih.

11. Bagaimana strategi yang baik untuk mendorong partisipasi *stakeholder* dalam kegiatan penyusunan profil?

Pendekatan dan strategi yang digunakan untuk mendorong partisipasi

stakeholder dalam kegiatan penyusunan profil dilakukan dengan cara: a) menciptakan kesan bahwa proyek ini bermanfaat baik bagi *stakeholder*, b) menyamakan persepsi dengan *stakeholder*, c) menempatkan *stakeholder* sebagai mitra dalam kegiatan proyek, d) menyebarluaskan konsep penyusunan profil dan hasil yang diperoleh kepada masyarakat luas.

12. Strategi apa yang baik agar data dan informasi dapat dikumpulkan secara lengkap, efisien, efektif dan rinci?

Pengumpulan data dan informasi secara lengkap, efisien, efektif dan rinci sebaiknya dilakukan dengan strategi: a) menentukan spesifikasi data yang dibutuhkan sebelum melakukan kegiatan pengumpulan data, b) melibatkan *stakeholder* kunci (*key persons*) yang tepat sebagai sumber awal informasi dalam proses pengumpulan dan verifikasi data, c) membina hubungan baik secara formal maupun informal dengan *stakeholder* pemilik atau sumber data atau informasi, d) melakukan kajian khusus terhadap isu-isu yang ingin secara rinci diketahui dengan cara melibatkan tim ahli, e) pendayagunaan tenaga ahli yang sesuai dengan keperluannya.

13. Bagaimana sebaiknya konfirmasi dan verifikasi data atau informasi dilakukan?

Untuk menyajikan data dan informasi yang akurat dalam suatu dokumen, konfirmasi dan verifikasi data/informasi harus dilakukan. Konfirmasi dan verifikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara: a) melakukan perbandingan dan pemeriksaan silang (*cross-check*) terhadap data sekunder yang berasal dari sumber-sumber data, b) melakukan lokakarya dan pertemuan, baik formal maupun informal, dengan melibatkan *stakeholder* dan instansi atau lembaga penerbit data.

14. Bagaimana sebaiknya sosialisasi profil dilakukan?

Sosialisasi profil sumberdaya pesisir dapat dilakukan melalui pertemuan formal dan informal, media elektronik dan cetak seperti televisi dan radio, koran, majalah, tabloid, jurnal.

15. Bagaimana sebaiknya komposisi tim ahli untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan profil?

Komposisi tim ahli yang akan dilibatkan dalam kegiatan *profiling* sebaiknya ditentukan setelah mempertimbangkan cakupan dan keragaman isu pengelolaan sumberdaya, luas wilayah, waktu dan dana yang tersedia.

16. Bagaimana strategi terbaik agar profil tersebut dapat diakui dan diterima oleh *stakeholder*?

Melalui kerjasama yang baik antara lembaga perencanaan (misalnya Bappeda), perguruan tinggi dan instansi atau lembaga terkait lainnya, profil tersebut akan diterima sekaligus mempermudah proses pembaharuan profil di masa yang akan datang.

17. Siapa sebaiknya yang bertanggungjawab dalam pembaharuan (*up-dating*) informasi yang tertulis dalam profil di kemudian hari?

Pihak yang bertanggungjawab terhadap pembaharuan profil ditentukan oleh cakupan kawasan geografi dan wilayah administratif. Penanggungjawab pembaharuan profil pesisir desa sebaiknya pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Untuk profil propinsi, yang bertanggungjawab seyogyanya pemerintah propinsi. Sedangkan untuk profil kawasan ekologi (seperti kawasan teluk), yang bertanggungjawab sebaiknya instansi-instansi pemerintah yang terlibat dalam penyusunan profil. Dalam kegiatan pembaharuan ini, perguruan tinggi setempat sebaiknya dilibatkan.

18. Bagaimana sebaiknya bentuk profil yang cocok?

Profil yang baik adalah yang memenuhi kriteria, yaitu mudah dimengerti oleh pembacanya, isinya menarik perhatian artistik, dan informatif serta obyektif. Oleh karena itu, bentuk profil sebaiknya disesuaikan dengan sasaran pengguna profil, ruang lingkup permasalahan dan cakupan wilayah pengelolaan.

19. Darimana sebaiknya sumber dana untuk kegiatan penyusunan profil?

Pada prinsipnya, kegiatan penyusunan profil ini melibatkan sumberdaya (dana dan tenaga) dari berbagai pihak. Dalam contoh ini, sebagian besar dana dan tenaga ahli berasal dari Proyek Pesisir. Sumberdaya lain berasal dari pemerintah daerah, masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan perusahaan swasta serta pihak-pihak lain. Hal ini tergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang terlibat.

20. Apa manfaat kegiatan penyusunan profil?

Kegiatan penyusunan profil bermanfaat untuk membangun partisipasi *stakeholder* di tahap selanjutnya, untuk perencanaan pembangunan daerah dan untuk membangun forum penentuan pengelolaan pesisir.

Kegiatan penyusunan profil ini memberikan manfaat besar karena membangun dukungan serta partisipasi masyarakat dan berbagai pihak dalam mewujudkan upaya pengelolaan sumberdaya, menyediakan informasi dasar yang dapat dijadikan acuan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungannya. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan penyusunan profil, masyarakat mengetahui isu-isu (masalah dan peluang), penyebab isu, akibat yang ditimbulkan dan mengetahui strategi penanganan isu-isu tersebut.

Kegiatan penyusunan profil ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, baik kecamatan, tingkat I maupun II, untuk mengetahui permasalahan dan peluang secara lebih rinci. Informasi tersebut bagi pemerintah sangat penting untuk merencanakan pembangunan yang efektif, bermanfaat dan diperlukan oleh masyarakat.

Kegiatan penyusunan profil ini memberikan pengalaman dalam membangun forum perwakilan berbagai *stakeholder* dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir. Komunikasi antar *stakeholder* untuk mencapai kesepakatan bersama merupakan contoh bagaimana suatu keputusan dibuat dan semua pihak memiliki komitmen terhadap keputusan tersebut.

EXECUTIVE SUMMARY

A. ESTABLISHMENT OF COMMUNITY BASED MARINE SANCTUARY IN BLONGKO, MINAHASA, SULAWESI UTARA

1. What is a marine sanctuary?

A marine sanctuary is an area assigned permanently as 'no-taking zone' where extractive activity is not permitted. Strict regulation is applied for fishing in its buffer zone surrounding it.

2. What is a community-based marine sanctuary?

A marine sanctuary that is planned and managed by local community with a collaboration with local government.

3. What is the benefit of a marine sanctuary to local community?

By establishment of a marine sanctuary, fish landings (especially reef-associated fish) will increase, tourism objects will be maintained, and local community has capability to plan and manage their resources.

4. What is the role of a marine sanctuary to conservation and protection of marine life?

A marine sanctuary will promote abundance of marine biota, coral coverage, species richness and biodiversity, and protection of coral reefs, seagrass beds and mangrove habitats.

5. How long does it take to establish a marine sanctuary? why?

It needs at least one year to establish a marine sanctuary. An effective marine sanctuary requires great participation and supports from local community. Hence, to build such community attitude takes a lot of time. If the preparation of a marine sanctuary is less than one year, its

sustainability and effectivity are difficult to achieve or maintained. Experience of other countries, such as Philippines, shows that building local community commitment and capacity in marine sanctuary management required a long period of time.

6. How is a location of a marine sanctuary selected?

A location of a marine sanctuary is decided by community based on a compromise among scientific- technical considerations and community needs. Some criteria for selecting a location of a marine sanctuary: its area is about 30% of the total coral reefs; coral coverage is dominated by living corals; distance from settlement is not too far to enable local community to monitor it; it is not an important location for direct use, i.e. fishing ground, for local community.

7. When can the impact of marine sanctuary be observed?

Increase in fish abundance, biodiversity and improvement of coral coverage can be seen at least one year after its establishment. Until now, there is no example from Indonesia. However, experiences in Philippines and South Pacific show that increased fish production is significant after 3 to 5 years.

8. What is expected role of local community during the process of development of a marine sanctuary and its implementation?

During the process, local community is expected to make decision on location and size of the sanctuary, types of activity permitted in the sanctuary, control, punishment for disobedient of the rule, management organization, maintenance of border signs and floats, monitoring and evaluation and in-kind contribution to the development of marine sanctuary.

9. What is the role of local government in the establishment of marine sanctuary?

Local government is expected to provide technical assistance and funding during planning stage and implementation of marine sanctuary, implementation of early actions, training and public education. Local government should promote and facilitate planning process and implementation and monitor the institution which giving assistance to local community. Formal approval on location and regulation is expected from local government.

10. What is the role of extension officer?

Extension officer has important roles on facilitating, promoting, organizing planning process and implementation of marine sanctuary. At the early stage of marine sanctuary planning, extension officer is a coordinator to facilitate communication between government and local community. Extension officer is responsible on capacity building and community leadership on planning and implementation.

11. What are the requirements for an extension officer?

An extension officer must have appropriate skill to deal with public and strong commitment to facilitate the community.

12. Why are early actions needed in the development of marine sanctuary?

Early actions are needed to build community support on the concept and implementation of marine sanctuary, building community trust and building community capacity in planning and management of marine sanctuary. Early actions also allow testing a strategy in developing marine sanctuary; this can be considered a learning period.

13. What types of early actions are appropriate for community-based marine sanctuary?

According to the objectives of early actions, type of early action is not important but must fulfill community needs and requirements for an early action. Therefore, building MCK, development of marine sanctuary information center, rehabilitation of drinking water supply, assistance to improve community income, etc. are selected as early actions.

14. Why it took such a long time to facilitate the establishment of marine sanctuary?

As a facilitator in the preparation of marine sanctuary development, Proyek Pesisir needs to collaborate with and involve local community until marine sanctuary is well implemented. Proyek must be present in the village until local community is capable to handle the management of marine sanctuary. The management of marine sanctuary must be effective and run well before proyek is pull out from the village. Project intervention must be reduced gradually.

15. What is the participatory strategy applied in the establishment of marine sanctuary and why?

Both informal and formal approach must be applied to accomodate community participation. Formal approach is applied by extension officer during public meetings, discussion and presentation through formal institution in the village, including schools, religious groups, etc. Informal approach is applied by extension officer during social informal activities, such as weeding party, birthday, etc., and during community economic activity, such as fishing or harvesting their crops.

16. How important the informal approach of participation?

Informal approach for village community is more important than for formal approach because can be more effective. However, the former takes longer time.

17. What are the lessons from this activity?

Coastal resources management using marine sanctuary approach can be adapted in Indonesia as its process works in North Sulawesi. The community-based approach is relevant to reformed era and relevant to Undang Undang No. 22/1999. Therefore this community-based marine sanctuary models can be easily adapted in Indonesia.

B. DEVELOPMENT OF ECO-FRIENDLY BRACKISHWATER AQUACULTURE AND COMMUNITY-BASED MANGROVE REHABILITATION IN PEMATANG PASIR, LAMPUNG SELATAN

1. What is an eco-friendly brackish aquaculture?

An aquaculture activity which is sustained small-scale business targeting small level productivity, designed according to ecological carrying capacity using technology suitable for local community, does not use polluting materials.

2. What is the meaning of ‘community-based’?

Community is the main player at every stage of management development but with coordination with other stakeholders, e.g. local government agencies.

3. What is the philosophical background of development of community-based eco-friendly brackish aquaculture and mangrove rehabilitation?

- sustainability of social economic and environmental aspects of the business;
- popular among community where design and activities are reflection of needs, capacity and commitment among the community according to local situation and environmental condition.

4. What are the objectives of this program?

- to develop an example of approach of integrated coastal management where local community is the main player in the utilization of mangrove area as sustainable aquaculture.
- to promote and position community responsibility on protection and conservation of natural resources through their awareness and participation.

5. What is the strategy applied to achieve this program?

- developing brackish ponds with moderate target (less than 10.000 fry/hectare). The main objective is business sustainability based on potential and carrying capacity of local environment by protecting local environment.
- to develop a mechanism of community-based mangrove rehabilitation;

6. What is the goal of that strategy?

Development of efficient techniques of brackish pond aquaculture and community-based mangrove rehabilitation.

7. What is the expected outcome of this program?

- To improve community awareness on the importance of mangrove in promoting sustainability of brackish water aquaculture;
- To improve community capacity in exploring potentials and identifying problems and develop appropriate programs;
- To improve community capacity in negotiating to developing commitment to improve common programs.
- To improve confident and capability in developing, application and socialization of sustainable program in daily activity.

8. Why community participation is considered important?

- active participation will build community confidence on their capability;

- to build sense of ownership on the planned activities;
- to avoid misunderstanding on good will of external intervention;

9. When community should be involved in this program?

As early as possible is better for the community to be involved. However, trust of community towards facilitators must be established before they involved in participatory survey, such as PRA.

10. Why good approach to community is important?

In order to obtain accurate data during surveys, especially of short period such as PRA, good approach to community is very important. Bad approach will mislead data as respondent will take safety response, not objective response.

11. Why early involvement of local government in the program implementation is important?

To build support and commitment of local government. In turn, it will make local community more confident.

12. Why should a facilitating group be consisted of project staff and NGO members?

To build community capacity and stakeholder as a preparation when the project must be pulled out from the project site. This is relevant to strategic objective of the project, i.e. decentralization and strengthening institution.

13. What is important factor to be considered carefully?

- Gender composition of facilitating group
- Local culture and language

14. What is the use of facilitating group in program implementation?

A bridge between local community and government agencies and other stakeholders.

15. Why a clear explanation of program objectives is needed during program socialization?

To avoid misleading and to reduce community dependency on facilitating group.

16. Why is a cohesive understanding among members of facilitating group needed?

To avoid confusion of community and misleading.

17. What is the importance of program socialization?

- to describe program objectives.
- to explore community issues.

18. Is there any time limit for program socialization?

No. It should be continuous.

19. Who is the right person to promote the program?

Key persons, informal leaders.

20. What is the use of visiting places?

To expose community to real examples or situations.

21. Why are early actions needed?

To develop community capability, improve their knowledge and vision, a preparation to promote community participation.

C. COASTAL RESOURCES PROFILING FOR VILLAGE LEVEL, ECOLOGICAL BAY AREA AND ADMINISTRATIVE REGION

1. What is a profile?

A profile is a description of an object with some information. Profile

of a coastal area or zone is a general description on issues relevant to coastal resources management. A profile is an output of profiling activities. A profile can be in the forms of printed matters, such as maps and books, or electronic, such as compact disc, video cassettes, or photo slides.

2. What is an issue?

An issue is a condition or situation that community wants to change. Needs of changing is implemented as utilization of potentials or problem solution. There are positive and negative issues. The former is utilization of potential identified by the community and the latter are problems that requires solutions.

3. What is an issue-based profile?

An issue-based profile is issues relevant to utilization of potentials and problems that need solution in the context of resources management.

4. What is the purposes of issue-based profile?

Issue-based profile is useful: a) as a basis for development of strategic planning of resources management; b) as a baseline data to measure the impact of management initiatives; c) improvement of local knowledge on their environment; d) to develop a public forum for resources management and build stakeholder participation; e) to build commitment among stakeholders.

5. Who are involved in the profiling activity?

A wide range of community, from provincial to village levels, in the forum of stakeholder representatives, experts from universities and consultant firms, local government agencies, non government organizations and private companies. Types of participation and their roles varies among groups, according to their commitment.

6. How they participate in the profiling activity?

In general, there are three types of roles of participant: a) providing data or information (Group A); b) providing data/information and actively participated in data collection (Group B); c) providing data/information, participated in data collection and actively engaged in data analysis. In North Sulawesi, group A consisted of NGO and private companies, group B consisted of local government agencies and universities, group C consisted of village community. In Kalimantan Timur and Lampung, group A consisted of community and private companies, group B consisted of NGO and group C consisted of universities and consultant firms.

7. How are profiling activities facilitated by Proyek Pesisir?

In general, profiling activities in the three project field sites consisted of preparation, implementation, approval and production, dissemination steps and use of profile after production.

Atlas of Lampung coastal resources

As this paper is being written, profile developed by Lampung coastal stakeholders has been printed and distributed to public. In general, profile development consisted of: (1) consultative meetings with stakeholders, (2) training for project staffs and partners involved in profiling activities, (3) preliminary surveys and review on secondary data, (4) selection of types of information to be included in the profile. After data and information collected, next steps are (1) development of basic map manually, (2) field surveys, (3) data analysis, (4) development of basic and thematic maps using digitations system, (5) drafting the atlas, and (6) data verification by stakeholders in workshops, public meetings, and distribution of the draft for review. Approval of the atlas is made by stakeholders after their acceptance on the contents of the atlas. Formal approval is made by Governor of Lampung.

Atlas is disseminated through socialization programs, such as articles in scientific journal, presentation in seminars and workshops, production of brochures, and through website. Atlas is distributed to participants of profiling, stakeholders including high schools, other provincial governments, and international partners of Lampung government. The information provided in the atlas have been used as reference in development of provincial strategic plan, as inputs for revision of provincial spatial plan, inputs for inter-sectoral development plan, reference or reading material for senior high school and university students, and a national example for coastal management initiative in other provinces in Indonesia.

Profile of Balikpapan Bay

Slightly different from profiling activities in other field sites, profile of Balikpapan Bay has just completed stage of data analysis. At its preparation stage, activities include : (a) decision on types of data and information to be included in the profile, (b) socialization of profiling activities, consultative meetings, and coordination with participants (government agencies, NGOs, universities, PTF, etc.), (c) establishment of data collection plan, (d) starting cooperative works with certain institutions for special studies to describe a number of issues thoroughly. During implementation stage, activities include : (a) issue identification, (b) data collection through field surveys, collection of secondary data, (c) implementation of technical studies, (d) verification of data or information obtained from technical studies in workshop, and (e) compilation of results of technical studies.

Profile of coastal village in Minahasa, North Sulawesi.

Profiling activities consist of: (a) summarizing issues identified from technical studies and public meetings in the villages, (b) identification of potential members and establishment of core team which is responsible for developing village profile, (c) development of technical supporting team, (d) training for core-team and supporting team members

to prepare them for profile development. At implementation stage, development of village profile is carried out by the core-team. Approval and acceptance of issues written in the draft of profile were made after review by public and technical support team. Based on comments from the review, the draft is corrected. After that, printing and distribution of village profiles to government agencies, project sites, neighboring villages and others.

8. What is the difference in the process of profiling among the three field sites?

There are some differences in mechanism of stakeholder participation, types of expertise and number of experts, types of information, strategy of institutional strengthening, methods and time required for profile development.

Mechanism of local community participation

In North Sulawesi, community participated public meetings and personal meetings, i.e., door-to-door approach. In Lampung, community participation is performed by their representatives, usually key persons, village officers and representatives of resources users. In East Kalimantan, community participation is represented by representatives of villages selected by certain criteria.

Types and number of experts

Types and number of experts involved in profiling activities depend on type of issues and special issues. Number of expertise required for North Sulawesi is 5, for Lampung is 11 and for East Kalimantan is 9. Number of consultants or experts was determined by scope of management area, types of issues or information to be presented in the profiles. There were 8 experts involved for development of village profiles in North Sulawesi, 26 experts for development of atlas of Lampung and 14 experts for Balikpapan Bay profile.

Preparation and building capacity of the core team which is responsible in development of the profile. To prepare the core team, Proyek Pesisir provide training and other activities to improve individual capacity and group. Based on geographical scale and scope of administrative areas, approach for building team capacity varied among field sites. Training materials and strategy is adjusted to the characteristics of participants.

Data collection In principle, the strategy for data collection is similar among field sites, i.e., collection and review on secondary data, field surveys, comparison between field survey and secondary data, data validation, and consultative meetings with source agencies. However, strategies for collection are different among field sites, due to differences in geographic scale and administrative area. Data collection for village is intensive for village's profiles in North Sulawesi. Whereas for development coastal profile of Lampung, intensive data collection was carried out in hot-spot areas. Strategies in data collection for Balikpapan Bay is a combined strategy of Lampung and North Sulawesi approach.

Length of time required to complete a profile Geographical area, details of data, core-team readiness and validation process determine length of time to complete each profile. Capacity and workload of project management may extend the time, as it is experience by PP SULUT. Validation process involved various stakeholders and is very important because a profile will contains commitment and agreement on current situation and prioritized problems which addressed by management plan. North-Sulawesi village profiles and Balikpapan Bay profile required more or less 2 (two) years to complete while Lampung provincial coastal profile required 1 (one) year.

9. What is the strategy to encourage community and stakeholder participation in profiling activities.

Community and stakeholders participation was encouraged through public meeting in public education with materials obtained from their environment, implementation of early actions, establishment of partnership with stakeholders, collaboration with local key persons, positioning project programs as stakeholders program.

From contacts with community and stakeholders, project allocated sufficient time for communication and carefully listen to community and stakeholders. In principle, project tried to accommodate community needs. Project always tries to apply best strategy in explaining project ideas but is ready to make discussion if there is some differences.

Types of strategies are adjusted to types of meeting and participants of the meetings. For community in the villages, visual examples are intensively used because they are more effective in explaining issues. Seminar and workshop types of meeting are commonly used for staffs from government agencies and representatives of stakeholders.

10. What is the main constraints of profile development

Main constraints faced during profiling activities for Balikpapan Bay and coast of Lampung are low accuracy of secondary data, size of geographic areas, technical problems (GIS hardware and software), insufficient capability of local stakeholders in coastal management, limit of time and negative perception of community on profiling activities. In general, similar constraints are also found for development of village profiles in North Sulawesi. However, development of village profiles do not require GIS facilities because sizes of villages are relatively small and village information can be sufficiently presented without advanced technology.

SOME LESSONS LEARNED FROM PROFILING ACTIVITIES

What is a good strategy to build stakeholder participation?

Approach and strategy to build stakeholder participation in profiling activity are:

a) introducing usefulness of project activities to community and stakeholders, b) building cohesive understanding among stakeholders, c) position stakeholders as partners in project activities, d) dissemination of profile concept and results of profiling to public.

What is a strategy to collect data and information efficiently, effectively and comprehensively?

It should be started by: a) deciding specification of data before data collection, b) selecting key person as one of primary sources of information in collection and verification, c) building both formal and informal relationship with stakeholders, sources of information, d) conducting special studies on issues by involving expert team, e) involving existing experts according to needs of profiling.

How should confirmation and verification of data be carried out?

By cross checking data or information from various sources, discussion in workshops and meetings attended by stakeholders and sources of data.

How should profile be socialized among public?

Through mass-media, both printed and electronics, television and radio broadcast, newspaper, tabloids and scientific journals.

What should the composition of expert team for profiling?

The composition of the team should consider scope and types of issues of coastal resources management, area coverage, time and fund availability.

What is the best strategy a profile can be accepted by stakeholders?

Good collaboration with planning agency, universities and other relevant institutions, will make the profile easily accepted and its updating in the future will be easier.

Who is supposed to be responsible for updating profile in the future?

Responsible agency for profile updating is determined by scope of geographical and administrative area. For example, updating of village profile is responsible of village and district level governments. Updating of provincial profile is responsible of provincial government. Updating of ecological area which crosses the administrative boundaries is responsible of involved governmental agencies in the profiling. In any updating activity, staff members from local university. .

What is the appropriate format of a profile document?

Good criteria for a profile document are easily understood by readers, contents are artistically interesting, informative and objective. Therefore a profile must be designed according to target audiences, scopes of issues and management area.

Who is supposed to provide funding for profiling?

In principle, profiling can use funds from many sources. In our examples, most of funding was provided by Proyek Pesisir. Other resources were obtained from local government, community, NGO, universities, private companies, and others. Its composition depends on commitment of stakeholders.

What is the use of profiling?

Profiling is useful to build stakeholders participation in the next step of management process, to improve community knowledge on their environment, to provide information for regional development planning,

and to stimulate formation of decision making forum for integrated coastal management.

By actively participating in profiling activities, community are aware with local issues (problems and opportunities), causes of issues, impacts if issues are not handled properly and they understand strategies to handle the issues.

Profiling also gives an opportunity to local government to understand issues in their region more comprehensively. Such information obtained during profiling activities are useful to build effective development plan and useful to fulfill community needs.

Profiling stimulates the formation of decision making system for integrated coastal management by involving various stakeholder representatives. Communication among stakeholders to reach agreements is a good example how a decision can be made and all parties have commitments on the decision.

Pidato Sambutan Lokakarya Pembelajaran

oleh

Dietrich G. Bengen

Program Coordinator, Proyek Pesisir PKSPL IPB

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Hadirin peserta lokakarya yang saya hormati,

Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME atas segala rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka mengikuti Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir Tahun 1997 - 2000.

Atas nama pimpinan PKSPL IPB perkenankan juga dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan selamat datang untuk berlokakarya kepada anda, peserta lokakarya ini.

Lokakarya sekarang ini adalah yang kedua setelah lokakarya tahun lalu yang diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 1999. Tujuan lokakarya ini adalah sama dengan yang pertama, yaitu untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan dan tukar menukar informasi agar dokumen yang memuat sejumlah informasi pengalaman Proyek Pesisir ini menjadi bermanfaat bagi semua pihak. Seperti kita ketahui bersama, lokakarya ini adalah puncak dari runtutan kegiatan *Learning Team* Proyek Pesisir PKSPL IPB di tahun ketiga proyek (1999/2000).

Berbeda dengan tahun lalu, lokakarya ini terdiri dari dua bagian, yaitu lokakarya internal (21-22-24 Maret 2000) dan lokakarya eksternal (23 Maret 2000). Lokakarya hari ini bersifat internal karena secara terbatas dihadiri

oleh staf Proyek Pesisir. Lokakarya internal ini bersifat pendahuluan dan hasilnya akan disajikan oleh staf Proyek Pesisir dalam lokakarya eksternal pada hari Kamis nanti. Lokakarya eksternal akan dihadiri oleh peserta undangan, yaitu pihak-pihak pemerhati, akademisi, pelaksana dan pejabat instansi pemerintah yang berkepentingan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Secara umum, hasil dari rangkaian lokakarya ini akan disajikan dalam sebuah prosiding yang memuat pengalaman proyek dan rekomendasi bagi pihak-pihak lain yang ingin menerapkan atau mengembangkan pendekatan pengelolaan pesisir secara terpadu.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta lokakarya hari ini yang berasal dari PP Sulawesi Utara, PP Lampung, PP Kalimantan Timur dan unit kerja lain komponen Proyek Pesisir di Jakarta. Khusus kepada Pak Brian R. Crawford, *technical advisor* untuk kegiatan *Learning Team*, saya ucapkan terimakasih atas kehadiran dan bantuannya.

Bogor, 21 Maret 2000

Dr Ir Dietrich G. Bengen, DEA
Program Coordinator
Proyek Pesisir PKSPL-IPB

Learning Workshop Opening Remarks

**by
I. M. Dutton
Project Leader, Proyek Pesisir**

Distinguished guests and colleagues,

On behalf of the Coastal Resources Center of the University of Rhode Island, it is my pleasure to welcome you to the second Learning Workshop where we will report and discuss the result of our learning activities during the least year. As many of you know, one of the key features of the design of Proyek Pesisir was an explicit commitment to learning. Over the past two and a half years, we have made a considerable investment in development of capacity for learning by our partners in the Center for Coastal and Marine Resources Studies at Institut Pertanian Bogor. Much of that contribution has been via the mentoring of Dr. Kem Lowry from the University of Hawaii - Kem unfortunately can not be with us today - and Brian Crawford who many of you already know through his work with the North Sulawesi program. Kem and Brian's efforts have enabled the relatively young and inexperienced team led by Dr. Fedi Sondita to work with Proyek Pesisir program staff to develop techniques and capacity for learning that are grounded in the unique context of Indonesia.

To understand why that investment has been made, let me briefly outline two scenarios for you:

Scenario One - the year is now 2004. Proyek Pesisir finished last year. Sarwono Kusumaatmadja has just been appointed for a second term as Minister for Marine Exploration and Fisheries. He asks a team of experts from various universities to advise him on new policy options for improved management of Indonesia's marine biodiversity. He especially wants to know

what works in the Indonesian context - he does not want another theory lesson. The experts review the limited available information and discover that there has been no systematic attempt to analyze this question previously. Equally important, few project records exist from which to make informed judgement. They reluctantly inform the Minister that they can not complete his assignment.

Scenario Two is basically the same, however, there is one key difference. The Learning Team established initially at IPB by Proyek Pesisir in 1998, has become a learning network. Community, NGO, industry, government and academic groups have been cooperating, sharing data and experience in structured and informal ways. A range of options derived from Indonesian experience in many areas can be readily collated, posted on an internet site for group comment, analyzed further and then submitted to the Minister with excellent supporting documentation.

These are obviously two extremes of many possible futures for learning activity. Scenario One is business as usual, with no integration of knowledge over time. That scenario is typical of what has been happening in Indonesia during the last decade. It results in what Prof. Rais calls "the pasar malam" or night market approach - when funding stops, so does activity. Scenario Two obviously requires a highly integrative approach. Reformasi demands that we pay more attention to the social context of our work. We can no longer ask the Indonesian public to support disconnected and inefficient approaches to coastal resources management. Hopefully, both scenarios

reinforce the importance of what we have gathered here to discuss today.

I encourage you to become a partner with Proyek Pesisir in broadening the focus of our learning activities in the coming year. The presentations you are about to be given will be greatly enriched by contribution of your experience. I hope that you will use this workshop as a platform to engage more closely with Pak Fedi and his team.

As a practical step to promote such cooperation, I am pleased to announce that Proyek Pesisir will sponsor joint learning initiatives with new partners in the coming year. Please talk with Dr. Fedi Sondita, Dr. Dietrich Bengen or myself if you are interested in joining that program from April.

Again, thank you for making time to join us today - I look forward to your contribution. Bogor, 23 Maret 2000

Bogor, 23 Maret 2000

Ian M Dutton

Project Leader Proyek Pesisir

**Kata Sambutan
Lokakarya Pembelajaran**

oleh
I. M. Dutton
Project Leader, Proyek Pesisir

Rekan-rekan, para undangan dan para hadirin yang terhormat,
Atas nama Coastal Resources Center, University of Rhode Island, perkenankanlah saya mengucapkan Selamat Datang dan selamat bergabung dengan kami dalam Lokakarya Pembelajaran dimana kami akan memberikan laporan dan mendiskusikan hasil kegiatan pembelajaran kami dalam kurun waktu satu tahun yang lalu. Seperti yang anda semua ketahui, salah satu komitmen Proyek Pesisir adalah komitmen untuk mempelajari hal-hal yang baru. Selama dua setengah tahun, kami telah menanamkan investasi yang besar dalam pengembangan kapasitas pembelajaran melalui mitra kerja kami di Pusat Kajian dan Studi Sumberdaya Pesisir dan Lautan di Institut Pertanian Bogor. Sebagian besar kontribusi tersebut diberikan lewat bimbingan Dr. Kem Lowry dari University of Hawaii - sayang beliau tidak dapat hadir saat ini - dan Brian Crawford yang mungkin sebagian dari anda sudah mengenalnya melalui program Sulawesi Utara kami. Kerja keras Kem dan Brian telah membina tim dengan sedikit pengalaman yang dipimpin oleh Dr. Fedi Sondita untuk dapat bekerja dengan staf program Proyek Pesisir dalam mengembangkan teknik dan kapasitas pembelajaran yang terdapat dalam konteks unik Indonesia.

Untuk memahami tujuan investasi tersebut, perkenankan saya menyampaikan dua skenario kepada anda:

Skenario Satu - andaikan saat ini tahun 2004. Proyek Pesisir selesai tahun lalu. Sarwono Kusumaatmadja baru saja terpilih untuk kedua kalinya sebagai Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan. Beliau meminta tim ahli dari berbagai universitas untuk memberi masukan kepadanya mengenai pilihan kebijakan bagi pengembangan pengelolaan keanekaragaman hayati

laut Indonesia. Secara khusus beliau tidak mau menerima teori tetapi beliau ingin mengetahui metode apa yang dapat berjalan dengan baik. Para ahli tersebut mengkaji data/informasi yang terbatas dan menemukan bahwa hingga saat itu belum pernah dilakukan analisa sistematis akan hal tersebut. Selain itu juga hanya sedikit catatan mengenai proyek-proyek yang dapat dijadikan bahan informasi. Dengan sangat menyesal, tim ahli tersebut melaporkan kepada Menteri bahwa mereka tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan.

Skenario Dua - pada dasarnya sama, hanya ada satu perbedaan penting. Tim Learning yang dibentuk di IPB oleh Proyek Pesisir tahun 1998, telah menjadi bagian dari jaringan kerja pembelajaran. Masyarakat, LSM, industri, pemerintahan dan kelompok akademis telah saling bekerja sama, berbagi data dan pengalaman melalui cara yang terstruktur dan informal. Lingkup pilihan yang didapat dari pengalaman kerja di berbagai area di Indonesia dapat langsung diolah dan dimasukkan kedalam situs internet untuk dikomentari, dianalisa lebih lanjut dan akhirnya diserahkan kepada Menteri lengkap dengan data-data pendukungnya.

Ini tentunya hanya dua dari berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Skenario satu adalah yang biasa terjadi di Indonesia dalam dekade terakhir, hanya bekerja saja tanpa memadukannya dengan pengetahuan. Hal ini digambarkan oleh Prof. Jacob Rais sebagai “proyek pasar malam” - bila bantuan dana berhenti, kegiatan juga berhenti. Skenario dua jelas membutuhkan pendekatan keterpaduan yang tinggi. Reformasi menuntut kita untuk lebih memperhatikan konteks sosial pekerjaan kita. Kita tidak dapat lagi meminta masyarakat Indonesia untuk

mendukung pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang tidak berkelanjutan dan tidak efisien. Saya harap, kedua skenario tersebut dapat menggambarkan pentingnya informasi yang kami coba kumpulkan dan diskusikan bersama disini.

Saya mendorong anda untuk menjadi mitra Proyek Pesisir dalam memperluas fokus kegiatan pembelajaran kita di tahun kerja yang akan datang. Presentasi yang akan diberikan dapat lebih baik lagi di tahun depan dengan adanya kontribusi pengalaman anda. Saya harap lokakarya ini dapat menjadi jembatan penghubung untuk kerjasama yang lebih baik dengan Pak Fedi dan timnya.

Salah satu langkah praktis dalam mempromosikan kerjasama tersebut, dengan gembira saya umumkan bahwa Proyek Pesisir akan mensponsori langkah awal kegiatan pembelajaran dengan rekan kerja kami di tahun kerja yang akan datang. Silakan menghubungi Dr. Fedi Sondita, Dr. Dietrich G Bengen atau saya sendiri bila anda tertarik untuk bergabung dalam program yang akan dimulai pada bulan April tersebut.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang anda berikan untuk menghadiri acara ini - saya menantikan kontribusi anda selanjutnya.

Bogor, 23 Maret 2000

Ian M Dutton

Project Leader Proyek Pesisir

Learning Workshop Closing Remarks

**by
I. M. Dutton
Project Leader, Proyek Pesisir**

This morning we heard some fascinating presentations from a range of places and from a range of context. Each case study revealed some unique aspects of the three activities, however they also shared some important common features.

Describing those common features is what excites me about our learning activity - from just these examples we now have a set of guidelines/principles that can be applied and tested by others who are trying to implement programs like Proyek Pesisir.

As I mentioned this morning, these guidelines will be even more robust when they incorporate contributions from outside Proyek Pesisir. I thank all of you who have contributed new perspective and ideas today.

I encourage all of you who believe that integration is important to continue to share your data and experience with us.

As I mentioned this morning, we are willing to sponsor participation by our program in our learning activities - please talk with Dietrich, Fedi or myself for details of that.

Let me close with an observation - the closer we get to a problem, the nearer we get to a solution.

Thank you for your help today in getting us closer to understanding the problems of, and solutions for, ICM in Indonesia

Bogor, 23 Maret 2000

Ian M Dutton
Project Leader Proyek Pesisir

Kata Penutup Lokakarya Pembelajaran

**oleh
I. M. Dutton
Project Leader, Proyek Pesisir**

Pagi tadi kita telah mengikuti beberapa presentasi menarik dari berbagai tempat dan berbagai keadaan. Tiap-tiap studi kasus mengungkapkan aspek-aspek unik dari setiap kegiatan, dan memberikan gambaran umum yang penting akan kegiatan tersebut.

Mendeskripsikan gambaran umum tersebut merupakan salah satu hal yang menarik dalam kegiatan pembelajaran kami - dari contoh-contoh ini saja kita sekarang memiliki seperangkat pedoman/panduan yang dapat diaplikasikan dan diuji coba oleh pihak lain yang hendak mengimplementasikan program-program seperti Proyek Pesisir.

Seperti yang sudah saya kemukakan dalam sambutan saya tadi, pedoman-pedoman tersebut akan lebih sempurna bila ada kontribusi dari pihak-pihak diluar Proyek Pesisir. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang telah memberikan kontribusi pandangan dan ide-ide baru hari ini.

Saya menganjurkan anda yang berpendapat bahwa integrasi itu penting, untuk terus berbagi data dan pengalaman dengan kami.

Satu hal yang juga sudah saya ungkapkan pagi tadi, kami bersedia mensponsori partisipasi anda dalam program kegiatan pembelajaran kami - silakan menghubungi Dietrich, Fedi atau saya sendiri untuk keterangan selanjutnya.

Ijinkan saya menutup dengan sebuah observasi - semakin dekat kita mengenal permasalahan, semakin dekat kita memperoleh solusi.

Terima kasih atas bantuan anda hari ini dalam membantu kami mengerti lebih jauh akan masalah dan solusi bagi ICM di Indonesia.

Bogor, 23 Maret 2000

Ian M Dutton
Project Leader Proyek Pesisir

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DALAM PROYEK PESISIR DAN PROSES KEGIATAN LEARNING TEAM 1999/2000

Oleh:

M. Fedi A. Sondita, Bambang Haryanto, Burhanuddin,
Amiruddin Tahir, Neviaty P. Zamani dan B. R. Crawford

I. PENDAHULUAN

Pengalaman proyek-proyek pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia selama ini belum banyak didokumentasikan sehingga kita tidak dapat memperoleh pelajaran-pelajaran penting (*lessons learned*) dari proyek-proyek tersebut untuk keperluan perencanaan di masa mendatang. Pendokumentasian untuk pembelajaran dari suatu kegiatan proyek sangat diperlukan bagi kepentingan proyek maupun diluar proyek. Manfaat pendokumentasian bagi proyek adalah untuk mengetahui perkembangan kegiatan proyek, menentukan langkah/strategi proyek mendatang dan memperkenalkan pengalaman-pengalaman dan pelajaran-pelajaran dari kegiatan proyek tersebut. Sedangkan manfaat bagi pihak di luar proyek adalah untuk secara kontinyu memperbaiki pengelolaan sumberdaya pesisir di Indonesia melalui penyediaan bahan rujukan, pengembangan model untuk replikasi dan penyajian pilihan atau alternatif yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan dalam mengelola sumberdaya pesisir.

Misi Proyek Pesisir adalah memberikan sumbangan kepada salah satu *strategic objective* USAID Natural Resources Management (NRM) II, yaitu 'desentralisasi dan penguatan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia' (*to decentralize and strengthen natural resources management in Indonesia*). Untuk mencapai tujuan ini, Proyek Pesisir mencoba memperkenalkan tiga contoh *good practices* pengelolaan pesisir di tiga propinsi dengan harapan contoh-contoh ini akan diterapkan secara luas di seluruh Indonesia. Rancangan proyek yang dibuat tahun 1995 (Crawford *et al.*, 1995) dapat dikatakan unik

untuk beberapa alasan. Pertama, hipotesis bahwa desentralisasi dan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan sumberdaya alam akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kualitas lingkungan. Kedua, proyek ini dirancang untuk menguji hipotesis tersebut di tempat-tempat berbeda dan kemudian menggunakan pengalaman lapang tersebut sebagai dasar untuk menyusun usulan perbaikan kebijakan nasional yang dapat mempopulerkan penerapan *good practices* yang dikembangkan proyek. Karena hasil dan pengalaman lapang merupakan informasi dasar untuk mendukung perbaikan tersebut, maka rancangan proyek mencakup strategi pembelajaran (*learning strategy*) untuk mendokumentasikan pengalaman proyek dan penggalan *lessons learned*. Terakhir, rancangan proyek juga mencakup strategi penyebaran (*outreach*) dan komunikasi untuk mendukung adopsi dari *good practices*.

PKSPL-IPB dipilih sebagai mitra pembelajaran untuk proyek. Didalam PKSPL sebuah cikal bakal unit pembelajaran (*learning unit*) sudah didirikan untuk melaksanakan strategi proyek dalam pendokumentasian pengalaman proyek dan penggalan *lessons learned*.

2. PELAKU PENDOKUMENTASIAN DAN PERANNYA

a. *Learning Team*

Peran *Learning Team* (LT) dalam suatu program pendokumentasian adalah sebagai fasilitator dan perangkum/perumus, yaitu :

- memfasilitasi dan merangkum hasil pendokumentasian berupa pengalaman pengalaman;

- memfasilitasi dan merangkum hasil pengkajian/pembelajaran dari dokumen-dokumen, kunjungan lapang dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pendokumentasian, berupa pelajaran-pelajaran yang bermanfaat (*lessons learned*);
- memfasilitasi dan merangkum hasil diseminasi pengalaman dan *lessons learned*.

Sesuai dengan peranannya, maka LT memerlukan kerjasama dengan mitra-kerja dan berbagai pihak lain yang terlibat dengan kegiatan tersebut untuk bersama-sama menghasilkan kesepakatan *lessons learned* yang akan disebarluaskan.

b. Staf Lapangan

Peran staf lapangan (SL) dalam proses pendokumentasian adalah:

- ♦ menyediakan informasi/data sebanyak-banyak dan akurat sesuai keperluan pendokumentasian.
- ♦ memberikan masukan-masukan pengalaman yang dimilikinya.
- ♦ berpartisipasi aktif dalam pengambilan pelajaran terbaik (*lessons learned*).

c. Technical Advisor (TA)

Peran TA dalam proses pendokumentasian adalah :

- meningkatkan kapasitas atau kemampuan LT.
- memberikan saran/pendapat dalam proses pendokumentasian dan
- membantu perumusan *lessons learned*.

3. STRATEGI PEMBELAJARAN TAHUN 1998/1999

Strategi pembelajaran (*learning strategy*) yang diterapkan oleh Proyek Pesisir melalui proses pendokumentasian yang dilaksanakan oleh LT adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kapasitas Learning Team

Peningkatan kapasitas LT tentang teori, konsep, model dan pengalaman kegiatan *learning* dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dilakukan oleh *Technical Advisors* (TA). Konsultasi dan diskusi antara LT dan TA dilakukan secara periodik pada tahapan-tahapan tertentu dalam proses *learning*.

b. Penyusunan rencana kerja LT

Penyusunan Rencana Kerja sangat penting untuk menuntun kerja LT secara sistematis dan tepat waktu sebelum melakukan *learning*. Rencana kerja disusun dalam bentuk proposal pendokumentasian (tujuan, metoda, pemilihan topik, kegiatan, waktu, tempat, biaya, pelaksana).

c. Melakukan kajian dokumen dan pengumpulan data / informasi

Pengkajian dokumen melalui analisa dokumen di kantor, kunjungan lapang dan wawancara dengan *stakeholder* yang terlibat dalam topik pendokumentasian. Strategi pengumpulan data dijelaskan dalam Sondita *et al.* (1999).

d. Mengadakan lokakarya

Pelaksanaan lokakarya pada tanggal 1 Maret 1999 dilakukan untuk memverifikasi, mengklarifikasi dan menghimpun berbagai respon dari pihak di luar proyek terhadap hasil pendokumentasian.

e. Penyebarluasan prosiding

Penyebarluasan hasil lokakarya tentang pengalaman Proyek Pesisir dan *lessons learned* dilakukan dalam bentuk distribusi prosiding lokakarya kepada masyarakat luas. Prosiding tersebut selesai disusun beberapa bulan setelah pelaksanaan lokakarya (Sondita *et al.*, 1999).

f. Melibatkan Staf Lapangan (SL):

Dalam proses pendokumentasin pengalaman proyek, SL merupakan sumber informasi utama karena memiliki pengalaman selain dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh Proyek Pesisir.

4. STRATEGI PEMBELAJARAN TAHUN 1999/2000

Strategi pembelajaran pada tahun 1999/2000 pada umumnya sama dengan strategi yang diterapkan pada tahun 1998/1999. Berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya, pada tahun 1999/2000 dilakukan penyesuaian dalam hal keterlibatan staf lapangan (SL), pelaksanaan lokakarya dan peran *Technical Advisor* (TA) dalam lokakarya dan kegiatan pendokumentasian.

Lessons learned yang dipetik dari kegiatan pendokumentasian pada tahun pertama adalah :

- Melibatkan staf lapangan secara lebih awal dan lebih banyak waktu yang dialokasikan dalam proses pendokumentasian menyebabkan kegiatan pendokumentasian menjadi lebih mudah dan cepat (efisien) karena informasi yang terkumpul lebih lengkap dan akurat dan berkurangnya kesalahpahaman antara pelaku pendokumentasian;
- Penguatan kapasitas dan pengembangan metode dan strategi pembelajaran seyogyanya dilakukan lebih awal dan berkesinambungan (terus menerus);
- Pembelajaran harus menjadi budaya dari organisasi proyek.

1. Keterlibatan Staf Lapangan (SL):

SL diharapkan terlibat secara aktif sejak awal dan mengalokasikan waktunya lebih banyak dalam proses pendokumentasian sebagai mitra-kerja LT bukan sebagai sumber informasi saja.

2. Pelaksanaan Lokakarya

Lokakarya (*workshop*) dilakukan dalam dua bagian, yaitu:

- *internal workshop* untuk verifikasi hasil pendokumentasian yang dihadiri oleh peserta internal proyek
- *external workshop* untuk menyajikan hasil *internal workshop* yang dihadiri oleh peserta internal proyek dan undangan dari luar proyek.

3. Keterlibatan *Technical Advisor* (TA)

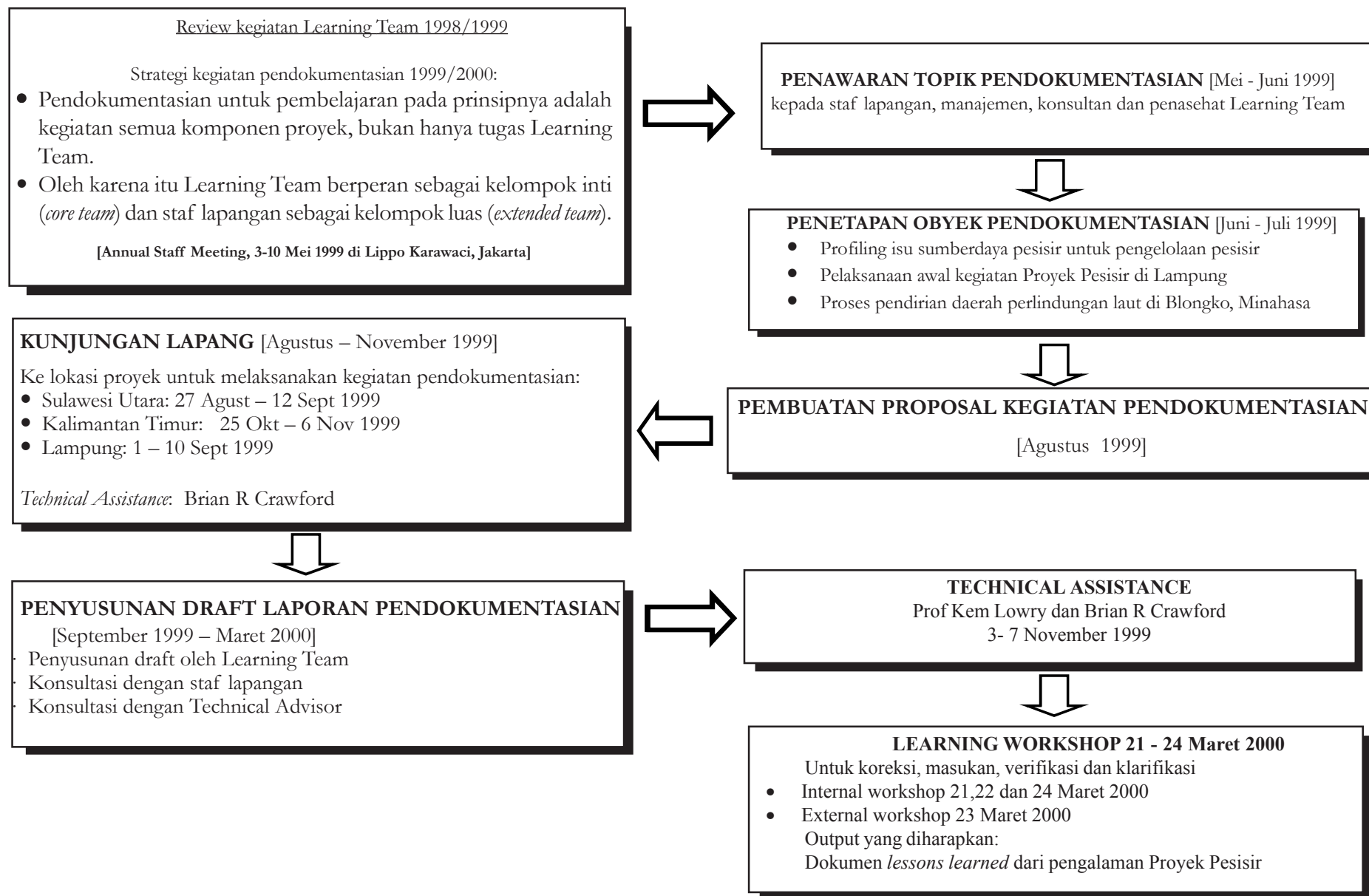
Kehadiran TA sangat penting dalam tahap-tahap tertentu dari proses pendokumentasian dan lokakarya sebagai fasilitator dan katalisator.

Proses pelaksanaan kegiatan pendokumentasian dapat dilihat pada Gambar 1.

Daftar Pustaka

Crawford *et al.* 1995.

Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, Burhanuddin, A. Tahir dan B. Haryanto (editors). 1999. Pelajaran dari pengalaman proyek pesisir 1997-1999. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir, Bogor, 1 Maret 1999. PKSPL-IPB dan CRC-URI.



Gambar 1. PROSES PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN PROYEK PESISIR 1999/2000

DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI CONTOH PENGELOLAAN PESISIR TERPADU: PENGALAMAN DAN PELAJARAN DARI UPAYA PENGELOLAAN BERBASIS MASYARAKAT DI MINAHASA, SULAWESI UTARA

Oleh:

**Burhanuddin, M. Fedi A. Sondita, Brian R. Crawford, Johnnes Tulungen,
Christovel Rotinsulu, Asep Sukmara, Meidi Kasmidi, Maria T. Dimpudus,
Noni Tangkilisan, Fadilla Kesuma, Andi Agus, Christie Saruan,
Edwin Ngangi dan Sесilia Dajoh**

ABSTRAK

Daerah perlindungan laut (DPL) berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang umum diterapkan dalam sebagian besar program-program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di dunia, khususnya di negara-negara berkembang dan di tempat dimana terumbu karang merupakan bagian signifikan dari ekosistem pesisir.

Di Sulawesi Utara, Proyek Pesisir memfasilitasi proses pendirian daerah perlindungan laut di desa Blongko. Daerah perlindungan laut ini merupakan zona inti yang secara permanen tertutup bagi kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan ekstraktif lainnya sementara dalam zona penyangga yang mengelilinginya kegiatan penangkapan ikan dapat diatur atau dilarang. Proses pendiriannya terdiri dari lima kegiatan, yaitu: (1) pengenalan masyarakat dan sosialisasi proyek, (2) pelatihan, pendidikan dan pengembangan kapasitas masyarakat, (3) pertemuan konsultasi dan pembuatan aturan-aturan DPL, (4) pengesahan keputusan daerah perlindungan laut, dan (5) pelaksanaan.

DPL berbasis masyarakat ini merupakan contoh implementasi kebijakan desentralisasi dalam pengelolaan pesisir. Proses pendirian DPL di Blongko sangat penting untuk didokumentasikan agar prosesnya dapat dipahami oleh berbagai pihak yang tertarik untuk mengaplikasikan pendekatan yang sama di tempat lain.

Kata kunci: daerah perlindungan laut, contoh pengelolaan berbasis masyarakat, pengelolaan pesisir terpadu, *lessons learned*, Minahasa

ABSTRACT

Community-based marine sanctuary has been commonly proposed and introduced by coastal management programs, especially in developing countries where coral reefs significantly characterizes coastal habitats.

In North Sulawesi, Proyek Pesisir has introduced development of a community-based management in Blongko. The marine sanctuary is an area where extractive activities are illegal; fishing inside the area is permanently forbidden but fishing in the buffer zone is regulated. Its establishment of the marine sanctuary follows several steps: (1) introduction of project objectives etc. to local community, (2) training, public education and capacity development of local community, (3) consultative meetings with community to develop regulation relevant to marine sanctuary, (4) formal adoption of regulation and establishment of the marine sanctuary, (5) implementation of marine sanctuary.

The community-based marine sanctuary is an example of implementation of decentralized coastal management. The process is very important to be understood by publics and governments or anybody interested to apply or develop similar approach of coastal management in other areas.

Keywords:

Marine sanctuary, example of community-based management, integrated coastal managemen, lessons learned, Minahasa.

1. PENDAHULUAN

Pengalokasian suatu kawasan laut menjadi daerah yang dilindungi terhadap jenis kegiatan pemanfaatan tertentu merupakan wujud nyata dari upaya pengelolaan yang bertujuan untuk konservasi. Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat (DPL-BM) merupakan pendekatan yang umum dalam sebagian besar program-program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di dunia, khususnya di negara-negara berkembang dan di tempat dimana terumbu karang merupakan bagian terbesar ekosistem pesisir. Secara umum, adanya daerah perlindungan laut dapat dianggap sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan agar sumberdaya alam yang dimanfaatkannya dapat lestari, kebutuhan untuk menikmati keindahan alam dan kebutuhan untuk melindungi 'hak sebagai pemilik sumberdaya' dari gangguan pengguna luar.

Di Filipina dan Pasifik Selatan, DPL telah terbukti efektif dalam menjaga/melindungi ekosistem terumbu karang, meningkatkan jumlah ikan di dalam daerah perlindungan dan meningkatkan produksi perikanan di sekitar DPL (Alcala, 1988; Russ dan Alcala, 1989, 1994; Russ *et al.*, 1992; White, 1989a; Wantiez *et al.*, 1997; World Bank, 1999). Perlindungan laut (seperti DPL) juga efektif dalam meningkatkan hasil perikanan dibandingkan dengan pendekatan pengelolaan secara tradisional (Hasting dan Botsford, 1999), dengan demikian DPL dapat lebih sederhana, lebih murah (*cost efective*) dengan pendekatan yang lebih tepat, khususnya konservasi bagi ekosistem terumbu karang.

Konsep DPL-BM telah diterapkan oleh banyak proyek yang disponsori oleh bank pembangunan internasional di Asia dimana komponen perlindungan laut merupakan satu dari berbagai strategi pembangunan dan pengelolaan pesisir. Sebagai contoh Program Sektor Perikanan sebesar 150 juta dolar di Filipina (Ablaza-Baluyut, 1995) dan berbagai proyek bantuan luar lainnya, telah memasukkan konsep DPL berbasis masyarakat kedalam desain proyek-proyek ini. Filipina memiliki sejarah yang cukup panjang dalam DPL berbasis masyarakat ini selama lebih dari dua dekade. DPL berbasis masyarakat ini telah menjadi pendekatan utama pengelolaan pesisir di negara ini dan dipakai sebagai bagian dari kebijakan program desentralisasi. Pada

peralihan abad telah ada ratusan DPL yang tersebar hampir di semua wilayah pesisir negara tersebut. Parajo *et al.* (1999) mencatat 439 DPL di Filipina dari berbagai jenis, dimana mayoritas dari DPL ini adalah berbentuk daerah perlindungan skala kecil yang dikelola oleh masyarakat dan berukuran kurang dari 30 hektar. Proses dan pendekatan yang berhasil dalam pelaksanaan DPL-BM semakin baik untuk didokumentasikan agar dapat dipakai sebagai bahan pembelajaran (White, 1989b; Buhat, 1994; White *et al.*, 1994).

Di Sulawesi Utara, contoh pendekatan pengelolaan dengan rencana pengelolaan berbasis masyarakat diterapkan di tiga lokasi yang mencakup empat desa di wilayah Kabupaten Minahasa, yaitu Bentenan, Tumbak, Blongko dan Talise. Untuk menyusun rencana pengelolaan tersebut, masyarakat diharapkan mengetahui persoalan-persoalan yang menyangkut pengelolaan sumberdaya pesisir, baik yang bersifat negatif maupun positif. Persoalan-persoalan tersebut diberi istilah 'isu-isu pengelolaan pesisir' atau 'isu-isu sumberdaya pesisir'. Salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat desa-desa proyek adalah degradasi lingkungan laut, seperti kerusakan terumbu karang tempat habitat ikan-ikan. Untuk mengatasi persoalan tersebut dilakukan penetapan kawasan laut menjadi daerah yang tertutup bagi kegiatan eksploitatif, yaitu sebagai daerah perlindungan laut atau *marine sanctuary* (Crawford dan Tulungen, 1998; Kasmidi, 1999).

Upaya yang telah dilakukan oleh Proyek Pesisir Sulawesi Utara sejak tahun 1997 adalah mengadaptasikan model DPL di Philipina yang sudah berhasil ke dalam DPL Blongko. Proyek Pesisir berupaya memperkenalkan sebuah contoh pengelolaan pesisir yakni daerah perlindungan laut (DPL, *marine sanctuary*) yang pengelolaannya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya dilakukan oleh masyarakat (*community-based marine sanctuary*). Kawasan tersebut didefinisikan sebagai suatu kawasan yang kecil dari lingkungan sub-tidal, khususnya habitat terumbu karang, dimana semua aktivitas pengambilan dan kegiatan destruktif seperti penangkapan ikan secara permanen dilarang (*no take zone*). Dalam kasus DPL-BM di Sulawesi Utara, seperti DPL Blongko ini meliputi zona inti yang tertutup secara permanen dari kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan ekstrasi lainnya serta zona penyangga disekeliling zona inti dimana beberapa kegiatan penangkapan

ikan diatur/dilarang. Daerah ini telah resmi ditetapkan oleh pemerintah setempat lengkap dengan sebuah peraturan yang disusun dan disetujui oleh masyarakat setempat (*local ordinance*), termasuk kelompok *stakeholder* yang tinggal berdekatan dengan kawasan tersebut (Crawford, 1999). DPL berbasis masyarakat di Sulawesi Utara menggunakan pengelolaan kolaborasi dimana masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Mengingat konsep daerah perlindungan laut ini relatif masih baru, maka kelancaran dan keberhasilan pendirian kawasan ini dapat dikatakan sangat berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan pendahuluan lain yang dilakukan oleh proyek, seperti pengenalan antara proyek dan masyarakat, serta kegiatan pelaksanaan awal (*early actions*).

2. MANFAAT DARI PENDIRIAN DPL DAN ALASAN PROSES PENDIRIAN DPL PERLU DIDOKUMENTASIKAN

Daerah perlindungan laut berbasis masyarakat yang berhasil adalah apabila DPL-BM tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat seperti memberikan tambahan sumber pendapatan dari peningkatan produksi perikanan dan dari sektor pariwisata. Juga dapat berfungsi sebagai upaya konservasi dengan adanya perbaikan kualitas sumberdaya alam seperti terumbu karang. Manfaat tambahan lainnya adalah peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat yang lebih besar/meningkat dalam mengelola sumberdaya alam. Selain itu DPL-BM dapat menjadi alat untuk membantu mengatasi isu pengelolaan sumberdaya pesisir yang lebih luas di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, DPL-BM lebih efektif dari segi biaya dan lebih langgeng sifatnya.

Hasil-hasil lain seperti partisipasi luas dari masyarakat dalam proses perencanaan atau pengesahan keputusan desa dapat dilihat sebagai hasil antara, yang secara bertahap akan mengarah pada hasil atau dampak yang lebih luas, seperti perbaikan kualitas sumberdaya alam dan kualitas hidup masyarakat

Pendirian daerah perlindungan laut yang diupayakan oleh masyarakat desa-desa Proyek Pesisir

Proses kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan daerah perlindungan laut

1. Pengenalan masyarakat dan sosialisasi proyek
2. Pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendidikan dan studi banding
3. Pertemuan konsultasi dan pembuatan aturan DPL
4. Keputusan desa tentang DPL
5. Pelaksanaan

di Sulawesi Utara dapat dianggap sebagai contoh upaya pengelolaan pesisir berbasis masyarakat bagi tempat-tempat lain di Indonesia (Kasmidi, *et al.*, 1999).

Dengan meningkatnya perhatian masyarakat serta pemerintah terhadap perlunya kelestarian sumberdaya dan usaha-usaha pemanfaatannya di berbagai desa pantai di Indonesia, pengalaman masyarakat desa Proyek Pesisir di Sulawesi Utara dalam proses pendirian daerah perlindungan laut perlu didokumentasikan secara obyektif (Lampiran 1). Berbagai pihak yang akan mendirikan ataupun memfasilitasi pendirian daerah perlindungan laut dapat mempelajari pengalaman masyarakat desa proyek.

Metodologi yang dilakukan *Learning Team* dalam mendokumentasikan kegiatan ini dapat dilihat pada paper perspektif *Learning Team* (Sondita *et al.*, 2000).

3. PROSES PENDIRIAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

Setelah desa Blongko, Kab. Minahasa terpilih sebagai desa proyek, maka secara umum proses pendirian daerah perlindungan laut terdiri dari lima tahapan, yaitu: (1) Pengenalan masyarakat dan sosialisasi proyek (2) Pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendidikan dan studi banding (3) Pertemuan konsultasi dan pembuatan aturan DPL (4) Pengesahan keputusan daerah perlindungan laut dan (5) Pelaksanaan. Proses tersebut dalam prakteknya kadang dilakukan secara paralel dalam jangka waktu yang relatif panjang.

3. 1. Pengenalan masyarakat dan sosialisasi proyek

Mengingat Proyek Pesisir merupakan proyek yang relatif baru bagi masyarakat maupun pemerintahan desa, proses pengenalan dan sosialisasi masyarakat mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya memperkenalkan proyek kepada masyarakat pesisir sekaligus memberi kesempatan kepada proyek untuk mengenal masyarakat dan kondisi sumberdaya alam

di lokasi proyek. Setelah empat desa lokasi proyek dipilih oleh *Provincial Working Group* (PWG), Proyek Pesisir menempatkan penyuluh lapang di desa proyek sejak Oktober 1997. Penempatan para penyuluh lapang ini difasilitasi oleh Bupati Minahasa dengan Surat Keputusan No. 227/1997 dan No. 67/1998. Melalui para penyuluh lapangan inilah, Proyek Pesisir melakukan sosialisasi proyek kepada masyarakat dan proyek mengenali masyarakat dan mengetahui kondisi sumberdaya alam desa secara lebih intensif. Penyuluh lapangan berperan sebagai wakil proyek yang bertugas untuk menjembatani komunikasi antara proyek dengan masyarakat desa.

Penempatan penyuluh lapangan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan intensitas dan tingkat perkembangan kegiatan proyek di tingkat desa (Lampiran 2) mengingat pada saat yang bersamaan Proyek Pesisir juga melakukan sosialisasi proyek atau pengenalan di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten. Secara umum dapat dikatakan bahwa sosialisasi proyek kepada masyarakat berlangsung dalam setiap kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan tentang pengenalan isu-isu pesisir, kondisi pesisir setempat, dampak kegiatan manusia dan cara penanganannya, baik dalam acara resmi maupun tidak resmi.

Contoh kegiatan pertemuan yang difasilitasi oleh Proyek Pesisir dalam rangka sosialisasi proyek, penyuluhan dan pendidikan serta musyawarah hal-hal khusus, seperti *early actions*, dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3. Untuk memperlancar tugas-tugas penyuluh lapangan, baik dalam proses sosialisasi proyek dan pengenalan masyarakat maupun kegiatan lainnya, mulai tahun 1998 seorang penduduk desa diangkat sebagai asisten penyuluh lapangan. Dalam menjalankan tugasnya, penyuluh lapangan dan asistennya mendapat dukungan dari kepala pemerintahan desa.

Dalam proses pengenalan masyarakat juga dilakukan beberapa kegiatan penelitian untuk mengenal lebih jauh kondisi masyarakat maupun ekologi desa tersebut. Sejumlah studi tentang desa lokasi proyek sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi proyek dalam mencapai tujuannya, yaitu *baseline study*, penyusunan sejarah lingkungan desa atau *eco-history* dan studi-studi teknis. *Baseline study* ini dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan lingkungan desa sebelum proyek dilaksanakan sehingga di

masa yang akan datang, misalnya pada saat proyek berakhir, kita dapat mengetahui apakah proyek ini mempunyai dampak terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan desa. Proyek Pesisir Sulawesi Utara mengadakan *baseline study* di empat desa dalam periode Juni 1997 - Maret 1998 (Lampiran 4). Kegiatan studi ini dimulai di desa Bentenan dan Tumbak dimana desain survei sosial-ekonomi yang disusun kemudian diterapkan dan dikembangkan untuk survei sosial-ekonomi di dua desa lainnya, yaitu Talise dan Blongko (Pollnac *et al.*, 1997a). Studi kondisi lingkungan pesisir dilakukan dengan mengacu pada metodologi yang dikembangkan oleh ASEAN-*Australia Marine Science Project* (English *et al.*, 1994).

Sejarah lingkungan desa (*eco-history*) disusun untuk mengetahui kecenderungan kondisi masyarakat dan lingkungan di masa lalu hingga saat ini sehingga konsekuensi dari kecenderungan tersebut di masa depan dapat diperkirakan jika upaya-upaya untuk menangani isu-isu penting tidak dilakukan. Studi ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen desa dan catatan-catatan lainnya serta wawancara dengan orang-orang tua yang tinggal di desa. Seperti juga dengan *baseline study*, penyusunan sejarah lingkungan ini dimulai dengan desa Bentenan dan Tumbak (Lampiran 4). Informasi yang terangkum dalam sejarah lingkungan desa tersebut dimanfaatkan Proyek Pesisir dalam penyuluhan kepada masyarakat agar mereka menyadari dan mengetahui perubahan-perubahan yang pernah terjadi sehingga timbul kesadaran untuk melakukan tindakan sebagai antisipasi terhadap kecenderungan perubahan yang teridentifikasi tersebut.

Bagi masyarakat desa Blongko, pembangunan jalan raya Trans-Sulawesi yang menggunakan material terumbu karang sebagai fondasi jalan telah menyadarkan bahwa pengambilan terumbu karang telah menyebabkan pantai desa mudah terkena erosi. Dampak dari berkurangnya upaya penangkapan ikan terhadap kelimpahan sumberdaya ikan dapat dimengerti oleh masyarakat desa Blongko setelah mereka merasakan dengan adanya pengalaman pada saat perang Permesta sekitar tahun 1950-an. Setelah desa ditinggalkan selama sekitar satu tahun karena mereka harus mengungsi di desa tetangga, masyarakat desa dapat melakukan operasi penangkapan ikan dengan mudah karena ikan 'semakin banyak' di dekat desa. Sedangkan pengalaman

masyarakat desa Talise, khususnya yang tinggal di Pulau Kinabohutan, telah menyadari bahwa penebangan kayu bakau untuk pembakaran karang sebagai bahan pengganti semen secara besar-besaran telah menyebabkan pulau tersebut mengalami erosi pantai yang hebat. Pengalaman-pengalaman tersebut telah menyebabkan adanya kesadaran bahwa lingkungan dan sumberdaya yang ada di sekitar mereka harus dilindungi dan dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi selanjutnya.

Sejumlah isu atau masalah pengelolaan pesisir yang berhasil diidentifikasi oleh studi-studi terdahulu (misalnya *rapid assessment* dan *baseline studies*) dikaji secara khusus dalam bentuk studi teknis oleh Proyek Pesisir untuk mengetahui statusnya secara lebih jelas (Lampiran 4). Informasi yang diperoleh dari studi teknis tersebut dimanfaatkan sebagai bahan penyuluhan kepada masyarakat desa maupun pemerintah agar mereka mengetahui kondisi atau perkembangan terakhir lingkungan pesisir sekaligus membuka wawasan mengenai konsekuensi di masa yang akan datang jika tidak ada tindakan terhadap isu-isu yang disampaikan. Setelah penyuluhan tersebut, timbul inisiatif atau keinginan mereka untuk melakukan tindakan. Tayangan informasi secara visual berupa gambar ilustrasi, foto, video dan film slide yang diperoleh dari studi-studi di lokasi setempat tampaknya sangat efektif dalam proses penyadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pengelolaan sumberdaya pesisir.

3.2 Pengembangan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pelatihan, pendidikan dan studi banding

Proyek Pesisir memfasilitasi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan belajar bersama seperti pengamatan terumbu karang (*manta tow training*), penyuluhan dan pendidikan umum menyangkut terumbu karang dan konsep DPL, hukum lingkungan laut dan pesisir, habitat dan ekosistem wilayah pesisir, pelatihan pengorganisasian kelompok dan pengelolaan keuangan (Lampiran 3). Untuk melengkapi pengembangan kapasitas masyarakat ini, program studi banding dilakukan (Lampiran 6).

Para fasilitator (yang tergabung dalam kelompok inti, cikal bakal

kelompok pengelola daerah perlindungan laut) dan anggota masyarakat diberi kesempatan untuk mengikuti penyuluhan tentang ekosistem terumbu karang, konsep daerah perlindungan laut dan hukum lingkungan. Untuk dapat mengenali kondisi terumbu karang yang ada, anggota masyarakat diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan pembuatan peta lingkungan dan monitoring terumbu karang. Dari pelatihan pembuatan peta dihasilkan informasi yang penting yang diperoleh masyarakat untuk pembuatan peta daerah perlindungan laut desa Blongko. Bersama-sama dengan wakil-wakil dari desa proyek lainnya, sejumlah anggota masyarakat desa Blongko juga mengikuti pelatihan tentang pengelolaan pesisir secara terpadu; mereka yang dilatih tersebut terpilih sebagai anggota kelompok inti di setiap desa, termasuk studi banding ke Pulau Apo.

Kunjungan ke Pulau Apo dilakukan selama 7 hari, mulai dari tanggal 5 Juni 1997 hingga 11 Juni 1997. Daerah perlindungan laut yang luasnya 'hanya' 8% dari 106 hektar terumbu karang di sekitar Pulau Apo adalah sebuah contoh pengelolaan pesisir yang diprakarsai oleh masyarakat setempat yang diresmikan pada tahun 1986. Studi banding yang diselenggarakan tidak hanya ditujukan untuk anggota masyarakat biasa, tetapi juga untuk staf pemerintahan, baik dari tingkat desa hingga tingkat pemerintah pusat, perguruan tinggi (IPB dan UNSRAT) dan staf Proyek Pesisir.

Obyek studi banding dan pesertanya disesuaikan dengan konteks program yang dilaksanakan. Dengan mengikuti studi banding tersebut, para peserta diharapkan dapat melihat pengalaman-pengalaman yang dilakukan pihak-pihak lain sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan tindakan atau aksi pengelolaan di tempat asalnya. Studi banding ini sangat strategis dalam membuka wawasan peserta tentang perlunya pengelolaan sumberdaya pesisir secara serius karena selama kunjungan mereka mendapatkan contoh nyata, yang kemungkinan besar belum pernah terbayangkan bagaimana suatu upaya-upaya pengelolaan diwujudkan. Setelah mengikuti kunjungan tersebut, warga desa Blongko kemudian menyebarluaskan pengalaman kunjungan kepada masyarakat desa Blongko.

Selanjutnya, masyarakat desa Blongko mendapat kunjungan dari dua

tokoh masyarakat Pulau Apo, yaitu kepala desa (Mr. Mario) dan ketua kelompok wanita (Ms. Fransia), pada tanggal 26-27 November 1997. Mereka berdua menceritakan pengalaman masyarakat Pulau Apo dalam pendirian daerah perlindungan laut. Dengan adanya kunjungan tersebut, masyarakat desa Blongko semakin terbuka terhadap konsep daerah perlindungan laut. Sehingga, semakin meningkat keyakinan akan manfaat dan meningkat keinginannya untuk mendirikan daerah perlindungan laut di desa Blongko.

Studi banding terhadap usaha ekoturisme dan pengembangan mata pencaharian juga dilakukan sebagai antisipasi memanfaatkan peluang yang dihasilkan akibat didirikannya daerah perlindungan laut. Studi ini diikuti oleh 47 peserta yang terdiri dari seluruh tenaga penyuluh lapangan, masyarakat desa Blongko, Bentenan, Tumbak dan desa Talise serta staf pemerintahan daerah. Lokasi studi adalah Taman Nasional Bunaken.

Pada saat rencana pendirian daerah perlindungan laut di desa Blongko masih dalam proses, masyarakat Tumbak juga merencanakan mendirikan daerah perlindungan laut melakukan kunjungan studi banding ke desa Blongko. Kunjungan dari masyarakat desa lain dapat saja membangkitkan kebanggaan desa Blongko bahwa desanya dijadikan acuan atau bahan pembelajaran masyarakat luar.

Kisah sukses selalu menarik perhatian warga desa, khususnya yang diceritakan oleh orang yang mengalami langsung, dapat meningkatkan kebenaran dari cerita-cerita yang diperoleh sebelumnya. Seorang nelayan Blongko pernah bertemu dengan nelayan Filipina di tengah laut. Nelayan asing tersebut mengatakan bahwa ia pernah mendengar sukses dan manfaat daerah perlindungan laut di Pulau Apo. Saat kembali ke desa Blongko, kisah sukses yang diperoleh dari pertemuan di laut tersebut cepat tersebar dan memiliki pengaruh besar terhadap antusias masyarakat untuk mendirikan daerah perlindungan laut di desanya (catatan pribadi M. Kasmi).

Untuk memperlancar jalannya program proyek yang intinya adalah memfasilitasi keinginan masyarakat untuk mengelola sumberdaya pesisir, Proyek Pesisir menyiapkan dana untuk kegiatan pelaksanaan awal (*early actions*). Pelaksanaan awal ini merupakan inisiatif masyarakat dengan memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki (dana, tenaga dan material)

dibantu dengan kontribusi dari Proyek Pesisir dan sumberdana lain dari pemerintah daerah (Haryanto *et al.*, 1999). Jenis kegiatan pelaksanaan awal yang diselenggarakan di Blongko adalah pembuatan MCK (11 unit), pengadaan motor katinting (6 unit). Kegiatan pelaksanaan awal ini mencerminkan perhatian proyek terhadap kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan dan aktifitas ekonomi penduduk.

3.3 Pertemuan konsultasi dan pembuatan aturan daerah perlindungan laut

Sejumlah pertemuan formal dan informal difasilitasi oleh penyuluh lapangan untuk membicarakan hal-hal khusus yang menyangkut proses pendirian daerah perlindungan laut (Lampiran 4). Pertemuan antar masyarakat desa merupakan forum keterlibatan mereka dalam penyusunan peraturan desa tentang daerah perlindungan laut. Dalam forum tersebut peran penyuluh lapangan, kepala desa dan kelompok inti sangat besar dalam memfasilitasi proses penyusunan peraturan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena peraturan yang disusun akan mencerminkan keinginan dan komitmen mereka.

Mengingat jumlah anggota masyarakat desa cukup besar dan mereka memiliki kesibukan dalam mencari nafkah sehari-hari, maka pertemuan-pertemuan yang membahas peraturan daerah perlindungan laut tersebut dilaksanakan dengan strategi dimulai dari kelompok-kelompok kecil, seperti kelompok-kelompok kegiatan agama ataupun dari satu dusun ke dusun lain. Untuk itu, kelompok inti dan penyuluh lapang serta asistennya bekerja keras memfasilitasi pertemuan yang banyak jumlahnya tersebut.

Bimbingan hukum dalam penyusunan peraturan desa tentang daerah perlindungan laut disiapkan oleh Proyek Pesisir Sulawesi Utara dengan menyediakan seorang konsultan hukum Denny Kanwur dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Proyek Pesisir juga memfasilitasi ekspose atau penyajian rancangan peraturan tersebut di hadapan masyarakat hukum setempat, yaitu civitas akademika Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi. Bimbingan teknis perencanaan daerah perlindungan laut diberikan oleh pimpinan Proyek Pesisir Sulawesi Utara beserta para konsultannya dalam

monitoring perkembangan persiapan daerah perlindungan laut.

Sosialisasi rencana perlindungan laut yang dibuat oleh masyarakat desa Blongko kepada berbagai pihak di luar desa difasilitasi oleh Proyek Pesisir (Lampiran 3). Hal ini dilakukan mengingat: (1) konsep daerah perlindungan laut belum cukup populer di kalangan masyarakat luas dan staf pemerintahan; (2) untuk menjamin kelangsungan dan efektivitas daerah perlindungan laut perlu dukungan dari pihak-pihak di luar desa, baik dari skala kecamatan, kabupaten maupun propinsi serta nasional, mengingat faktor eksternal desa sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan efektivitas tersebut. Upaya sosialisasi tersebut dilakukan dalam bentuk pertemuan-pertemuan khusus dan liputan media massa, seperti surat kabar dan televisi. Pertemuan khusus tersebut biasanya dilakukan dengan agenda diskusi untuk perbaikan draft peraturan desa. Saat ini sudah teridentifikasi dukungan dan keinginan besar pemerintah daerah, baik kecamatan, kabupaten dan propinsi, untuk mendirikan daerah perlindungan laut di desa-desa lain.

Liputan RCTI tentang daerah perlindungan laut Blongko dilaksanakan pada tanggal 10-11 Agustus 1999. Peliputan ini mencakup pengambilan gambar tentang kegiatan masyarakat nelayan maupun petani dan simulasi tentang musyawarah kelompok pengelola daerah perlindungan laut (Kasmidi, Agustus 1999).

3.4 Pengesahan keputusan daerah perlindungan laut

Diterbitkannya surat keputusan (SK) Kepala Desa Blongko tentang peraturan daerah perlindungan laut hasil musyawarah desa merupakan tonggak (*milestone*) perkembangan pengelolaan pesisir yang berbasis masyarakat di desa Blongko. Surat keputusan tersebut mencerminkan keinginan dan komitmen masyarakat desa Blongko untuk memelihara lingkungan dan sumberdaya pesisir yang tersedia di sekitarnya. Pada tanggal 26 Agustus 1999 surat keputusan itu dikeluarkan, kemudian diperkuat dengan

pengesahan oleh Camat Tenga. Garis besar dan salinan lengkap surat keputusan tersebut dapat dilihat dalam lampiran 9.

Setelah penandatanganan SK tersebut, selanjutnya adalah peresmian daerah perlindungan laut yang dilakukan oleh Gubernur pada tanggal 16 April 1998. Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 150 orang yang terdiri dari Bappeda Tk I, Bapedalda, Dinas Pariwisata, Dinas Pengairan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, BPN Minahasa, TVRI dan RRI stasiun Manado, Manado Post, NRM II, USAID, Fakultas Hukum dan Fakultas

Perikanan UNSRAT, dan tokoh-tokoh masyarakat desa serta masyarakat dari desa Blongko, Bentenan, Tumbak dan Talise. Saat diresmikan, daerah perlindungan laut telah dilengkapi dengan tanda-tanda batas, papan informasi dan pusat informasi. Acara berlangsung di desa Blongko lengkap dengan liputan media masa. Peresmian daerah perlindungan laut oleh pimpinan pemerintahan propinsi dapat dinilai sangat bermanfaat mengingat mencerminkan dukungan pemerintah propinsi terhadap upaya masyarakat desa Blongko sekaligus mempopulerkan konsep ini ke

segenap penjuru Kabupaten Minahasa dan Propinsi Sulawesi Utara. Bersamaan dengan itu, peresmian ini memberikan dampak pada semakin meningkatnya kebanggaan masyarakat Blongko sebagai desa yang unggul dalam pengelolaan pesisir, dibandingkan dengan desa-desa pesisir lainnya.

3.5 Pelaksanaan daerah perlindungan laut

Pelaksanaan daerah perlindungan laut ini dimulai dengan penentuan tim pengelola DPL yang sudah terbentuk untuk melaksanakan pengelolaan DPL serta melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, batas-batas daerah perlindungan laut Blongko telah dipasang yang dapat terlihat dari pemukiman penduduk. Titik-titik sudut batas diberi tanda berupa pelampung berbendera yang dijangkarkan ke dasar laut. Papan informasi (*signboard*) tentang himbauan dan adanya daerah perlindungan laut ada di tepi jalan raya (di muka rumah Kepala Desa), di dalam kampung dan di

Garis besar keputusan desa

- Pertimbangan dan aturan hukum, serta tujuan daerah perlindungan
- Lokasi daerah perlindungan
- Tugas dan tanggung jawab kelompok pengelola
- Kewajiban dan kegiatan yang diperbolehkan
- Kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan
- Sanksi dan pengawasan

dekat pusat informasi. Pusat informasi ini menyajikan informasi biota yang ada di dalam kawasan, menyimpan pustaka dan peralatan untuk pengamatan serta perlengkapan administrasi pengelolaan daerah perlindungan laut. Lokasi bangunan pusat informasi pada awalnya berada di tepi pantai lain, lebih dekat ke sungai. Namun karena daerah tersebut mengalami abrasi yang hebat kemudian dipindahkan ke lokasi sekarang, dekat dengan rumah Kepala Dusun III. Kondisi terumbu karang dan biota lainnya tercatat dalam laporan kondisi lingkungan desa Blongko (Kusen *et al.* 2000).

Setelah dikeluarkannya SK Desa Blongko dan peresmian oleh Gubernur Sulawesi Utara, yang dilakukan adalah pengelolaan daerah perlindungan laut. Untuk penyelenggaraan pengelolaan ini diperlukan adanya kelompok pengelola daerah perlindungan laut. Saat diresmikan sebuah kelompok pengelola daerah perlindungan laut sudah terbentuk dengan persetujuan Kepala Desa Blongko. Kelompok ini beranggotakan pejabat desa, seperti para Kepala Urusan Desa, ditambah anggota masyarakat lain. Tugas dari kelompok pengelola ini adalah menyusun rencana pengelolaan daerah perlindungan laut sehingga upaya ini akan berlanjut terus (*sustained*).

Kelompok pengelola ini melakukan sejumlah pertemuan, tugasnya antara lain menyusun rencana pengelolaan. Di dalam rencana pengelolaan tersebut, dicantumkan rencana monitoring kondisi terumbu karang dan biota laut (ikan), upaya-upaya penegakan hukum, melanjutkan penyuluhan dan pendidikan umum kepada masyarakat. Pengelolaan tersebut juga mencakup upaya-upaya untuk memanfaatkan daerah perlindungan laut sebagai sumberdana untuk dapat mendukung kelangsungan upaya pengelolaan itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa daerah perlindungan tersebut akan dikelola dengan baik oleh masyarakat.

Agar masyarakat desa Blongko memiliki kemampuan untuk memonitor

**Susunan kelompok pengelola
daerah perlindungan laut**

Ketua	: Arnold Ratu
Sekretaris	: Erick Armada
Bendahara	: Femmy Lumolos
Anggota	: Ismet Malyafar, Salim Duto, Donald Yanis, Jefta Mintahari

daerah perlindungan laut mereka diberi pelatihan. Untuk itu pada tanggal 19-21 Agustus 1999, pelatihan diadakan bagi anggota kelompok pengelola dan nelayan Blongko. Pelatihan monitoring ini mencakup pemantauan terhadap hasil tangkapan yang diperoleh masyarakat desa Blongko; informasi yang dikumpulkan dan dicatat adalah jenis alat tangkap yang digunakan, jenis ikan dan beratnya, lokasi diperolehnya ikan, jumlah ikan (ekor), lama operasi penangkapan dan jenis perahu yang digunakan. Selain itu, pelatihan juga diberikan untuk memantau jenis pelanggaran, pelaku pelanggaran, penanganan desa terhadap pelanggaran tersebut (Kasmidi, Agustus 1999).

Pengamatan secara cermat terhadap perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan daerah perlindungan laut oleh proyek dan pemerintah perlu dilakukan sebagai upaya untuk pembelajaran bagi penerapan contoh pengelolaan pesisir secara desentralisasi di tempat lain.

4. SUMBERDAYA YANG DIPERLUKAN DALAM PROSES PENDIRIAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

Kegiatan yang langsung berkaitan dengan proses pendirian daerah perlindungan laut adalah sumberdaya manusia dan dana yang berasal dari kontribusi beberapa sumber, yang mencakup sumber yang ada di desa, sumber dari pemerintah daerah dan sumber dari Proyek Pesisir. Kontribusi masyarakat desa diberikan dalam bentuk waktu dan tenaga serta material yang tersedia di desa. Kontribusi pemerintah daerah diberikan dalam bentuk bantuan dana dan saran yang bersifat arahan agar sesuai dengan peraturan yang ada. Kontribusi proyek diberikan dalam bentuk bantuan teknis, seperti material yang tidak terdapat di desa, konsultasi teknis dan dana. Proyek Pesisir sangat menghargai kontribusi masyarakat desa dalam bentuk apapun. Pengelolaan keuangan dilakukan oleh anggota masyarakat desa setelah dilatih oleh *Office Manager* PP Sulut. Pengawasan dilakukan dengan cermat oleh *Office Manager* PP Sulut. Proposal dan rincian usulan anggaran biaya dibuat oleh anggota masyarakat dengan bantuan penyuluh lapangan.

Salah satu contoh usulan masyarakat yang didanai oleh Proyek Pesisir adalah pembuatan tanda batas daerah perlindungan laut dan bangunan pusat informasi masing-masing memerlukan dana sebesar Rp 11.769.400,- dan

Rp 2,561.000,-. Bahan yang diperlukan untuk tanda batas adalah tali-temali, bahan pelampung, bahan jangkar, kain bendera tanda dan perkakas tukang. Dalam konteks proses pendirian daerah perlindungan laut di desa Blongko, sumberdaya yang diberikan untuk merangkul dukungan masyarakat, dilakukan dengan pemberian bantuan teknis (dana), seperti bantuan terhadap pembangunan jaringan air bersih dan MCK. Total besarnya biaya yang dikeluarkan oleh PP Sulut untuk pembangunan perbaikan sistem air bersih adalah Rp 2.400.000,-. Uang ini sebagai pelengkap karena sudah ada bantuan pemerintah sebesar Rp 61.500.000,- dalam bentuk jaringan air minum dan kontribusi masyarakat senilai Rp 10.100.000,- dalam bentuk bahan bangunan (material) dan tenaga kerja.

Untuk pembangunan satu unit MCK diperlukan dana sebesar Rp 1.737.000,-. Masyarakat Blongko menyiapkan kontribusi sebesar Rp 497.500,- dalam bentuk bahan bangunan lokal dan tenaga. Sisa kekurangan dana disediakan oleh PP Sulut (Rp 1.239.500) untuk pembelian bahan bangunan yang tidak tersedia di lingkungan desa, seperti atap seng, kloset, batubata, kayu dan paku. Jumlah MCK yang dibangun di desa Blongko adalah 11 unit, sehingga total kontribusi PP Sulut untuk pembangunan fasilitas ini adalah Rp 13.634.500.

5. PERKEMBANGAN PENDIRIAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT DI EMPAT DESA PROYEK

Saat ini ada indikasi bahwa desa lain (Tumbak, Bentenan dan Talise) ingin segera memiliki daerah perlindungan laut (*marine sanctuary*). Keinginan ini semakin besar terutama setelah proses pendirian daerah perlindungan laut di desa Blongko semakin jelas dan populer. Namun mengingat ada perbedaan fokus kegiatan dan prioritas, tingkat perkembangan proses pendirian daerah perlindungan laut di tiap desa. Ini disebabkan oleh strategi proyek yang memfokuskan pada salah satu desa (Blongko) agar dapat menarik pelajaran dari proses yang terjadi di desa tersebut sebelum pelaksanaan kegiatan serupa di desa lainnya. Strategi ini diterapkan karena Proyek Pesisir

Tabel 1. Perkembangan pendirian daerah perlindungan laut di empat desa Proyek Pesisir (Blongko, Bentenan, Tumbak dan Talise).

Nb	Kegiatan	Blongko	Bentenan	Tumbak	Talise
1	Survei data dasar	x	x	x	x
2	Sosialisasi daerah perlindungan laut	x	x	x	x
3	Pembentukan kelompok pengelola	x	/	x	/
4	Pendidikan lingkungan hidup	x	x	x	x
5	Studi banding	x	x	x	x
6	Penentuan lokasi daerah perlindungan laut	x	/	x	x
7	Konsultasi peraturan daerah perlindungan laut	x	/	/	/
8	Pemasangan tanda batas, papan informasi	x	-	/	-
9	Pengesahan peraturan	x	-	x	-
10	Implementasi/pelaksanaan	x	-	/	-

Keterangan:

x: sudah selesai, /: sebagian atau masih dalam proses, -: belum dilaksanakan

memiliki keterbatasan sumberdaya (staf) dalam mendampingi dan memfasilitasi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pelatihan dan pendidikan. Hal ini juga berkaitan dengan prioritas kebutuhan masyarakat akan penanganan permasalahan (isu) yang ada di desanya yaitu masyarakat mengutamakan masalah lain yang dianggap lebih penting daripada pendirian DPL.

Rangkuman perkembangan proses pendirian daerah perlindungan laut dimana Proyek Pesisir terlibat, mulai dari tahap persiapan hingga pengelolaan setelah implementasi, dapat dilihat dalam Tabel 1. Sementara ini perkembangan pendirian daerah perlindungan laut di desa Tumbak lebih maju dari perkembangan di desa Bentenan dan Talise. Di desa Tumbak, lokasi daerah perlindungan laut sudah ditentukan sementara peraturan desa dan kelompok pengelolanya sudah mulai dibicarakan.

6. APA YANG DAPAT DIPELAJARI DARI PENGALAMAN PENDIRIAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT?

Pemeran utama dalam pendirian daerah perlindungan laut adalah anggota masyarakat desa dimana daerah perlindungan laut akan berada. Namun selain itu ada pemeran lain, yaitu penyuluh lapangan yang ditempatkan oleh Proyek Pesisir dan warga setempat yang berperan sebagai asisten penyuluh lapangan, kepala desa dan anggota kelompok inti berperan sebagai motor kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Dari catatan pengalaman masyarakat Blongko terlihat bahwa penyuluh lapangan dan asistennya, kelompok pengelola daerah perlindungan laut serta kepala desa sangat memiliki peran penting dalam kelancaran proses pendirian daerah perlindungan laut. Dengan mempertimbangkan peranan tersebut, ke-empat pemeran tersebut diharapkan memiliki kriteria yang mendukung partisipasi masyarakat desa dan prinsip-prinsip yang diterapkan proyek dalam memfasilitasi pendirian DPL.

Penyuluh lapangan berfungsi sebagai jembatan antara manajemen proyek dan masyarakat desa. Tugas penyuluh lapangan adalah: (1) dapat berperan sebagai wakil proyek, koordinator, fasilitator dan mediator antara Proyek Pesisir, masyarakat dan pemerintahan; (2) membantu proses

Kriteria penyuluh lapangan

- ♦ Orang luar desa dan bersedia tinggal di desa;
- ♦ Memiliki latar belakang pengetahuan yang memadai; sebaiknya yang mengenal aspek lingkungan dan masyarakat pesisir, misalnya perikanan atau kelautan;
- ♦ Bersedia dilatih untuk meningkatkan kapasitas dalam mengkoordinasikan masyarakat, proyek dan pimpinan pemerintahan serta *stakeholder* pesisir;
- ♦ Memiliki jiwa pemimpin serta mau mendengar dan belajar dari masyarakat.
- ♦ Bisa bekerjasama dengan pimpinan desa dan asisten penyuluh lapangan;
- ♦ Memiliki pendidikan minimum SMU atau sederajat;
- ♦ Bersikap dewasa dalam berfikir dan bertindak, sehat dan kuat fisik maupun mental, memiliki inisiatif, kreatif, jujur, terbuka dan dapat dipercaya;
- ♦ Mendapat dukungan dari keluarga;
- ♦ Memiliki komitmen untuk berpartisipasi kapan saja.

pelaksanaan proyek dengan bantuan asisten dan bertanggung-jawab terhadap Proyek Pesisir; (3) Melaksanakan dan koordinasi lingkungan hidup kepada masyarakat desa; (4) Membangun motivasi masyarakat desa untuk upaya pengelolaan pesisir. Seorang penyuluh lapangan merupakan ujung tombak proyek karena terlibat mulai dari

awal persiapan pelaksanaan proyek di desa hingga masyarakat desa memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola sumberdaya pesisir sesuai dengan norma keterpaduan, kelangsungan (*sustainability*), dan dalam sosialisasi proyek ke lingkungan masyarakat dan kegiatan proyek dalam rangka mengenal masyarakat. Tugas-tugas seperti itu tampaknya memerlukan seseorang yang memiliki kriteria sebagaimana dicantumkan dalam kotak.

Untuk melaksanakan tugasnya, penyuluh lapangan ini dibantu oleh asisten penyuluh lapangan yang diambil dari masyarakat desa setempat. Ide dibalik pengangkatan seorang asisten penyuluh lapangan yang berasal dari desa proyek adalah untuk memudahkan komunikasi antara proyek dengan masyarakat setempat. Tugas asisten penyuluh lapangan adalah: (1)

membantu penyuluh lapangan dalam proses pelaksanaan proyek dengan bantuan asisten dan bertanggung-jawab terhadap Proyek Pesisir; (2) sebagai fasilitator dan mediator antara Proyek Pesisir dan penyuluh lapangan, masyarakat serta pemerintahan; (3) membangun motivasi masyarakat desa untuk upaya pengelolaan pesisir; (4) menjadi anggota kelompok inti; (5) bertanggungjawab kepada penyuluh lapangan. Kriteria seorang asisten penyuluh lapangan sebaiknya seperti yang tercantum dalam kotak.

Kriteria asisten penyuluh lapangan

- ♦ Orang penduduk asli desa dan diterima oleh masyarakat desa;
- ♦ Bisa bekerjasama dengan penyuluh lapangan dan pimpinan desa;
- ♦ Memiliki pendidikan minimum SMU atau sederajat;
- ♦ Bersikap dewasa dalam berfikir dan bertindak, sehat dan kuat fisik maupun mental, memiliki inisiatif, kreatif, jujur, terbuka dan dapat dipercaya;
- ♦ Mendapat dukungan dari keluarga;
- ♦ Memiliki komitmen untuk berpartisipasi kapan saja

Kelancaran penyelenggaraan suatu kegiatan tergantung juga pada pimpinan formal di wilayah (kepala desa). Komitmen kepala desa untuk mendukung Proyek Pesisir merupakan modal dasar dari kelancaran tersebut. Komitmen ini timbul setelah kepala desa mengetahui manfaat suatu kegiatan bagi masyarakatnya. Dengan komitmennya, kepala desa akan memfasilitasi proyek, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan. Salah satu sifat kepala desa yang penting perlu dicatat dalam memfasilitasi proyek adalah sifat sabar dalam arti memberi kesempatan kepada anggota masyarakatnya untuk memahami makna atau manfaat kegiatan. Sifat ini perlu digarisbawahi mengingat dalam proyek ini aspek partisipasi masyarakat atau *community-based* adalah ciri utama dari contoh pengelolaan pesisir yang diperkenalkan. Sifat sabar ini berlaku juga untuk pelaku-pelaku lain dari kegiatan-kegiatan di desa. Jika makna dan manfaat suatu kegiatan telah diketahui oleh anggota masyarakat maka kesinambungan (*sustainability*) relatif lebih terjamin karena dapat menimbulkan masyarakat merasa memiliki dan kemudian menjadi merasa bertanggungjawab.

Peran kepala pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya camat, juga penting. Namun peran khusus camat ini terutama sebagai pemberi dukungan resmi terhadap upaya-upaya yang dilakukan desa. Sebagai kepala pemerintahan yang membawahi sejumlah desa, camat memiliki posisi strategis sebagai pejabat yang menyebarluaskan pengalaman desa proyek kepada desa-desa lainnya. Oleh karena itu, seorang camat seyogyanya mengetahui perkembangan terakhir upaya-upaya yang berlangsung di desa.

Kriteria sebuah daerah perlindungan laut yang dikelola masyarakat desa

Berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sebuah daerah perlindungan laut adalah kemampuan masyarakat desa dalam mengawasi kawasan dimana kegiatan eksploitatif tidak diperkenankan. Hal ini sangat mempengaruhi pemilihan lokasi dan besar ukuran daerah perlindungan laut. Hal lain yang harus diperhatikan adalah kualitas aspek estetika kawasan ditinjau dari kualitas terumbu karang dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, kesepakatan masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan daerah perlindungan laut, dan tingkat ancaman terhadap kelestarian terumbu karang. Berdasarkan hal-hal

Kriteria sebuah daerah perlindungan laut yang dikelola masyarakat desa

- ♦ Lokasinya relatif dekat dengan pemukiman desa sehingga mudah diawasi atau dipantau;
- ♦ Ukurannya masih sanggup ditangani oleh desa, anggapan ideal 10% dari luas seluruh terumbu karang yang ada;
- ♦ Terdapat terumbu karang yang kondisinya masih bagus dan lebih dominan dari padang-lamun serta memiliki keanekaragaman ikan dan biota yang relatif tinggi untuk memudahkan pengelolaan;
- ♦ Habitat tersebut kurang dimanfaatkan, baik oleh orang desa maupun oleh orang luar; bukan daerah penangkapan ikan utama, tapi mungkin lokasi alternatif;
- ♦ Ada kesepakatan dan komitmen dari para *stakeholder* tentang pemanfaatan dan pengelolaannya;
- ♦ Lokasinya tidak mengalami sedimentasi dan jauh dari sumber polusi.

tersebut, sejumlah kriteria diajukan untuk menentukan daerah perlindungan laut yang dikelola oleh masyarakat desa (lihat kotak).

Adopsi konsep daerah perlindungan laut di lokasi lain (*scaling-up*)

Masyarakat desa Blongko semakin termotivasi setelah mengikuti penyuluhan, mengingat sejarah yang mereka alami dan mendengar atau menyaksikan keberhasilan upaya konservasi melalui pendirian daerah perlindungan laut. Selain itu, kebanggaan masyarakat desa sebagai desa yang berhasil mewujudkan keinginannya, sesuai dengan pesan yang terkandung dalam UU No. 22/1999, turut meningkatkan motivasi tersebut. Daerah perlindungan laut di desa Blongko telah menjadi bahan liputan media masa, baik tingkat lokal maupun nasional, dan telah juga menjadi bahan pembicaraan diantara para pejabat pemerintah. Hal ini telah memicu keinginan warga desa lain dan niat pemerintah lokal untuk menerapkan konsep daerah perlindungan laut di desa pantai lainnya (Saruan, 1999).

Beberapa prinsip yang diterapkan proyek untuk memfasilitasi pendirian daerah perlindungan laut:

- ♦ Keterbatasan sumberdaya manusia
- ♦ Ada waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami persoalan dan isu setempat;
- ♦ Penyuluhan tentang daerah perlindungan laut;
- ♦ Masyarakat mengkonsultasikan idenya ke berbagai pihak;
- ♦ Menempatkan penyuluh lapang secara tetap di tengah masyarakat;
- ♦ Mengadakan asisten penyuluh lapang dari lingkungan desa setempat;
- ♦ Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok pengelola;
- ♦ Menyediakan informasi/data sekunder hasil survei-survei;
- ♦ Mengakomodasi peran penting pemerintahan desa dan instansi lainnya

Adanya minat dan antusiasme untuk mendirikan daerah perlindungan laut tersebut tentu saja suatu hal yang menggembirakan. Sementara ini, perkembangan tersebut dapat dianggap sebagai 'keberhasilan' Proyek Pesisir memperkenalkan contoh pengelolaan pesisir. Namun ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengadopsi konsep ini. Proyek Pesisir selalu mengacu pada prinsip-prinsip seperti tercantum dalam kotak. Hal ini dilakukan terutama untuk lebih menjamin kesinambungan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola daerah perlindungan laut. Jika dilihat dengan seksama, prinsip nomor satu menekankan pada perlunya masyarakat diberi kesempatan (waktu). Oleh karena itu implementasi adopsi daerah perlindungan laut di tempat lain harus melihat perkembangan kesiapan masyarakat. Implementasi dalam bentuk penetapan daerah perlindungan laut tanpa proses yang mengakomodasi aspirasi masyarakat harus dihindarkan. Jika hal ini terjadi, maka yang akan ada hanyalah papan-papan tanda adanya daerah perlindungan laut tanpa pengelolaan sebagaimana mestinya.

Dari sudut pelaksanaan proyek, ciri *community-based* memberikan implikasi bahwa waktu penyelesaian tahapan proyek ataupun pencapaian *milestone* perkembangan proyek kemungkinan mengalami keterlambatan (*delayed*). Hal ini disebabkan karena kemajuan proyek harus didasarkan pada kesiapan masyarakat untuk maju ke tahap proyek selanjutnya. Oleh karena itu, sebuah proyek yang berciri *community-based* sebaiknya melakukan pemantauan terhadap kesiapan masyarakat tersebut.

PUSTAKA

- Ablaza-Baluyut, E. 1995. *The Philippine fisheries sector program*. In: Coastal and Marine Environmental Management: Proceedings of a Workshop. Bangkok, Thailand, 27-29, March, 1995. Asian Development Bank. pp. 156-177.
- Alcala, A.C. 1988. *Effects of marine reserves on coral fish abundance and yields of Philippine coral reefs*. *Ambio*. 17(3): 194-199.
- Buhat, D. 1994. *Community-based coral reef and fisheries management, San Salvador Island, Philippines*. In: White, A. T., L.Z. Hale, Y Renard and L. Cortesi. (eds.) 1994. Collaborative and community-based management of coral reefs: lessons from experience. Kumarian Press, West Hartford, Connecticut, USA. 33-49
- Crawford, B.R. and J. Tulungen. 1999a. *Preliminary documentation of the village profiling process in North Sulawesi*. Working Paper. Proyek Pesisir USAID/BAPPENAS NRM II Program. 9p.
- Crawford, B.R. and J. Tulungen. 1998a. *Marine sanctuaries as a community-based coastal resources management contoh for North Sulawesi and Indonesia*. Proyek Pesisir USAID/BAPPENAS NRM II Program. 7p.
- Crawford, B.R. and J. Tulungen. 1998b. *Methodological approach of Proyek Pesisir in North Sulawesi*. Working Paper. Proyek Pesisir USAID/BAPPENAS NRM II Program. 7p.
- Crawford, B.R. and J. Tulungen. 1999b. *Scaling up initial models of community based marine sanctuaries into a community-based coastal management program as a means of promoting marine conservation in Indonesia*. Working Paper. Proyek Pesisir USAID/BAPPENAS NRM II Program. 7p.
- Crawford, B.R. 1999. *Monitoring and evaluation of a community-based marine sanctuary: the Blongko village example*. Working Paper. Proyek Pesisir USAID/BAPPENAS NRM II Program. 7p.
- Crawford, B., M. Balgos and C. Pagdilao. (In prep). *Community-based Marine Sanctuaries in the Philippines: A Report on the Focus Group Discussions*. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, RI, USA, and, Philippine Council for Aquatic and Marine Research Development, Los Banos, Laguna, Philippines.
- English, S., C. Wilkinson, and V. Baker. (Eds.) 1994. *Survey Manual for Tropical Marine Resources*. Australian Institute for Marine Sciences.
- Ferrer, E. M., L. Polotan-Dela Cruz and M. Agoncillo-Domingo (Eds). 1996. *Seeds of hope: A collection of case studies on community based coastal resources management in the Philippines*. College of Social Work and Community Development, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, Philippines. pp. 223.
- Haryanto, B., M.F.A. Sondita, N.P. Zamani, A. Tahir, Burhanuddin, J. Tulungen, C. Rotinsulu, A. Siahainenia, M. Kasmidi, E. Ulaen dan P. Gosal. 1999. *Kajian terhadap konsep early action (pelaksanaan awal) Proyek Pesisir Sulawesi Utara*. Dalam Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, Burhanuddin, A. Tahir dan B. Haryanto (editors). 1999. *Pelajaran dari Pengalaman Proyek Pesisir 1997-1999*. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir, Bogor, 1 Maret 1999. PKSPL-Institut Pertanian Bogor dan CRC-University of Rhode Island. 5-27.
- Hastings, A. and L.W. Botsford. 1999. Equivalence in yield from marine reserves and traditional fisheries management. *Science*. 284: 1537 - 1538

- Kasmidi, M., A. Ratu, E. Armada, J. Mintahari, I. Maliasar, D. Yanis, F. Lumolos, N. Mangampe. 1999. *Profil sumberdaya wilayah pesisir desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. Proyek Pesisir, Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. 32 hal.
- Kusen, J., B.R. Crawford, A. Siahainenia dan C. Rotinsulu. 1999. *Laporan data dasar sumber daya wilayah pesisir desa Blongko, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara*. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett.
- Pajaro, M., F. Olano, B. San Juan. 1999. *Documentation and review of marine protected areas in the Philippines: a preliminary report*. Haribon Foundation for the Conservation of Natural Resources. Metro Manila, Philippines.
- Pollnac, R.B., F. Sondita, B. Crawford, E. Mantjoro, C. Rotinsulu, and A. Siahainenia. 1997a. *Baseline assessment of socioeconomic aspects of resource use in Bentenan and Tumbak*. Narragansett RI: Coastal Resources Center, University of Rhode Island.
- PP SULUT. 1999. *Profil sumberdaya wilayah pesisir desa Bentenan dan Tumbak, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. Proyek Pesisir, Manado. 47 hal.
- Proyek Pesisir. 1998. *Year two workplan (April 1998 - March 1999)*. Coastal Resources Management Project, Jakarta. 49p.
- Proyek Pesisir. 1999. *Year three workplan (April 1999 - March 2000)*. Coastal Resources Management Project, Jakarta. 101p.
- Polotan-de la Cruz, L. 1993. *Our Life Our Sea*. Proceedings of the seminar workshop on community-based coastal resources management. February 7-12, 1993, Silliman University, Dumaguete City, Philippines. Voluntary Services Overseas, Quezon City, Philippines. pp. 95.
- Russ, G.R. and A.C. Alcala. 1989. *Effects of intense fishing pressure on an assemblage of coral reef fishes*. Marine Ecology Progress Series. Vol. 56: 13-27.
- Russ, G.R. and A.C. Alcala. 1994. *Sumilon Island Reserve: 20 years of hopes and frustrations*. Naga: 7(3): 8-12.
- Russ, G.R., A.C. Alcala and A.S. Cabanban. 1992. *Marine reserves and fisheries management on coral reefs with preliminary modelling of the effects on yield per recruit*. Proceedings of the Seventh International Coral Reef Symposium, Guam, 1992, Vol 2. pp. 978-985.
- Saruan, J. 1999. *Dukungan pemda mengintegrasikan pembangunan wilayah dengan pengelolaan taman nasional dalamantisipasi pelaksanaan otonomi daerah*. Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Se Kawasan Timur Indonesia, 23-27 Agustus 1999, Manado. 13 hal.
- Tangkilisan, N., V. Samuel, F. Masambe, E. Mungga, I. Makaminang, M. Tahumil dan S. Tompoh. 1999. *Profil sumberdaya wilayah pesisir desa Talise, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. Proyek Pesisir, Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. 28 hal.
- Wantiez, L., P. Thollot and M. Kulbicki. 1997. *Effects of marine reserves on coral reef fish communities from five islands in New Caledonia*. Coral Reefs. 16: 215-224.
- White, A.T. 1989a. *Two community-based marine reserves: lessons for coastal management*. In T.E. Chua and D. Pauly (eds) ICLARM Conf. Proc. 19. Ministry of Science, Technology and the Environment, Kuala Lumpur, Johor State Economic Planning Unit, Johore Bahru, Malaysia, and International Center for Living Aquatic Resources management, Metro Manila, Philippines. 85-96

- White, A.T. 1989b. *The marine conservation and development program of Silliman University as an example for the Lingayen Gulf*. In G. Silvestre, E. Miclat and T-E Chua (eds) Towards sustainable development of the coastal resources of Lingayen Gulf, Philippines. ICLARM conf. Proc. 17. Philippine Council for Aquatic and Marine Research and development, Los Banos, Laguna, and, International Center for Living Aquatic Resources management, Metro Manila, Philippines. 119-123
- White, A. T., L.Z. Hale, Y Renard and L. Cortesi. (eds.) 1994. *Collaborative and community-based management of coral reefs: lessons from experience*. Kumarian Press, West Hartford, Connecticut, USA. pp. 124.
- World Bank. 1999. *Voices from the village: a comparative study of coastal resource management in the Pacific Islands*. Pacific Islands Discussion Paper Series Number 9 (and No. 9A-Summary Report). World Bank, East Asia and Pacific Region, Papua New Guinea and Pacific Islands Country Management Unit. Washington D.C. USA.

Lampiran 1. Proses kegiatan dalam proses pendirian daerah perlindungan laut di desa Blongko

No.	Proses kegiatan yang dilakukan	Kegiatan	Hasil yang diharapkan	Indikator hasil
1	Pengenalan masyarakat dan sosialisasi proyek	* Pemilihan desa proyek * Penempatan penyuluh lapangan di desa proyek secara tetap * Pelaksanaan survey data dasar * Penyusunan dokumen sejarah lingkungan * Pelaksanaan studi teknis * Pertemuan staf proyek dengan masyarakat desa	* Isu-isu pengelolaan pesisir yang diidentifikasi masyarakat dan proyek * Proyek memahami konteks sosial ekonomi dan lingkungan lokasi * Masyarakat memahami pendekatan dan tujuan proyek	✦ Dokumen data dasar lengkap dengan isu-isu pengelolaan pesisir ✦ Dokumen sejarah desa ✦ Terjadinya sejumlah pertemuan antara staf proyek dengan masyarakat ✦ Terjadinya diskusi dengan informan kunci dan masyarakat yang menunjukkan bahwa mereka telah memahami pendekatan dan tujuan proyek.
2	Pelatihan, pendidikan dan pengembangan kapasitas masyarakat	* Pelatihan teknis * Studi banding * Pelaksanaan awal * Pemberian dana	* Masyarakat memahami dampak aktivitas manusia terhadap kondisi lingkungan dan konsep daerah perlindungan laut; * Masyarakat mendukung tujuan proyek dan konsep daerah perlindungan laut; * Masyarakat mengetahui kondisi lingkungan di sekitarnya, khususnya terumbu karang; * Masyarakat memiliki kemampuan untuk mengamati dan mengawasi lingkungan awalnya; * Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan, termasuk pengelolaan keuangan. * Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan pengelolaan sumberdaya pesisir melalui pemecahan dengan kegiatan yang sederhana.	✦ Jumlah penyuluhan, kunjungan silang dan pelatihan yang dilaksanakan; ✦ Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan, kunjungan silang dan pelatihan yang dilaksanakan; ✦ Peta terumbu karang di perairan desa yang pembuatannya melibatkan masyarakat; ✦ Jumlah pertemuan yang dilakukan dalam rangka menentukan jenis dan proses kegiatan pelaksanaan awal; ✦ Jumlah peserta dan kelompok stakeholder dalam pertemuan untuk mempersiapkan kegiatan pelaksanaan awal; ✦ Jumlah proposal yang diajukan masyarakat untuk kegiatan pelaksanaan awal; ✦ Pelaksanaan awal yang selesai dilakukan oleh masyarakat dan laporan penggunaan dana kepada lembaga pemberi dana.

Lanjutan lampiran 1.

No	Proses kegiatan yang dilakukan	Kegiatan	Hasil yang diharapkan	Indikator hasil
3	Pertemuan konsultasi dan pembuatan aturan daerah perlindungan laut	* Membantu penyusunan draft isi aturan desa * Menyelenggarakan diskusi dan pertemuan informal * Membantu perbaikan draft isi aturan desa setelah berkonsultasi dengan pimpinan kecamatan hingga propinsi * Memasyarakatkan ide daerah perlindungan laut di kalangan pemerintah, mulai dari tingkat kecamatan hingga pemerintah pusat	* Ada partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembuatan aturan daerah perlindungan laut; * Ada konsensus dari mayoritas masyarakat mengenai lokasi, jenis dan tingkat kegiatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sanksi bagi pelanggar dan susunan/personel pengelola daerah perlindungan laut. * Ada dukungan dan masukan dari pemerintah.	✦ Jumlah pertemuan formal dan informal untuk menetapkan atau menyiapkan aturan desa dan lokasi daerah perlindungan laut; ✦ Jumlah peserta dan kelompok stakeholder yang hadir dalam pertemuan tentang aturan desa dan lokasi daerah perlindungan laut; ✦ Jumlah peserta dan kelompok stakeholder yang setuju dan tidak setuju dengan aturan desa dan lokasi daerah perlindungan laut selama pertemuan-pertemuan di atas.
4	Pengesahan keputusan desa tentang daerah perlindungan laut	* Musyawarah desa tentang aturan desa * Penandatanganan Surat Keputusan Desa oleh Kepala Desa dan Camat * Peresmian daerah perlindungan laut oleh Gubernur	* Pengakuan secara formal adanya daerah perlindungan laut oleh masyarakat dan pemerintahan desa hingga propinsi * Adanya dasar hukum yang tepat untuk pengelolaan dan penegakan aturan.	✦ Ada musyawarah desa yang menetapkan aturan desa tentang daerah perlindungan laut; ✦ Ada Surat Keputusan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui/disetujui Camat; ✦ Acara peresmian daerah perlindungan laut yang dihadiri oleh para pejabat pemerintahan, mulai dari Kecamatan hingga Propinsi, serta liputan media masa (surat kabar, radio dan televisi).

Lanjutan lampiran 1.

	Proses kegiatan yang dilakukan	Kegiatan	Hasil yang diharapkan	Indikator hasil
5	Pelaksanaan	* Pemasangan tanda batas yang terjaga dan dapat diawasi; * Pemasangan papan informasi; * Pengembangan rencana pengelolaan; * Pertemuan-pertemuan kelompok pengelola; * Monitoring kondisi terumbu karang dan biota laut; * Pelaksanaan penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada yang melanggar; * Penyuluhan dan pendidikan umum;	* Tingkat kepatuhan masyarakat setempat kepada peraturan yang telah disepakati; * Terjadinya pengelolaan yang efektif * Terjaganya atau perbaikan kualitas kondisi terumbu karang di dalam daerah perlindungan laut; * Meningkatnya kepadatan biota laut (misalnya ikan) di dalam daerah perlindungan laut;	✱ Jumlah pelanggaran di dalam daerah perlindungan yang tercatat; ✱ Jumlah pelanggar yang ditangkap dan proses tindak lanjutnya (sanksi); ✱ Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kelompok pengelola daerah perlindungan laut; ✱ Jumlah pertemuan kelompok pengelola; ✱ Monitoring terumbu karang; ✱ Survei <i>manta-tow</i> untuk tutupan karang; ✱ <i>Interval line transect</i> (ILT) untuk tutupan karang dan sensus ikan; ✱ Statistik sederhana yang disusun oleh masyarakat tentang jenis ikan yang ditangkap di sekitar daerah perlindungan laut.

Lampiran 2. Penempatan penyuluh lapangan di desa lokasi Proyek Pesisir

Desa	Nama Penyuluh Lapangan	Tanggal mulai ditempatkan di desa	Keterangan
Bentenan	Christovel Rotinsulu Maria T. Dimpudus	Juli 1997 - Maret 1998 SK Bupati Tk. II Minahasa No. 227/1997 April 1998 SK Bupati Tk. II Minahasa No. 67/1998	Mulai bekerja pada proyek sebagai penyuluh lapangan Februari 1997; ditempatkan setelah terlibat dalam <i>baseline study</i> Bentenan-Tumbak; Mulai bekerja pada proyek sebagai <i>trainee</i> penyuluh lapangan;
Tumbak	Christovel Rotinsulu Egmond Ulaen	Juli 1997 - Maret 1998 April 1998 SK Bupati Tk. II Minahasa No. 227/1997	Lihat keterangan diatas Mulai bekerja pada proyek sebagai <i>trainee</i> penyuluh lapangan;
Blongko	Meidiarti Kasmidi	Oktober 1997 SK Bupati Tk. II Minahasa No. 227/1997	Mulai bekerja pada proyek sebagai penyuluh lapangan Februari 1997; terlibat dalam <i>baseline study</i> Bentenan-Tumbak;
Talise	Noni Tangkilisan	Oktober 1997 SK Bupati Tk. II Minahasa No. 227/1997	Mulai bekerja pada proyek sebagai penyuluh lapangan Agustus 1997;

Lampiran 3. Kegiatan pertemuan dan pelatihan di lingkungan masyarakat desa Talise (Oktober 1997 - Februari 1999)

No	Bulan	Topik pertemuan	Peserta
1	Okt ober 97	Sosialisasi Proyek Pesisir	Masyarakat desa, per dusun
2	November 97	Sosialisasi Proyek Pesisir	Masyarakat desa, per dusun
3	Januari 98	Pelatihan lingkungan hidup tentang terumbu karang	Masyarakat desa
4	Februari 98	Musyawarah pelaksanaan <i>early actions</i> (pembangunan pusat informasi)	Masyarakat desa
5		Presentasi hasil survei erosi pantai	Masyarakat desa
6	Maret 98	Presentasi kegiatan Proyek Pesisir	Masyarakat desa
7	April 98	Pelatihan administrasi <i>early actions</i>	Panitia pembangunan pusat informasi
8		Penyerahan dana untuk <i>early actions</i>	Panitia pembangunan pusat informasi
9		Musyawarah daerah perlindungan laut	Kelompok inti masyarakat
10	Mei 98	Pelatihan pembuatan profil pantai	Kelompok inti masyarakat
11		Pelatihan lingkungan hidup tentang hutan dan satwa	Masyarakat desa
12	Juni 98	Pelatihan lingkungan hidup tentang bakau	Masyarakat desa
13	Juli 98	Presentasi hasil survei penyebab banjir	Masyarakat desa
14	Agustus 98	Musyawarah umum daerah perlindungan laut dan penjelasan status hutan desa Talise	Kelompok inti masyarakat
15		Pelatihan lingkungan hidup tentang hutan dan satwa	Kelompok inti masyarakat
16	Oktober 98	Pembersihan pantai	Masyarakat desa
17	November 98	Presentasi hasil survei hutan Talise	Masyarakat desa
18		Pelatihan ICM untuk kelompok inti (Tomohon, 2-7 Nov 98)	Kelompok inti masyarakat
19	Januari 99	Sosialisasi isu-isu / profil pesisir yang diidentifikasi oleh kelompok inti	Masyarakat desa
20	Februari 99	Sosialisasi isu-isu / profil pesisir yang diidentifikasi oleh kelompok inti	Masyarakat desa

Sumber: Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Talise, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara

Lampiran 4. Kegiatan pertemuan dan pelatihan di lingkungan masyarakat desa Blongko (Agustus 1997 - Mei 1999)

Bulan	No	Topik pertemuan	Peserta
	1	Sosialisasi Proyek Pesisir	Dusun I
	2	Pelatihan monitoring terumbu karang	Dusun II dan III
	3	Sosialisasi Proyek Pesisir	LKMD dan PKK
	4	Peranan masyarakat dalam pengelolaan pesisir di Apo Island, Filipina	Dusun II dan III
	5	Musyawarah pelaksanaan <i>early actions</i> (MCK desa)	Kepala Desa, LKMD dan tokoh agama
	6	Studi banding usaha wisata rakyat di Manado	Perwakilan masyarakat
	7	Musyawarah pelaksanaan <i>early actions</i> (MCK desa) dan rencana kerja desa tahun kedua	LKMD
	8	Musyawarah persetujuan <i>early actions</i> (MCK desa) dan pengalaman studi banding usaha wisata rakyat di Manado	Setiap Dusun
	9	Pelatihan monitoring terumbu karang	Dusun I
	10	Musyawarah pelaksanaan <i>early actions</i> (lokasi MCK desa) dan daerah perlindungan laut	Setiap Dusun
	11	Konperensi Nasional I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia	Para akademisi, masyarakat, nelayan
	12	Musyawarah peraturan daerah perlindungan laut	Kelompok pemanfaat: nelayan gleaning, nelayan perahu lampu dan pengambil kayu bakau
	13	Pelatihan monitoring terumbu karang (tingkat lanjutan)	Masyarakat desa
	14	Pelatihan kelompok swadaya	Perwakilan masyarakat
	15	Musyawarah draft SK desa tentang peraturan daerah perlindungan laut	Tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan agama
	16	Musyawarah evaluasi pembuatan MCK dan laporan keuangan	Tim UPS
	17	Musyawarah evaluasi pembuatan MCK, proyek air bersih Bandes Kab. Minahasa, pembentukan kelompok pengelola daerah perlindungan laut.	Tokoh-tokoh masyarakat, tim UPS dan kepala dusun
	18	Musyawarah pemilihan kelengkapan pengurus dan anggota kelompok pengelola daerah perlindungan laut, diskusi, gambaran tugas dan tanggung jawab	Kepala Desa, Kepala Dusun, LKMD, Tim UPS, tokoh masyarakat, guru dan anggota masyarakat
	19	Musyawarah desa persetujuan SK desa tentang daerah perlindungan laut (26/8/98)	Masyarakat dan Proyek Pesisir
	20	Musyawarah strategi pendidikan lingkungan hidup untuk anak-anak sekolah	Penyuluh lapangan, konsultan dan guru-guru
	21	Pelatihan ICM untuk kelompok inti (Tomohon, 2-7 Nov 98)	Wakil masyarakat desa
	22	Sosialisasi isu-isu / profil pesisir yang diidentifikasi oleh kelompok inti	Perayaan Natal Masyarakat Dusun I
	23	Musyawarah sosialisasi isu-isu / profil pesisir, laporan kegiatan dan keuangan kelompok pengelola daerah perlindungan laut, laporan pembangunan MCK	Masyarakat
	24	Musyawarah sosialisasi isu-isu / profil pesisir, dan peraturan kelompok usaha perahu katinting	Masyarakat dan nelayan
	25	Peresmian daerah perlindungan laut (16/04/99)	Masyarakat, Akademisi dan Pemerintah Daerah
	26	Pertemuan kelompok pengelola dan masyarakat dengan Tim COREMAP	Kelompok Pengelola dan Tim COREMAP

Lampiran 5. Studi *eco-history*, *baseline studies* dan studi teknis yang dilaksanakan oleh Proyek Pesisir Sulawesi Utara

Tabel 1. Tanggal mulai dan laporan studi *eco-history* desa-desa Proyek Pesisir di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

No	Desa	Laporan	Tanggal mulai
1	Bentenan - Tumbak	Mantjoro (1997)	Juni 1997
2	Blongko	Kasmidi (1998)	Desember 1997
3	Talise	Mantjoro (1997)	Juli 1997

Tabel 2. Tanggal mulai dan laporan studi *baseline studies* sosial ekonomi dan kondisi lingkungan desa-desa Proyek Pesisir di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

No	Desa	Sosial ekonomi desa		Lingkungan dan sumberdaya alam	
		Mulai	Laporan	Mulai	Laporan
1	Bentenan - Tumbak	Juni 1997	Pollnac <i>et.al</i> (1997)	Juni 1997	Kusen <i>et.al</i> (1997)
2	Blongko	Juli 1997		17 November 1997	
3	Talise	Agustus 1997		Agustus 1997	

Tabel 3. Studi teknis isu pengelolaan pesisir di desa-desa Proyek Pesisir di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

	Topik / isu	Lokasi studi	Tanggal mulai	Laporan
1	Degradasi terumbu karang akibat <i>Crown of Thorns</i>	Bentenan; Tumbak	Desember 1997	Fraser (1997)
2	Pergeseran garis pantai akibat erosi	Bentenan; Talise	Januari 1998	Rubinof (1998) Gosal (1998)
3	Keanekaragaman hayati hutan	Talise	November 1998	Lee (1999)
4	Peranan wanita dalam pengelolaan pesisir	Bentenan, Tumbak, Talise dan Blongko	Januari 1998	Diamond <i>et al.</i> (1999)

Lampiran 6. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pendirian daerah perlindungan laut Desa Blongko

Tabel 1. Beberapa studi banding yang diselenggarakan oleh Proyek Pesisir dalam rangka memperkenalkan konsep upaya pengelolaan sumberdaya pesisir

No	Maksud studi banding	Lokasi	Tanggal	Peserta
1	Studi banding ke Pulau Apo, Philipina	Pulau Apo, Philipina	5 - 11 Juni 1997	Bappeda (ibu Devy), masyarakat (Jeny Kauntu, Norma Mangampe, K.R. Sampelan), Proyek Pesisir (Meidi Kasmidi, Ramli Malik, Ian Dutton, Brian Crawford), IPB (Darmawan)
2	Konperensi Nasional I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia	Bogor	19 - 20 Maret 1998	Blongko: Phillep Dandel, Norma Mangampe; PP Sulut: Johnnes Tulungen, Christovel Rotinsulu, Meidi Kasmidi, Noni Tangkilisan
3	Studi banding wisata rakyat	Manado dan Minahasa	13 - 16 Februari 1998	Semua EO, masyarakat desa proyek (47 orang)
4	Studi banding pengelolaan hutan mangrove	Sinjai, Sulawesi Selatan	25 - 31 Januari 1999	EO (3), SEO, Bappeda (2), masyarakat (5)

Tabel 2. Sosialisasi daerah perlindungan laut kepada pihak-pihak di luar desa, sasaran sosialisasi dan bentuknya

No	Pihak sasaran sosialisasinya	Forum atau format sosialisasi
1	Staf pemerintah daerah kecamatan dan kabupaten	Pertemuan <i>Kabupaten Task Force</i> (KTF)
2	Masyarakat luas di Sulawesi Utara	Manado Post dan TVRI Manado
3	Masyarakat luas di tingkat nasional	RCTI, Jakarta
4	Masyarakat luas di tingkat nasional dan internasional	NRM Newsletter Indonesian Travel & Nature 12 (Agustus-September 1999) p8
5	Pemerintah pusat	Pertemuan
6	Masyarakat akademik nasional	Seminar-seminar

KEPUTUSAN DESA

DESA BLONGKO KECAMATAN TENGA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA
NOMOR : SK Desa Nomor: 03/2004A/KD-DB/VIII/98

Tentang

KEPUTUSAN MASYARAKAT DESA BLONGKO
KECAMATAN TENGA DAERAH TINGKAT II MINAHASA
TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLONGKO DAN MASYARAKAT

MENIMBANG :

- a. Bahwa dengan semakin terbatasnya potensi sumberdaya pesisir dan laut desa untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan serta terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, akibat dari tindakan, ancaman pemanfaatan, dan perusakan lingkungan pesisir dan laut dari masyarakat dan atau nelayan desa/luar desa, maka wilayah pesisir dan laut, yaitu wilayah laut yang sangat berpotensi sebagai tempat penyediaan sumberdaya perikanan laut, serta sangat efektif untuk meningkatkan produksi perikanan di dalam wilayah dan sekitarnya, serta wilayah daratan sebagai wilayah penyanggah, perlu dilindungi;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin pelestarian lingkungan hidup (darat, laut dan udara), maka setiap orang berkewajiban untuk menjaga, mengawasi dan memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa perencanaan Tata Ruang Kabupaten Minahasa, diperlukan perencanaan yang meliputi wilayah pesisir dan laut tingkat Kecamatan dan Desa.
- d. Bahwa dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka perlindungan kawasan pesisir dan laut desa perlu dituangkan dalam suatu keputusan masyarakat desa, sebagai masyarakat sadar hukum dan sadar lingkungan hidup.

- e. Musyawarah masyarakat per dusun tanggal 18 Februari'98, 13 & 14 Maret'98, 7 & 8 April'98, 19 Mei'98, 13 Agustus'98 dan Musyawarah Umum tanggal 26 Agustus'98.

MENGINGAT :

1. Undang Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 ayat 3
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
6. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
7. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984, tentang Penetapan Batas Wilayah Desa
13. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
14. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.
15. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 1991 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Minahasa Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa.

Setelah dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, Lembaga Musyawarah Desa, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh-Tokoh Masyarakat, dan Seluruh Anggota Masyarakat :

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MASYARAKAT DESA BLONGKO KECAMATAN TENGA DAERAH TINGKAT II MINAHASA TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. M[MDIC1]asyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Blongko Kecamatan Tenga.
2. Nelayan adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut yang berasal dari Desa dan atau luar Desa Blongko.
3. Kelompok Usaha Perikanan adalah nelayan dari Desa dan atau luar Desa Blongko.
4. Kelompok Pengelola Wilayah Perlindungan Laut adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui keputusan bersama masyarakat, dengan Surat Keputusan Lembaga Masyarakat Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.
5. Kegiatan Pemanfaatan Terbatas adalah kegiatan penangkapan jenis ikan tertentu oleh nelayan dengan menggunakan peralatan tradisional sederhana.
6. Wilayah Perlindungan adalah bagian pesisir dan laut tertentu yang termasuk dalam wilayah administratif Pemerintahan Desa Blongko Kecamatan Tenga yang terdiri dari Zona Inti dan Zona Penyanggah.

BAB II

CAKUPAN WILAYAH PERLINDUNGAN PESISIR DAN LAUT

Pasal 2

1. Zona Inti dan batas-batasnya berada di lokasi yang bernama LOS LIMA, yang mencakup wilayah yang terletak di dalam garis-garis lurus yang menghubungkan Titik Batas I, Titik Batas II, Titik Batas Bakau Utara, Titik Batas Terumbu Karang Utara, Titik Batas III, Titik Batas IV, Titik Batas Terumbu Karang Selatan dan Titik Batas Bakau Selatan.
2. Titik Batas I berjarak 50 meter diukur dari titik terluar tepi sebelah Utara Sungai bernama "*Kuala Batu Tulu*".
3. Titik Batas II berjarak 300 meter diukur tegak lurus menyusur pantai dari Titik Batas I.
4. Titik Batas Bakau Utara berjarak 90 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas II ke arah laut.
5. Titik Batas Terumbu Karang Utara berjarak 244 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas Bakau Utara ke arah laut di tempat yang bernama "*tubir nyare*".
6. Titik Batas III berjarak 50 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas Terumbu Karang Utara ke arah laut.
7. Titik Batas Bakau Selatan berjarak 150 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas I ke arah laut.
8. Titik Batas Terumbu Karang Selatan berjarak 174 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas Bakau Selatan ke arah laut di tempat yang bernama "*tubir nyare*".
9. Titik Batas IV berjarak 50 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas Terumbu Karang Selatan ke arah laut.

Pasal 3

1. Zona Penyanggah dan batas-batasnya berada di lokasi yang bernama LOS LIMA, yang mencakup wilayah yang terletak antara Zona Inti dengan garis-garis yang menghubungkan Titik Batas Penyanggah I, II, III, IV, V dan VI.
2. Titik Batas Penyanggah I berjarak 125 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas I menyusur pantai ke arah Selatan.
3. Titik Batas Penyanggah II berjarak 100 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas IV menyusur pantai ke arah Selatan.
4. Titik Batas Penyanggah III berjarak 100 meter diukur dari Titik Batas IV ditarik garis lurus ke arah laut.
5. Titik Batas Penyanggah IV berjarak 100 meter diukur dari Titik Batas III ditarik garis lurus ke arah laut.
6. Titik Batas Penyanggah V berjarak 100 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas III menyusur pantai ke arah Utara.
7. Titik Batas Penyanggah VI berjarak 125 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas II menyusur pantai ke arah Utara.

Pasal 4

Wilayah Perlindungan Daratan dan batas-batasnya yaitu daratan yang mengikuti garis pantai yang batas-batasnya adalah bagian Utara berbatasan dengan Tanah Negara/perkebunan kelapa PT Laimpangi, bagian Selatan berbatasan dengan Tanah Negara/perkebunan kelapa PT Laimpangi, bagian Timur berbatasan dengan Tanah Negara/perkebunan kelapa PT Laimpangi, dan bagian Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK PENGELOLA

Pasal 5

1. Kelompok Pengelola yang dibentuk bertugas membuat perencanaan pengelolaan wilayah perlindungan yang disetujui oleh masyarakat, melalui keputusan bersama.
2. Kelompok Pengelola bertanggung jawab dalam perencanaan lingkungan hidup untuk Pengelolaan Wilayah Perlindungan Laut yang berkelanjutan.
3. Kelompok Pengelola yang dibentuk bertugas untuk mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan wilayah yang dilindungi untuk kepentingan masyarakat.
4. Kelompok Pengelola berhak melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dalam keputusan ini.
5. Kelompok Pengelola berhak melaksanakan penyitaan, dan pemusnahan atas barang dan atau alat-alat yang dipergunakan sesuai ketentuan dalam keputusan ini.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 6

1. Setiap penduduk desa wajib menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan laut yang dilindungi.
2. Setiap penduduk desa dan atau kelompok mempunyai hak dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan

- pengelolaan lingkungan hidup di wilayah yang dilindungi.
3. Setiap orang atau kelompok yang akan melakukan kegiatan dan atau aktivitas dalam Wilayah Perlindungan (Zona Inti), harus terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari Kelompok Pengelola.
 4. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Wilayah yang dilindungi (Zona Inti), adalah kegiatan orang-perorang dan atau kelompok, yaitu penelitian, dan wisata, terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari Kelompok Pengelola, dengan membayar biaya pengawasan dan perawatan, yang akan ditentukan kemudian oleh Kelompok Pengelola.
 5. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Penyanggah, adalah pemanfaatan terbatas oleh nelayan, dengan terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari Kelompok Pengelola.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN DANA

Pasal 7

1. Dana yang diperoleh dari kegiatan dalam wilayah perlindungan, diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan petugas atau kelompok pengawasan/patroli laut, pemeliharaan rumah/menara pengawas, pembelian peralatan penunjang seperti pelampung, bendera laut dan biaya lain-lain yang diperlukan dalam upaya perlindungan wilayah pesisir dan laut, dan tata cara pemungutannya oleh petugas yang ditunjuk melalui keputusan bersama Kelompok Pengelola Wilayah Perlindungan Laut.
2. Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain yang tidak mengikat yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengelolaan Wilayah Perlindungan Pesisir dan Laut.

BAB VI

HAL-HAL YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN ATAU DILARANG

Pasal 8

Semua bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dilakukan di wilayah pesisir dan laut yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama untuk dilindungi (Zona Inti dan Zona Penyanggah).

Pasal 9

1. Setiap penduduk desa dan atau luar desa dilarang melakukan aktivitas di laut pada wilayah yang dilindungi (Zona Inti).
2. Hal-hal yang tidak dapat dilakukan/dilarang di Zona Inti, sebagai berikut :
 - ♦ Melintasi/menyeberang dengan menggunakan segala jenis angkutan laut,
 - ♦ Pemancingan segala jenis ikan,
 - ♦ Penebaran jala, jaring, soma, bubu dan sejenisnya,
 - ♦ Penangkapan ikan dengan menggunakan alat pemanah, racun dan bahan peledak,
 - ♦ Pengambilan teripang dan sejenisnya,
 - ♦ Pengambilan karang hidup atau mati,
 - ♦ Pengambilan kerang-kerangan dan atau jenis biota lainnya hidup atau mati.
 - ♦ Membuang jangkar,
 - ♦ Menggunakan perahu lampu,
 - ♦ Berjalan diatas terumbu karang,
 - ♦ Pengambilan Batu, Pasir dan Kerikil,

- ♦ Penebangan segala jenis kayu bakau (posi-posi)
- ♦ Pengambilan ranting-ranting kayu baik yang hidup/utuh dan atau yang sudah mati,

Pasal 10

Hal-hal yang tidak dapat dilakukan/dilarang di Zona Penyanggah, sebagai berikut:

- ♦ Melintasi/menyeberang dengan perahu yang menggunakan lampu atau cahaya lainnya.
- ♦ Menangkap ikan dengan menggunakan peralatan tangkap modern, perahu pajeko, jaring (soma/jala) cincin, soma paka-paka, muro-ami dan sejenisnya

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

1. Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi tingkat pertama berupa permintaan maaf oleh yang bersangkutan atau kelompok, sekaligus menyerahkan seluruh hasil perbuatan/tindakan, seperti penangkapan ikan yang dikonsumsi dan atau ikan hias, pengambilan kayu bakar dan atau ranting pohon bakau (mangrove/posi-posi), kerang-kerangan, batu, pasir, kerikil dan lain-lain, harus dikembalikan ketempat asalnya dan atau dimusnahkan, dan berjanji untuk tidak akan melakukan

perbuatannya kembali, serta menandatangani surat pernyataan yang dibuat, dihadapan Pemerintah Desa, Kelompok Pengelola dan Masyarakat.

2. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatannya yang kedua kalinya seperti yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 dikenakan sanksi tingkat kedua yaitu sanksi seperti pada Pasal 11 ayat (1) diatas, ditambah dengan denda berupa sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok Pengelola, dan sekaligus penyitaan dalam tenggang waktu tertentu semua peralatan pemancingan, jala, perahu, parang, pisau, alat gergaji, alat pemotong dari mesin dan atau alat-alat lainnya yang dipergunakan untuk perbuatan yang dilarang dalam Keputusan Desa ini.
3. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatannya yang ketiga kalinya seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10, dikenakan sanksi tingkat ketiga yaitu sanksi seperti pada Pasal 11 ayat (2) diatas, serta diwajibkan untuk melakukan pekerjaan sosial untuk kepentingan seluruh masyarakat desa, dan atau sanksi lain yang akan ditentukan kemudian oleh keputusan masyarakat dan pemerintah desa.
4. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10, secara berulang-ulang kali, yaitu perbuatan yang melebihi tiga kali, maka dikenakan sanksi seperti pada Pasal 11 ayat (3) diatas, dan kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian sebagai penyidik, untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perbuatan melanggar hukum pada Pasal 9 ayat (2) dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 12

1. Wilayah yang dilindungi adalah merupakan daerah pesisir dan laut yang telah dipilih dan disetujui bersama oleh seluruh masyarakat Desa Blongko.
2. Wilayah yang dilindungi dijaga kelestariannya untuk kepentingan masyarakat Desa Blongko.
3. Setiap anggota masyarakat berkewajiban melaporkan kepada Kelompok Pengelola atau Pemerintah Desa, apabila mengetahui tindakan-tindakan perusakan lingkungan dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-perorang dan atau kelompok, sehubungan dengan pelestarian Wilayah Perlindungan.

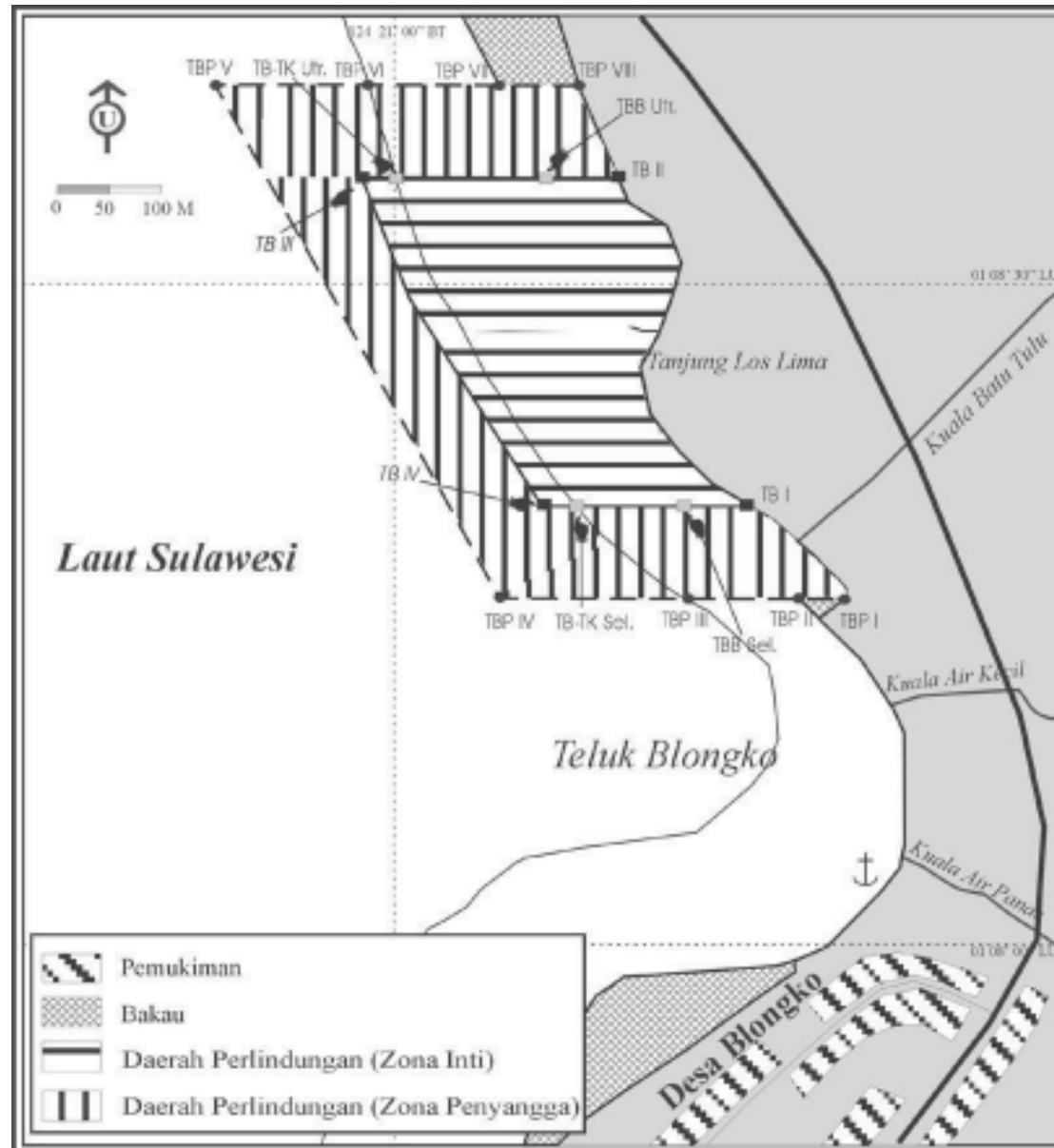
BAB IX

PENUTUP

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Musyawarah Desa.
2. Keputusan masyarakat desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Keputusan Masyarakat Desa Blongko, tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut sudah dibuat dengan benar dan apabila dipandang perlu dapat disempurnakan kembali sesuai musyawarah dengan suatu keputusan bersama masyarakat dan Pemerintah Desa Blongko, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.



Peta Lokasi Daerah Perlindungan Laut Desa Blongko

SK Desa Nomor: 03/2004A/KD-DB/VIII/98

Keterangan :

TB I = Titik Batas I TB II = Titik Batas II
TB III = Titik Batas III TB IV = Titik Batas IV

TBP I = Titik Batas Penyangga I
TBP II = Titik Batas Penyangga II
TBP III = Titik Batas Penyangga III
TBP IV = Titik Batas Penyangga IV
TBP V = Titik Batas Penyangga V
TBP VI = Titik Batas Penyangga VI
TBP VII = Titik Batas Penyangga VII
TBP VIII = Titik Batas Penyangga VIII

TBB Utr. = Titik Batas Bakau Bagian Utara
TBB Sel. = Titik Batas Bakau Bagian Selatan

TB-TK Utr. = Titik Batas Terumbu Karang Bagian Utara
TB-TK Sel. = Titik Batas Terumbu Karang Bagian Selatan



PROSES PENGEMBANGAN TAMBAK RAMAH LINGKUNGAN DAN REHABILITASI MANGROVE BERBASIS MASYARAKAT SECARA TERPADU DI DESA PEMATANG PASIR-LAMPUNG SELATAN

Oleh:

Neviaty P. Zamani, Budy Wiryawan, Hermawati Poespitasari, Supomo T.H. Wardoyo, Handoko A. Susanto,
Ali K. Mahi, Marizal Ahmad, M. Fedi A. Sondita dan Burhanuddin

ABSTRAK

Pada tahun pertama (1998), kegiatan Proyek Pesisir Lampung mencakup identifikasi permasalahan atau isu-isu pengelolaan dan *stakeholders* sumberdaya pesisir, penentuan prioritas permasalahan, perumusan konsep pengelolaan pesisir secara terpadu (*Integrated Coastal Management*), mencari peluang kerjasama dengan instansi pemerintah setempat dan membangun kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dari kegiatan tahun pertama ini terungkap ancaman terhadap habitat mangrove adalah salah satu permasalahan utama pesisir Lampung. Ancaman utama terhadap kelestarian fungsi ekologis mangrove di pesisir timur Lampung adalah alih fungsi kawasan hutan mangrove menjadi areal pertambakan, baik semi intensif maupun intensif dan reklamasi untuk perluasan lahan. Hampir 90% hutan mangrove telah berubah fungsi dalam jangka waktu 15 tahun. Usaha pertambakan tersebut umumnya tidak berlangsung lama, hanya bertahan dalam jangka 4 – 5 tahun. Kasus kerusakan lahan dan ketidaksinambungan usaha tambak seperti ini mirip dengan yang terjadi di sepanjang Pantai Utara Jawa. Untuk menghindari hal serupa di Lampung, saat ini sedang dikembangkan suatu kegiatan program tambak ramah lingkungan dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat secara terpadu.

Kegiatan percontohan tersebut dimulai pada tahun kedua program Proyek Pesisir (1999) dengan kegiatan berupa penentuan lokasi, kegiatan pelaksanaan awal (*early actions*) yang meliputi pembentukan Tim Pantai Timur (TPT) yang akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan penyamaan persepsi diantara sesama anggota TPT, sosialisasi kegiatan di tengah masyarakat, penggalian potensi dan identifikasi kendala, pelatihan aplikasi metode *participatory rapid appraisal* (PRA) bagi anggota TPT dan studi banding. Untuk selanjutnya, dalam tahun ketiga proyek (2000), kegiatan-kegiatan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi program.

Kendala utama yang dijumpai dalam proses kegiatan ini antara lain adalah (a) adanya persepsi masyarakat bahwa kegiatan tersebut adalah proyek bantuan untuk pembangunan fisik dan (b) kesulitan dalam menyesuaikan kegiatan yang diinginkan masyarakat dengan kegiatan yang diinginkan pemerintah daerah. Pelajaran yang dapat diambil (*lessons learned*) antara lain (a) keterlibatan dan partisipasi pemerintah daerah maupun masyarakat perlu diakomodasi sejak awal, (b) diperlukan pendekatan yang baik kepada masyarakat, (c) metode PRA hanya tepat digunakan bila masyarakat sudah mempercayai fasilitator sepenuhnya, dan (d) sosialisasi program atau proyek perlu terus-menerus dilakukan dengan melibatkan tokoh kunci (*key person*) dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kata kunci: **tambak ramah lingkungan, rehabilitasi mangrove, berbasis masyarakat, pengelolaan pesisir secara terpadu, tokoh kunci (*key person*).**

ABSTRACT

The first year activities of Proyek Pesisir in Lampung include identification of resources management issues and their stakeholder, establishment of prioritized issues or problems to be handled by management effort, formulation of integrated coastal management (ICM) concept for Lampung context, exploring opportunity for collaborative works with local government agencies and non-government organizations. Based on the first year activities, the pronounced threat on mangrove habitat is considered the main issue of Lampung's coast. The threats are alteration of mangrove forest into brackishwater aquaculture areas (both intensive and semi intensive) and land reclamation. These problems were identified in east coast of Lampung. Almost 90% of the mangrove forest have been converted into various functions during the last 15 years, especially for coastal aquaculture. However, most aquaculture business in the area lasted only 4-5 years. This is a similar case to what happened along the north coast of Java. To avoid the same accident, Proyek Pesisir and stakeholder in Lampung develop a community-based integrated eco-friendly sustainable brackishwater-aquaculture and mangrove rehabilitation program. A pilot study has been conducted in Desa Pematang Pasir, Kabupaten Lampung Selatan.

The program was started in the second year of Proyek Pesisir Lampung, begun with site selection and early actions which consist of establishment of a facilitating group (Tim Pantai Timur ~ TPT), development of cohesive perception, program socialization, identification of development potentials and issues, training on participatory rapid appraisal (PRA) for the TPT and comparative study visiting areas where efforts have been made to manage mangrove areas. In the third year, these activities will be followed up by development of programs, their implementation, monitoring and evaluation.

The main constraints of these activities are (a) wrong perception of community to project strategy as they usually experienced physical development, and (b) difficulties in combining community needs and government-planned development. Some lessons from this program are (a) the involvement and participation of government and community have to be established as early as possible, (b) good approach to the community is needed, (c) use of PRA method will be efficient when community has trusted their facilitators, (d) project socialization have to be continuously conducted along with established contact with key persons and resolving local problems in the community.

Key words: eco-friendly brackishwater-aquaculture, mangrove rehabilitation, community-based, integrated coastal management, key person.

1. PENDAHULUAN

Proyek Pesisir atau *Coastal Resources Management Project* (CRMP) dimulai pada tahun 1997 dengan tujuan strategis untuk desentralisasi dan penguatan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia (*to decentralize and strengthen natural resources management in Indonesia*). Dengan strategi tersebut diharapkan taraf hidup masyarakat pesisir dan kondisi sumberdaya pesisir dapat meningkat atau minimal dipertahankan (Proyek Pesisir 1998, 1999). Proyek ini mencoba menerapkan 3 model pendekatan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat, yaitu: (1) pengelolaan tingkat desa di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, (2) pengelolaan suatu kawasan ekologi Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, dan (3) pengelolaan wilayah administratif setingkat propinsi atau kabupaten di Lampung.

Fokus kegiatan utama Proyek Pesisir Lampung dalam tahun kedua (1999/2000) adalah melanjutkan tahapan proses pengelolaan setelah penyusunan profil pesisir propinsi yang disajikan dalam bentuk 'Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung' (Wiryawan *et al.*, 1999). Kegiatan tindak lanjut tersebut adalah (1) penyusunan dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir Lampung dan (2) penerapan contoh pengelolaan pesisir terpadu (*Integrated Coastal Management* ~ ICM) dalam bentuk kegiatan pengembangan tambak ramah lingkungan dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Kegiatan kedua yang dilaksanakan di Desa Pematang Pasir-Lampung Selatan merupakan upaya Proyek Pesisir untuk memberikan contoh kepada para *stakeholder* setempat. Oleh karena itu kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai pelaksanaan awal (*early actions*) dari implementasi rencana strategis yang berkaitan dengan penanganan masalah kerusakan hutan habitat mangrove.

Beberapa alasan pentingnya proses kegiatan percontohan tambak ramah lingkungan dan rehabilitasi mangrove ini didokumentasikan adalah sebagai berikut:

- Bagi suatu proyek yang bermaksud memperkenalkan penerapan konsep pengelolaan pesisir, adanya rangkaian atau tahapan kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan merupakan salah satu indikator kemajuan proyek. Adanya rencana kegiatan tersebut merupakan refleksi dari upaya intervensi di suatu lokasi agar tujuan proyek tercapai. Masyarakat di Desa Pematang Pasir,

menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pesisir Pantai Timur Lampung dalam bentuk kesiapan untuk menjadikan lahan pertambakan setempat sebagai areal percontohan tambak ramah lingkungan.

- Dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat serta pemerintah terhadap perlunya kelestarian sumberdaya dan usaha-usaha pemanfaatannya di berbagai desa pantai di Indonesia, pengalaman masyarakat desa Proyek Pesisir di Lampung, khususnya di Pantai Timur Lampung, perlu didokumentasikan dan disebarluaskan. Melalui upaya ini pengalaman Proyek Pesisir dapat dijadikan pelajaran oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan ataupun memfasilitasi pengelolaan sumberdaya pesisir.

Adapun kegiatan/tahapan pendokumentasian yang dilakukan oleh Learning Team IPB mencakup penyusunan proposal, perbaikan proposal, pertemuan persiapan, pengkajian dokumen-dokumen, pengamatan ke lapang, wawancara dan workshop (Sondita *et al.*, 1999 dan 2000).

2. ISU PENGELOLAAN PANTAI TIMUR

Propinsi Lampung, terletak di ujung tenggara Pulau Sumatera, memiliki garis pantai sepanjang 1.105 km (CRMP 1998a). Di kawasan pesisir tersebut telah teridentifikasi lebih dari 15 tipe habitat; diantaranya adalah habitat terumbu karang, padang lamun, pantai berpasir, mangrove dan termasuk juga perkotaan serta kawasan pertambakan (Wiryawan *et al.*, 1999). Ancaman lingkungan terbesar yang terjadi di kawasan pesisir Lampung adalah perubahan fungsi lahan, khususnya konversi kawasan mangrove menjadi areal pertambakan. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, hampir 90 % hutan mangrove di kawasan pantai timur telah berubah menjadi pertambakan dan reklamasi, dari 20.000 Ha menjadi 2.000 Ha (Wiryawan *et al.*, 1999). Di Kabupaten Lampung Timur, tepatnya sebelah selatan Taman Nasional Way Kambas, rawa-rawa dan hutan mangrove di sepanjang pantai mulai dari Tanjung Penet hingga Ketapang pada mulanya diubah menjadi lahan pertanian padi. Namun kemudian lahan pertanian tersebut diubah menjadi lahan usaha tambak udang windu. Sebagian besar tambak tersebut bersifat

tambak tradisional, yaitu dengan penerapan teknologi budidaya sederhana dan modal relatif kecil atau terbatas. Sisanya adalah tambak semi-intensif dan intensif yang menerapkan teknik budidaya yang lebih rumit dan membutuhkan modal yang relatif besar.

Selain pertambakan, bentuk pembangunan fisik di kawasan pantai timur Lampung adalah reklamasi untuk pembuatan polder Rawasragi dari Lampung Selatan sampai Lampung Tengah dan reklamasi Rawa Mesuji - Tulang Bawang - Pedada untuk pemukiman pola transmigrasi dan kemitraan swasta tambak inti rakyat. Pesatnya pembangunan di pantai timur ini tidak hanya menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, namun juga memberikan tekanan terhadap keberadaan dan kelestarian sumberdaya alam yang ada, dalam hal ini kawasan mangrove.

Ditinjau dari aspek sosial-ekonomi, konversi habitat mangrove menjadi pertambakan dan lahan untuk keperluan lain memberikan keuntungan yang cukup tinggi dalam jangka waktu pendek. Namun pembukaan tambak secara intensif dan berskala besar seringkali kurang dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam kegiatan pertambakan yang bersifat intensif dan semi intensif ini, peran dan partisipasi masyarakat umumnya hanya sebatas sebagai buruh dengan upah yang sangat murah. Kurangnya keterbukaan pengelolaan usaha dapat menimbulkan konflik antara petambak plasma dan perusahaan inti. Sebagian masyarakat yang terlibat menganggapnya sebagai suatu ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya alam bagi kesejahteraan mereka. Beberapa kasus konflik sosial terjadi di pertambakan inti rakyat Dipasena, Tulang Bawang.

Ditinjau dari aspek lingkungan, kegiatan ini memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap kawasan pesisir. Penggunaan bahan kimia dan pakan buatan dalam usaha tambak pola intensif dan semi intensif berhasil memberikan keuntungan besar dalam jangka waktu pendek sekitar 4-5 tahun (Putra, komunikasi pribadi). Setelah itu usaha pertambakan menjadi tidak optimum atau tidak produktif dan biasanya tambak-tambak tersebut akhirnya banyak yang ditelantarkan dan ditinggal begitu saja. Hal seperti ini banyak terjadi di sepanjang pantai utara Jawa. Penyebab utama kegagalan usaha pertambakan ini adalah akumulasi bahan-bahan pencemar dari limbah

pertambakan itu sendiri, wabah penyakit udang dan tercemarnya air laut yang digunakan tambak akibat industri di darat dan wilayah pesisir (Savitri dan Khazali 1999). Permasalahan lain yang timbul akibat perluasan lahan pertambakan lewat konversi kawasan mangrove di pantai timur adalah abrasi, khususnya di sekitar Labuhan Maringgai (Wiryawan *et al.*, 1999).

Dengan mempertimbangkan permasalahan di atas dan belum adanya penerapan pengelolaan pesisir secara terpadu (*integrated coastal management ~ ICM*) di Lampung serta adanya peluang yang baik untuk membangun kerjasama dengan instansi pemerintah setempat, Proyek Pesisir Lampung mencoba untuk mengembangkan suatu program untuk pengembangan tambak ramah lingkungan dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat secara terpadu.

3. KONSEP PROGRAM TAMBAK RAMAH LINGKUNGAN DAN REHABILITASI MANGROVE

Dasar pemikiran atau landasan berpijak tambak ramah lingkungan dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat adalah keberlanjutan (*sustainability*) usaha pertambakan, baik ditinjau dari aspek sosial-ekonomi maupun aspek

lingkungan hidup, dan bersifat merakyat. Sifat merakyat ini merupakan bentuk implementasi dari **k e b u t u h a n ,
kemampuan dan
k e s e p a k a t a n**

TAMBAK RAMAH LINGKUNGAN

Suatu bentuk usaha pertambakan yang tidak merusak lingkungan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam sekitarnya, bisa dilakukan oleh masyarakat, tidak menggunakan bahan-bahan yang akan mencemari lingkungan dan usaha pertambakan ini berlangsung terus menerus (berkesinambungan)

masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada. Dalam implementasi program ini, Proyek Pesisir Lampung dan mitra LSM-nya lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara masyarakat dan instansi pemerintah terkait serta memformulasikan suatu rencana atau program yang mengakomodasi pemikiran dan keinginan masyarakat.

REHABILITASI MANGROVE BERBASIS MASYARAKAT

Kegiatan penghijauan kembali jalur hijau pantai yang terlaksana atas inisiatif masyarakat berdasarkan kesepakatan mereka mulai dari penentuan lokasi, pelaksanaan penghijauan, pemeliharaan dan pengawasannya. Kesepakatan mereka tercakup dalam kesepakatan atau keputusan

Program ini bertujuan untuk:

✓ mengembangkan suatu bentuk pengelolaan pesisir terpadu dimana masyarakat menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan lahan

mangrove sebagai areal pertambakan secara berkelanjutan;

✓ menumbuhkan tanggung jawab masyarakat dengan cara meningkatkan kepedulian dan partisipasi mereka dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya alam di lingkungan mereka.

Dua strategi telah dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu:

- ♦ mengembangkan dan mencari teknik-teknik tepat guna yang tidak mengejar produksi dalam skala besar, namun lebih mementingkan kesinambungan usaha pertambakan dengan mempertimbangkan potensi, daya dukung dan kelestarian sumberdaya alam serta kemampuan sumberdaya manusia.
- ♦ membangun suatu mekanisme rehabilitasi dan perlindungan mangrove berbasis masyarakat dengan cara perbaikan dan rehabilitasi jalur hijau (*coastal green belt*) yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi tambak-tambak rakyat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tambak yang merupakan keinginan masyarakat.

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah terciptanya suatu contoh pola pengelolaan tambak ramah lingkungan dan kawasan jalur hijau berbasis masyarakat secara terpadu, yang merupakan aplikasi dari konsep pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat. Contoh pola pengelolaan ini diharapkan dapat diterapkan di kawasan lain di Lampung atau tempat yang memiliki sumberdaya alam dengan karakteristik hampir sama (komunikasi pribadi, Tim PSC, Juni 1999).

Dengan diselenggarakannya program ini, beberapa hasil yang diharapkan dari program ini adalah:

- ♦ peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan arti penting hutan mangrove dalam menunjang keberlanjutan usaha pertambakan mereka;
- ♦ peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggali potensi dan memahami isu serta permasalahan yang dihadapinya kemudian mengangkat hal tersebut sebagai teladan baik;
- ♦ peningkatan kemampuan masyarakat dalam memberikan pendapat dan argumentasi secara aktif dan berani;
- ♦ peningkatan kemampuan masyarakat dalam bermusyawarah dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan dalam penyempurnaan program bersama;
- ♦ peningkatan kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam menyusun, mengembangkan, menerapkan dan membudayakan program-program yang bersifat *sustainable* (berkelanjutan) dan ramah lingkungan ke dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari;
- ♦ peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat yang sejahtera melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan di lingkungan yang baik sesuai dengan fungsi-fungsinya.

4. TAHAPAN KEGIATAN

Proses kegiatan ini berkaitan erat dengan kegiatan Proyek Pesisir di tahun pertama yang diawali dengan kegiatan penyusunan profil sumberdaya wilayah pesisir Lampung (penyusunan atlas pesisir) yang mencakup identifikasi permasalahan atau isu dan *stakeholders*, penentuan prioritas masalah, perumusan konsep ICM, mencari peluang kerjasama dengan instansi/dinas dan membangun kerjasama dengan LSM. Pada tahun kedua, pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan pemilihan lokasi dan pelaksanaan awal (*early actions*). Kegiatan pelaksanaan awal ini mencakup pembentukan dan penyamaan persepsi anggota Tim Pantai Timur, sosialisasi kegiatan dan penggalian potensi dan kendala yang ada di lokasi, pelatihan PRA bagi anggota TPT dan studi banding. Pada tahun berikutnya (tahun ketiga), kegiatan-kegiatan sebelumnya diharapkan dapat ditindaklanjuti

dengan kegiatan penyusunan rencana pengelolaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi program.

4.1 Pemilihan desa lokasi percontohan

Proses pemilihan lokasi dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap pemilihan wilayah, tahap survei desa dan tahap penentuan desa. Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu dan potensi sumberdaya alam pesisir yang diperoleh dari kegiatan penyusunan profil, maka wilayah pesisir Lampung dibedakan menjadi 4 kelompok wilayah utama, yaitu Pantai Barat, Pantai Timur, Teluk Semangka dan Teluk Lampung. Dengan mempertimbangkan skala degradasi habitat mangrove dan tingkat kegiatan ekonomi cukup tinggi, Pantai Timur dipilih sebagai wilayah untuk lokasi percontohan. Selanjutnya, wilayah di antara Tanjung Penet dan Ketapang dipilih karena di sepanjang pantainya kegiatan tambak cukup padat. Di wilayah tersebut terdapat 9 desa dari dua kabupaten, Kabupaten Lampung Timur (Desa Karya Makmur, Karya Tani, Pasir Sakti, Purworejo, Mulyosari, dan Labuhan Ratu) dan Kabupaten Lampung Selatan (Desa Bandar Agung, Berunding dan Pematang Pasir).

KRITERIA PEMILIHAN DESA LOKASI PERCONTOHAN

- ♦ Sebagian besar tambak dimiliki oleh penduduk desa;
- ♦ Tambak yang ada menerapkan teknologi ekstensif dan/atau semi intensif

Setelah penentuan wilayah, serangkaian survei dilakukan dengan tujuan khusus untuk mengidentifikasi status pemilikan tambak dan kondisi dari kesembilan desa tersebut. Mengingat ada keterbatasan waktu, survei tersebut dilaksanakan dengan menerapkan metode *participatory rapid appraisal* (PRA). Kajian umum terhadap aspek-aspek ekologi, potensi sumberdaya alam dan sosial-ekonomi telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dan konsultan proyek dalam kegiatan penyusunan profil wilayah pesisir Lampung (Wiryawan *et al.*, 1999). Dalam survei ini masyarakat desa yang disurvei turut aktif dalam pengidentifikasian status pemilikan tambak. Tim survei bersama masyarakat membuat peta pemilikan lahan bersama masyarakat dalam kurun waktu yang singkat

PMILIHAN DESA CALON LOKASI

Ada beberapa kesamaan di antara kedua desa calon lokasi percontohan, yaitu 90 % lahan tambak dimiliki oleh penduduk desa, persentase pemilik hak garap penduduk asli desa tertinggi dan mereka menerapkan teknik budidaya tradisional plus. Adapun perbedaan di antara kedua terletak pada luasan tambaknya: luas tambak Desa Karya Tani sekitar tiga setengah kali luas tambak Desa Pematang Pasir.

Kedua desa ini diusulkan untuk dipilih oleh Tim Pengarah Propinsi pada tanggal 30 Juni 1999. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Lampung Selatan dan Sekwilda Lampung Timur, Bupati Lampung Selatan nampak sangat antusias dan sangat mengharapkan kegiatan ini dilaksanakan di wilayahnya dan berjanji akan memberikan dukungan penuh. Pada akhir diskusi ini Tim Pengarah Propinsi menentukan Desa Pematang Pasir sebagai lokasi kegiatan Proyek Pesisir, mengingat kesiapan Kabupaten Lampung Selatan baik dalam aspek organisasi pemerintah daerah maupun aspek pendanaan. Hal-hal lain yang juga menjadi bahan pertimbangan adalah telah terbentuknya kelompok petambak dan koperasi di Desa Pematang Pasir

(Gambar 1). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari survei dan kriteria yang telah ditentukan, akhirnya dua desa terpilih untuk diusulkan untuk menjadi lokasi percontohan. Kedua desa tersebut adalah Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Desa Pematang Pasir, Kecamatan Penengahan. Keterangan yang lebih rinci mengenai kedua desa tersebut dapat dilihat dalam Lampiran 1.

Kedua desa tersebut kemudian diusulkan dalam pertemuan Tim Pengarah Propinsi (*Provincial Steering Committee ~ PSC*) untuk memilih satu desa yang akan dijadikan lokasi percontohan. Dalam pertemuan tersebut terpilih Desa Pematang Pasir berdasarkan komitmen, kesiapan dan keinginan Pemerintah Daerah untuk pengembangan pengelolaan wilayah secara terpadu. Skema proses pemilihan lokasi dapat dilihat dalam Gambar 2.

T e r a k h i r diketahui bahwa pelaksanaan survei dalam rangka m e n d a p a t k a n informasi penting

Kurangnya sosialisasi dan penjelasan pada masyarakat dalam survei yang menerapkan metoda PRA dapat menimbulkan kecurigaan dari masyarakat sehingga informasi yang diberikan tidak akurat karena mereka mencoba menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

untuk pemilihan desa dengan metode ini ternyata kurang tepat karena waktu tersedia sangat singkat, termasuk waktu untuk sosialisasi kegiatan. Masyarakat yang terlibat dalam survei tidak memahami tujuan survei sehingga data yang mereka berikan adalah data yang kurang akurat. Seyogyanya tersedia waktu yang cukup untuk sosialisasi hingga tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap tim tidak ada kecurigaan sehingga masyarakat dapat memberikan data yang benar.

Akibat dari kekurangan tersebut, desa yang terpilih sebenarnya adalah desa yang kurang memenuhi kriteria. Untuk mengatasi hal ini, wilayah kegiatan didasarkan bukan hanya pada batas administratif, tetapi juga pada keterkaitan ekologis. Dengan demikian desa-desa yang bersebelahan dengan Desa Pematang Pasir, seperti Desa Berunding dan Sumbernadi, termasuk sebagai desa lokasi pelaksanaan awal dan penanganannya dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kesiapan warga desa.

4.2 Kegiatan pelaksanaan awal (*early actions*)

Pengertian pelaksanaan awal dalam konteks ini adalah serangkaian kegiatan yang mengawali suatu program jangka panjang. Program jangka panjang ini adalah pengelolaan tambak ramah lingkungan dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Pengertian pelaksanaan awal dalam konteks ini agak berbeda dari pemahaman Haryanto *et al.* (1999) karena isi rangkaian kegiatan tersebut tidak harus secara langsung berkaitan dengan masyarakat. Bentuk pelaksanaan awal di Pantai Timur Lampung mencakup komponen yang akan memfasilitasi masyarakat, seperti pembentukan Tim Pantai Timur (disingkat TPT), kegiatan penyamaan persepsi anggota tim serta pelatihan bagi fasilitator. Kegiatan pelaksanaan awal lainnya adalah sosialisasi kegiatan, penggalan isu atau permasalahan dan potensi desa yang berkaitan dengan pengembangan program serta studi banding.

Pembentukan tim dan penyamaan persepsi

Pelaksanaan kegiatan di Pantai Timur Lampung difasilitasi oleh Tim Pantai Timur. Awal pembentukan tim adalah keterlibatan anggota tiga lembaga swadaya masyarakat dalam survei awal penentuan lokasi, yaitu LPSM Yasadhana, Yayasan Mitra Bentala dan Yayasan Alas Indonesia. Selanjutnya

ketiga LSM ini bersama dengan staf Proyek Pesisir Lampung menjadi anggota tim pelaksana kegiatan

yang disebut dengan Tim Pantai Timur setelah penandatanganan kesepakatan (*Memorandum of Understanding* ~ MOU) antara Proyek Pesisir dengan ketiga lembaga tersebut pada tanggal 8 Juli 1999. Kesepakatan tersebut berisi kerangka kerjasama dimana setiap lembaga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Untuk memperkuat tim ini, khususnya aspek teknis perikanan budidaya, seorang pakar akuakultur dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor ditunjuk Proyek Pesisir untuk mendampingi para anggota tim.

Proyek Pesisir melihat bahwa peran dan keterlibatan LSM setempat dalam kegiatan ini sangat penting mengingat Proyek Pesisir mempunyai jangka waktu operasional terbatas. Proyek Pesisir menyadari bahwa sangat mustahil untuk menanamkan suatu konsep pengelolaan pesisir terpadu kepada masyarakat daerah dalam waktu singkat. Oleh karena itu Proyek Pesisir Lampung berusaha untuk menyebarluaskan konsep tersebut kepada sebanyak mungkin lembaga dan instansi baik pemerintah maupun non

ANGGOTA TIM PANTAI TIMUR

- Hermawati Puspitasari (Proyek Pesisir)
- Wandoyo (Mitra Bentala)
- Venny Marlinda dan Ivan Rayendra Bahar (Alas Indonesia)
- Yusuf Kriswardi (Yasadhana)

PENTINGNYA LSM TERLIBAT DALAM KEGIATAN PROYEK PESISIR

- Keterbatasan Proyek Pesisir Lampung (misalnya dalam hal waktu) dapat diatasi oleh LSM lokal;
- Kegiatan LSM umumnya langsung bersentuhan dengan masyarakat luas (*grass root community*);
- Keragaman komposisi anggota LSM memberikan kemudahan mereka untuk melakukan kontak dengan masyarakat yang terstruktur (terdapat pemisahan pria dan wanita);
- LSM dapat berperan sebagai fasilitator masyarakat sekaligus penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

pemerintah. Selain itu, keterlibatan LSM ini strategis karena umumnya kegiatan LSM langsung bersentuhan dengan seluruh lapisan masyarakat luas, termasuk dalam kategori masyarakat *grass root*. Efektifitas penyebaran konsep tersebut kepada masyarakat dapat diandalkan dari kekerjasamanya dengan LSM. Saat proyek berakhir, kegiatan yang telah dirintis ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh masyarakat dalam pengertian luas.

Ketiga LSM tertarik untuk bekerjasama dengan Proyek Pesisir karena mereka ingin berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan wilayah pesisir yang selama ini masih belum banyak disentuh oleh LSM. LSM berharap dapat berperan sebagai fasilitator dan jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Sosialisasi kegiatan yang melibatkan anggota LSM di antara masyarakat Pematang Pasir yang mayoritas beragama Islam sangat berarti.

Sosialisasi kegiatan

Selain penyamaan persepsi dan juga pengembangan kapasitas melalui kegiatan pelatihan, pada saat yang bersamaan TPT bersama dengan tenaga pendamping mensosialisasikan program dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi. TPT juga mencoba membina kerjasama dengan instansi pemerintah terkait. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dalam bentuk diskusi-diskusi dengan masyarakat dan pejabat-pejabat instansi pemerintahan.

Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar keberadaan TPT dapat diterima dengan baik dan menjadikan program ini sebagai program masyarakat sendiri. Kegiatan ini dilakukan melalui suatu pertemuan formal, baik yang difasilitasi oleh TPT maupun yang memanfaatkan pertemuan rutin yang sudah ada,

TUJUAN SOSIALISASI KEGIATAN

- Memperkenalkan dan menjelaskan peran dan kegiatan TPT;
- Menumbuhkan kepercayaan masyarakat;
- Menumbuhkan partisipasi masyarakat;
- Membangun dukungan masyarakat;
- Menumbuhkan rasa memiliki masyarakat;

Dalam tahap sosialisasi ini, seorang warga mengusulkan dirinya untuk menjadi anggota TPT atas nama Proyek Pesisir. Alasannya adalah pengalaman dia sebagai warga setempat dapat dengan mudah berkomunikasi dengan masyarakat dan bidang keahlian yang dimilikinya, dia seorang sarjana perikanan. Masyarakat desa pada umumnya mudah menerima inovasi dengan setelah ada contoh keberhasilan yang dibuat warga setempat. Oleh karena itu dia juga mengusulkan agar tambaknya dijadikan contoh oleh Proyek Pesisir dan TPT. Dia ingin menerapkan dan mengembangkan keahliannya di desanya jika hal ini memberikan prospek kehidupan yang layak. Namun karena beberapa alasan teknis, usulan ini belum dapat terwujud. Usulan inisiatif warga setempat seperti ini tampaknya patut untuk dipertimbangkan.

seperti pertemuan kelompok pengajian (Yasinan) yang ada di setiap dusun. Melalui pertemuan-pertemuan ini, TPT mudah untuk menjumpai *key person* sebagai pihak yang dapat diandalkan dalam proses identifikasi potensi dan isu desa. Proses sosialisasi ini berlangsung terus hingga masyarakat benar-benar memahami peran dan kegiatan TPT di desa mereka.

Pelatihan bagi Tim Pantai Timur

Setelah pembentukan dan anggotanya menyamakan persepsi, tahap berikutnya adalah pembangunan kapasitas (*capacity building*) TPT melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. Ada dua jenis pelatihan yang diikuti oleh anggota TPT, yaitu pelatihan teknis budidaya udang windu (pembenihan dan pembesaran) dan pelatihan metode survei dengan *Participatory Rapid Appraisal* (PRA). Melalui pelatihan budidaya udang windu para anggota tim diharapkan dapat mengenali berbagai aspek budidaya udang sebagai bekal pengetahuan pada saat berhubungan dengan petani tambak. Pelatihan budidaya udang ini dilaksanakan pada tanggal 1-4 Juli 1999 di Bandarlampung dan Kalianda. Peserta pelatihan diajak untuk melihat langsung usaha pembenihan dan pembesaran udang skala besar (intensif) dan skala kecil (ekstensif dan semi intensif).

Melalui pelatihan PRA para anggota tim diharapkan memahami dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan PRA (Lampiran 2). Manfaat

yang dirasakan oleh peserta pelatihan terutama adalah tambahan wawasan tentang cara pendekatan kepada masyarakat agar informasi dapat diperoleh dengan baik. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan selama 3 hari ini dapat dilihat dalam laporan yang dibuat oleh Marsden and Marsden (1999).

Penggalan potensi dan isu desa

Setelah pelatihan, TPT melaksanakan kegiatan penggalan potensi dan isu desa dengan cara pengumpulan data dari tingkat rumahtangga (KK). Data yang dikumpulkan dari tingkat rumahtangga tersebut adalah tentang aspek kependudukan, tingkat pendidikan, pekerjaan, asal daerah dan pemanfaatan lahan. Pelaksanaan pengumpulan data ini dibantu oleh Kepala Dusun dan Ketua RT/RW setempat. Sebelum pendataan dilaksanakan, pertemuan dilaksanakan untuk menjelaskan tujuan pendataan dan cara pengisian daftar pertanyaan.

Penggalan isu desa dilakukan melalui wawancara informal terstruktur tentang bidang pertanian dan pertambakan yang menjadi mata pencaharian utama di wilayah Pematang Pasir. Survei juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang ada dan kegiatannya di masyarakat. Data kelompok ini diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat aktifitas masyarakat sebagai pertimbangan untuk kegiatan penguatan kelembagaan. Informasi yang terkumpul dari survei tersebut akan disajikan dalam sebuah dokumen yang disebut profil desa. Secara umum, sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat desa dapat dibedakan menjadi masalah pertanian dan masalah pertambakan. Masalah pertanian mencakup:

- air tawar untuk tanaman padi tidak cukup tersedia;
- status lahan yang masih belum jelas;
- penyuluhan pertanian masih kurang;
- pola atau musim tanam yang tidak serempak;
- modal untuk usaha pertanian maupun usaha lain masih kurang;
- standar harga produksi pertanian yang jelas belum ada.

Sedangkan masalah pertambakan mencakup:

- abrasi pantai akibat rusaknya hutan mangrove;
- belum ada pengaturan saluran air masuk dan keluar;

- menanggulangi penyakit udang masih sulit;
- fasilitas untuk mengukur kualitas air tambak, khususnya salinitas air laut, masih kurang;
- status lahan pertambakan tidak jelas.

Selain penggalan data dasar tentang potensi desa dan isu, survei ini juga mencakup penggalan tentang sejarah desa (Lampiran 4). Dari penggalan sejarah desa ini proyek ingin melihat perubahan struktur masyarakat, karakter masyarakat terhadap perubahan Desa Pematang Pasir sejak awal pembukaan lokasi hutan di tahun 1970-an hingga terbentuknya tambak-tambak rakyat.

Informasi yang terkumpul kemudian dicek kebenarannya melalui proses verifikasi. Tujuan verifikasi ini adalah untuk mendapatkan kesamaan persepsi antara masyarakat dan TPT mengenai informasi yang terkumpul. Setelah itu bersama anggota masyarakat permasalahan yang teridentifikasi disusun urutan prioritas penanganannya untuk penyusunan program kegiatan. Penyusunan prioritas ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tingkat dusun kemudian ke tingkat desa. Dalam kegiatan ini TPT menjelaskan hasil identifikasi isu yang ditulis dikertas plano dan meminta pendapat masyarakat mengenai isu-isu tersebut, apakah ada perbedaan persepsi atau masih ada informasi yang kurang.

Kronologis sejarah desa Pematang Pasir sudah dipresentasikan kepada para perintis desa dan tokoh masyarakat pada tanggal 20 Juli 1999, pukul 19.00 WIB – selesai, bertempat di rumah Bapak Satiman, Kepala Desa Pematang Pasir. Dengan melihat perubahan sejarah masyarakat ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan dalam rangka memecahkan berbagai konflik yang ada, dalam mempermudah penyusunan perencanaan dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan pesisir desa Pematang pasir secara terpadu dan berbasis masyarakat.

Studi banding

Untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, khususnya pengelolaan mangrove, suatu kegiatan studi banding ke daerah-daerah tertentu dilaksanakan sebelum melaksanakan aktifitas pengelolaan mangrove. Proyek Pesisir Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan BAPPEDA Propinsi Lampung mengadakan kegiatan studi banding ke pantai utara Jawa. Tujuan dari kegiatan ini adalah melihat langsung dan mendiskusikan contoh-contoh pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, khususnya pengelolaan mangrove yang berhasil di Jawa dengan rekan-rekan di Jawa, sebagai bahan pertimbangan untuk penerapan di Propinsi Lampung. Lokasi studi banding adalah Indramayu, Pemalang, Jepara dan Probolinggo. Peserta studi banding ini tidak hanya pejabat-pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Propinsi Lampung, tetapi juga mencakup anggota masyarakat Desa Pematang Pasir, Sumbernadi dan Berundung (Laporan Hasil Studi Banding ke Jawa, 1999).

Studi banding ini memberikan pemahaman baru pada peserta khususnya masyarakat desa akan pentingnya hutan mangrove sebagai pelindung lahan yang mereka miliki. Hal ini terlihat dari pendapat dan ide yang muncul saat diskusi dalam pertemuan tindak lanjut yang diadakan pada tanggal 3 Pebruari 2000. Gagasan dari masyarakat antara lain perlunya segera membuat rencana pembuatan kesepakatan masyarakat mengenai rehabilitasi hutan mangrove dan pengelolaanya. Sebagai langkah awal, dalam pertemuan tersebut disepakati untuk melaksanakan survei ke wilayah pantai Desa Pematang Pasir untuk mengidentifikasi wilayah yang diperkirakan dapat direhabilitasi. Dari survei ini diketahui adanya lahan timbul yang sebagian sudah ditumbuhi api-api dan adapula lahan tambak yang sudah digarap pemiliknya.

Hasil survei ini segera ditindak lanjuti dalam pertemuan dengan aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat dari tiap dusun pada tanggal 12 Maret 2000. Dalam pertemuan ini ditentukan bahwa lahan timbul adalah lahan yang dapat segera direhabilitasi, sedangkan untuk lahan tambak yang berbatasan langsung dengan laut akan diupayakan untuk dapat dilepaskan

oleh pemiliknya melalui proses negosiasi yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Bila ternyata pemilik tambak berkeberatan maka akan dibuat kesepakatan yang ditandatangani oleh masyarakat yang akan digunakan sebagai aturan dalam pengelolaan hutan mangrove. Setelah kesepakatan dibuat direncanakan untuk membuat proposal kepada pemerintah daerah untuk kegiatan rehabilitasi jalur hijau (*green belt*).

4.3 Kendala-kendala

Kendala yang dijumpai di awal pelaksanaan program ini adalah persepsi masyarakat bahwa kegiatan program ini akan memberi bantuan baik dalam bentuk fisik dan dana. Setelah dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan untuk pengelolaan wilayah pesisir, pada mulanya mereka sedikit kecewa. Namun setelah dijelaskan tujuan dan manfaat kegiatan ini bagi masyarakat di masa yang akan datang, dukungan masyarakat kembali tumbuh. Sosialisasi kegiatan dan pendekatan kepada masyarakat secara kelompok maupun personal sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Kendala lain yang ditemui adalah munculnya kesulitan untuk menyesuaikan kegiatan masyarakat dengan kegiatan pemerintah daerah. Di sinilah pentingnya peranan fasilitator untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai mekanisme perencanaan kegiatan pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat menerima dan menyesuaikan dengan program mereka. Suatu kegiatan pemerintah daerah seyogyanya mempertimbangkan situasi dan kondisi serta keinginan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam pengembangan program, perbedaan pendekatan dan pola penanganan masalah di antara Proyek Pesisir dan LSM merupakan sebuah kendala lain dalam pelaksanaan kegiatan di lapang. LSM umumnya langsung menangani permasalahan berdasarkan informasi dari masyarakat. Data kuantitatif yang biasanya dibutuhkan sebagai dasar perencanaan belum dianggap penting sekali. Hal ini terjadi karena program-program LSM pada umumnya berdiri sendiri dan tidak terkait dengan program-program pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan prinsip pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang menekankan pentingnya kerjasama di antara semua pihak

terkait untuk menangani satu permasalahan wilayah pesisir. Sedangkan Proyek Pesisir Lampung melakukan pencarian data dan informasi sebelum melakukan respons atau tindakan penanganan. Data kuantitatif dan kualitatif sangat penting untuk meyakinkan berbagai pihak.

5. TINDAK LANJUT KEGIATAN DI TAHUN KETIGA

Setelah beberapa kegiatan pelaksanaan awal diharapkan dalam tahun ketiga dapat ditindaklanjuti dengan program penyusunan rencana pengelolaan, pelaksanaan program serta monitoring dan evaluasi. Dalam tahun ketiga masyarakat diharapkan mampu menyusun rencana program pengelolaan tambak ramah lingkungan dan rehabilitasi mangrove. Penyusunan rencana program ini didasari pada hasil identifikasi masalah serta penggalian informasi dasar dengan persetujuan masyarakat yang difasilitasi oleh TPT, konsultan pendamping dan juga dukungan serta koordinasi dari sektor pemerintah terkait. Meskipun penyusunan program rencana pengelolaan ini dilakukan oleh masyarakat, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan sektor pemerintah terkait. Dalam kegiatan Pengembangan tambak ramah lingkungan ini program monitoring yang dilakukan dapat dikategorikan dalam monitoring dari kegiatan lapang misalnya dalam penerapan pola tambak ramah lingkungan dan program penanaman mangrove oleh masyarakat. Pengertian monitoring lainnya yaitu monitoring terhadap program ini secara keseluruhan untuk melihat tingkat keberhasilan dari program ini.

Dalam rangka monitoring kegiatan lapang direncanakan akan lebih ditekankan pada masyarakat, dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan ini dengan membuat kesepakatan-kesepakatan desa dalam pengelolaan pesisir (misalnya perlindungan jalur hijau) dan pola tambak yang disepakati bersama. Hasil kesepakatan ini yang diharapkan akan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam memonitor dan juga mengevaluasi kegiatan-kegiatan mereka. Sedangkan monitoring program secara keseluruhan akan dilakukan baik oleh proyek pesisir, instansi pemerintah terkait, LSM dan juga learning team. Salah satu metoda dengan melihat perubahan yang terjadi dengan jalan membandingkan dengan lokasi yang tidak mendapat perlakuan namun

memiliki kondisi awal yang tidak terlalu jauh berbeda. Alternatif lainnya membandingkan dengan lokasi yang menjadi proyek dinas perikanan dengan batuan dari OECF (*kepanjangannya apa?*) dimana dalam kegiatan ini Proyek Pesisir berperan sebagai mitra dalam bentuk konsultatif.

6. PELAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL (*LESSONS LEARNED*)

Pelaksanaan penerapan PRA

Penerapan metoda PRA dalam mengumpulkan data dan informasi yang akan digunakan untuk menentukan desa lokasi percontohan harus hati-hati, khususnya tentang kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi. Kesiapan masyarakat ini akan mempengaruhi kualitas data dan informasi yang akan diterima. Persiapan yang baik seyogyanya dilakukan dengan mengalokasikan waktu yang cukup. Persiapan tersebut mencakup mempersiapkan masyarakat untuk memahami tujuan kegiatan survei, kaitan antara survei dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Persiapan ini dapat dalam bentuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari penentuan lokasi, sehingga masyarakat akan memahami program sejak awal, menumbuhkan rasa percaya masyarakat tanpa curiga terhadap tim proyek, membangkitkan semangat dan rasa memiliki terhadap program-program

Manfaat pelaksanaan survei dengan metode PRA seawal mungkin:

- ◆ Memperkenalkan program sejak awal kepada masyarakat;
- ◆ Menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat;
- ◆ Menumbuhkan semangat dan rasa memiliki;
- ◆ Menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap maksud intervensi proyek sebagai pihak luar;

Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan survei dengan metode PRA

- ◆ Maksud dan tujuan PRA perlu dijelaskan secara jelas;
- ◆ Rasa saling percaya antara masyarakat dan fasilitator perlu ditumbuhkan;
- ◆ Tersedia waktu yang cukup untuk penyampaian tujuan/sosialisasi;

yang akan dikembangkan. Pembuatan peta lokasi kepemilikan tambak dengan melibatkan masyarakat secara langsung menghilangkan kecurigaan mereka terhadap anggapan bahwa pihak luar datang untuk menguasai atau mengambil alih lahan mereka.

Namun dengan keterbatasan waktu dan kurangnya sosialisasi tujuan dari survei mengakibatkan terjadi salah pengertian antara masyarakat dan tim penggali data. Masyarakat menaruh curiga pada tim penggali data, karena ada dugaan oleh masyarakat akan adanya pengambil alihan ataupun pemberian sertifikat masal lahan tambak. Hal ini dikarenakan penduduk belum mengerti secara jelas tujuan dari penggalan data-data tersebut, dan juga timbul rasa curiga, yang akhirnya masyarakat akan memberikan data yang didasari pada kepentingan sendiri untuk ‘penyelamatan diri’.

Penentuan desa lokasi percontohan

Selain melibatkan masyarakat, proses penentuan desa lokasi percontohan perlu melibatkan pemerintah daerah (Kepala Pemerintahan Wilayah, kepala-kepala dinas dan lain lain). Keterlibatan dan partisipasi pemerintah ini sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program. Cermin kesungguhan pemerintah ini selanjutnya akan menumbuhkan semangat, komitmen dan kepercayaan diri masyarakat dalam mendukung terlaksananya program-program yang diinginkannya.

Pembentukan Tim Pantai Timur

Komposisi anggota tim yang akan melakukan kontak dengan masyarakat perlu memperhatikan aspek gender. Hal ini penting terutama jika tim akan berhubungan dengan kelompok masyarakat yang memisahkan laki-laki dan perempuan dalam aktivitas religiusnya. Fasilitator wanita menghadapi kesulitan sulit untuk bersosialisasi dengan kelompok pria di desa. Pada siang hari kaum pria umumnya pergi bekerja baik di sawah, tambak ataupun berdagang. Fasilitator wanita agak sulit untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan kaum pria tersebut. Pada sore dan malam hari, masyarakat biasanya melakukan kegiatan pengajian dimana antara kaum wanita dan pria terpisah. Oleh karena itu, efektifitas dan efisiensi kegiatan

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING SEPERTI TPT

- ◆ Komposisi gender anggota tim;
- ◆ Kesamaan visi dan misi sesama anggota;
- ◆ Anggota memahami budaya dan adat masyarakat setempat;
- ◆ Anggota mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat di desa;
- ◆ Anggota memiliki pengetahuan yang memadai dalam memfasilitasi masyarakat;
- ◆ Anggota bersedia dilatih dan dapat dilatih untuk menambah pengetahuan yang relevan dengan tujuan pengembangan program;
- ◆ Anggota sabar dan mau mendengar serta belajar dari masyarakat;
- ◆ Anggota memiliki komitmen untuk berpartisipasi kapan saja;
- ◆ Anggota mendapat dukungan dari keluarga, dan menempatkan kepentingan didesa diatas kepentingan keluarga;
- ◆ Anggota memiliki inisiatif dan bersifat, kreatif dan jujur

pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator wanita relatif rendah untuk berkomunikasi dengan kaum pria. Padahal jenis pertemuan masyarakat seperti ini merupakan forum yang baik untuk mensosialisasikan program. Selain faktor gender, anggota tim seyogyanya memiliki kapasitas untuk dapat memahami budaya dan bahasa masyarakat setempat.

Kesamaan persepsi di antara anggota tim tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan proyek sangat menentukan kelancaran pencapaian tujuan pembentukan tim. Perbedaan persepsi di antara anggota tim akan dapat membingungkan dan juga menimbulkan salah pengertian masyarakat yang menjadi target pendampingan. Sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran dan keberhasilan kegiatan tersebut.

Sosialisasi tim dan kegiatannya

Meskipun kegiatan sosialisasi sebenarnya sudah diawali pada saat kegiatan penentuan lokasi, namun sosialisasi seyogyanya tidak berhenti setelah satu tahap kegiatan terlaksana. Dengan kata lain kegiatan sosialisasi sebaiknya harus terus menerus hingga masyarakat benar-benar memahami proses pelaksanaan program dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi disamping berfungsi untuk menjelaskan tujuan kegiatan kepada

masyarakat luas, juga dapat berfungsi sebagai media untuk membangun kontak dengan tokoh-tokoh kunci (*key persons*), yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, dan menemukan berbagai permasalahan atau isu yang terjadi dalam masyarakat. Kepala desa, pemuka adat dan agama ini sangat penting untuk dihubungi dan dilibatkan dalam menciptakan kelancaran komunikasi antara fasilitator dengan masyarakat. Dalam komunikasi ini seyogyanya terbentuk pula dukungan dan komitmen dari para tokoh masyarakat tersebut untuk mendukung program ini.

Beberapa hal penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah tujuan kegiatan dan manfaatnya bagi masyarakat serta peran fasilitator atau tim pendamping dalam kegiatan tersebut. Hal ini sangat penting agar tidak timbul salah paham dan menjadikan masyarakat tidak terlalu tergantung kepada TPT. Masyarakat harus disiapkan agar mereka menyadari bahwa keberadaan TPT di lokasi hanyalah untuk sekedar membantu dan mendampingi mereka. Keseluruhan dari kegiatan akan dikembangkan haruslah mencerminkan keinginan masyarakat setempat. Tim pendamping lebih berperan sebagai pihak yang menjelaskan dan memberikan pemahaman sekaligus memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang manfaat kegiatan dan kontribusi yang perlu disiapkan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.

Studi banding

Studi banding sangat efektif untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas (*capacity building*) perorangan maupun tim, membuka wawasan, serta merangsang tumbuhnya ide-ide masyarakat untuk mengatasi permasalahannya.

7. PENUTUP

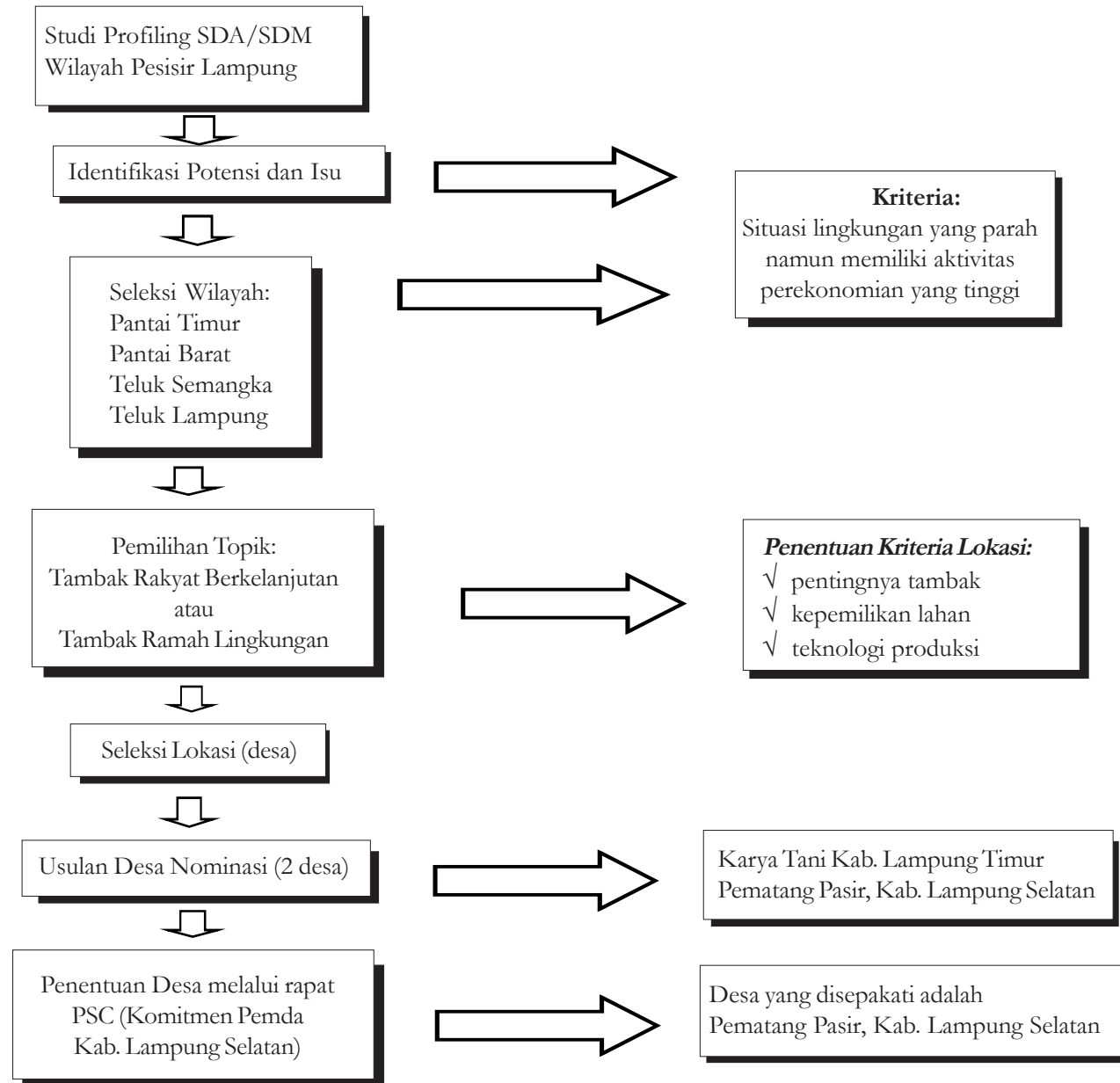
Apakah program ini dapat dikatakan program sudah membawa hasil? Tampaknya masih terlalu dini untuk tiba pada kesimpulan tersebut. Pengelolaan pesisir terpadu bukan hanya berurusan dengan sumberdaya alam. Namun lebih dari itu karena pengelolaan ini berkaitan dengan perubahan tingkah laku, cara pandang, pola hidup dari para *stakeholders* dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang menjadi perhatiannya. Pengelolaan pesisir terpadu adalah suatu proses dalam seni mengelola sumberdaya alam. Keberhasilan suatu pengelolaan yang berbasis masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Pengalaman dari setiap proses dari tahapan-tahapan pengelolaan pesisir terpadu adalah sangat berharga bagi pengembangan pengelolaan pesisir terpadu di tempat lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan Venny dan Ivan dari Alas Indonesia, Yusuf dari Yasadhana), Wandoyo dan Herza dari Mitra Bentala, bapak-bapak dari instansi-instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan beserta aparat desa dan masyarakat Desa Pematang Pasir atas bantuan dan kemudahan-kemudahan serta informasi yang diberikan untuk kegiatan pendokumentasian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- CRMP. 1998a. *Laporan penyelidikan geologi daerah pesisir Pantai Propinsi Lampung*. Technical Report CRMP Lampung. Bandar Lampung.
- CRMP. 1998b. *Profil habitat perairan pantai Propinsi Lampung*. Technical Report CRMP Lampung. Bandar Lampung.
- Haryanto, B., M.F.A. Sondita, N.P. Zamani, A. Tahir, Burhanuddin, J. Tulungen, C. Rotinsulu, A. Siahainenia, M. Kasmidi, E. Ulaen dan P. Gosal. 1999. *Kajian terhadap konsep early action Proyek Pesisir Sulawesi Utara*. Dalam Sondita, M.F.A, Burhanuddin, N.P. Zamani, B. Haryanto dan A. Tahir (editors). 1999. Pelajaran dari pengalaman Proyek Pesisir 1997-1999. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir, Bogor, 1 Maret 1999. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor, Bogor dan Proyek Pesisir-Coastal Resources Management Project, Coastal Resources Center-University of Rhode Island-Narraganset. p. 5-27.
- Marsden, B. and E. Marsden. 1999. *Laporan kegiatan TOT / Pelatihan untuk Tim Pantai Timur di Pematang Pasir Lampung Selatan*. Proyek Pesisir Lampung, Bandarlampung. 22 pp.
- Proyek Pesisir. 1998. *Year two workplan (April 1998 - March 1999)*. Coastal Resources Management Project, Jakarta. 49p.
- Proyek Pesisir. 1999. *Year three workplan (April 1999 - March 2000)*. Coastal Resources Management Project, Jakarta. 101p.
- Savitri, L.A. dan M. Khazali. 1999. *Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir: Pengalaman pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi mangrove di Indramayu*. Wetlands International, Indonesia Programme. 30 pp.
- Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, B. Haryanto, A. Tahir dan Burhanuddin. 1999 *Proses Kerja Learning Team pada Tahun 1998/1999 dalam Kegiatan Pendokumentasian Proyek Pesisir*. Dalam Sondita, M.F.A, Burhanuddin, N.P. Zamani, B. Haryanto dan A. Tahir (editors). 1999. Pelajaran dari pengalaman Proyek Pesisir 1997-1999. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir, Bogor, 1 Maret 1999. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor, Bogor dan Proyek Pesisir-Coastal Resources Management Project, Coastal Resources Center-University of Rhode Island-Narraganset. p. 1-4
- Tim Pantai Timur. 1999a. Rekapitulasi hasil kegiatan Tim Pantai Timur, Agustus 1999. 1pp.
- Tim Pantai Timur. 1999b. Notulensi yasinan bapak-bapak masyarakat Pematang Pasir, diwakili Dusun Rejosari I dan Rejosari II, Agustus 1999. 4pp.
- Tim Pantai Timur. 1999c. *Rencana kegiatan Tim Pantai Timur periode Agustus-Desember 1999*. 3p.
- Wiryawan, B., B. Marsden, H.A. Susanto, A.K. Mahi, M. Ahmad, H. Poespitarsari (editors). 1999. *Lampung Coastal Resources Atlas*. Government of Lampung Province and Coastal Resources Management project (Coastal Resources Studies, University of Rhode Island and Centre for Coastal and Marine Resources Studies, Bogor Agricultural University), Bandar Lampung. Indonesia. 109 pp.
- Wiryawan, B., B. Marsden, I.M. Dutton. 1999. Atlas sumberdaya wilayah pesisir Lampung: suatu hasil dan proses. Jurnal Pesisir dan Lautan 2(3):27-41.
- Zamani, N.P. dan Darmawan. 1999. *Pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan - Institut Pertanian Bogor. Materi Pelatihan ICM (*Integrated Coastal Management*). PKSPL-IPB, Bogor.



Gambar 1. Skema proses pemilihan lokasi

Lampiran 1. Karakteristik desa Karya Tani dan Pematang Pasir yang diusulkan Tim Pantai Timur kepada *Provincial Steering Committee* sebagai calon desa lokasi pengembangan tambak ramah lingkungan dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat secara terpadu

A. Desa Karya Tani

Informasi dasar:

- Sebagian besar penduduk (90%) adalah penduduk yang tinggal dan menetap di desa.
- Total luas tambak 473, 97 ha yang terdiri dari tambak alih fungsi (303,40 ha) dan tambak register 15 (170,57 ha); rincian status pemilikan dan pengelolaan tambak adalah sebagai berikut:

Jenis tambak	Luas tambak yang dimiliki atau digarap penduduk desa	Luas tambak yang dimiliki atau digarap penduduk luar desa
Tambak alih fungsi	271,40 ha (HG)	30 ha (HG) dan 2 ha (disewa)
Tambak register 15	147,57 ha (digarap)	21 ha (digarap)

Keunggulan desa:

- Pemimpin informal mendapat kepercayaan besar dari masyarakat (Pesantren Madinah);
- Masuknya Desa Karya Tani kedalam Kabupaten Lampung Timur yang baru dibentuk memungkinkan Proyek Pesisir untuk memperluas kegiatan ke kabupaten lainnya mengingat Proyek Pesisir telah melakukan kegiatan di Teluk Lampung (Kabupaten Lampung Selatan);
- Ada peluang untuk memadukan kegiatan antar instansi pemerintah dalam rangka penerapan konsep pengelolaan pesisir terpadu;
- Ada kesempatan untuk membuktikan keunggulan pola pelaksanaan kegiatan proyek yang mengakomodasi partisipasi masyarakat dengan kepentingan pemerintah daerah;
- Tersedia tambak seluas 400 ha yang siap digarap sebagai percontohan agar banyak petambak lain meningkat kepedulian dan perhatiannya.

Kelemahan:

- Permasalahan yang ada terlalu kompleks dan semakin berat dengan adanya proyek pemerintah daerah yang jika akan dilaksanakan tanpa transparansi dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;
- Besarnya luasan tambak dapat menyulitkan kegiatan pengawasan.

B. Desa Pematang Pasir

Informasi dasar:

- 90 % petambak adalah penduduk asli dan tinggal di desa;
- Total luas tambak 123,75 ha, dengan rincian 110,75 ha adalah milik penduduk desa dan 13,00 ha milik penduduk luar desa.

Keunggulan desa:

- Para petambak sudah bergabung dalam sebuah koperasi, sebuah indikasi bahwa para petambak sudah kerjasama;
- Keberadaan Desa Pematang Pasir dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan memungkinkan Proyek Pesisir untuk memfokuskan kegiatannya telah ada dukungan konkrit Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk melaksanakan kegiatan Proyek Pesisir di Teluk Lampung yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kotamadya Bandarlampung;
- Tidak ada proyek pemerintah daerah di wilayah ini memudahkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat karena LSM dan masyarakat yang akan terlibat;
- Kesempatan untuk membuktikan kekuatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilaksanakan oleh LSM;
- Luas tambak yang 'hanya' 133 ha akan memudahkan kegiatan pengawasan.

Kelemahan:

- Luas tambak yang tidak terlalu besar mengurangi kesempatan untuk petambak lain untuk meningkatkan kesadaran.
- Sulit untuk membuat suatu contoh sesuai dengan konsep pengelolaan pesisir terpadu karena hanya Proyek Pesisir Lampung dan LSM yang bekerja tanpa

Lampiran 2. Materi pelatihan metode survei dengan pendekatan *Participatory Rapid Appraisal* yang diikuti oleh anggota Tim Pantai Timur

Tujuan	Metode pelatihan
Hari pertama	
Sesi 1: Perkenalan Berbagi pengalaman terhadap cara memperkenalkan diri dalam satu kelompok Wawancara diantara 2 orang selama 2½ menit setiap orangnya untuk mencari informasi tentang diri masing-masing	Wawancara diantara 2 orang selama 2½ menit setiap orangnya untuk mencari informasi tentang diri masing-masing
Sesi 2: Menggarap harapan dan pengalaman - Mencari dan membuaat evaluasi beberapa cara menggarap perkenalan - Menjelaskan pada diri sendiri apa faktor-faktor yang dibutuhkan untuk menjadi seorang fasilitator yang baik	Satu fasilitator membuat daftar harapan dari setiap peserta pada waktu memperkenalkan diri <i>Brain storming</i> tentang apa yang harus disiapkan agar menjadi fasilitator yang baik untuk membantu TPT, kemudian dilanjutkan dengan mengurutkan tingkat kepentingannya (penyusunan ranking atau urutan prioritas)
Sesi 3: Membuat masalah menjadi lebih mudah untuk dipecahkan Meneliti permasalahan yang dihadapi TPT	<i>Problem tree analysis</i> (analisis pohon masalah)
Hari kedua	
Sesi 1: Robot/controller Fokus pada kekuasaan	Memanfaatkan permainan <i>role play</i> 'robot'
Sesi 2: Matrik ranking faktor-faktor yang dibutuhkan untuk menjadi fasilitator yang baik (prioritasi dari hasil brain storming di hari pertama) Menghasilkan daftar prioritas kebutuhan bagi seorang fasilitator yang baik	Memanfaatkan matrik ranking
Sesi 3: Sabotase Fokus terhadap hambatan dalam komunikasi	Memanfaatkan permainan <i>role play</i> 'sabotase'

Sesi 4: Kompromi: gelas ke dapur dll. Memfokuskan diri terhadap perlunya kompromi dan komunikasi Sesi 5: Informasi yang diperlukan Tim Pantai Timur dari masyarakat Mendapatkan penjelasan terhadap kebutuhan informasi di Pematang Pasir Sesi 6: Evaluasi harian Sesi 7: Penjelasan tahap rencana dalam mengatasi pohon masalah	Memanfaatkan permainan menggunakan gelas (biasanya kursi digunakan dalam jenis permainan ini) <i>Brain storming</i> / penyusunan ranking kedua
Hari ketiga Sesi 1: Komunikasi Melatih untuk fokus pada suatu komunikasi Sesi 2: Kerja tim: “persiapan ke lapang” Sesi 3: Bagaimana menjadikan diri efektif di tim kerja/ pembuatan kontrak kerja lanjutan Memecahkan masalah didalam dan diantara Tim Pantai Timur	
	Memanfaatkan macam-macam permainan Membahas sebuah studi kasus sebagai bahan permulaan diskusi kelompok

Lampiran 3. Daftar responden yang diwawancarai untuk keperluan pendokumentasian kegiatan pengembangan tambak ramah lingkungan dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat secara terpadu di Pantai Timur Lampung

Instansi/lembaga	Responden
Staf Proyek Pesisir Lampung	• Herawati Poespitasari, • Budy Wiryawan, • Bill Marsden
Aparat dan masyarakat Desa Pematang Pasir	• Kepala desa, • Sekretaris desa, • Kepala dusun (5 dusun), • Masyarakat (petambak, petani, pemuda dan ibu-ibu)
Staf instansi Kabupaten Lampung Selatan	• Sayuti (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura); • Idwansyah (Kabag. Perekonomian); • Budi Suranto (Staf bagian Lingkungan Hidup); • Moh. Roni (Kabag. Lingkungan Hidup);
Lembaga Swadaya Masyarakat	• Wandoyo (Mitra Bentala); • Venny Marlinda (Alas Indonesia); • Yusuf Kriswardi (Yasadhana)

Lampiran 4. Sejarah atau kronologis perkembangan desa Pematang Pasir berdasarkan informasi dari masyarakat

Tahun	Peristiwa penting setempat
1972	Sekitar 30 KK yang berasal dari Wonosobo dan Kota Agung, Jawa Tengah (kelompok H. Zen, Kadim <i>et al.</i>) tiba di desa Taman Sari secara swadaya atas informasi dari Bapak H. Rais (DPRD I) dan Bapak Masrah Saleh (Kepala Desa Gayam) untuk membuka lokasi.
1973	Dengan koordinasi Yayasan Pembina Ummat (YPU) yang diketuai Yacob Lubis, 30 KK tersebut membuka areal baru di Pematang Pasir. Mereka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.500,- per orang untuk 2 ha lahan. Pengukuran lokasi dilakukan oleh juru ukur Tumiri yang didampingi Bapak Silalahi (Polisi Kehutanan)
1974	Rombongan gelombang II datang dari Wonosobo (sekitar 40 KK) dan ikut membuka lokasi di Pematang Pasir, diantaranya Marjono, Arjogini, Karno, Cokro Tris <i>et al.</i> Pembukaan lahan dilakukan secara periodik hingga tahun 1977. Kondisi lokasi pada saat itu masih berhutan, banyak binatang liar dan jalan masih berupa jalan setapak. Dalam periode 1974-1976, pemerintahan desa untuk wilayah Pematang Pasir masih ikut dengan Desa Gayam (Kades Masrah Saleh). Selanjutnya terus berdatangan kelompok yang baru secara bertahap hingga tahun 1979 dengan kepala suku Ramlan Lubis (YPU) dan wakil ketua areal Bapak Syamsudin.
1976	• Pendirian Madrasah Ibtida'iyah. • Kepala pemerintahan desa di Gayam dijabat oleh Kepala Desa Karya Singajaya (1976 – 1988). • Pembangunan mesjid dan balai desa.
1977	• Pasar Sidoasih mulai dibangun dan beroperasi. • Hutan sudah mulai habis dan binatang liar mulai hilang.
1978	Perubahan lahan (hutan) menjadi perladangan dan sawah, sebagian kecil mulai menanam cabe dan bawang merah (swadaya).
1979	Yayasan Pembina Umat bubar.
1980	• Kepala suku dijabat oleh Marjono (1980 – 1988). • Pengukuran proyek Rawasragi II selama 5 bulan.
1981 - 1983	• Terjadi banjir dan merusak tanaman padi gogo rancah. • Tahun ini masyarakat mulai menanam sayuran, bawang merah, cabe, tomat/rampai, dll tetapi terjadi puso. • Pembangunan puskesmas.

Lanjutan lampiran 4

Tahun	Peristiwa penting setempat
1984 - 1985	• Proyek Rawasragi II masuk wilayah Pematang Pasir, mulai pembuatan tanggul irigasi atau penangkis. • Terjadi banjir lagi, gogo rancah puso. • Pembentukan kelompok tani yang diketuai oleh Bapak Abidin. • Pembuatan tanggul Proyek Rawasragi II dimulai. • Orang-orang dari Pati dan Kronjo mulai datang dan membuka empang ikan bandeng di lokasi hutan mangrove.
1986	• Pendirian Madrasah Tsanawiah Darul Ma'arif. • Pembuatan tanggul Rawasragi II selesai.
1987 - 1988	• Proyek Rawasragi II melakukan sertifikasi lahan (<i>land reform</i>) dengan pembagian jatah 1 ha pekarangan dan 1 ha sawah untuk setiap Kepala Keluarga. • Land reform ini hingga saat ini masih banyak menyimpan masalah sosial yang belum selesai.
1989 - 1992	• Pemekaran wilayah Pematang Pasir menjadi desa sendiri dengan pejabat sementara Kepala Desa Muh. Ro'is (1988 – 1992). • Lahan sawah sudah mulai dialihfungsikan menjadi tambak udang (1990 – 1991), milik Sawon, Basar dan Yadi.
1991 - 1992	Menjadi desa definitif dengan Kades Satiman (1992 – 2000) dengan wilayah 5 dusun (Purwosari, Rejosari I, Rejosari II, Sidomukti I dan Sidomukti II). Sekretaris desa adalah Bambang.
1995	Jalan aspal menjadi jalan ber- <i>hotmix</i>
1997/1998	• Tahun 1997/1998 PLN masuk ke Pematang Pasir. • Bantuan bibit bawang dan cabe dari Pemerintah Daerah Propinsi Lampung
1999	Seluruh lokasi sawah yang dicetak Proyek Rawasragi II sudah habis karena dialih-fungsikan menjadi areal tambak udang.

Lampiran 5. Daftar Kegiatan Learning Team PKSPL IPB di Lampung

Tanggal	Kegiatan
1-09-99	Berangkat ke Lampung, Menyusun Rencana Kegiatan
2-09-99	• Diskusi dengan staf PP Lampung • Menghadiri pertemuan PSC
3-09-99	• Kunjungan ke lokasi (Desa Pematang Pasir) • Diskusi dengan Tim Pantai Timur (TPT) • Diskusi dengan salah seorang tokoh masyarakat • Melihat lokasi tanah timbul, dan lahan tambak yang baru dibuka
4-09-99	Diskusi dengan bapak Kades, carik, kepala-kepala dusun dan TPT
5-09-99	• Diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat, dan TPT • Pulang ke Bandar Lampung
6-09-99	• Diskusi dengan staf PP Lampung • Berangkat ke Desa Pematang Pasir • Diskusi dengan TPT
7-09-99	• Diskusi dengan staf PP Lampung • Menulis laporan
8-09-99	• Diskusi dengan staf PP Lampung • Membantu persiapan pertemuan Renstra
9-09-99	• Mengikuti seminar penyusunan renstra • Membantu training renstra bagi tim kecil penyusun renstra
10-09-99	• Diskusi dengan staf PP Lampung • Pulang ke Bogor

PENGALAMAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENYUSUNAN ATLAS SEBAGAI PROFIL SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR LAMPUNG

Oleh:

Neviaty P. Zamani, Budy Wiryawan, Handoko A. Susanto, Ali K. Mahi,
Marizal Ahmad, Hermawati Poespitasari, M.Fedi A. Sondita dan Burhanuddin

ABSTRAK

Profil sumberdaya wilayah pesisir Lampung yang disajikan dalam bentuk atlas merupakan suatu potret kondisi pesisir Lampung berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai kajian dan survei yang melibatkan berbagai tenaga ahli dan *stakeholder* setempat. Alasan pembuatan atlas ini berawal dari kebutuhan informasi yang akurat dan komprehensif tentang kondisi kawasan Pesisir Lampung sebagai dasar perencanaan pengelolaan. Dalam konteks pengelolaan pesisir Propinsi Lampung, atlas tersebut penting karena merupakan dasar dan informasi utama untuk penyusunan **rencana strategis** pengelolaan wilayah pesisir Propinsi Lampung (Renstra Pesisir Lampung). Atlas yang terdiri dari 120 halaman ini, termasuk 30 peta-peta tematik, disusun secara partisipatif yang melibatkan lebih dari 270 orang dari sekitar 80 lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam proses penyusunannya.

Hasil dari kegiatan penyusunan profil berbentuk atlas ini ada dua jenis, yaitu luaran atau *output* fisik yang berupa dokumen atlas dan pengalaman penting yang diperoleh para *stakeholder* pesisir Propinsi Lampung. Atlas tersebut dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat karena dirancang untuk berbagai macam pembaca. Pelajaran dari pengalaman penyusunan profil ini diperoleh para *stakeholder* dalam setiap proses mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengakuan/pengesahan, penyebarluasan, dokumentasi dan pemanfaatannya. Selain dihasilkan suatu dokumen (atlas), kegiatan penyusunan profil ini juga memberikan dampak positif bagi kelancaran upaya pengelolaan pesisir. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kepedulian berbagai pihak (*stakeholders*) tentang pentingnya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, terjadinya konsensus atau pengakuan terhadap permasalahan atau isu-isu wilayah pesisir yang perlu segera ditangani; serta terciptanya forum dimana aspirasi masyarakat dan *stakeholders* lainnya dapat disampaikan kepada lembaga perencanaan baik di tingkat propinsi maupun nasional. Seandainya ada pihak lain yang ingin membuat atlas serupa untuk daerahnya, perhatian khusus perlu diberikan pada proses pengumpulan informasi serta data primer dan sekunder, proses verifikasi dan klarifikasi dari instansi yang menerbitkan informasi dan data, dan format penyajiannya dalam atlas. Proses-proses tersebut memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan beragam pihak sehingga memerlukan kesabaran untuk dapat mencapai konsensus tentang informasi dan data yang dapat disajikan di dalamnya. Jika proses ini dilakukan secara seksama, niscaya atlas yang akan disusun tersebut mempunyai kualitas yang memadai untuk dijadikan dasar perencanaan wilayah pesisir secara terpadu.

Kata kunci: profil sumberdaya pesisir; atlas; proses partisipatif; Lampung.

ABSTRACT

Lampung coastal resource profile, presented as an atlas, displays features of Lampung coastal condition, which is based on data and information compiled from a number of studies and surveys involving local stakeholders and consultants from various multidisciplines. Reasons for developing the atlas were originated from needs on accurate and comprehensive informations on coastal areas as foundation to develop provincial coastal management plan. In the Lampung provincial management context, the atlas is important as a foundation to develop the provincial strategic planning of coastal management. The 120 page atlas, including 30 thematic maps, was produced by involving various stakeholders and government agencies. More than 270 people from about 80 government institutions and non-government institution actively involved in process.

There are two types of results generated from profiling activities, i.e., physical output (the atlas) and some lessons that can be learned by the stakeholders of Lampung coasts. The atlas can be used by various groups of society because it was designed for a broad range of readers. The stakeholders who are involved actively experience some stages of coastal management process. The profiling activities also generate positive impacts on the establishment process of coastal management. This activity: (1) promotes an increasing public and stakeholder awareness and their understanding on the importance of integrated coastal management, (2) builds consensus among stakeholders and their commitment on coastal issues that need to be solved, (3) establish a community forum which can accomodate community aspiration to the planning agencies, both at provincial and national levels. Some attention and consideration are needed in the quality of data and information collected for atlas development, their verification and some clarification from their official sources, and design of the atlas. These processes require great patience to achieve acceptable quality which is determined by consensus or agreement of the sources and stakeholders on the information and data presented in the atlas. If these carried out thoroughly, such atlas will be a reliable source of data for development of an integrated management plan.

Keywords: coastal resource profile; atlas, participatory process, Lampung.

1. PENDAHULUAN

Tujuan strategis Proyek Pesisir atau *Coastal Resources Management Project* adalah ‘desentralisasi dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia’ (*to decentralize and strengthen natural resources management in Indonesia*). Diharapkan dengan mewujudkan desentralisasi dan penguatan kelembagaan pada tingkat lokal akan meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat pesisir serta terjaganya kelestarian sumberdaya pesisir melalui bentuk-bentuk pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Proyek Pesisir telah mengembangkan 3 model pendekatan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat, yaitu: (1) pengelolaan tingkat desa di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, (2) pengelolaan suatu kawasan ekologi Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, dan (3) pengelolaan wilayah administratif setingkat propinsi atau kabupaten di Lampung.

Proyek Pesisir Lampung diresmikan pada tanggal 17 Juli 1998 oleh Menteri Pertanian Kabinet Reformasi yang dihadiri juga Gubernur Lampung dan Direktur USAID untuk Indonesia. Dalam tahun pertama, proyek ini melaksanakan 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya pengelolaan pesisir terpadu di kalangan masyarakat dan pemerintahan daerah, penyusunan profil wilayah pesisir Lampung yang diwujudkan dalam bentuk atlas dan kegiatan penguatan kelembagaan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilakukan secara terpisah karena ada keterkaitan satu dengan lainnya.

Diantara ketiga kegiatan tersebut, *Learning Team* dan Proyek Pesisir Lampung sepakat untuk mendokumentasikan proses penyusunan profil wilayah pesisir atau *profiling*. Alasan pemilihan topik tersebut dikarenakan pentingnya kegiatan ini sebagai dasar dan informasi utama untuk penyusunan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir Propinsi Lampung (Renstra Pesisir Lampung) dan pelaksanaan contoh pengelolaan penanganan isu pesisir Pantai Timur di Desa Pematang Pasir (Kabupaten Lampung Selatan). Hal lain yang melandasi topik ini adalah sambutan yang positif dari pemerintah daerah propinsi-propinsi lain di Indonesia terhadap Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung. Atlas tersebut telah diterima sebagai contoh untuk penyajian

informasi sumberdaya wilayah pesisir. Melalui kegiatan pendokumentasian proses penyusunan profil pesisir ini, berbagai pihak yang tertarik untuk mempersiapkan dokumen serupa diharapkan dapat menarik pelajaran dari pengalaman Proyek Pesisir Lampung.

Profil wilayah pesisir dalam tulisan ini menyangkut deskripsi potensi dan permasalahan (isu) yang ada di kawasan pesisir berkaitan dengan sumberdaya wilayah pesisir yang mencakup kondisi sumberdaya alam, manusia dan jasa-jasa lingkungan Propinsi Lampung. Propinsi ini terletak di ujung tenggara pulau Sumatera dengan luas wilayah mencakup 35.376 km². Panjang garis pantai yang mengelilinginya 1.105 km (termasuk 69 buah pulau kecil). Secara administratif di propinsi ini terdapat 10 kabupaten dan kotamadya, dengan rincian geografis 5 (lima) kabupaten pesisir dan 1 (satu) kota pesisir (Gambar 1). Sampai tahun 1998, penduduknya mencapai 7 juta jiwa.

2. KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PESISIR LAMPUNG

2.1 Deskripsi dan tujuan penyusunan profil

Profil sumberdaya pesisir Propinsi Lampung merupakan suatu potret atau rona wilayah Pesisir Lampung yang ditampilkan dalam bentuk atlas. Atlas tersebut merupakan deskripsi kondisi pesisir Lampung berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai kajian dan survei yang melibatkan berbagai tenaga ahli dan *stakeholder* setempat. Alasan pembuatan atlas ini berawal dari perlunya informasi yang akurat dan komprehensif tentang kondisi kawasan Pesisir Lampung sebagai dasar perencanaan pengelolaan. Proyek Pesisir Lampung menemukan data yang tidak konsisten di antara instansi-instansi penerbit data sehingga perlu ada klarifikasi yang melibatkan instansi-instansi tersebut.

Tujuan penyusunan atlas adalah untuk:

- ♦ melengkapi, menyeleksi, mengkoreksi, mengkonfirmasi dan klarifikasi data-data dasar wilayah pesisir, termasuk potensi dan permasalahan serta kendala-kendala dalam pengelolaan wilayah pesisir;

- ♦ mengkaji status dan kondisi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam berdasarkan data primer dan data sekunder;
- ♦ menyediakan data dan informasi lengkap yang menggambarkan kondisi wilayah pesisir secara sederhana, menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat, pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain.

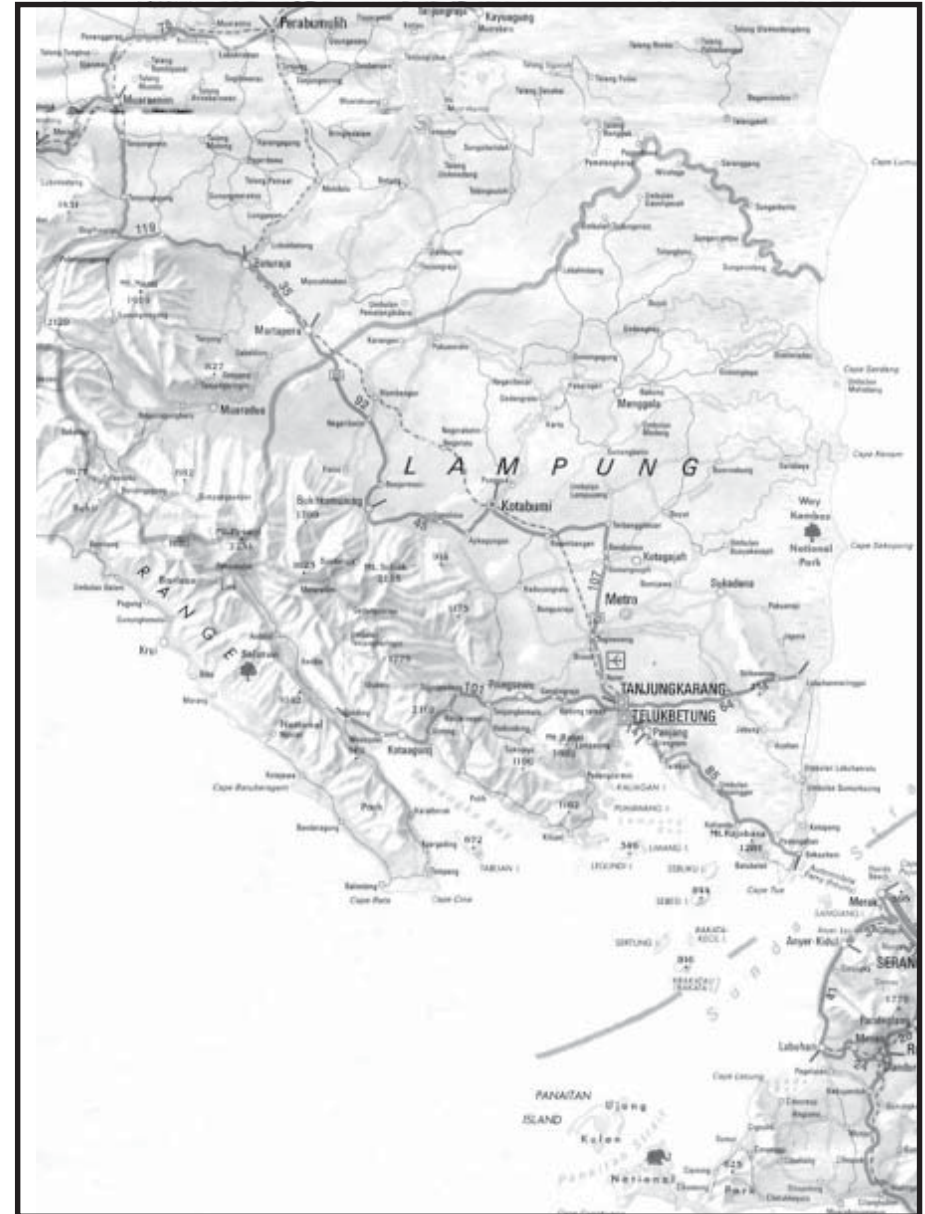
Pengkajian yang dilakukan oleh Proyek Pesisir dalam rangka penyusunan profil ini (atlas) mencakup: kondisi geologi (CRMP, 1998a), kondisi perikanan tangkap (CRMP, 1998b), status mangrove dan terumbu karang (CRMP, 1998c), kesesuaian dan arah pengembangan lahan pertanian (CRMP, 1998d), sumber-sumber pencemaran (CRMP, 1998e), perkembangan, status dan potensi akuakultur (CRMP, 1998f), habitat pesisir, satwa liar dan sumberdaya air (CRMP, 1998g), pariwisata bahari (CRMP, 1998h), kondisi oseanografi dan kualitas perairan (CRMP, 1998i dan 1998j), dan pemanfaatan lahan 'terbuka' (CRMP, 1998k).

2.2 Tahapan dalam penyusunan atlas

Dalam pembuatan atlas sumberdaya pesisir wilayah Propinsi Lampung telah disepakati bahwa :

- ♦ setiap desa yang mempunyai garis pantai harus dikunjungi oleh Tim Proyek Pesisir untuk mendapatkan data primer dan verifikasi data sekunder tentang desa tersebut;
- ♦ kegiatan ini melibatkan instansi-instansi pemerintah di tingkat propinsi, kabupaten serta aparat desa, lembaga swadaya masyarakat setempat, staf dan mahasiswa Universitas Lampung agar dampak Proyek Pesisir dalam mempromosikan konsep pengelolaan pesisir secara terpadu di kalangan masyarakat Lampung menjadi lebih efektif.

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan tentang gambaran status dan potensi pesisir Lampung, Proyek Pesisir Lampung memutuskan untuk mengangkat seorang konsultan lokal dan dua orang penasehat dari Universitas Lampung. Untuk sejumlah bidang tertentu yang tidak tersedia di Lampung, maka diangkat sejumlah konsultan dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Secara umum proses



Gambar 1. Peta Propinsi Lampung

pembuatan atlas sumberdaya wilayah pesisir Propinsi Lampung (Gambar 2) dimulai dengan penentuan jenis informasi yang perlu ditampilkan dalam atlas dan diakhiri dengan pencetakan serta penyebar-luasannya.

Penentuan jenis informasi yang perlu ditampilkan dalam profil pesisir Lampung

Penentuan jenis informasi yang perlu ditampilkan dalam atlas dilakukan dalam diskusi-diskusi dengan berbagai pihak, seperti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan - IPB, staf instansi pemerintah daerah Propinsi Lampung (khususnya Tim Pengarah Propinsi atau *Provincial Steering Committee*), para konsultan proyek, pimpinan Proyek Pesisir dan Coastal Resources Center - URI. Diskusi Proyek Pesisir Lampung dengan PKSPL-IPB dimulai pada bulan April 1998. Secara umum disimpulkan bahwa informasi tersebut harus mencakup aspek biofisik, ekonomi dan sosial-budaya serta kelembagaan.

Penentuan strategi pengumpulan informasi dari lapang

Berdasarkan kebutuhan informasi di atas, disusunlah rancangan studi atau kajian dengan topik-topik yang relevan. Setiap topik kajian dilaksanakan oleh sebuah tim yang dikoordinir oleh seorang konsultan, baik konsultan nasional maupun internasional). Penentuan konsultan pelaksana studi ditentukan berdasarkan diskusi dan informasi dari berbagai pihak. Tim pengkajian ini beranggotakan beberapa sukarelawan (*volunteers*) yang berminat, baik mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat, masyarakat lokal maupun staf dinas/instansi terkait di Propinsi Lampung. Para konsultan bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan kajian sampai penulisan laporan teknis. *Field Project Manager* Proyek Pesisir Lampung berperan sebagai koordinator kegiatan pengkajian ini. Jangka waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing tim pengkajian sangat bervariasi (Wiryawan *et al.*, 1999).

Pelaksanaan pengumpulan dan pengkajian informasi lapang

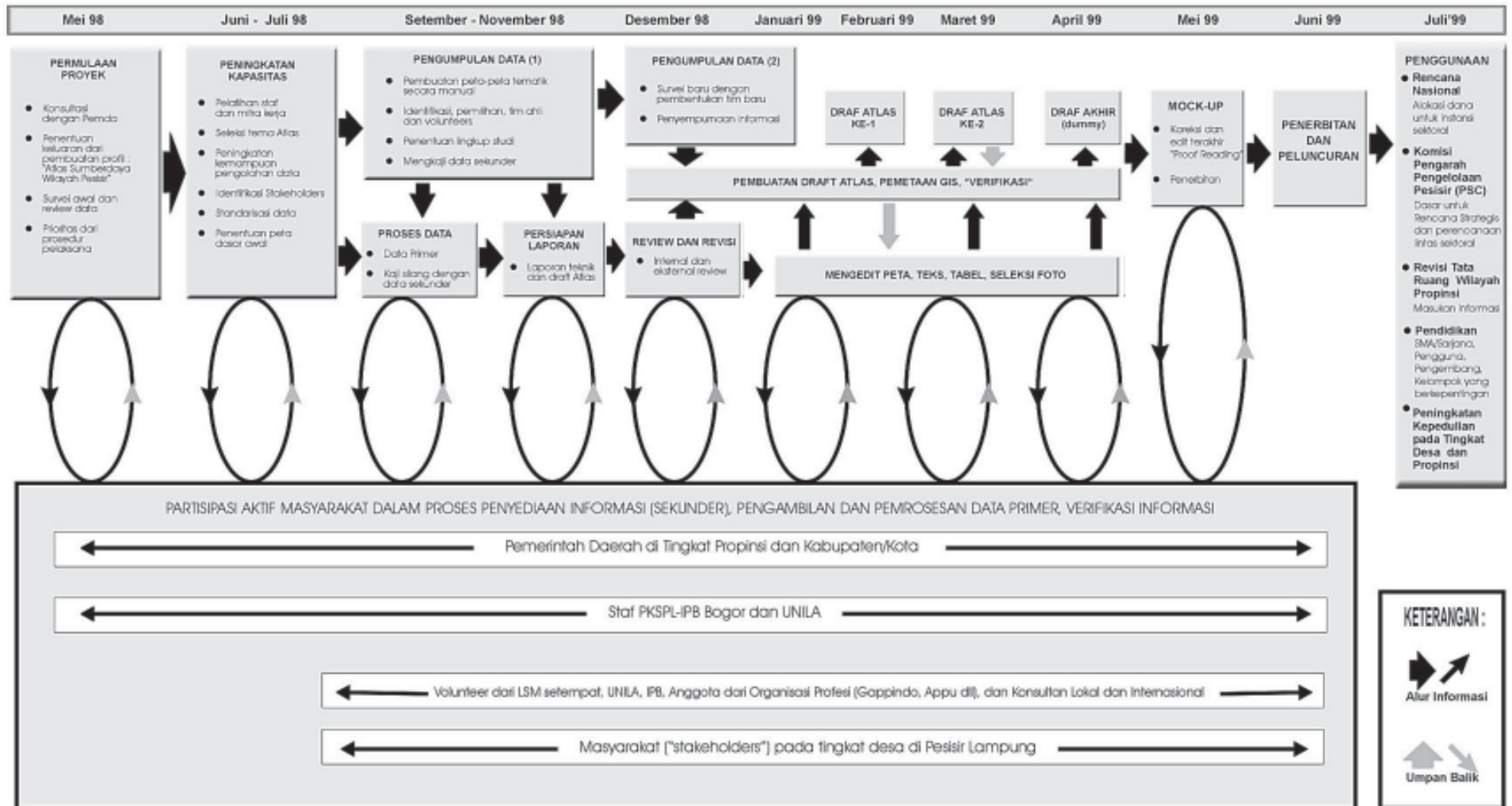
Pelaksanaan pengumpulan dan pengkajian informasi lapang dapat dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah persiapan awal dalam bentuk pengumpulan dan pengkajian literatur, pembuatan sketsa peta dasar (jika

diperlukan) dan penyusunan daftar isian pertanyaan (*quesioner*) untuk penggalan informasi dan data primer di lapangan. Tahap kedua adalah penggalan informasi dan data primer di lapangan. Studi-studi ini sebagian besar dilakukan dengan mewawancarai *stakeholder* secara langsung dan pengisian kuesioner. Di setiap desa pantai dilakukan wawancara terhadap 4 orang responden, yaitu tokoh masyarakat, nelayan, petambak, staf pemerintah desa atau petani. Penggalan data primer juga dilakukan dengan menghubungi instansi atau dinas pemerintah dan non-pemerintah. Data sekunder diambil untuk melengkapi dan pengecekan silang data primer yang diperoleh di lapangan. Tahap ketiga adalah analisis data lapangan dan penyusunan laporan teknis serta ringkasan studi. Pelaksanaan pengumpulan dan pengkajian informasi lapang dimulai pada bulan Agustus 1998 dan berakhir pada bulan Februari 1999.

Konfirmasi dan klarifikasi hasil kajian informasi lapang

Informasi dan data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dikonfirmasi dengan dinas atau instansi terkait di tingkat propinsi dan kabupaten serta lembaga non-pemerintah, seperti LSM dan perusahaan-perusahaan. Kegiatan ini dilakukan sebanyak dua kali sebelum penyusunan atlas. Konfirmasi pertama yang bertujuan untuk verifikasi dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan terhadap kecukupan kajian dan kebenaran atau validitas data dan informasi yang tertuang dalam laporan-laporan teknis yang disusun oleh para konsultan. Dari kegiatan ini disimpulkan perlunya kajian tambahan tentang kondisi oseanografi dan pariwisata serta kajian khusus tentang Bandar Lampung. Penambahan studi tentang oseanografi dan pariwisata diperlukan dengan pertimbangan bahwa perencanaan pengelolaan wilayah pesisir perlu dilengkapi dengan informasi tentang kedua aspek tersebut. Kajian tambahan tentang Bandar Lampung adalah permintaan *stakeholder* setempat yang mempertimbangkan bahwa meskipun secara geografis wilayah pesisirnya tidak luas namun Bandar Lampung sangat mempengaruhi kerumitan permasalahan pesisir Lampung, khususnya Teluk Lampung. Kegiatan konfirmasi dan klarifikasi ini berlangsung dari bulan Desember 1998 sampai April 1999.

BAGAN ALUR PROSES PEMBUATAN ATLAS SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR LAMPUNG



Gambar 2. Proses pembuatan atlas sumberdaya pesisir Propinsi Lampung

Penyusunan laporan teknis

Setiap konsultan diwajibkan untuk menyusun laporan teknis (*technical report*) dan melengkapinya dengan sebuah ringkasan hasil kajian sebanyak 2 lembar dengan teknik penulisan menggunakan bahasa populer agar mudah dimengerti oleh khalayak umum. Lama waktu yang diperlukan untuk penyusunan laporan teknis tersebut sesuai dengan waktu yang disediakan untuk setiap konsultan dalam menyelesaikan kajiannya. Ringkasan hasil kajian tersebut adalah teks bahan utama yang dimasukkan kedalam atlas. Untuk itu, selanjutnya Tim Editor yang terdiri dari Proyek Pesisir Lampung dibantu oleh Learning Team PKSPL-IPB melakukan perbaikan redaksional, perubahan dan penambahan terhadap laporan teknis dan ringkasan kajian tersebut tanpa mengubah isi substansinya. Perbaikan redaksional laporan teknis dan ringkasannya tersebut dilakukan pada bulan Januari 1999.

Pembuatan atlas

Atlas merupakan suatu format penyajian informasi yang ditampilkan dalam bentuk peta-peta tematik dan dilengkapi dengan teks yang mudah dipahami oleh khalayak umum sehingga dapat ditelaah oleh banyak pihak. Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung memuat permasalahan atau isu-isu pengelolaan wilayah pesisir yang teridentifikasi di Propinsi Lampung. Isu-isu tersebut disajikan dengan konsep '*hot spot*' sehingga permasalahan-permasalahan tersebut diketahui dimana lokasi geografinya. Atlas ini juga menampilkan permasalahan yang diprioritaskan untuk ditangani dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Atlas tersebut terdiri dari dua bagian utama, yaitu ringkasan studi dan peta-peta tematik yang menggambarkan kondisi Lampung. Pembuatan peta-peta yang disajikan dalam atlas diawali dengan pembuatan peta dasar dan peta tematik secara manual. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan peta-peta melalui proses digitasi. Pembuatan peta secara manual dilakukan pada

Jumlah orang yang berpartisipasi dalam proses penyusunan atlas

- ◆ 26 orang tim teknis
- ◆ 50 orang volunteer (mahasiswa)
- ◆ 10 orang staf pemerintah daerah Lampung
- ◆ 30 orang dari LSM dan perusahaan swasta
- ◆ 20 orang dari media massa
- ◆ 40 orang dari CRC - URI, Proyek Pesisir, perguruan tinggi, Ditjen Pembangunan Daerah

bulan Januari 1999. Pembuatan peta dasar dan peta-peta tematik digital dilakukan di Lampung sebagai kerjasama antara Proyek Pesisir Lampung dengan Bappeda Propinsi Lampung; pembuatan peta di Bogor adalah kerjasama antara Proyek Pesisir Lampung dengan PKSPL-IPB yang dilaksanakan oleh sebuah tim di Laboratorium GIS. Pembuatan peta digital ini dimulai dari bulan Agustus 1998.

Secara singkat kegiatan penyusunan atlas meliputi kegiatan perbaikan redaksional setiap ringkasan studi, perumusan permasalahan atau isu-isu pesisir untuk empat wilayah pesisir (a. Pantai Barat dan Teluk Semangka, b. Teluk Lampung, c. Pantai Timur dan d. Bandar Lampung), pembuatan peta dasar dan peta-peta tematik, penulisan kata pengantar, sambutan, ucapan terimakasih, pendahuluan, daftar akronim, daftar istilah, daftar pustaka. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah draft dokumen atlas.

Sosialisasi dan penyebaran atlas

Sosialisasi atlas dilakukan sejak proses konfirmasi dan verifikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan berperan dengan jenis data dan informasi yang terkandung di dalamnya. Setelah dicetak, atlas setebal 120 halaman ini disebarluaskan ke seluruh sekolah menengah umum, baik SMU negeri maupun SMU swasta, semua instansi pemerintah dan non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan-perusahaan swasta dan masyarakat umum. Atlas juga dikirim kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) untuk dijadikan contoh dan disebarluaskan kepada seluruh Bappeda propinsi-propinsi lain di Indonesia. Sosialisasi atlas kepada masyarakat dilakukan bersamaan dengan proses konsultasi umum dalam penggalan visi untuk keperluan penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung (Renstra Pesisir). Sosialisasi isi atlas juga dilakukan dalam bentuk penulisan beberapa artikel ilmiah (Mahi dan Wiryawan 1999; Wiryawan *et al.*, 1999).

2.3 Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penyusunan atlas

Dalam penyusunan profil pesisir Propinsi Lampung ini diterapkan beberapa prinsip penting, seperti:

- dengan sumberdaya yang tersedia (dana, tenaga dan waktu) Proyek Pesisir mengupayakan agar seluruh wilayah pesisir Propinsi Lampung terwakili dalam satu dokumen yang secara lengkap menggambarkan potensi dan permasalahan atau isu-isu masing-masing wilayah pesisir.
- informasi yang dimuat dalam profil diutamakan berasal dari data primer, termasuk informasi dari citra satelit yang telah dilengkapi dengan kegiatan *ground truth* di lapang.
- pemakaian data sekunder untuk informasi yang akan dimuat dalam peta dilakukan secara hati-hati dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi dari instansi-instansi yang menerbitkan data sekunder serupa. Alasan dilakukannya klarifikasi dan verifikasi adalah: 1) data yang berasal dari satu sumber dirasakan kurang akurat; 2) data yang dilaporkan oleh instansi-instansi kadang-kadang sudah kadaluarsa karena kegiatan pembaharuan data (*up-dating*) secara rutin kemungkinan jarang dilakukan.
- Penyusunan profil ini semaksimal mungkin melibatkan pihak-pihak dan fasilitator setempat. Hal ini mengingat bahwa:
 - a. masyarakat lokal lebih mengetahui kondisi daerah mereka sendiri,

Isi atlas sumberdaya wilayah pesisir Lampung

- ♦ Pendahuluan
- ♦ Geomorfologi lingkungan pesisir
- ♦ Kondisi oseanografi perairan
- ♦ Ekosistem pesisir
- ♦ Daerah aliran sungai dan sumber pencemaran
- ♦ Kawasan konservasi
- ♦ Kota dan kabupaten pesisir
- ♦ Demografi desa dan kondisi sosial ekonomi budaya
- ♦ Kesesuaian dan arahan pengembangan lahan pertanian
- ♦ Perikanan tangkap dan perikanan budidaya
- ♦ Pariwisata bahari di Teluk Lampung
- ♦ Isu utama a) Bandar Lampung, b) Pantai Barat dan Teluk Semangka, c) Pantai Timur dan d) Teluk

dengan keterlibatan langsung;

- b. masyarakat setempat diharapkan semakin meningkat kemampuannya dan semakin menyadari pentingnya pengelolaan wilayah pesisir;
- c. Penyusunan profil menjadi lebih efisien, khususnya dalam hal dana dan waktu, bila melibatkan masyarakat lokal.

2.4 Hasil dan manfaat

Beberapa manfaat dari penyusunan profil sumberdaya wilayah pesisir Propinsi Lampung terungkap dalam pertemuan antara Tim Kerja Renstra dan Tim Pengarah Propinsi. Manfaat tersebut antara lain:

- ♦ terjalinnya hubungan dan komunikasi yang lebih dekat antar berbagai instansi pemerintah terkait dengan para *stakeholder* lainnya hingga terbentuk semacam jaringan kerja (*network*) yang berjalan baik dan mencerminkan keterpaduan;
- ♦ pertemuan-pertemuan yang dilakukan merupakan wahana untuk penyebaran informasi sumberdaya wilayah pesisir yang akurat, mutakhir, komprehensif, menarik dan mudah dipahami berbagai kalangan, baik para pengambil kebijakan maupun para pengguna jasa lingkungan pesisir serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
- ♦ pihak-pihak yang terlibat memiliki wawasan yang lebih luas terhadap manfaat pengelolaan pesisir terpadu, perubahan sikap terhadap upaya yang diperkenalkan proyek karena telah tumbuh rasa memiliki sehingga kepedulian mereka untuk mengelola sumberdaya pesisir Lampung semakin meningkat.

2.5 Keterkaitan kegiatan penyusunan profil dengan kegiatan lainnya

Keterkaitan kegiatan penyusunan profil atau atlas sumberdaya pesisir dengan kegiatan-kegiatan proyek lainnya, seperti penyusunan rencana strategi pesisir dan kegiatan percontohan di Pantai Timur, adalah sebagai berikut:

- ♦ profil atau atlas merupakan informasi dasar atau acuan untuk berbagai kegiatan-kegiatan lain, seperti perencanaan (dalam hal ini penyusunan dokumen Renstra Pesisir), penyusunan kebijakan di tingkat lokal maupun

- nasional, kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan masyarakat.
- ♦ dalam konteks proyek di skala nasional, profil pesisir Lampung merupakan sebuah contoh dari proses perencanaan pengelolaan sumberdaya pesisir yang didasarkan pada informasi terakhir tentang kondisi sumberdaya dan permasalahan yang ada.
 - ♦ mengingat pengelolaan pesisir secara terpadu dicirikan oleh adanya partisipasi para *stakeholder* dalam setiap tahap perkembangan pengelolaan, kegiatan penyusunan profil telah berperan sebagai media untuk mengakomodasi terangkainya aspirasi masyarakat.
 - ♦ selain partisipasi, pengelolaan pesisir secara terpadu juga dicirikan oleh adanya koordinasi *stakeholder* dalam pengelolaan; kegiatan penyusunan profil telah berperan sebagai media yang efektif untuk membangun koordinasi ini.
 - ♦ secara tidak langsung, proses penyusunan profil yang melibatkan staf instansi pemerintahan merupakan media efektif untuk menyampaikan masukan bagi para pengambil kebijakan di daerah.

2.6 Faktor pendorong dan kendala dalam penyusunan profil

Kelancaran penyusunan profil sumberdaya pesisir banyak oleh beberapa faktor pendorong seperti:

- ♦ dukungan, komitmen dan kerjasama dari mitra Proyek Pesisir, baik mereka yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari lembaga swadaya masyarakat setempat;
- ♦ kerjasama yang erat dengan para konsultan yang berasal dari beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Lampung, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor.

Selain faktor pendorong, beberapa kendala yang dijumpai dalam penyusunan profil antara lain:

- ♦ ketersediaan waktu dan dana yang terbatas untuk pengumpulan data karena kegiatan suatu proyek sudah diatur agar hasil antara (*intermediate outcome*) dapat dicapai sesuai dengan jadwal;
- ♦ persepsi berbagai pihak yang sudah terbiasa dengan istilah proyek yang

berkonotasi sebagai proyek pembangunan fisik mengakibatkan adanya kesulitan dalam mensosialisasikan misi dan visi Proyek Pesisir pada awal kegiatan.

3. PELAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL

Beberapa pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman penyusunan atlas antara lain:

- ♦ perlu kesiapan dan perencanaan yang matang dalam memutuskan informasi yang dianggap penting untuk digali;
- ♦ tingkat kedalaman data dan informasi yang disajikan dalam atlas ditentukan oleh dana yang tersedia.
- ♦ pendekatan dan sosialisasi yang baik akan menumbuhkan kebersamaan yang erat dalam melakukan kegiatan;
- ♦ mendengarkan dan menggali informasi dari sumber yang dapat dipercaya, lapangan dan masyarakat;
- ♦ dalam mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat, khususnya yang menyangkut permasalahan atau isu-isu, seyogyanya anggota tim pencari data siap untuk mendengarkan keluhan masyarakat dengan sabar; hindarkan sikap untuk memberikan respon yang bersifat emosional;
- ♦ memposisikan lembaga proyek dalam status yang sama tingginya dengan mitra dan *stakeholder* lainnya sangat membantu dalam mendorong terciptanya suasana kerjasama yang positif, seperti rasa percaya, rasa memiliki dan tanggungjawab;
- ♦ informasi awal dari *stakeholder* terkait dan lembaga lainnya akan mempermudah pencarian informasi selanjutnya.
- ♦ proses verifikasi dan klarifikasi informasi kepada instansi atau pihak-pihak yang menerbitkan data dan informasi menyebabkan atlas ini mendapat obyektifitas informasi yang disajikan diakui oleh berbagai pihak sehingga atlas tersebut memuat konsensus tentang keadaan pesisir Lampung yang sebenarnya.

- ♦ kerjasama yang baik antara instansi pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda Propinsi Lampung, sejumlah perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat mempermudah proses diterimanya atlas sebagai sumber informasi terkini dan sekaligus mempermudah proses pembaharuan informasi di masa yang akan datang;
- ♦ tingkat keahlian dan profesionalisme tim peneliti dan pencari data sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi yang ditampilkan dalam profil atau atlas;
- ♦ kualitas akhir profil atau atlas, baik dari segi artistik, validitas, kelengkapan isi dan kemudahan atlas untuk dapat dipahami oleh berbagai pihak sangat ditentukan oleh kreatifitas, ketelitian dan kesabaran Tim Editor.

4. PENUTUP

Seandainya ada pihak lain yang ingin membuat atlas serupa untuk daerahnya, perhatian khusus perlu diberikan pada proses pengumpulan informasi dan data primer dan sekunder, proses verifikasi dan klarifikasi dari instansi yang menerbitkan data dan informasi, serta format penyajiannya dalam atlas. Proses-proses tersebut memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan beragam pihak sehingga memerlukan kesabaran untuk dapat mencapai konsensus tentang informasi dan data yang dapat disajikan di dalamnya. Jika proses ini dilakukan secara seksama, niscaya atlas yang akan disusun tersebut mempunyai kualitas yang memadai untuk dijadikan dasar perencanaan wilayah pesisir secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- CRMP. 1998a. *Penyelidikan geologi daerah pesisir pantai Propinsi Lampung*. Technical Report CRMP Lampung, Bandar Lampung.
- CRMP. 1998b. *Profil perikanan tangkap Propinsi Lampung*. Technical Report CRMP Lampung, Bandar Lampung.
- CRMP. 1998c. *Profil habitat pertanian pantai Propinsi Lampung*. Technical Report CRMP Lampung, Bandar Lampung.
- CRMP. 1998d. *Kesesuaian dan arahan pengembangan lahan pertanian dan pesisir Lampung*. Technical Report CRMP Lampung, Bandar Lampung.
- CRMP. 1998e. *Sumber-sumber pencemaran wilayah pesisir Propinsi Lampung*. Technical Report CRMP Lampung, Bandar Lampung.
- CRMP. 1998f. *An analysis of aquaculture in the coastal areas of Lampung, evolution, status, and potential*. Technical Report CRMP Lampung, Bandar Lampung.
- CRMP. 1998g. *Significant coastal habitats, wildlife and water resources in Lampung*. Technical Report CRMP Lampung, Bandar Lampung.
- CRMP. 1998h. *Profil wisata bahari di kawasan pesisir Teluk Lampung*. Technical Report CRMP Lampung, Bandar Lampung.
- CRMP. 1998i. *Kondisi oseanografi perairan pesisir Lampung*. Technical Report CRMP Lampung, Bandar Lampung.
- CRMP. 1998j. *Oseanografi dan kualitas perairan Teluk Lampung*. Technical Report CRMP Lampung, Bandar Lampung.
- Mahi, A.K. dan B. Wiryawan. 1999. *Potensi dan arahan pengembangan lahan pertanian di wilayah pesisir Lampung*. Jurnal Pesisir dan Lautan 2(2): 29-43.
- Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, B. Haryanto, A. Tahir dan Burhanuddin. 1999. *Proses kerja Learning Team pada tahun 1998/1999 dalam kegiatan pendokumentasian Proyek Pesisir*. Dalam Sondita M.F.A., N.P.Zamani, B.Haryanto, A.Tahir dan Burhanuddin (editor). Kerjasama PKSPL dengan CRC-URI.
- Wiryawan, B., B. Marsden, H.A. Susanto, A.K. Mahi, M. Ahmad, H. Poespitasi (editors). 1999. *Atlas sumberdaya wilayah pesisir Lampung*. Pemerintah Propinsi Lampung, Proyek Pesisir CRC-URI, PKSPL-IPB, Bandar Lampung. 109 pp.
- Wiryawan, B., B. Marsden, I.M. Dutton. 1999. *Atlas sumberdaya wilayah pesisir Lampung: suatu hasil dan proses*. Jurnal Pesisir dan Lautan 2(3):27-41.

Lampiran 1. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penyusunan atlas

Sumber informasi	Jenis informasi yang terkumpul*
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung	Peta penggunaan lahan, hutan, perikanan, pertanian 1977, 1987, 1997; statistik pertanahan; proses kepemilikan lahan; permasalahan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Lampung	Peta tata-ruang propinsi (RUTRW) 1977,1987,1997; peraturan daerah
Dinas Perikanan (tingkat propinsi dan kabupaten)	Statistik perikanan, penggunaan lahan, produksi (tingkat propinsi dan kabupaten) tahun 1977,1987, 1990-1997; kondisi sosial ekonomi; konflik penggunaan perairan; prosedur perijinan; permasalahan
Dinas Kehutanan dan Kanwil Kehutanan	Hutan mangrove; rencana pengembangan silvo-fishery; program reboisasi; perubahan penggunaan lahan 1977, 1987 dan 1987; permasalahan
Dinas Pekerjaan Umum / Pengairan dan Kanwil Pekerjaan Umum	Penggunaan lahan; jaringan jalan; pelabuhan dan bangunan pantai; erosi dan reklamasi
Kanwil Perhubungan	Konflik penggunaan perairan laut; kegiatan pengerukan dan kegiatan pekerjaan umum yang lain
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah	Pencemaran; polutan industri dan Prokasih; <i>hot-spots</i> polusi; permasalahan
Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia GAPPINDO dan Asosiasi Pengusaha Pembenihan Udang APPU	Perusahaan perikanan; produksi, 1977, 1987, 1990-1997; pemasaran domestik dan internasional; status stok ikan; permasalahan
KUD Mina	Permasalahan
TNI Angkatan Laut / Satuan Keamanan Laut / Kanwil Perhubungan	Pelabuhan dan fasilitasnya; permasalahan; konflik penggunaan perairan.
Perguruan tinggi (Universitas Lampung dan Institut Pertanian Bogor)	Hasil-hasil penelitian Pusat Studi Lingkungan, proyek-proyek, survei sosial-ekonomi, studi AMDAL dan aktivitas advokasi
Lembaga swadaya masyarakat	Konflik sosial-ekonomi dan penyelesaiannya; permasalahan lingkungan hukum.
Lembaga Bantuan Hukum	Kasus konflik penggunaan lahan

Keterangan: *: hasil pertemuan Tim Proyek Pesisir September 1998.

PENYUSUNAN PROFIL SUMBERDAYA PESISIR OLEH MASYARAKAT DESA: PENGALAMAN DAN PELAJARAN DARI UPAYA PENGELOLAAN BERBASIS MASYARAKAT DI MINAHASA, SULAWESI UTARA

Oleh:

M. Fedi A. Sondita, Burhanuddin, Brian R. Crawford, Johnnes Tulungen,
Christovel Rotinsulu, Asep Sukmara, Meidi Kasmidi, Maria T. Dimpudus,
Noni Tangkilisan, Fadilla Kesuma, Andi Agus, Christie Saruan, Edwin Ngangi dan Sесilia Dajoh

ABSTRAK

Proyek Pesisir Sulawesi Utara sejak tahun 1997 telah merintis atau memperkenalkan dan menerapkan contoh pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di 3 desa lokasi proyek, yaitu desa Bentenan-Tumbak, Blongko dan Talise. Di setiap lokasi tersebut masyarakat diharapkan mampu melaksanakan pengelolaan sumberdaya setempat. Sebelum menyusun rencana pengelolaan, masyarakat perlu mengetahui gambaran permasalahan atau isu-isu sumberdaya pesisir yang ada. Kegiatan untuk mengetahui dan menyajikan gambaran isu-isu tersebut dalam sebuah dokumen dinamakan kegiatan penyusunan profil sumberdaya pesisir.

Dalam makalah ini disajikan proses penyusunan profil sumberdaya pesisir oleh masyarakat desa. Secara umum kegiatan ini terdiri dari tahapan yang mencakup: (1) perangkuman isu-isu yang diidentifikasi dalam studi-studi dan diskusi, (2) kegiatan pelaksanaan awal, (3) identifikasi anggota dan pembentukan kelompok inti, (4) pembentukan tim pendukung teknis, (5) pelatihan bagi kelompok inti dan tim pendukung teknis, (6) penyusunan draft profil isu desa oleh kelompok inti, dan (7) pengkajian (*review*) draft profil isu oleh masyarakat desa dan tim teknis, kemudian (8) pengesahan dan pencetakannya.

Kegiatan penyusunan profil ini memberikan manfaat besar karena membangun dukungan serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan upaya pengelolaan sumberdaya, menyediakan informasi dasar yang dapat dijadikan acuan untuk penyusunan rencana pengelolaan, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungannya. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan penyusunan profil, masyarakat mengetahui isu-isu (masalah dan peluang), penyebab isu, akibat yang ditimbulkan dan mengetahui strategi penanganan isu-isu tersebut.

Selain proses penyusunan, dalam makalah ini disajikan pula hasil-hasil pembelajaran (*lessons learned*) berupa saran-saran atau rekomendasi sebagai bahan pertimbangan jika seseorang akan menyusun suatu profil sumberdaya pesisir untuk pengelolaannya. Beberapa faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan profil perlu diperhatikan dengan seksama. Salah satunya adalah mempersiapkan kelompok inti dan masyarakat agar mereka memiliki kapasitas untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.

Kata kunci: profil sumberdaya desa pesisir; partisipasi masyarakat; *community-based management*.

ABSTRACT

In 1997 in North Sulawesi, Proyek Pesisir started to introduce examples of coastal management in three village level sites, Bentenan-Tumbak, Blongko and Talise. The community of each site are expected to be capable to manage their local resources they depend on. Before developing a management plan, community needs to understand existing issues in their area. Activities to identify and to describe these issues in a document of profil are called development of coastal resources profile or profiling activities.

This paper presents the process of profiling activities conducted by local community with the help of Proyek Pesisir. In general, profiling activities consisted of: (1) summarizing issues identified from technical studies, consultative meetings, (2) early actions, (3) identification members and establishment of core team responsible for profile development, (4) establishment of technical support team, (5) trainings for core team and technical support team, (6) development of profile draft by the core team, (7) review of the draft by local community and technical support team, (8) approval, printing and distribution.

Impact of profiling is not limited to the production of the profiles because it also develops community participation to implement resource management, provides basic information for development of management plan, improves their knowledge on environment and resources available in their village. By actively involved in profiling activities, community members can identify resources management issues, their causes, impacts if the issues are not handled properly and understand how to handle them.

This paper also presents some lessons learned from experience of Proyek Pesisir in facilitation this activity. These lessons are important to anyone interested to develop issue-based coastal profile. Several factors promoting the efficiency of profiling activities need careful attention. One of them is capacity development of core team and community to execute this activity through outreach and training programs.

Keywords: coastal village resources profile; community participation, community-based management

1. PENDAHULUAN

Langkah pertama dalam perencanaan pengelolaan sumberdaya pesisir adalah identifikasi dan analisis permasalahan (*issue identification and analysis*). Langkah ini biasa disebut sebagai penyusunan profil (*profiling*). Salah satu tujuan utama dari penyusunan profil adalah analisis isu kunci dari pengelolaan yang telah diidentifikasi. Tujuan yang lain adalah upaya untuk memulai pembentukan konsensus di antara kelompok-kelompok stakeholders mengenai isu-isu penting yang diprioritaskan penanganannya untuk dimasukkan dalam rencana pengelolaan (*management plan*). Selain itu, proses penyusunan profil yang dilakukan secara partisipatif akan membangun konstituensi terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir.

Salah satu dari keluaran utama dari kegiatan penyusunan profil adalah dokumen yang disebut sebagai profil sumberdaya pesisir. Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai karakteristik wilayah pesisir yang akan dikelola. Kegiatan penyusunan profil dan dokumen profil telah digunakan secara luas dalam berbagai konteks dan lingkup. Di Amerika Serikat, penyusunan profil digunakan untuk menggambarkan karakteristik muara-muara yang termasuk dalam Program Muara Nasional dari Environmental Protection Agency (US-EPA National Estuary Program). Di Ecuador, ada suatu profil yang dikembangkan untuk seluruh wilayah pesisir dari beberapa propinsi (Epler and Olsen, 1993). Di Thailand, sebuah profil nasional tentang terumbu karang sudah dibuat (CRMP-Thailand, 1987). Di Sri Lanka, sejumlah profil digunakan untuk menyusun rencana pengelolaan kawasan khusus di dua lokasi yang dipilih (CRMP-Sri Lanka, 1987). Satu lokasi (Hikkaduwa) diperuntukkan bagi kawasan pariwisata urban. Sedangkan lokasi lain (Rekawa) diperuntukkan sebagai kawasan laguna di daerah pedesaan. Di Filipina, sejumlah profil sumberdaya pesisir sedang dikembangkan untuk kawasan perkotaan (CRMP-Philippines, 1997).

Sejumlah profil juga sudah disusun untuk perencanaan pengelolaan pesisir di Indonesia. Sebagai contoh proyek yang didanai oleh ASEAN-USAID menyusun sebuah profil tentang lingkungan pesisir Segara Anakan di daerah Cilacap (ICLARM, 1987). Belum lama ini, suatu profil sumberdaya pesisir juga telah dibuat untuk Propinsi Riau oleh sebuah proyek yang didanai

UNDP (Zieren *et al.*, 1997).

Proyek Pesisir atau *Coastal Resources Management Project* (CRMP) dimulai pada tahun 1997 dengan tujuan strategis untuk desentralisasi dan penguatan pengelolaan sumberdaya alam (*to decentralize and strengthen natural resources management in Indonesia*). Dengan strategi tersebut diharapkan taraf hidup masyarakat pesisir dan kondisi sumberdaya pesisir dapat dipertahankan (Proyek Pesisir 1998, 1999). Proyek ini mencoba menerapkan 3 model pendekatan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat, yaitu: (1) pengelolaan tingkat desa di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, (2) pengelolaan suatu kawasan ekologi Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, dan (3) pengelolaan wilayah administratif setingkat propinsi atau kabupaten di Lampung.

Di Sulawesi Utara, model pendekatan pengelolaan dengan rencana pengelolaan berbasis masyarakat (*community based management*) diterapkan di tiga lokasi yang mencakup empat desa di wilayah Kabupaten Minahasa, yaitu Bentenan, Tumbak, Blongko dan Talise. Untuk itu tahap pertama dalam siklus pengelolaan perlu dilakukan, yaitu pengenalan permasalahan atau *issue identification* (Olsen *et al.*, 1999) yang tertuang dalam dokumen profil sumberdaya pesisir desa. Di Sulawesi Utara, Proyek Pesisir memfasilitasi penyusunan profil sumberdaya tiga lokasi dimana contoh pengelolaan pesisir berbasis masyarakat diterapkan. Pada saat proses penyusunan profil akan dimulai, staf Proyek Pesisir di Sulawesi Utara tidak dapat menemukan contoh penyusunan profil untuk tingkat desa, baik di Indonesia maupun di wilayah Asia lainnya. Oleh karena itu kegiatan penyusunan profil sumberdaya pesisir tingkat desa bukan hanya yang pertama di Indonesia tetapi mungkin juga yang pertama di wilayah Asia Tenggara atau bahkan mungkin di dunia. Namun meskipun contoh profil tingkat desa belum ditemukan, sejumlah profil pesisir yang dibuat di Indonesia dan di tempat lain yang telah digunakan sebagai dasar untuk membuat strategi penyusunan dan format dokumen profil tingkat desa.

Ada sejumlah perbedaan di antara profil sumberdaya pesisir desa dengan “Profil Desa” yang dibuat oleh Pemerintah Desa di Indonesia. Pertama, profil sumberdaya pesisir di tingkat desa disusun dengan partisipasi

masyarakat yang tinggi. Kedua, profil tersebut disusun dengan fokus isu pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkembang di masyarakat. Ketiga, profil tersebut disusun sebagai dasar untuk penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya pesisir di tingkat desa.

2. DESKRIPSI PROFIL SUMBERDAYA PESISIR DESA

Mengapa profil sumberdaya perlu dibuat?

Sebelum menyusun rencana pengelolaan (*management plan*), masyarakat diharapkan sudah mengetahui persoalan-persoalan yang menyangkut pengelolaan sumberdaya dan sosial pesisir, baik yang bersifat negatif (masalah penghambat) maupun positif (peluang pendukung). Persoalan-persoalan tersebut diberi istilah 'isu-isu pengelolaan pesisir' atau 'isu-isu sumberdaya pesisir'. Pengetahuan masyarakat masing-masing lokasi proyek dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut 'profil sumberdaya pesisir desa'. Proses penyusunannya disebut dengan nama kegiatan 'profiling isu'. Dalam konteks pengelolaan pesisir secara terpadu, dokumen tersebut dapat dianggap sebagai refleksi dari kebutuhan masyarakat untuk melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya pesisir di lingkungan tempat tinggal mereka.

Dokumen profil sumberdaya pesisir desa selain mencerminkan pengetahuan masyarakat desa tentang permasalahan persoalan yang mereka alami, diharapkan juga mencerminkan pengetahuan mereka tentang mengapa persoalan tersebut terjadi dan bagaimana cara mengatasinya (Crawford dan Tulungen 1999). Menurut judulnya maka fokus perhatian dokumen profil diberikan kepada isu-isu, bukan kepada deskripsi sumberdaya alam ataupun keadaan sosial ekonomi masyarakat desa. Dengan strategi penulisan tersebut pembaca, termasuk anggota masyarakat, diharapkan benar-benar memusatkan perhatiannya kepada persoalan dan tergerak untuk mengatasi persoalan tersebut. Pembaca dokumen tersebut adalah (1) anggota masyarakat, pejabat-pejabat pemerintahan mulai dari desa hingga propinsi untuk membangun kesadaran terhadap adanya permasalahan atau isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat desa untuk dilakukan tindakannya, serta (2) perorangan ataupun lembaga di luar dan di dalam propinsi untuk penyuluhan dan penyebaran hasil pekerjaan Proyek Pesisir.

Manfaat dokumen profil sumberdaya bagi Proyek Pesisir

Bagi suatu proyek yang bermaksud memperkenalkan penerapan konsep pengelolaan pesisir, adanya sebuah rencana pengelolaan merupakan salah satu indikator kemajuan proyek. Adanya rencana pengelolaan tersebut merupakan refleksi dari rangkaian upaya-upaya proyek dalam melakukan intervensi di suatu lokasi agar tujuan pengelolaan sumberdaya pesisir tercapai. Rencana pengelolaan yang tersusun dengan dukungan fasilitas dari proyek seyogyanya mencerminkan langkah-langkah untuk menangani isu-isu yang dihadapi masyarakat. Isu-isu tersebut teridentifikasi dalam tahap kegiatan *issue indentification*. Dengan demikian pada saat intervensi proyek berakhir, dokumen profil sumberdaya merupakan salah satu acuan untuk mengukur apakah isu-isu yang teridentifikasi sudah ditangani dengan baik atau tidak.

Mengapa proses penyusunan profil sumberdaya pesisir perlu didokumentasikan?

Masyarakat di empat desa Proyek Pesisir di Sulawesi Utara sudah menyelesaikan pembuatan dokumen profil sumberdaya wilayah pesisir. Profil desa Bentenan dan Tumbak dimuat dalam satu dokumen karena sumberdaya di kedua desa tersebut akan dikelola dalam satu unit pengelola; profil dua desa lainnya dimuat masing-masing dalam satu dokumen. Dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat serta pemerintah terhadap perlunya kelestarian sumberdaya dan usaha-usaha pemanfaatannya di berbagai desa pantai di Indonesia, pengalaman masyarakat desa Proyek Pesisir di Sulawesi Utara dalam proses penyusunan profil sumberdaya pesisir desa perlu didokumentasikan dan disebarluaskan. Melalui upaya ini pengalaman Proyek Pesisir dapat dijadikan pelajaran oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan ataupun memfasilitasi pengelolaan sumberdaya pesisir.

Metodologi pendokumentasian

Untuk mendapatkan dokumentasi yang baik, Learning Team IPB melakukan kegiatan pendokumentasian yang mencakup penyusunan proposal, perbaikan proposal, pertemuan persiapan, pengkajian dokumen-dokumen, pengamatan ke lapang, wawancara dan workshop (Sondita 2000).

Sebagai catatan, proses penyusunan profil ini sudah disampaikan dalam sebuah *working paper* yang dibuat oleh Crawford and Tulungen (1999).

3. PROSES PENYUSUNAN PROFIL SUMBERDAYA PESISIR

Berbagai kegiatan dilakukan Proyek Pesisir untuk memfasilitasi penyusunan profil sumberdaya pesisir di tingkat desa. Jenis proyek ini relatif baru bagi masyarakat dibandingkan dengan proyek-proyek pembangunan fisik yang biasa dialami. Setelah suatu desa terpilih menjadi desa proyek, sebagai persiapan terhadap kegiatan penyusunan profil Proyek Pesisir secara berurutan melaksanakan program pengenalan, pelatihan dan pembekalan kepada para fasilitator, yaitu penyuluh lapang (*extension officer*), mengidentifikasi calon anggota dan membentuk kelompok inti yang akan bertanggungjawab dalam penyusunan profil sumberdaya, pelatihan kepada anggota kelompok inti, penyuluh lapang dan staf pemerintahan.

Dalam tahap awal Proyek Pesisir memperkenalkan diri kepada masyarakat dan sekaligus Proyek Pesisir mengenali masyarakat sehingga terbina adanya interaksi atau komunikasi positif di antaranya. Masa pengenalan lewat interaksi dan komunikasi tersebut sekaligus digunakan juga untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dan stakeholder pesisir akan pentingnya pengelolaan sumberdaya alam secara baik untuk kepentingan masyarakat. Sosialisasi pengelolaan pesisir dan konsultasi dilakukan kelompok inti tidak hanya dengan anggota masyarakat, tetapi juga dengan staf pemerintahan desa dan kecamatan.

Kegiatan penelitian Segera setelah penetapan keempat desa lokasi proyek, Proyek Pesisir *melakukan baseline studies* di desa Bentenan dan Tumbak, baik aspek sosial-ekonomi (Pollnac *et al.*, 1997b) maupun aspek sumberdaya dan lingkungan (Kusen *et al.*, 1997). Untuk melihat kecenderungan perkembangan sosial ekonomi dan isu-isu pengelolaan pesisir, Proyek Pesisir juga melakukan studi historis pesisir desa Bentenan-Tumbak (Mantjoro, 1997a). Fokus perhatian di tahun 1997/1998 ditujukan pada lokasi Bentenan-Tumbak sementara kegiatan di desa-desa lokasi lain masih bertaraf persiapan. Hal ini dilakukan mengingat pada saat itu masih kapasitas Proyek Pesisir Sulawesi Utara masih relatif rendah, antara lain jumlah staf penyuluh

lapangan yang terlatih (*Extension Officer*) masih kurang. Alasan lain adalah Proyek Pesisir di Sulawesi Utara masih perlu diperkenalkan secara luas untuk mendapatkan dukungan. Upaya ini memerlukan tenaga dan waktu yang tidak sedikit.

Dengan pengalaman dari kegiatan di Bentenan-Tumbak, Proyek Pesisir kemudian melanjutkan kegiatan-kegiatan serupa di desa lokasi proyek lainnya. Output kegiatan-kegiatan tersebut di desa Blongko dan Talise adalah informasi tentang aspek sosial-

Tahapan penyusunan profil isu-isu sumberdaya pesisir:

1. Merangkum isu-isu yang diidentifikasi dalam studi-studi dan diskusi;
2. Pelaksanaan awal;
3. Identifikasi dan pembentukan kelompok inti;
4. Pembentukan tim pendukung teknis;
5. Pelatihan bagi kelompok inti dan tim pendukung teknis;
6. Penyusunan draft profil isu desa oleh kelompok inti;
7. Pengkajian (review) draft profil isu oleh masyarakat desa dan tim teknis
8. Perbaikan draft profil isu dan pencetakan

Sumber: Crawford and Tulungen (1999)

Jenis informasi data dasar yang dikumpulkan di desa Bentenan dan Tumbak

Sosial-ekonomi:

- ◆ Kegiatan produktif rumah tangga
- ◆ Pemanfaatan sumberdaya dan kecenderungannya
- ◆ Jenis rumah dan kekayaan
- ◆ Persepsi masyarakat tentang sumberdaya
- ◆ Keadaan saat ini dan pandangan masa depan
- ◆ Masalah yang dihadapi masyarakat
- ◆ Peraturan-peraturan

Lingkungan

- ◆ Kondisi terumbu karang
- ◆ Kelimpahan ikan karang
- ◆ Lokasi, jenis dan luasan habitat pesisir
- ◆ Sampah

ekonomi untuk p e m a n f a a t a n sumberdaya pesisir (Crawford, 1998; Kussoy, 1998), sejarah penduduk dan lingkungan hidup (Mantjoro, 1997b, Kasmidi, 1998). Kegiatan penelitian ini tidak hanya melibatkan staf Proyek Pesisir (*technical advisor* dan para *extension officer*), tetapi juga

konsultan lokal dan staf pengajar dari perguruan tinggi setempat, yaitu Universitas Sam Ratulangi, Manado. Runtutan kegiatan Proyek Pesisir Sulawesi Utara telah disajikan dalam makalah “Daerah perlindungan laut sebagai model pengelolaan pesisir terpadu: Pengalaman dan pelajaran dari upaya pengelolaan berbasis masyarakat di Minahasa, Sulawesi Utara” untuk lokakarya ini (Burhanuddin *et al.*, 2000).

Informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh proyek di atas adalah bahan yang sangat bermanfaat bagi desain atau perencanaan kegiatan Proyek Pesisir di Sulawesi Utara, tetapi juga sekaligus sebagai bahan penyuluhan untuk pengenalan isu dan konsep pengelolaan sumberdaya pesisir kepada masyarakat yang akan mengelola sumberdaya alam di lingkungannya. Hal ini sangat signifikan mengingat seluruh anggota masyarakat lokasi proyek belum tentu mengenali kondisi alam lingkungannya secara karena bagi mereka semua yang biasa mereka hadapi sehari-hari adalah sesuatu yang normal.

Selain itu isu sumberdaya pesisir diidentifikasi melalui pertemuan formal dan informal yang dihadiri oleh masyarakat, dokumen profil desa yang memuat statistik dan potensi desa serta wawancara dengan informan atau tokoh kunci. Informasi yang diperoleh dari sumber-sumber ini secara hati-hati diperiksa kebenarannya melalui pengamatan silang (*cross check*) mengingat data kemungkinan sudah kadaluarsa, informan maupun tokoh kunci atau masyarakat kurang obyektif.

Kegiatan pelaksanaan awal. Ada jenis kegiatan lain dilakukan oleh Proyek Pesisir yang dapat dikelompokkan sebagai pelaksanaan awal (*early actions*) dan pendidikan lingkungan hidup. Kegiatan pelaksanaan awal merupakan suatu kegiatan yang mengawali kegiatan-kegiatan besar dan berjangka panjang yang menangani isu yang akan tercakup dalam dokumen rencana pengelolaan sumberdaya pesisir tingkat desa (Haryanto *et al.*, 1999). Pelaksanaan awal ini dapat dianggap sebagai proses pembelajaran, sekaligus bermanfaat untuk membangkitkan partisipasi dan menggalang kerjasama antar anggota masyarakat, dan antara mereka dengan Proyek Pesisir dan lembaga-lembaga di tingkat desa. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa kegiatan pelaksanaan awal melibatkan masyarakat dalam rangka mendukung setiap tahapan awal dalam siklus pengelolaan (*policy cycle*, Olsen *et al.*, 1999),

yaitu identifikasi isu, penyusunan *baseline data* dan penyusunan profil desa hingga tersusunnya rencana pengelolaan. Contoh kegiatan pelaksanaan awal di setiap desa proyek dapat dilihat dalam tulisan Haryanto *et al.* (1999).

Merangkum isu-isu yang diidentifikasi dalam studi-studi teknis dan diskusi. Kegiatan identifikasi isu pengelolaan sumberdaya pesisir desa-desa lokasi proyek sudah dilakukan oleh proyek dengan melaksanakan *rapid assessment* pesisir Minahasa (Polnac *et al.*, 1997a) dan *base-line study* (Pollnac *et al.*, 1997b) serta oleh penyuluh lapang setelah mereka ditempatkan secara permanen di desa pada bulan Oktober 1997 (Crawford and Tulungen 1999). Dalam perkembangan selanjutnya, setelah Field Program Manager PP Sulut dan Technical Advisor kembali dari Amerika Serikat pada bulan Juli 1998, kegiatan identifikasi isu sumberdaya pesisir dilakukan lagi dengan pertimbangan bahwa upaya pernah dilakukan belum memadai karena kurang mencerminkan partisipasi masyarakat dalam proses penggaliannya (Crawford and Tulungen, 1999). Proyek Pesisir menerapkan konsep bahwa penggalian dan identifikasi isu-isu harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa agar masyarakat dan pemerintah desa memiliki rasa yang tinggi terhadap isu-isu yang ada di desa. Hal ini penting karena model pengelolaan yang akan diperkenalkan adalah pengelolaan pesisir yang berbasis masyarakat (Crawford dan Tulungen, 1999).

Sebagai persiapan untuk mewujudkan *community-based profiling of coastal resources issues*, PP Sulut menyusun rangkuman isu-isu yang telah diidentifikasi dalam *rapid assessment*, *baseline-study* (Pollnac *et al.*, 1997a, Pollnac *et al.*, 1997b) maupun dokumen *eco-history* desa (Mantjoro, 1997a; Mantjoro, 1997b, Kasmidi, 1998), dan diskusi-diskusi sebelumnya (Crawford and Tulungen, 1999). Rangkuman ini dijadikan catatan dan acuan oleh Proyek Pesisir Sulawesi Utara, khususnya sebagai bahan pelatihan atau penyuluhan dan informasi yang berguna sebagai isi dokumen profil sumberdaya desa.

Identifikasi calon anggota dan pembentukan kelompok inti
Mengingat masyarakat dan pemerintah desa adalah pihak-pihak yang akan aktif menyusun dokumen profil sumberdaya namun belum memiliki kemampuan yang, Proyek Pesisir merasa perlu membangun kapasitas mereka.

Untuk itu PP Sulut memfasilitasi pembentukan kelompok inti yang akan berperan besar dalam penyusunan profil sumberdaya desa. Para anggota kelompok inti tersebut diidentifikasi oleh penyuluh lapangan (*extension officer*) yang tinggal menetap di lokasi proyek.

Pembentukan tim pendukung teknis Agar tugas kelompok inti ini lancar, PP Sulut juga membentuk tim pendukung teknis yang terdiri dari penyuluh lapangan dan staf pemerintah dari kecamatan. Partisipasi staf pemerintahan ini dimaksudkan agar informasi yang ada di desa dapat secara cepat diketahui oleh pimpinan pemerintahan yang lebih tinggi dari desa sehingga dukungan yang diperlukan masyarakat akan diperoleh. Selain itu juga untuk memastikan penanganan isu dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan peluang penggunaan dana pembangunan daerah.

Pelatihan bagi kelompok inti dan tim pendukung teknis Selanjutnya para anggota kelompok inti dan tim pendukung teknis ini kemudian diikutsertakan dalam suatu pelatihan. Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kapasitas mengidentifikasi isu hingga penyusunan profil sumberdaya dan pengelolaan sumberdaya pesisir. Pelatihan dilakukan di Hotel Sahid, Manado, pada tanggal 6-12 September 1998. Materi pelatihan tersebut antara lain mencakup konsep *integrated community-based management* dan metode penggalan isu-isu pengelolaan sumberdaya pesisir serta pendekatan yang diterapkan oleh Proyek Pesisir dalam memfasilitasi pengelolaan berbasis masyarakat (*community-based management*).

Penyusunan draft oleh kelompok inti Di akhir pelatihan tersebut, setiap kelompok inti menyusun *draft* isu-isu pesisir yang dihadapi oleh masyarakat desa masing-masing. Daftar isu yang dibuat mereka tersebut bersifat sementara karena masih merupakan persepsi mereka, bukan hasil galian atau *public hearing* lengkap dari masyarakat luas di desa.

Pengkajian (review) draft profil sumberdaya oleh masyarakat desa dan tim teknis Pelatihan kelompok inti tersebut ditindak-lanjuti dengan penyusunan draft dokumen profil desa oleh kelompok inti yang difasilitasi oleh penyuluh lapangan. Dalam menjalankan tugasnya, kelompok inti berkonsultasi dengan masyarakat dan pimpinan pemerintahan desa.

Tujuan konsultasi ini adalah untuk memperoleh masukan, konfirmasi dan perbaikan terhadap daftar isu dan deskripsi isu-isu yang dihadapi masyarakat desa serta cara menangani isu-isu tersebut. Dalam konsultasi tersebut mereka sekaligus melakukan sosialisasi pengelolaan pesisir terpadu (*integrated coastal management*) dengan menerapkan komunikasi dua arah antara kelompok inti dengan masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan agar konsultasi ini efektif dan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota masyarakat. Penyuluh lapangan dan kelompok inti memiliki strategi untuk mencapai konsultasi efektif tersebut, yaitu dengan memperbanyak jumlah pertemuan konsultasi dimana jumlah peserta yang hadir dibatasi agar tidak terlalu banyak (± 20 orang). Berbagai bentuk pertemuan diterapkan, mulai dari pertemuan informal dari rumah ke rumah, di akhir acara ibadah di tingkat dusun hingga pertemuan umum yang resmi yang difasilitasi oleh pemerintah desa.

Isu-isu sumberdaya pesisir di desa Blongko

- Penanggulangan banjir
- Penyaluran air bersih
- Perusakan hutan (daerah resapan air)
- Perusakan hutang bakau
- Erosi pantai
- Pemasaran hasil perikanan
- Anak putus sekolah
- Penanganan satwa langka
- Penanganan ikan yang merusak
- Pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan

Sumber: Kasmidi *et al.* (1999)

Isu-isu sumberdaya pesisir di desa Talise

- Pemilikan tanah
- Konflik daerah penangkapan ikan
- Kerusakan hutan
- Berkurangnya satwa langka
- Erosi pantai
- Air bersih
- Sampah dan sanitasi lingkungan
- Tingkat pendidikan pendudukan masih rendah
- Rendahnya produktivitas pertanian
- Kerusakan terumbu karang dan bakau

Sumber: Tangkilisan *et al.* (1999)

Salah satu staf kantor kecamatan dari desa proyek adalah anggota *Kabupaten Task Force* (KTF). Dengan terlibatnya staf pemerintahan dalam proses ini, isu-isu sumberdaya pesisir yang diidentifikasi oleh masyarakat dapat diketahui dan kemudian diantisipasi oleh pemerintah, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga Kabupaten Minahasa dan akhirnya pemerintah tingkat Propinsi Sulawesi Utara.

Dalam proses penyusunan dokumen, kelompok inti dan penyuluh lapangan juga berkonsultasi dengan Proyek Pesisir Sulawesi Utara. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah desa dan Tim Teknis Kabupaten, draft profil sumberdaya yang disusun oleh kelompok inti dan penyuluh lapangan diserahkan kepada FPM PP Sulut.

Perbaikan draft profil dan pencetakan. Selanjutnya FPM mengkonsultasikan draft profil sumberdaya tersebut kepada *Technical Advisor* dan Direktur Center for Coastal Resources, University of Rhode Island dalam suatu kunjungan ke Amerika Serikat, khususnya mengenai hal-hal teknis yang tertulis dalamnya dan struktur dokumen (Crawford and Tulungen 1999). Ahli komunikasi di CRC URI memberikan saran-saran tentang layout dokumen dan contoh-contoh profil dari tempat-tempat di negara lain.

Dalam kunjungan FPM PP Sulut di Amerika tersebut, draft profil sumberdaya desa Blongko dikaji dan diperbaiki (Crawford and Tulungen 1999). Bentuk perbaikan menyangkut aspek redaksional, seperti:

- pernyataan isu (*issue statements*),
- ucapan terima kasih yang mencerminkan adanya dukungan dan bantuan dari pejabat-pejabat senior di Propinsi Sulawesi Utara dan pejabat nasional dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah yang telah berkunjung dan mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan perlu adanya daerah perlindungan laut dan kegiatan pelaksanaan awal (*early actions*) di desa,
- restrukturisasi dokumen dengan memindahkan latar belakang proyek dari bagian pendahuluan (*introduction*) ke pengantar (*preface*) yang ditulis bersama oleh FPM PP Sulut, *Technical Advisor* dan *Chief of Party* Proyek Pesisir,
- penambahan satu halaman yang menggambarkan siklus perencanaan dan kebijakan pengelolaan pesisir (*policy cycle*),
- editing di akhir dokumen dengan memperbanyak penjelasan pada bagian

pengelolaan pesisir berbasis masyarakat, dan

- bagian penjelasan daerah perlindungan laut sebagian bagian baru yang terpisah serta mencantumkan lampiran-lampiran, seperti peta terumbu karang yang dibuat masyarakat hasil monitoring dengan manta tow yang melibatkan masyarakat, peta lokasi daerah perlindungan laut, daftar pertemuan-pertemuan penting, pelatihan dan penyuluhan untuk menggambarkan besarnya upaya yang telah dilakukan oleh proyek dan tingkat partisipasi masyarakat.

Profil sumberdaya desa Bentenan-Tumbak dan Talise, FPM dan *Technical Advisor* menyarankan perubahan redaksional yang hampir sama dengan yang dilakukan terhadap profil desa Blongko (Crawford and Tulungen 1999). Termasuk didalamnya adalah rekomendasi untuk memuat kata pengantar dari kepala desa dan camat. Mereka menyarankan juga agar ada penjelasan singkat tentang isu yang telah atau sedang ditangani oleh masyarakat ataupun dinas pemerintahan.

Isu-isu sumberdaya pesisir di desa Bentenan - Tumbak

Aspek sumberdaya alam:

- Pemanfaatan hutan bakau yang berlebihan
- Kerusakan terumbu karang
- Penyebaran populasi sasanai yang berlimpah
- Penangkapan satwa-satwa laut yang dilindungi
- Erosi pantai

Aspek kebutuhan masyarakat:

- Masalah air bersih
- Sanitasi lingkungan
- Sarana jalan kurang memadai
- Peluang pengembangan budidaya rumput laut, usaha penangkapan ikan dan budidaya ikan karang serta intensifikasi pertanian dan perkebunan
- Peranan wanita dalam pengelolaan sumberdaya
- Pengembangan potensi wisata
- Pengelolaan rawa
- Ancaman konflik karena masalah batas desa, areal budidaya rumput laut

Sumber: Petugas Lapangan (1999)

Draft dokumen profil sumberdaya Desa Blongko yang sudah diperbaiki tersebut dan dua draft lainnya dibawa kembali ke tanah air untuk dikaji lagi oleh para penyuluh lapangan (Crawford and Tulungen, 1999). Saat TA tiba kembali di Manado 2 minggu setelah FPM kembali ke Manado, mereka melakukan diskusi tambahan dengan kelompok inti mengenai redaksional, prosedur dan jadwal untuk menyelesaikan ketiga dokumen profil tersebut. Dalam dokumen profil diputuskan untuk tidak perlu mencantumkan tanda-tangan resmi para pejabat pemerintah mengingat dokumen tersebut tidak memuat rekomendasi tujuan pengelolaan maupun aksi yang akan dilakukannya. Sebaliknya rencana pengelolaan (*management plan*) memerlukan tandatangan pejabat desa mengingat isi dokumen tersebut memerlukan persetujuan dari pemerintah desa dan pemerintahan yang lebih tinggi.

Editing terhadap dokumen dilakukan berkali-kali di Manado, kantor PP Sulawesi Utara, dengan masukan dari para penyuluh lapangan, FPM, *technical advisor* dan staf Bappeda yang melakukan *on-the-job training* di Proyek Pesisir. Dokumen profil desa Blongko dirancang lebih mengandalkan gambar-gambar sebagai media komunikasi (dokumen lebih bersifat *pictorial*) sehingga pengaturan layout dan teks agak sulit (Crawford and Tulungen 1999). Draft akhir (*final draft*) profil desa Blongko kemudian dibawa ke masyarakat Blongko untuk ditunjukkan kepada mereka sebelum dicetak dan diperbanyak.

Khusus untuk dokumen profil desa Bentenan-Tumbak dan Talise, FPM dan TA memutuskan bahwa perubahan ini tidak memerlukan review masyarakat lagi. Penyelesaian editing teks dan gambar-gambar dilakukan oleh staf PP Sulut sedangkan layout dokumen dilakukan oleh unit produksi publikasi, Publishing House Proyek Pesisir, yang berbasis di Jakarta.

Isi dokumen profil sumberdaya pesisir. Dokumen ini secara sekilas memberikan indikasi persoalan yang perlu ditangani dan cara mengatasinya, suatu hal yang seyogyanya tercermin dalam dokumen rencana pengelolaan sumberdaya pesisir. Dalam dokumen profil desa Talise ada rencana untuk menangani: (1) masalah perburuan satwa liar (*wildlife*) yang dilakukan oleh orang-orang dari luar desa, (2) masalah penambangan pasir di pantai oleh perusahaan mutiara dan (3) pembuatan daerah perlindungan

laut (Tangkilisan *et al.*, 1999). Penanganan ketiga masalah prioritas tersebut akan dilakukan oleh LKMD, Tim Kerja, petugas lapangan dan Kepala Desa Talise. Sedangkan dalam dokumen profil desa Blongko diterangkan bahwa sebagian isu-isu kelautan sudah ditangani oleh masyarakat dengan ditetapkannya sebuah daerah perlindungan laut seluas 6 hektar di dekat desa (Kasmidi *et al.*, 1999; Sondita *et al.*, 1999). Saat ini sebuah dokumen lain, yaitu dokumen rencana pengelolaan pesisir yang lebih lengkap untuk setiap desa proyek sudah disusun oleh masing-masing masyarakat desa dengan difasilitasi oleh kelompok inti desa (*core group*) dan Proyek Pesisir. Dalam dokumen rencana pengelolaan tersebut tertulis persetujuan formal dari pemerintahan lokal dengan bukti berupa tanda-tangan Kepala Desa. Kaitan antara dokumen profil sumberdaya dan dokumen rencana pengelolaan dapat dilihat dari isu-isu yang tercantum didalam masing-masing dokumen.

Kaitan antara kegiatan penyusunan profil dengan aktifitas lain proyek. Sebagai upaya 'baru' bagi masyarakat dan pemerintah di tingkat desa, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Proyek Pesisir mencerminkan kegiatan pengenalan proyek dan sekaligus kegiatan memfasilitasi inisiatif masyarakat dalam rangka mendukung upaya mereka untuk mengelola sumberdaya alam yang tersedia. Oleh karena itu desain proyek sedikit banyak mencerminkan bentuk-bentuk rencana kegiatan yang seyogyanya dilakukan oleh masyarakat sebagai stakeholder pengelola

Isi profil sumberdaya pesisir desa

Pengantar

Proses penyusunan dan perencanaan

Latar belakang desa

- geografi

- demografi

- sosia-ekonomi

- kondisi lingkungan

Isu prioritas (masalah dan peluang)

Sebab dan akibat

- kecenderungan

- lokasi dan tingkat masalah

- apa yang sudah atau sedang dilakukan

Lampiran

Peristiwa penting untuk sosialisasi proyek, persiapan masyarakat dan proses penyusunan profil

sumberdaya pesisir. Sebagai contoh, proyek juga melakukan *issue identification* dalam rangka mendesain program-program yang akan dilaksanakan proyek karena proyek ingin upaya yang dilakukan dengan biaya mahal ini tidak sia-sia. Karena pengelolaan pesisir yang didesain menerapkan paradigma ‘berbasis masyarakat ~ *community-based*’, maka *issue identification* yang sesuai adalah identifikasi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Selain proses penyusunan dokumen profil sumberdaya yang dibuat oleh masyarakat, dalam tulisan ini disajikan juga kegiatan-kegiatan pendahuluan Proyek Pesisir.

Input yang diperlukan dalam penyusunan profil sumberdaya.

Sekitar 9 (sembilan) bulan diperlukan untuk menyusun profil sumberdaya desa, mulai dari persiapan hingga pencetakannya (Crawford and Tulungen, 1999). Panjangnya waktu tersebut merupakan konsekuensi logis dari pendekatan berbasis masyarakat karena pertemuan umum dan pelatihan ataupun penyuluhan memerlukan waktu untuk persiapan dan pelaksanaannya. Input yang digunakan untuk menyusun profil sumberdaya mencakup tenaga manusia (tenaga ahli, tenaga penyuluh, waktu, barang (alat tulis kantor, dan lain-

Komposisi tim pendukung teknis

Jenis keahlian yang diperlukan untuk mendukung masyarakat dalam penyusunan profil sumberdaya:

- Ahli ekologi/biologi laut
- Ahli sosio-ekonomi
- Ahli antropologi
- Ahli hukum dan peraturan
- Ahli lainnya sesuai dengan isu yang teridentifikasi

lain) dan dana. Berikut adalah contoh kebutuhan biaya dalam rangka kegiatan penyusunan profil sumberdaya pengelolaan. Input pertama adalah pelatihan pengelolaan pesisir secara terpadu yang diselenggarakan oleh Proyek Pesisir dengan jumlah peserta 27 orang. Sebagai contoh, pelatihan ini dilaksanakan di sebuah hotel di Manado selama 6 hari, mulai tanggal 6-12 September 1998 dengan anggaran biaya sebesar Rp. 22.800.000,- . Untuk kegiatan pertemuan masyarakat di desa anggaran biaya biasanya hanya untuk teh dan kue atau makanan kecil.

Tindak-lanjut setelah dokumen profil sumberdaya tersusun

Dokumen profil dirancang dengan suatu format yang mempertimbangkan teknik reproduksi dokumen oleh lembaga-lembaga lokal. Dokumen profil sumberdaya desa tersebut ini ditujukan terutama bagi: (1) masyarakat desa dan staf pemerintahan di dalam propinsi agar mereka menyadari permasalahan yang ada di desa dan mengambil langkah-langkah penanganan, (2) lembaga maupun perorangan di luar dan di dalam

propinsi untuk penyuluhan dan penyebaran hasil pekerjaan Proyek Pesisir. Oleh karena itu, dokumen tersebut akan disebarluaskan kepada: (1) masyarakat

Tindak lanjut setelah profil sumberdaya tersusun:

1. Menyebarkan dan membahas isi dokumen dengan masyarakat dan pemerintah setempat
2. Menyelenggarakan lokakarya kelompok inti untuk persiapan rencana pengelolaan (*management plan*)
3. Menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat untuk membicarakan draft rencana pengelolaan
4. Memastikan ada pengkajian rencana pengelolaan oleh tim pendukung teknis
5. Rencana pengelolaan mendapatkan persetujuan resmi dari masyarakat dan kepala pemerintah setempat
6. Mengalokasikan anggaran dan merencanakan kegiatan tahunan
7. Pelaksanaan rencana pengelolaan oleh masyarakat dan dinas pemerintahan terkait

desa, yang diwakili oleh kantor desa, LKMD, kepala dusun, dan sekolah setempat, (2) kantor camat, Bappeda Kabupaten Minahasa dan dinas-dinas pemerintah, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan dan lain-lain. Mengingat Proyek Pesisir juga ingin membagi pengalamannya dan diseminasi kegiatannya kepada pihak luas, maka dokumen juga akan disiapkan untuk disebarluaskan kepada mereka, baik di dalam maupun di luar propinsi. Di masa yang akan datang, para penyusun rencana pengelolaan sumberdaya pesisir diharapkan dapat menggunakan dokumen profil sumberdaya dalam rangka mencoba menerapkan model pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang desentralisasi dengan berbasis masyarakat.

4. PELAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL DARI PROSES

PENYUSUNAN PROFIL SUMBERDAYA DESA

4.1 Faktor kelancaran penyusunan dokumen profil

Dari proses penyusunan profil sumberdaya pesisir untuk ke-empat desa proyek tersebut kiranya dapat diidentifikasi faktor pendorong kelancaran kegiatan profiling sumberdaya oleh masyarakat, faktor penghambat atau yang menjadi kendala kelancaran kegiatan profiling, manfaat dokumen profil sumberdaya desa bagi masyarakat desa dan pemerintahannya, dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan profile sumberdaya. Faktor-faktor tersebut tercermin dalam prinsip-prinsip yang diterapkan PP Sulut untuk mengantisipasinya.

Prinsip yang diterapkan Proyek Pesisir dalam memfasilitasi penyusunan profil sumberdaya

- ◆ memberi kesempatan/waktu yang cukup kepada masyarakat hingga mereka dapat menyatakan dan mengidentifikasi isu, memahami penyebabnya dan memahami apa yang harus dilakukan untuk menangani isu;
- ◆ merancang dan memfasilitasi penyuluhan kepada masyarakat dan berbagai pihak lainnya;
- ◆ memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengkonsultasikan isu yang mereka identifikasi kepada pihak lain untuk mendapat masukan;
- ◆ menempatkan seorang penyuluh lapang yang akan memfasilitasi masyarakat dalam penggalian isu; kriteria seorang penyuluh lapangan;
- ◆ menempatkan asisten penyuluh lapangan yang berasal dari kalangan masyarakat setempat untuk memperlancar komunikasi antara masyarakat dengan penyuluh lapangan; kriteria seorang asisten penyuluh lapangan;
- ◆ memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok inti yang terlibat banyak dalam penyuluhan, identifikasi dan pembahasan isu-isu bersama masyarakat dalam rangka penyusunan dokumen profil sumberdaya;
- ◆ menyediakan informasi/data sekunder dari hasil-hasil survey/studi yang diperlukan untuk penyusunan dokumen profil sumberdaya;
- ◆ peran penting pemerintahan desa dan instansi lainnya dalam proses penyusunan profil sumberdaya;

4.2 Dampak kegiatan penyusunan dokumen profil sumberdaya pesisir

Partisipasi berbagai pihak, yaitu anggota masyarakat, pejabat pemerintah dan Proyek Pesisir mendapat pengalaman luar biasa dari kegiatan p e n y u s u n a n dokumen profil sumberdaya pesisir. P e n g a l a m a n menerapkan prinsip berbasis masyarakat atau *community-based* ini memberikan manfaat bagi masing-masing pihak. Terutama dalam mempersiapkan mereka berpartisipasi m e n g e l o l a sumberdaya alam pesisir secara terpadu.

Dampak proses penyusunan dokumen profil isu sumberdaya pesisir di desa proyek bagi masyarakat dan pemerintah setempat

- ◆ Memiliki pengalaman cara untuk mengenali kondisi sumberdaya dan permasalahan yang dihadapi, penyebabnya dan cara pemecahannya;
- ◆ Terbinanya pemerintah desa untuk menggali aspirasi dan mendidik masyarakat;
- ◆ Terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah desa sebagai pengelola dan masyarakat desa sebagai stakeholder utama;
- ◆ Masyarakat desa mempunyai landasan yang kuat dan siap untuk menyusun rencana pengelolaan (*management plan*).
- ◆ Dokumen profil isu dapat dijadikan tolok-ukur kemajuan pelaksanaan proyek (*project milestone*).

Manfaat bagi masyarakat desa

Kegiatan penyusunan profil sumberdaya pesisir desa merupakan proses yang membuka mata masyarakat untuk mengetahui keadaan sumberdaya alam dan lingkungan secara lebih baik lagi. Pertemuan-pertemuan untuk program penyuluhan maupun untuk menjaring masalah yang mereka hadapi dan untuk mengkonfirmasi isu-isu yang diidentifikasi oleh kelompok inti merupakan media untuk pembelajaran masyarakat. Sebelum penyusunan profil dilakukan, anggota yang mengetahui sumberdaya alam dan lingkungannya dengan baik hanyalah stakeholder tertentu. Sebagai contoh, yang tahu persis bagaimana keadaan terumbu karang adalah mereka yang suka mencari ikan sambil menyelam. Yang paling tahu persis tentang keadaan mangrove hanyalah mereka yang menggunakan kayu mangrove

sebagai bahan kayu bakar. Demikian juga dengan keadaan satwa liar di hutan paling baik diketahui oleh para pemburunya. Dapat disimpulkan bahwa dengan kegiatan penyusunan profil ini maka secara umum pengetahuan masyarakat desa terhadap sumberdaya dan lingkungannya menjadi lebih baik. Sehingga persoalan atau isu yang berkaitan dengan sumberdaya pesisir dan cara penanganannya diketahui oleh orang banyak. Pengetahuan terhadap permasalahan ini merupakan salah satu kunci sukses pengelolaan yang akan diterapkan.

Manfaat bagi pemerintah daerah Mengingat sebagian besar anggota kelompok inti yang bertanggungjawab untuk penyusunan profil sumberdaya desa adalah staf pemerintahan desa, seperti kepala urusan dan ketua dusun, maka secara tidak langsung kegiatan penyusunan profil desa meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam hal mengidentifikasi permasalahan pesisir yang dihadapi, mengerti penyebabnya dan tahu strategi atau cara penanganan masalah atau isu yang ada. Oleh karena proses dan hasil temuan dari penyusunan profil ini juga dikomunikasikan dengan kepala pemerintahan wilayah, baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun propinsi. Dengan profil pemerintah desa dapat menyusun perencanaan pembangunan desa secara lebih baik dan lebih terarah, khususnya dalam penanganan masalah dan peluang. Di lain pihak, camat, bupati dan gubernur dapat mengetahui kondisi desa dan aspirasi atau harapan masyarakat desa dengan jelas sehingga dukungan upaya dan rencana pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan desa tersebut tentu saja diharapkan mencerminkan pengelolaan sumberdaya pesisir desa. Dampak ini akan terus bergulir untuk perencanaan wilayah yang lingkungannya lebih luas, misalnya wilayah kecamatan dan kabupaten.

Selama proses berlangsung terjadi kontak antara staf pemerintahan desa dengan masyarakat dimana pihak pertama belajar untuk mendengar dan menggali aspirasi masyarakat. Belajar mendengar ini telah dijadikan persyaratan untuk mewujudkan adanya ciri '*community based*' dalam keputusan desa mengenai pengelolaan sumberdaya pesisir.

Manfaat bagi proyek Sebagai proyek yang memfasilitasi penerapan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu di tingkat desa, penyusunan profil desa ini merupakan dasar yang dapat dijadikan acuan untuk penyusunan rencana pengelolaan sesuai dengan aspirasi masyarakat, artinya rencana pengelolaan yang menjawab permasalahan yang diidentifikasi oleh masyarakat. Selain itu, proses penyusunan profil ini akan membangkitkan semangat dan dukungan masyarakat untuk pengembangan rencana pengelolaan. Dengan tersusunnya dokumen profil yang dibuat oleh dan digali dari masyarakat, Proyek Pesisir mempunyai landasan kuat bahwa masyarakat desa telah siap untuk menyusun *community-based coastal resources management plan*.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan profil sumberdaya pesisir menyangkut persiapan, kapasitas proyek dan masyarakat, partisipasi masyarakat, informasi dan waktu. Secara umum, pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat dimulai setelah masyarakat siap dalam arti mereka sudah memiliki komitmen, mereka sudah memiliki kemampuan dan mereka sudah mendapatkan dukungan dari pihak yang akan memfasilitasi proses pengelolaan pesisir berbasis masyarakat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan profil sumberdaya pesisir desa

- ◆ Siapkan waktu yang cukup untuk sosialisasi proyek dan kegiatan-kegiatan untuk menyiapkan masyarakat
- ◆ Tingkatkan kapasitas staf proyek dan masyarakat
- ◆ Pastikan ada partisipasi yang cukup dari masyarakat dan pemerintah setempat
- ◆ Gunakan informasi dari hasil penelitian terdahulu dan data sekunder untuk identifikasi isu dan penyusunan dokumen profil sumberdaya
- ◆ Bersiaplah untuk perkembangan kemajuan proyek sesuai dengan kemampuan dan kesiapan penyuluh lapangan dan masyarakat

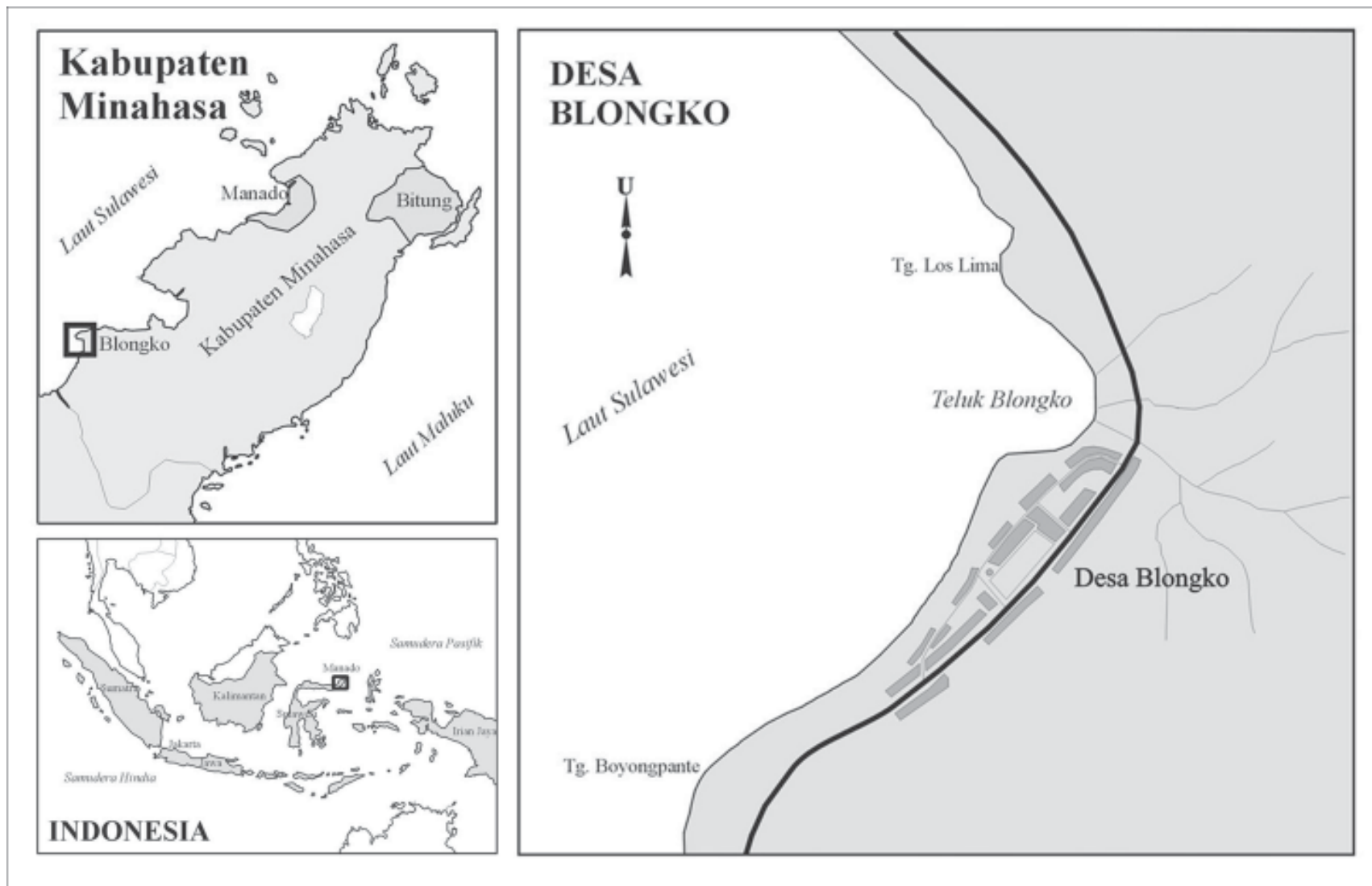
PUSTAKA

- Burhanuddin, Sondita, M.F.A., B.R. Crawford, J. Tulungen, C. Rotinsulu, A. Sukmara, M.Kasmidi, M.T. Dimpudus, N. Tangkilisan, F. Kesuma, A. Agus, C. Saruan, E. Ngangi dan S. Dajoh. 2000. *Daerah perlindungan laut sebagai model pengelolaan pesisir terpadu: Pengalaman dan pelajaran dari upaya pengelolaan berbasis masyarakat di Minahasa, Sulawesi Utara*. Learning Workshop, 21-24 Maret 2000.
- Crawford, B.R. 1999. Monitoring and evaluation of a community-based marine sanctuary: the Blongko village example. Working Paper. Proyek Pesisir USAID/BAPPENAS NRM II Program. 7p.
- Crawford, B.R. and J. Tulungen. 1998a. *Marine sanctuaries as a community-based coastal resources management model for North Sulawesi and Indonesia*. Proyek Pesisir USAID/BAPPENAS NRM II Program. 7p.
- Crawford, B.R. and J. Tulungen. 1998b. *Methodological approach of Proyek Pesisir in North Sulawesi*. Working Paper. Proyek Pesisir USAID/BAPPENAS NRM II Program. 7p.
- Crawford, B.R. and J. Tulungen. 1999. *Preliminary documentation of the village profiling process in North Sulawesi*. Proyek Pesisir USAID/BAPPENAS NRM II Program. 9p.
- Epler, B. and S. Olsen. 1993. A profile of Ecuador's coastal region. Technical Report Series: TR2047. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island.
- Haryanto, B., M.F.A. Sondita, N.P. Zamani, A. Tahir, Burhanuddin, J. Tulungen, C. Rotinsulu, A. Siahainenia, M. Kasmidi, E. Ulaen dan P. Gosal. *Kajian terhadap konsep early action (pelaksanaan awal) Proyek Pesisir Sulawesi Utara*. Dalam Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, Burhanuddin, A. Tahir dan B. Haryanto (editors). 1999. *Pelajaran dari Pengalaman Proyek Pesisir 1997-1999*. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir, Bogor, 1 Maret 1999. PKSPL-Institut Pertanian Bogor dan CRC-University of Rhode Island. 5-27.
- Kasmidi, M. 1998. *Sejarah penduduk dan lingkungan hidup desa Blongko, Kecamatan Tenga*. Proyek Pesisir Technical Report No. TE-98/01-I. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode island.
- Kasmidi, M., A. Ratu, E. Armada, J. Mintahari, I. Maliasar, D. Yanis, F. Lumolos, N. Mangampe. 1999. *Profil sumberdaya wilayah pesisir desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. Proyek Pesisir, Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. 32 hal.
- Kusen, J., B. Crawford, A. Siahainenia dan C. Rotinsulu. 1997. *Laporan data dasar sumber daya wilayah pesisir di Bentenan-Tumbak*. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett. 108pp.
- Kusen, J., B.R. Crawford, A. Siahainenia dan C. Rotinsulu. 1999. *Laporan data dasar sumber daya wilayah pesisir desa Talise, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara*. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett. 53pp.
- Kussoy, P., B.R. Crawford, M. Kasmidi dan A. Siahainenia. *Aspek sosial ekonomi untuk pemanfaatan sumberdaya pesisir di desa Blongko, Sulawesi Utara*. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode island.
- Mantjoro, E. 1997a. An ecological and human history of Bentenan dan Tumbak villages. Coastal Resources Management Project – Indonesia, NRM II Program

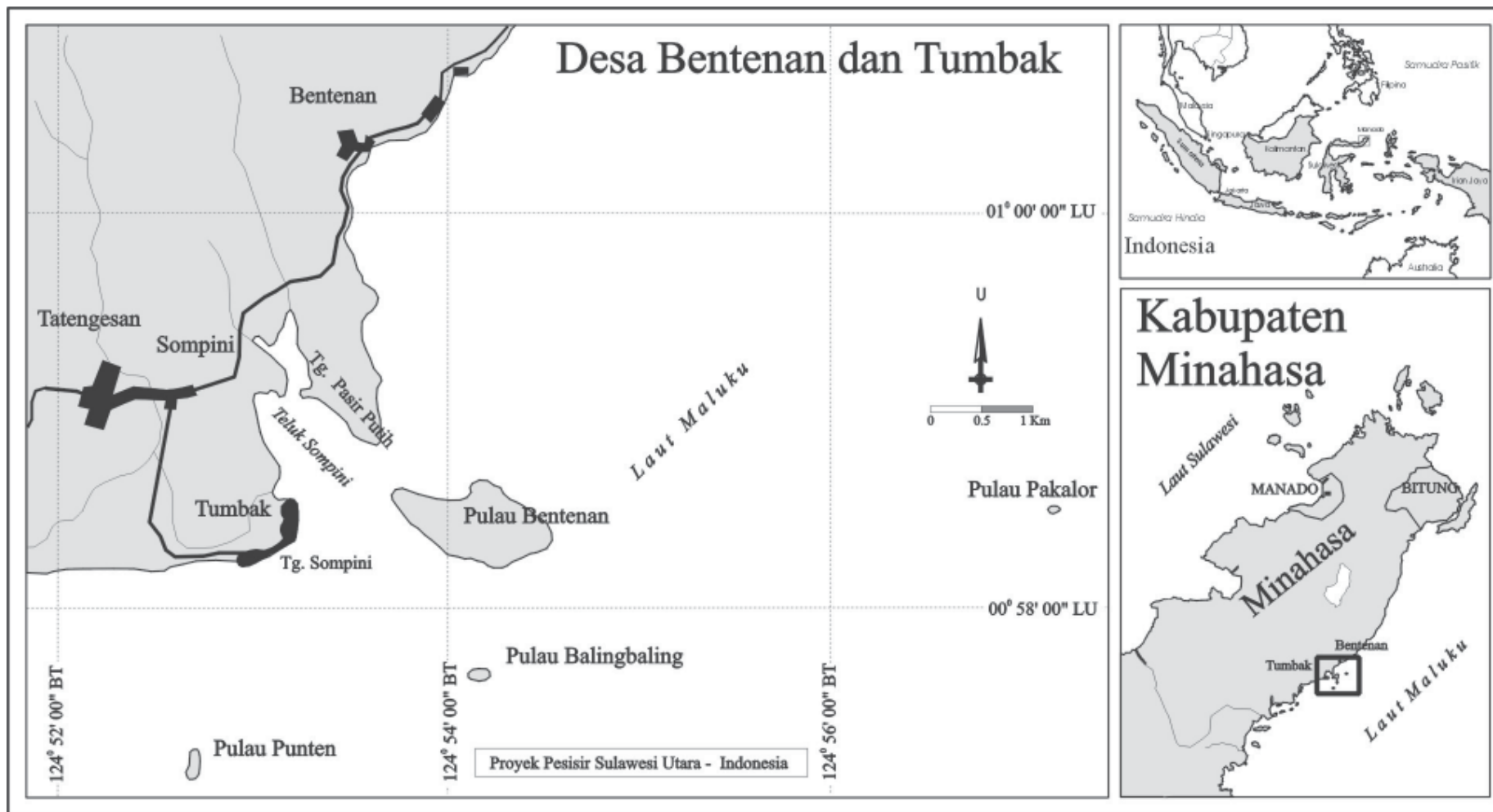
- Mantjoro, E. 1997b. *Sejarah penduduk dan lingkungan hidup desa Talise*. Proyek Pesisir Technical Report No. TE-97/03-I. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett. 21p.
- Olsen, S.B., K. Lowry and J. Tobey. 1999. *The common methodology for learning: a manual for assessing progress in coastal management*. Coastal Resources Center, University of Rhode Island. 56p.
- Petugas Lapangan, Wakil Masyarakat Desa Bentenan dan Desa Tumbak. 1999. *Profil serta rencana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Desa Bentenan dan Desa Tumbak, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Narragansett dan Bappeda Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.
- Pollnac, R.B., C. Rotinsulu, and A. Soemodinoto. 1997b. *Rapid assessment of coastal management issues on the coast of Minahasa*. Narragansett RI: Coastal Resources Center, University of Rhode Island.
- Pollnac, R.B., F. Sondita, B. Crawford, E. Mantjoro, C. Rotinsulu, and A. Siahainenia. 1997b. *Baseline Assessment of Socioeconomic Aspects of Resource Use in Bentenan and Tumbak*. Narragansett RI: Coastal Resources Center, University of Rhode Island.
- PP SULUT. 1999. *Profil sumberdaya wilayah pesisir desa Bentenan dan Tumbak, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. Proyek Pesisir, Manado. 47 hal.
- Proyek Pesisir. 1998. *Year two workplan (April 1998 - March 1999)*. Coastal Resources Management Project, Jakarta. 49p.
- Proyek Pesisir. 1999. *Year three workplan (April 1999 - March 2000)*. Coastal Resources Management Project, Jakarta. 101p.
- Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, Burhanuddin, A. Tahir dan B. Haryanto (editors). 1999. *Pelajaran dari Pengalaman Proyek Pesisir 1997-1999*. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir, Bogor, 1 Maret 1999. PKSPL-Institut Pertanian Bogor dan CRC-University of Rhode Island. 87 hal.
- Tangkilisan, N., V. Samuel, F. Masambe, E. Mungga, I. Makaminang, M. Tahumil dan S. Tompoh. 1999. *Profil sumberdaya wilayah pesisir desa Talise, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara*. Proyek Pesisir, Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. 28 hal.
- Zamani, N.P., M.F.A. Sondita, J. Tulungen, B. Wiryawan dan R. Malik. 1999. *Provincial Working Group: suatu upaya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan*. Dalam Sondita, M.F.A., N.P. Zamani, Burhanuddin, A. Tahir dan B. Haryanto (editors). 1999. *Pelajaran dari Pengalaman Proyek Pesisir 1997-1999*. Prosiding Lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir, Bogor, 1 Maret 1999. PKSPL-Institut Pertanian Bogor dan CRC-University of Rhode Island. 28-44.
- Zieren, M., O. Suhar dan D. Krisnabudhi. 1997. *Profil lingkungan wilayah pesisir Propinsi Riau, Indonesia*. Bappeda Tk I Riau, Ditjen Pembangunan Daerah, UNDP.



Peta Lokasi Desa Talise



Peta Lokasi Desa Blongko



Peta Lokasi Desa Bentenan Tumbak

PROSES PENYUSUNAN PROFIL TELUK BALIKPAPAN BERDASARKAN ISU PENGELOLAAN

Oleh :

**Bambang Haryanto, Amiruddin Tahir, Ramli Malik, Ary S. Dharmawan,
Ahmad Setiadi, Audrie J. Siahainenia, Achmad Yani,
Kasmawaty dan Romif Erwinadi**

ABSTRAK

Proyek Pesisir Kalimantan Timur (PP KALTIM) merupakan salah satu program lapangan Proyek Pesisir dengan tujuan strategis adalah desentralisasi dan penguatan kelembagaan dalam rangka pengelolaan sumberdaya pesisir, khususnya Teluk Balikpapan. Pengelolaan Teluk Balikpapan merupakan pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam Teluk Balikpapan (sumberdaya alam darat dan laut) sesuai kondisi aktual kawasan tersebut (kondisi biofisik, sosial-ekonom-budaya masyarakat, tekanan terhadap sumberdaya alam, serta perencanaan dan program yang pembangunan yang sudah ada). Hingga saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki perencanaan khusus untuk mengelola kawasan Teluk Balikpapan. Kalaupun ada, perencanaan wilayah setempat masih berdasarkan pendekatan batas administratif, bukan pendekatan ekologis. Oleh karena itu, proses perencanaan pengelolaan Teluk Balikpapan menerapkan pendekatan perencanaan secara terpadu (wilayah dan ekologi, sektor, *stakeholder* dan disiplin ilmu), komprehensif (penilaian menyeluruh terhadap isu-isu pengelolaan) dan partisipatif (melibatkan stakeholder sejak awal proses perencanaan).

Salah satu kegiatan penting dalam menyusun rencana pengelolaan Teluk Balikpapan adalah penyusunan profil Teluk Balikpapan; kegiatannya disebut *profiling*. Tahapan atau proses penyusunan profil ini adalah identifikasi isu, kajian teknis, kompilasi hasil-hasil penelitian, analisis dan konsultasi untuk penyusunan dokumen profil, penyusunan dokumen profil, dan distribusi serta sosialisasi profil. Selama 16 bulan (Oktober 1998-Februari 2000) PP KALTIM telah menyelesaikan proses *profiling* sampai tahap analisis dan konsultasi untuk penyusunan dokumen profil. Isu yang diprioritaskan untuk ditangani ada 9 (sembilan) buah, yaitu konversi lahan, kerusakan mangrove, erosi dan abrasi, sedimentasi dan siltasi, kepemilikan lahan, tumpang tindih perencanaan, pencemaran, kurangnya air tawa, dan reklamasi pantai. Studi-studi teknis yang dilaksanakan dalam *profiling* mencakup aspek sosial-ekonomi, sosial-budaya, biofisik, dan aspek perencanaan dan kebijakan. Sedangkan komponen stakeholder yang terlibat dalam proses *profiling* adalah instansi pemerintah, tenaga ahli dari perguruan tinggi dan konsultan), perusahaan swasta dan BUMN/BUMD, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat desa/kelurahan di sekitar Teluk Balikpapan.

Pelajaran (*lessons learned*) yang dapat dipetik dari pengalaman kegiatan *profiling* Teluk Balikpapan yang dilaksanakan PP KALTIM bersama stakeholder adalah keterlibatan/partisipasi stakeholder yang luas dalam proses *profiling*, penggunaan metode yang efektif dalam pengumpulan informasi, kajian-kajian teknis yang berbasis isu-isu, manfaat proses *profiling* dan outputnya sebagai acuan utama dalam proses perencanaan pengelolaan Teluk Balikpapan, dan penggunaan media massa dalam *profiling*.

Keywords: Pengelolaan teluk, profil teluk, pengelolaan teluk terpadu, teluk Balikpapan,

ABSTRAK

Proyek Pesisir Kalimantan Timur (PP KALTIM) is a field program to promote decentralization and institutional strengthening of coastal management, especially Balikpapan Bay. Management of Teluk Balikpapan is an effort to control the utilization of natural resources of the Bay which should be based on local condition (biophysical, social-economy of community, environmental pressures, and existing management plan developed by local government). Until now, management scheme for Balikpapan Bay does not exist. If there is any, such plan is administrative-based, not ecological-based. Therefore, there is a need to develop a management plan for Balikpapan Bay; such plan must be integrated, i.e., integration of administrative and ecological aspects, development sectors, stakeholders and scientific aspects), comprehensive (covers all main management issues) and involved local stakeholders as early as possible at planning phase.

One key activity conducted by PP KALTIM is development of profile of Balikpapan Bay. This activity consists of issue identification, technical studies, compilation of information from research and technical studies, analysis and consultative meeting for profile development, development of profile, distribution of the document and its socialization. Over 16 months, from Oktober 1998 until Februari 2000, the activity has reached analysis stage and consultative meeting. There are 9 (nine) prioritized issues identified, i.e., habitat conversion, degradation of mangrove habitats, coastal erosion and abrasion, sedimentation and siltation, land ownership, overlapped planning, pollution, lack of drinking water, and reclaimed coastal area. Technical studies for the purpose of profile development include socio-economic, biophysical, planning and policy studies. Participants of profiling activities include officials from government agencies, experts from universities and consultant firms, private companies, state-owned companies, non-governmental organization, and community from villages surrounding the Bay.

Some lessons learned from experience of Proyek Pesisir in developing profile of the Bay are active participation of local stakeholders, use of effective strategy to obtain information, technical studies to investigate the issues identified previously, use of information in the profile as the basis for management plan development, and use mass-media for profiling.

Keywords: bay management, bay profile, Balikpapan bay, integrated management of bay,

1. PENDAHULUAN

1.1 Pemilihan kawasan Teluk Balikpapan

Proyek Pesisir Kalimantan Timur (PP KALTIM) merupakan salah satu program lapangan dari Proyek Pesisir Indonesia dengan tujuan strategis adalah desentralisasi dan penguatan kelembagaan dalam rangka pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, khususnya Teluk Balikpapan. Pemilihan Teluk Balikpapan sebagai lokasi spesifik pengelolaan wilayah pesisir di Propinsi Kalimantan Timur didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan hasil diskusi antara *stakeholder* di Propinsi Kalimantan Timur yang melakukan pemilihan lokasi dengan kriteria bahwa kawasan:
 - memiliki aktivitas industri yang tinggi,
 - memiliki tekanan lingkungan yang besar,
 - dapat diakses masyarakat dengan mudah,
 - memiliki permasalahan yang masih dapat dikelola (*manageable*).
- b. Dalam mengimplementasikan programnya, Proyek Pesisir ingin menerapkan contoh pengelolaan yang berbasis kawasan ekologi khusus (*special area management*), dalam hal ini kawasan teluk.
- c. *Stakeholder* kawasan yang terpilih memiliki kapasitas perencanaan dan dapat ditingkatkan serta mampu melakukan sosialisasi proyek sebagai wujud dari adanya dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat terhadap pelaksanaan proyek

1.2 Kegiatan Proyek Pesisir Kalimantan Timur

Proyek Pesisir Kalimantan Timur (PP KALTIM) mulai aktif sejak bulan Oktober 1998 dengan kegiatan utama meliputi enam komponen, yaitu:

- Komponen manajemen dan koordinasi, meliputi kegiatan pembukaan kantor, pelatihan staf, pengembangan sistem administrasi sesuai dukungan dari penyandang dana, persiapan dan pengadaan peralatan kerja, dan koordinasi kegiatan.
- Komponen penelitian dan pengembangan, meliputi kegiatan: (1) penelitian lingkungan Teluk Balikpapan, (2) kajian sosial-ekonomi masyarakat Teluk Balikpapan di Desa Jenebora dan Kariangau, (3) penyusunan peta-peta

wilayah implementasi proyek, (4) identifikasi dan analisis isu, (5) valuasi ekonomi Teluk Balikpapan, (6) survei tataguna tanah (*land use*), dan (7) studi kearifan pengelolaan mangrove oleh masyarakat di Teluk Balikpapan.

- Komponen kebijakan, meliputi kegiatan: (1) penyusunan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir (bersama Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur, (2) pengkajian dan diseminasi rencana strategis pengelolaan pesisir yang telah disusun oleh Proyek MREP.
- Komponen penguatan kelembagaan yang dilaksanakan dalam bentuk memfasilitasi pemantapan *Provincial Task Force*/PTF sebagai lembaga koordinasi program-program pesisir dan pengembangan berbagai contoh yang akan dilakukan di Kalimantan Timur. Forum-forum koordinasi dilakukan melalui berbagai pertemuan dan seminar/lokakarya yang melibatkan anggotanya (instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan perusahaan swasta).
- Komponen pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat luas, dilakukan dengan melaksanakan berbagai lokakarya, pelatihan-pelatihan dan studi banding.
- Komponen diseminasi pengelolaan pesisir, dilakukan melalui berbagai media masa lokal dan nasional (koran dan televisi) berupa artikel, peliputan, dan paket-paket penyiaran atas kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat

1.3 Pengertian pengelolaan Teluk Balikpapan

Pengelolaan Teluk Balikpapan adalah pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam Teluk Balikpapan (meliputi sumberdaya alam darat dan laut) yang disesuaikan dengan kondisi aktual kawasan Teluk Balikpapan yang mencakup potensi sumberdaya alam (biofisik), kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kecenderungan tekanan terhadap sumberdaya alam, serta perencanaan dan program pembangunan yang sudah ada, seperti, Tata Ruang Propinsi, Tata Ruang Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan, Rencana Strategis Propinsi Kalimantan Timur dan Kawasan Pengembangan Terpadu (Kapet) SASAMBA.

Pengelolaan Teluk Balikpapan yang akan diperkenalkan dan diterapkan oleh PP KALTIM bersama dengan *stakeholder* adalah pengelolaan kawasan berbasis ekologis *watershed area* atau pendekatan sistem daerah aliran sungai (DAS). Pendekatan ini diterapkan mengingat pengelolaan pesisir Teluk Balikpapan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan lahan atas (*upland*) yang masih termasuk ke dalam kawasan sistem DAS Teluk Balikpapan karena yang terjadi di lahan atas akan berpengaruh terhadap kawasan pesisir. Peningkatan sedimentasi dan siltasi di muara sungai dan pesisir Teluk Balikpapan disebabkan oleh erosi yang terjadi di lahan atas akibat konversi lahan, seperti untuk pertanian, perkebunan, dan kegiatan hutan tanaman industri (HTI), yang dilakukan dengan tidak mengindahkan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dalam konteks pengelolaan kawasan, Teluk Balikpapan merupakan suatu kesatuan kawasan yang terdiri dari kawasan pesisir dan laut serta lahan atas (*upland*) suatu sistem daerah aliran sungai (DAS) yang mencakup areal seluas 211.456 ha dan terdistribusi dalam tiga daerah administratif, yaitu Kabupaten Pasir, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai (Gambar 1). Namun berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas PP KALTIM (dana, waktu dan sumberdaya manusia), maka fokus perencanaan pengelolaan kawasan Teluk Balikpapan hanya meliputi daerah administratif Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan seluas 207.096 ha (Gambar 2).

Dalam proses perencanaan pengelolaan Teluk Balikpapan, pendekatan perencanaan yang digunakan adalah perencanaan pengelolaan secara terpadu, komprehensif, dan partisipatif. Pendekatan secara terpadu mengandung arti bahwa perencanaan pengelolaan Teluk Balikpapan tidak lagi berorientasi pada pendekatan sektoral baik kawasan (administratif) maupun aspek (sektor-sektor pembangunan), tetapi berorientasi pada keterpaduan, baik keterpaduan wilayah/ekologis, sektor-sektor pembangunan, stakeholder dan disiplin ilmu. Perencanaan secara komprehensif mengandung makna perencanaan pengelolaan dilakukan melalui penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh isu dan permasalahan yang terdapat di Teluk Balikpapan, dengan demikian perencanaan yang dibuat tidak lagi secara parsial. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan stakeholder Teluk Balikpapan secara

aktif dalam seluruh proses-proses perencanaan yang dilakukan. Dengan demikian proses pengelolaan Teluk Balikpapan dilakukan secara kontinyu dan dinamis dengan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi dan budaya serta aspirasi masyarakat pengguna wilayah pesisir serta konflik-konflik yang mungkin ada.

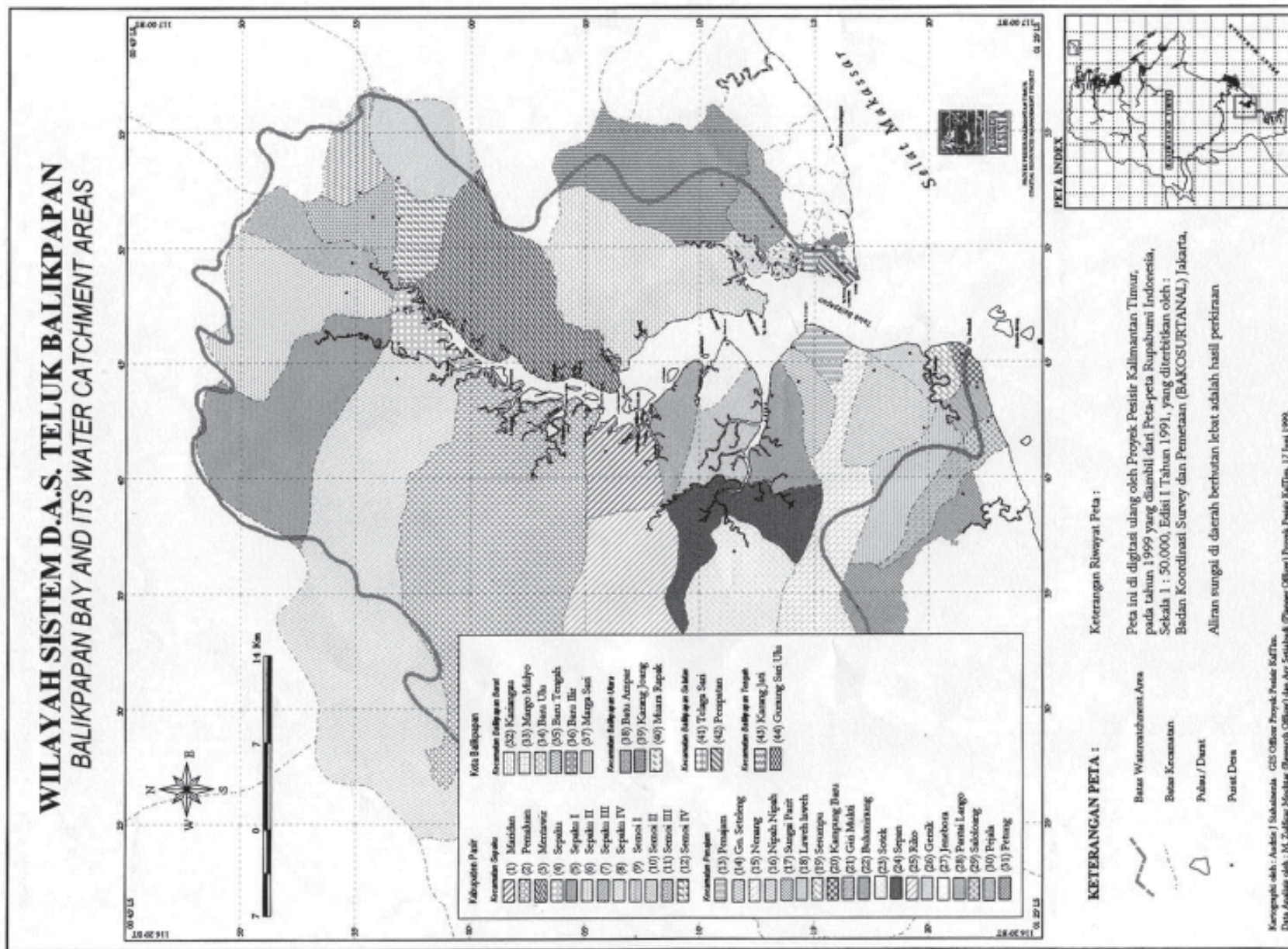
1.4 Proses perencanaan Teluk Balikpapan

Proses/tahapan perencanaan pengelolaan Teluk Balikpapan yang diterapkan di Kalimantan Timur pada dasarnya mengacu pada siklus kebijakan (*policy cycle*) yang diadopsi dari GESAMP (1996) yang terdiri atas 5 tahap, yaitu (1) identifikasi dan analisis isu; (2) persiapan dan perencanaan program pengelolaan Teluk Balikpapan, (3) adopsi program, (4) implementasi; (5) monitoring dan evaluasi (Olsen *et al.*, 1999). Sampai dengan bulan Februari 2000, PP KALTIM masih dalam tahap identifikasi isu dan awal tahap kedua (tahap perencanaan). Kegiatan yang telah dilakukan pada tahap pertama dan kedua disajikan pada Lampiran 1.

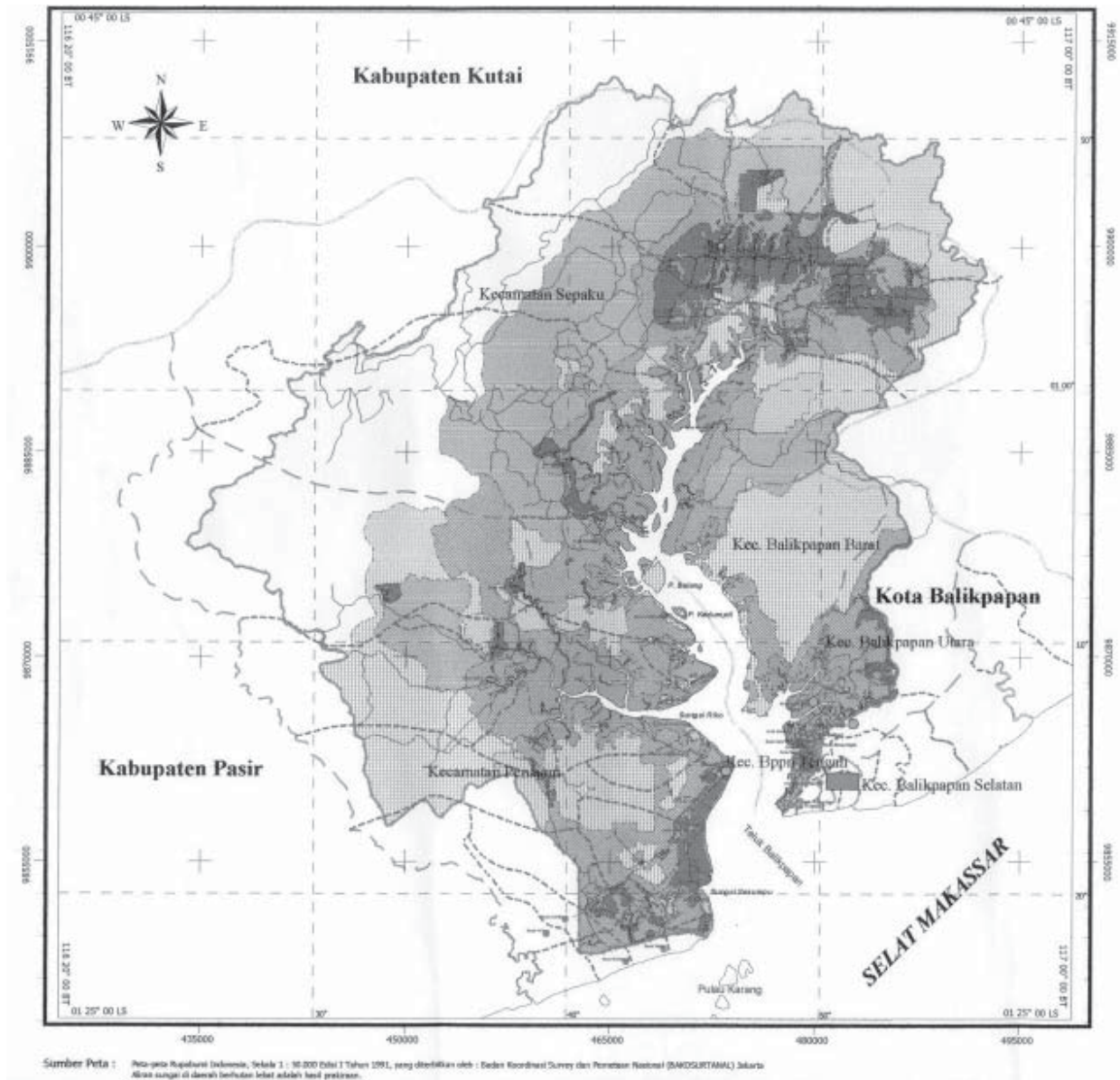
Pada tahap kedua (penyusunan program), PP KALTIM bersama *stakeholder* akan menyusun sebuah rencana pengelolaan (*management plan*) yang akan diadopsi dan diimplementasikan oleh *stakeholder* di Teluk Balikpapan. Salah satu kegiatan penunjang dalam penyusunan *management plan* adalah penyusunan profil (*profiling*) Teluk Balikpapan.

Maksud dilaksanakannya *profiling* dalam perencanaan pengelolaan Teluk Balikpapan adalah sebagai (a) penyediaan data dasar yang akan digunakan dalam penyusunan rencana pengelolaan (*management plan*) Teluk Balikpapan, (b) penyediaan data dan informasi ilmiah mengenai Teluk Balikpapan yang dapat diakses dan digunakan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan di Teluk Balikpapan, yang selama ini masih belum tersedia di Teluk Balikpapan, (c) merupakan dasar acuan bagi *stakeholder* di Teluk Balikpapan dalam menyusun rencana pengelolaan Teluk Balikpapan.

Dalam pelaksanaan programnya, PP KALTIM mendorong keterlibatan dan koordinasi antar instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam proses *profiling* dan perencanaan Teluk Balikpapan dalam rangka memberdayakan *Provincial Task Force* yang akan berperan:



Gambar 1. Wilayah sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Teluk Balikpapan



Gambar 2. Daerah administrasi Kabupaten Paser dan kota Balikpapan

- dalam menganalisis isu dan masalah yang selanjutnya akan disampaikan kepada ke *Provincial Steering Committee* (PSC),
- sebagai wadah komunikasi dan pertukaran informasi antara *stakeholder* dan PP KALTIM dalam membuat perencanaan dan profil Teluk Balikpapan;
- dalam memberikan dukungan serta terlibat aktif dalam pelaksanaan *profiling*. Dukungan yang diberikan berupa dukungan data dan informasi, saran, fasilitas dan dana.

Sementara ini keterlibatan aktif PTF diaktualisasikan melalui keterlibatan dalam kegiatan survei dan kajian, penelitian, maupun analisis isu. Sedangkan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga setempat untuk keperluan proses *profiling* dilakukan melalui kegiatan:

- pelatihan, baik yang bersifat *early action* maupun bukan *early action*, seperti pelatihan pengelolaan pesisir terpadu (*integrated coastal management – ICM*);
- survei dan penelitian yang melibatkan secara aktif staf lembaga-lembaga setempat;
- pertukaran data dan informasi, sehingga data sementara dari berbagai lembaga sumber terkumpul untuk digunakan dalam perencanaan pengelolaan ataupun penyusunan program-program masing-masing lembaga;
- lokakarya sebagai sarana untuk membahas rencana dan hasil kajian secara bersama-sama yang diikuti oleh *stakeholder* Teluk Balikpapan;
- studi banding dalam bentuk peninjauan pengelolaan teluk di Filipina dan pengelolaan mangrove di Sinjai-Sulawesi Selatan.

Saat ini Pemerintah Daerah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten atau kota, sudah mempunyai perencanaan wilayah yang mencakup sebagian Teluk Balikpapan, berdasarkan batas wilayah administratif masing-masing. Namun perencanaan khusus kawasan teluk belum ada. Integrasi program-program PP KALTIM kedalam perencanaan atau program pengelolaan yang sudah ada dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- Mengacu pada perencanaan yang sudah ada (Tata Ruang Propinsi, Tata Ruang Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan, Rencana Strategis Propinsi Kalimantan Timur, dan Kapet SASAMBA);
- Adopsi rencana pengelolaan (*management plan*) melalui kesepakatan antar

Pemerintah Daerah (Kabupaten Pasir, Kota Balikpapan dan Propinsi Kalimantan Timur);

- Membentuk lembaga koordinatif dan integratif yang independen.

2. Penyusunan profil Teluk Balikpapan

2.1 Pengertian dan tujuan *profiling*

Berdasarkan hasil diskusi dengan staf PP KALTIM dan *stakeholder* Teluk Balikpapan, pengertian penyusunan profil atau *profiling* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Proses pengumpulan data dan informasi wilayah Teluk Balikpapan yang meliputi aspek sosial ekonomi dan budaya, sumberdaya alam (baik sumberdaya alam darat dan laut), dan lingkungan hidup, yang secara administratif masuk dalam Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan (terdiri dari 44 desa) dan secara ekologis merupakan bagian dari sistem daerah aliran sungai (*watershed area*);
- Kegiatan untuk mendeskripsikan/menggambarkan kondisi alam dan lingkungan Teluk Balikpapan.
- Upaya untuk menggambarkan kondisi Teluk Balikpapan secara objektif melalui berbagai survei dan kajian serta analisis terhadap permasalahan pengelolaan sumberdaya alam dengan cara melibatkan *stakeholder* Teluk Balikpapan.

Berdasarkan hasil berbagai survei yang dilakukan oleh PP KALTIM dan diskusi dengan seluruh *stakeholder* Teluk Balikpapan, baik pada saat Lokakarya I (Januari 1999) maupun pada Lokakarya II (Oktober 1999) diperoleh kesimpulan mengenai kondisi pengelolaan Teluk Balikpapan saat ini. Kondisi inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk melakukan *profiling* sebagai bahan dasar dalam proses penyusunan rencana pengelolaan Teluk Balikpapan, yaitu:

- Pengelolaan suatu teluk yang baik adalah pengelolaan teluk yang tidak mengacu pada pendekatan administratif, tetapi mengacu pada pendekatan ekologis (daerah aliran sungai atau *watershed area*) yang dapat mencakup lebih dari satu wilayah administratif pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu profil yang menggambarkan kondisi Teluk Balikpapan

secara terpadu, komprehensif dan objektif.

- Data dan informasi Teluk Balikpapan yang dimiliki atau dikeluarkan oleh instansi atau lembaga setempat ada yang masih tumpang tindih dan berbeda, sehingga data dan informasi tersebut perlu diverifikasi dan dikelola agar dapat dimanfaatkan bagi setiap pengguna yang memerlukannya.
- Data dan informasi yang tersedia masih sangat kurang, sehingga perlu melakukan pengumpulan data dan informasi yang lebih lengkap. Oleh karena itu profil Teluk Balikpapan disusun untuk memfasilitasi penyediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat agar dapat digunakan untuk menyusun rencana pengelolaan teluk secara tepat.

Atas dasar pemikiran di atas, maka pelaksanaan profiling bertujuan untuk:

- mendapatkan data dasar yang akan dijadikan acuan dalam perencanaan pengelolaan Teluk Balikpapan.
- menyeleksi data dan informasi yang terkumpul sehingga dapat digunakan oleh *stakeholder* dalam perencanaan pengelolaan Teluk Balikpapan
- mendapatkan data yang lengkap dan akurat yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.

2.1 Proses kegiatan *profiling*

Profiling Teluk Balikpapan direncanakan untuk menerapkan tahapan sebagai berikut: (1) identifikasi isu, (2) kajian teknis, (3) kompilasi hasil-hasil penelitian, (4) analisis dan konsultasi untuk penyusunan dokumen profil, (5) penyusunan dokumen profil, dan (6) distribusi dan sosialisasi profil Teluk Balikpapan. Sedangkan kegiatan *profiling* yang telah dilaksanakan adalah identifikasi isu dan masalah, analisis isu (kajian-kajian teknis) dan

Tahapan/proses *profiling* Teluk Balikpapan:

1. Identifikasi isu dan masalah
2. Kajian Teknis
3. Kompilasi hasil-hasil penelitian
4. Analisis dan konsultasi penyusunan profil
5. Penyusunan dokumen profil
6. Distribusi dan sosialisasi dokumen profil

sosialisasi proyek serta penguatan kapasitas *stakeholder* (pertemuan, diskusi, pelatihan, dan lokakarya). Pada setiap kegiatan *profiling* dan kajian-kajian ilmiah melibatkan *stakeholder* dengan dukungan konsultan dan tenaga ahli. Untuk tahap 1 sampai dengan 4 dibutuhkan waktu selama 16 bulan (Oktober 1998 – Februari 2000), sedangkan untuk tahap 5 sampai dengan 6, diperkirakan akan membutuhkan waktu selama 7 bulan (Maret – September 2000).

2.2.1 Identifikasi isu dan masalah

Dari survei identifikasi isu dan masalah yang dilaksanakan oleh PP KALTIM di wilayah Kabupaten Pasir teridentifikasi sebanyak 24 isu/masalah dan di wilayah Kota Balikpapan mengidentifikasi lima kelompok isu yaitu 5 isu ekologis, 8 isu pemukiman penduduk, 3 isu aktifitas perekonomian, 16 isu fasilitas umum dan infrastruktur dan 8 isu perencanaan pembangunan serta 14 isu lingkungan hidup dan pertanahan (Malik *et al.*, 1999a dan 1999b). Setelah dikompilasi secara bertahap bersama berbagai pihak unsur masyarakat dan *stakeholder* melalui diskusi, konsultasi, dan lokakarya partisipatif serta kompilasi dari hasil penelitian dan studi yang dilakukan di Balikpapan, terakhir diputuskan ada 19 isu di masing-masing wilayah Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan. Sedangkan hasil kompilasi isu dan masalah untuk kawasan Teluk Balikpapan menjadi 22 isu dan masalah.

Seleksi isu utama yang diprioritaskan penanganannya dilakukan melalui diskusi dalam lokakarya *stakeholder* II (27-28 Oktober 1999) di Balikpapan. Isu dan masalah prioritas ditentukan berdasarkan kriteria:

- a) masalah yang dirumuskan harus relevan dan signifikan dengan kondisi wilayah Teluk Balikpapan,
- b) adanya legalitas melalui kebijakan/Undang-undang,

Isu prioritas pengelolaan Teluk Balikpapan

1. Konversi lahan
2. Kerusakan Mangrove
3. Erosi dan abrasi
4. Sedimentasi dan siltasi
5. Kepemilikan lahan
6. Tumpang tindih perencanaan
7. Pencemaran
8. Kurangnya air tawar
9. Reklamasi pantai

- c) akurasi data dan informasi,
- d) besaran atau luasan dampak terhadap wilayah Teluk Balikpapan,
- e) kemungkinan pengembangan masalah di masa yang akan datang,
- f) kemampuan pengelolaan,
- g) menyangkut aspek manusia dan lingkungan, dan
- h) turunan penyebab masalah.

Hasil diskusi dalam lokakarya II tersebut menetapkan 9 (sembilan) isu dan masalah prioritas dengan urutan sebagai berikut: 1) konversi lahan, 2) kerusakan mangrove, 3) erosi dan abrasi, 4) sedimentasi dan siltasi, 5) kepemilikan lahan, 6) tumpang tindih perencanaan, 7) pencemaran, 8) kurangnya air tawar, dan 9) reklamasi pantai.

2.2.2 Kajian teknis

Berdasarkan pengertian dan batasan di atas, maka ruang lingkup *profiling* Teluk Balikpapan dapat dibagi atas tiga lingkup, yaitu jenis kegiatan, batasan areal/kawasan dan aspek. Dari lingkup kegiatan, *profiling* Teluk Balikpapan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari kegiatan survei lapangan, kajian dan penelitian, kompilasi data serta penyusunan profil Teluk Balikpapan. Sedangkan dalam lingkup areal/kawasan, *profiling* Teluk Balikpapan mencakup kawasan seluas 207.096 ha yang merupakan satu kesatuan pesisir dan lautan serta daratan yang masuk

Studi-studi teknis yang dilaksanakan dalam proses *profiling*

1. Aspek sosial-ekonomi, yaitu
 - a) Studi valuasi ekonomi sumberdaya dan lingkungan.
 - b) Survei sosial-ekonomi masyarakat.
2. Aspek Biofisik :
 - a) Hidro-oseanografi,
 - b) Ekosistem mangrove,
 - c) Usaha perikanan tangkap dan budidaya,
 - d) Geomorfologi,
 - e) Penggunaan tanah dan pengambilan gambar
3. Aspek sosial-budaya.
4. Aspek perencanaan dan kebijakan : studi-studi kebijakan.

dalam sistem daerah aliran sungai Teluk Balikpapan.

Dari lingkup aspek, *profiling* Teluk Balikpapan meliputi empat aspek, yaitu aspek sosial ekonomi dan ekonomi sumberdaya, sosial budaya, aspek biologi dan fisik (biofisik), dan aspek perencanaan dan kebijakan. Dari keempat aspek ini kemudian dilakukan kajian dan analisis isu dan permasalahan secara mendalam untuk kemudian dilakukan prioritas isu dan masalah yang akan ditangani dalam pengelolaan Teluk Balikpapan. Adapun kajian teknis yang telah dilakukan adalah:

- a. Aspek ekonomi sumberdaya dan lingkungan, meliputi:
 - valuasi ekonomi sumberdaya dan lingkungan dan
 - sosial ekonomi masyarakat.
 - Valuasi ekonomi sumberdaya dan lingkungan yang menggambarkan (a) pertumbuhan ekonomi Balikpapan dan kontribusinya terhadap perekonomian Kaltim; (b) nilai ekonomi sumberdaya alam Teluk Balikpapan; (c) persepsi masyarakat/stakeholder terhadap fungsi dan manfaat Teluk Balikpapan.
 - Sosial ekonomi masyarakat (Desa Jenebora) mencakup meliputi populasi dan bentuk pemukiman, infrastruktur desa, struktur sosial, aktivitas masyarakat di pesisir, persepsi terhadap dampak kegiatan terhadap sumberdaya pesisir, dan pemahaman terhadap kualitas hidup.
- b. Aspek sosial budaya masyarakat, meliputi pola hidup masyarakat pantai/nelayan (pemukiman di atas air), pola pemanfaatan sumberdaya pesisir (perikanan tangkap dan budidaya).
- c. Aspek biofisik, yaitu:
 - Hidro-oseanografi mencakup pasang surut dan pola arus, gelombang dan angin, kualitas fisik dan kimia perairan, sedimen dan sedimentasi, biologi perairan (plankton, benthos dan *coliform*).
 - Ekosistem mangrove mencakup jenis dan karakteristik mangrove, kualitas pertumbuhan (persen penutupan/indeks nilai penting), biota-biota yang berasosiasi dengan mangrove, dan potensi ancaman bagi keberadaan ekosistem mangrove.
 - Usaha perikanan meliputi (a) perikanan tangkap yang mencakup jenis dan jumlah alat tangkap, daerah penangkapan (*fishing ground*), jenis dan

produksi ikan; (b) budidaya perikanan yang mencakup potensi benih (nener dan benur), klasifikasi tambak, teknologi tambak, dan status kepemilikan tambak.

- Geomorfologi mencakup konfigurasi bentuk medan dan proses alami yang mempengaruhinya, seperti kemiringan (*slope*) lahan/tanah, kondisi penutupan vegetasi, iklim dan tanah, serta aktivitas manusia.
 - Penggunaan tanah mencakup identifikasi sistem DAS dan sub DAS, muara-muara sungai (besar dan kecil), dan tipe-tipe penggunaan tanah.
- c. Aspek perencanaan dan kebijakan yang sudah ada mencakup perencanaan pembangunan yang sudah ada (Tata Ruang Propinsi, Tata Ruang Kota Balikpapan dan Kabupaten Pasir, Rencana Strategis Propinsi Kalimantan Timur, Kapet SASAMBA), kebijakan-kebijakan yang sudah ada, masalah perijinan, dan peraturan daerah.

Hasil studi geologi dan geomorfologi di daerah aliran sungai Teluk Balikpapan menunjukkan adanya terdapat masalah-masalah penting seperti a) luasnya areal *logging* (penebangan kayu dan bakau) dan pembukaan lahan, praktek-praktek petanian, industrialisasi dan urbanisasi akan mempercepat laju erosi, b) polusi lebih banyak diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan c) terjadi pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan atau tidak tepat. Hasil studi tersebut merekomendasikan perlunya dilakukan penelitian lanjutan geomorfologi Teluk Balikpapan mengenai sedimentasi, polusi, ekosistem mangrove, permukaan air laut, dan perbandingan sistem estuaria (Hopley, 1999). Survei tataguna tanah mencakup identifikasi sistem daerah aliran sungai (DAS) dan sub DAS, muara-muara sungai (besar dan kecil), dan tipe-tipe penggunaan lahan di kawasan DAS Teluk Balikpapan.

2.2.3 Pengumpulan data dan informasi

Pengumpulan data dan informasi dalam *profiling* untuk keperluan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan Teluk Balikpapan dilakukan melalui survei lapangan, wawancara dengan *stakeholder*, konsultasi, diskusi, pengambilan gambar, lokakarya dan persentasi serta liputan media. Dalam semua proses pengumpulan informasi dilakukan melalui berbagai metode selalu mempertimbangkan jenis isu dan masalah yang telah diidentifikasi

dan dilakukan seleksi pengumpulan data dan informasi yang terfokus pada isu dan masalah di Teluk Balikpapan. Penelitian yang dilakukan senantiasa berkaitan dengan isu dan mengarah kepada penanganan masalah-masalah teknis di lapangan.

Beberapa data dan informasi tentang kualitas lingkungan Teluk Balikpapan masih sangat kurang. Sementara itu data-data lainnya yang ada tersebar pada berbagai instansi. Untuk mengatasi keterbatasan/kesulitan pengumpulan data sekunder Teluk Balikpapan dari *stakeholder* (instansi pemerintah dan swasta), maka dilakukan pengumpulan informasi/data primer secara bersama-sama antara PP KALTIM dengan *stakeholder* yang terfokus pada isu dan masalah yang teridentifikasi.

2.2.4 Kegiatan pelibatan/partisipasi *stakeholder* dalam proses *profiling*

Kegiatan pendukung yang penting untuk mendorong keterlibatan *stakeholder* dalam proses *profiling* adalah sosialisasi proyek sekaligus untuk penguatan kapasitas *stakeholder* yang dilakukan melalui kegiatan pertemuan, diskusi, pelatihan, lokakarya dan studi banding. *Stakeholder* Teluk Balikpapan yang terlibat dalam proses *profiling* dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yaitu a) memiliki

Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam *profiling* :

- ◆ Survei lapangan.
- ◆ Wawancara dengan *stakeholder* dan masyarakat.
- ◆ Konsultasi dan diskusi dengan tenaga ahli dan *stakeholder*.
- ◆ Pengambilan gambar.
- ◆ Lokakarya dan persentasi.
- ◆ Peliputan media

Kelompok *stakeholders* yang terlibat dalam proses *profiling*

- ◆ Instansi pemerintah (Bappeda, Bapedalda, BPN, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian, Kehutanan, dsb.)
- ◆ Tenaga ahli dari perguruan tinggi dan konsultan lokal dan internasional.
- ◆ Perusahaan swasta dan BUMN/BUMD.
- ◆ Lembaga swadaya masyarakat
- ◆ Masyarakat desa/kelurahan

perhatian/tertarik terhadap Teluk Balikpapan meskipun tidak berada di Teluk Balikpapan, b) memiliki kegiatan dan perencanaan di Teluk Balikpapan, c) memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya di Teluk Balikpapan, d) memiliki kaitan dengan isu dan masalah di Teluk Balikpapan, dan e) merupakan hasil identifikasi *stakeholder* dalam lokakarya. Ada beberapa *stakeholder* (lembaga atau badan hukum) yang memiliki kriteria tersebut tetapi tidak bisa terlibat dalam proses *profiling* karena wewenangnya dan dalam pengambilan keputusan harus berkonsultasi dengan kantor pusatnya di luar daerah, misalnya Jakarta.

Peran-serta komponen *stakeholder* yang terlibat dalam proses *profiling* adalah :

- a. **Masyarakat desa/kelurahan** berperan dalam kontribusi atau penyiapan data/informasi dan isu setempat.
- b. **Tenaga ahli**, baik lokal dan internasional, berperan menyiapkan metode pengumpulan dan analisis data, metode penelitian, menganalisis data, mengarahkan pelaksanaan kajian yang efektif dan efisien, memfokuskan masalah dan penggalian informasi secara sistematis, dan melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas kajian kepada staf proyek dan *stakeholder*.
- c. **Instansi pemerintah** berperan dalam mendukung pengumpulan dan penyiapan data/informasi, mendukung pelaksanaan *profiling* melalui pelibatan personil (staf), mengintegrasikan program lembaga ke dalam proses *profiling*, dan terlibat aktif dalam proses *profiling* (sosialisasi, survei, kajian, penelitian, pelatihan, lokakarya).
- d. **Perusahaan swasta** berperan dalam kontribusi data dan informasi yang

Contoh partisipasi *Stakeholder* dalam proses *profiling*

1. Pertemuan-pertemuan
2. Mengikuti lokakarya *stakeholder* dan pelatihan
3. Kontribusi dalam informasi dan isu setempat melalui survei lapangan.
4. Studi wisata

terbatas pada aktivitas perusahaan yang berkaitan dan diperlukan dalam proses *profiling*.

- e. **Lembaga swadaya masyarakat** berperan dalam pengumpulan dan kontribusi data dan informasi serta terlibat aktif dalam proses *profiling* dalam rangka penguatan kapasitasnya.

3.1 Keluaran dan kendala pelaksanaan *profiling*

3.1.1 Keluaran *profiling*

Produk yang dihasilkan dari *profiling* adalah tersusunnya profil Teluk Balikpapan dalam bentuk dokumen berupa CD dan buku. Perkembangan *profiling* Teluk Balikpapan sampai bulan Februari 2000 telah mencapai tahap analisis dan konsultasi penyusunan profil Teluk Balikpapan. Kegiatan selanjutnya adalah penyusunan draf (edit, format, tata letak dan pencetakan) Dokumen Profil Teluk Balikpapan dijadwalkan selesai pada bulan September 2000. Dokumen tersebut nantinya akan didistribusikan ke berbagai kalangan. Untuk menyelesaikan profil tersebut beberapa kegiatan penting yang harus diperhatikan dapat dilihat pada kotak.

Prinsip-prinsip utama dalam proses *profiling*

1. Sosialisasi *profiling*
2. Pengumpulan data dan informasi secara efektif, lengkap dan akurat.
3. Penentuan isu-isu prioritas
4. Keterlibatan dan partisipasi *stakeholder*/ masyarakat.
5. Penelitian/Kajian
 - a. Kondisi awal kawasan Teluk
 - b. Kajian teknis berbasis pada isu prioritas
6. Diseminasi dan *lessons learned* proses *profiling*.

3.1.2 Kendala pelaksanaan *profiling*

Kendala utama yang dijumpai dalam proses *profiling* adalah:

- a. kondisi geografis dengan cakupan wilayah yang relatif besar sementara sarana komunikasi kurang memadai untuk jarak yang jauh. Oleh karena itu jumlah dan keragaman *stakeholder* yang terlibat aktif sangat

mempengaruhi penggunaan dana operasional, penggunaan waktu dan jumlah staf, intensitas fasilitasi proyek terhadap *stakeholder* dan koordinasi antar *stakeholder*,

- b. keterbatasan peralatan yang digunakan untuk *profiling* seperti GIS dan *software* yang digunakan *stakeholder* berbeda sehingga akses informasi lambat dan tidak bisa integratif,
- c. keterbatasan kapasitas *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Teluk Balikpapan.

Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan pembentukan jaringan kerjasama (*network*), mengintegrasikan program-program penelitian/survei di instansi-instansi pemerintah dan perusahaan swasta, terutama yang terkait dengan Teluk Balikpapan.

4. Monitoring dan evaluasi kemajuan *profiling*

Monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan *profiling* dilakukan melalui pertemuan teknis internal maupun eksternal. Kemajuan setiap monitoring kegiatan *profiling* dibahas setiap bulan sesuai dengan tugas staf teknis. Pembagian tugas diterapkan berdasarkan kegiatan yang berkaitan dengan *stakeholder*, kegiatan penelitian, pemetaan/GIS, dan proses perencanaan/integrasi kelembagaan.

4.1 Kegiatan pendukung proses *profiling*

Profiling merupakan serangkaian kegiatan yang dalam proses pelaksanaannya memerlukan dukungan dari kegiatan lain. Kegiatan lain yang berkaitan dan mendukung proses *profiling* diantaranya adalah a). desiminasi hasil-hasil PP KALTIM (melalui media massa, lokakarya dan pelatihan) kepada masyarakat setempat dan *stakeholder* untuk mendapatkan tanggapan berkaitan dengan pengelolaan pesisir; b) kegiatan studi wisata, untuk membangun aspek kemitraan dalam penyadaran masyarakat; c) pendidikan umum kepada masyarakat luas secara formal

Media masa yang digunakan dalam sosialisasi *profiling*

- 1 Media elektronik : Televisi (TVRI Samarinda)
2. Media Cetak : Koran, majalah, tabloid dan Jurnal

dengan melakukan penyuluhan atau pengajaran dalam suatu kelas/tempat tertentu yang dihadiri oleh sejumlah masyarakat, d) pendidikan tentang lingkungan hidup dan pengelolaan pesisir (Teluk Balikpapan) yang dilakukan melalui media masa, seperti pengiriman artikel kegiatan proyek kepada surat kabar lokal dan perusahaan siaran televisi; dan e) melakukan diskusi dan curah pendapat dengan *stakeholder* kegiatan *profiling* dan kegiatan proyek yang lainnya lewat lomba gambar lingkungan dan studi wisata bagi siswa SD di Teluk Balikpapan.

4.2 Manfaat profil Teluk Balikpapan

Tujuan utama dari *profiling* adalah menyediakan data dan informasi secara ilmiah, obyektif, rinci, lengkap, akurat dan siap pakai sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana pengelolaan Teluk Balikpapan secara terpadu. Dengan adanya profil maka perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian hasil yang diharapkan pada kisaran waktu tertentu dapat dilakukan dengan mudah dan tepat.

Kegiatan *profiling* Teluk Balikpapan secara umum sangat mendukung kegiatan PP KALTIM karena berpengaruh positif terhadap indikator kemajuan keluaran proyek, kesiapan proyek untuk merencanakan kegiatan selanjutnya serta kapasitas dan pengalaman staf dan pengelola proyek. Bagi *stakeholder*, kegiatan *profiling* juga berpengaruh positif terutama dalam perubahan persepsi *stakeholder* terhadap nilai Teluk Balikpapan, peningkatan pengetahuan *stakeholder* terhadap proses perencanaan Teluk Balikpapan, dan peningkatan kapasitas *stakeholder* dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di wilayah Kalimantan Timur.

5. Rencana setelah *profiling*

Berakhirnya kegiatan *profiling* ditandai dengan terbentuknya dokumen profil Teluk Balikpapan. Setelah profil selesai maka tahap berikutnya adalah penyusunan rencana pengelolaan Teluk Balikpapan untuk menghasilkan keluaran berupa Rencana Pengelolaan (*Management Plan*) Teluk Balikpapan. Proses penyusunan rencana pengelolaan tersebut akan dipersiapkan dengan melakukan kegiatan:

- pemberitahuan dan sosialisasi dokumen profil secara informal kepada

stakeholder,

- diseminasi profil melalui lokakarya, media massa (koran, majalah) setiap dua minggu sekali, serta melalui pembentukan Pusat Data dan Informasi untuk memperoleh masukan dari *stakeholder* dan masyarakat luas;
- pelaksanaan kajian-kajian teknis secara rinci terhadap isu-isu yang diprioritaskan oleh *stakeholder* dalam lokakarya proses perencanaan (26-28 Oktober 1999 di Balikpapan). Masukan-masukan dari masyarakat luas, lokakarya *stakeholder* dan hasil kajian teknis digunakan sebagai bahan-bahan untuk menyusun draf rencana pengelolaan oleh Tim Khusus yang ditentukan oleh para *stakeholder* dalam lokakarya tersebut.

Kemudian hasil kerja Tim Khusus ini akan dipresentasikan dan didiskusikan dalam lokakarya *stakeholder* berikutnya untuk menghasilkan draf akhir rencana pengelolaan. Draft akhir ini akan disampaikan kepada Kepala Pemerintah Daerah untuk diketahui dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan. Setelah diketahui dan disetujui, maka draft tersebut akan disahkan secara resmi oleh Kepala Pemerintahan Daerah sebagai Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan.

Rencana pengelolaan sumberdaya pesisir melalui pendekatan kawasan teluk secara partisipatif ini merupakan contoh perencanaan yang pertama di Indonesia, sehingga diharapkan menjadi teladan pengelolaan teluk yang terbaik untuk diadopsi atau direplikasi di kawasan teluk lainnya di Indonesia. Pada bulan Oktober tahun 2000 diharapkan draf Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan selesai disusun dan disetujui. Diantara proses perencanaan sampai pengesahan itu ada suatu kegiatan yang disebut pelaksanaan awal (*early action*) yang dibutuhkan untuk mendapat dukungan *stakeholder* yang akan

Langkah-langkah selanjutnya

setelah *profiling* :

1. Sosialisasi profil kepada stakeholder.
2. Penyebarluasan profil melalui lokakarya, media massa dan Pusat Data dan Informasi.
3. Kajian-kajian teknis secara detail tentang isu-isu prioritas.
4. Penyusunan Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan

membantu proses-proses yang terjadi secara teknis di lapangan.

Informasi penting yang akan dimuat dalam Rencana Pengelolaan adalah: 1) penggunaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, 2) koordinasi antar program pengembangan sumberdaya alam, 3) partisipasi kelembagaan/*stakeholder*, 4) keterlibatan masyarakat, 5) dukungan terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, 6) penggunaan teknologi baru yang dibutuhkan, dan 7) data ilmiah tentang kondisi sosial-ekonomi yang terbaru.

6. PELAJARAN (*LESSONS LEARNED*) YANG DIPETIK DARI PROSES *PROFILING* TELUK BALIKPAPAN

1) Bagaimana mendorong keterlibatan dan partisipasi *stakeholder* secara luas dalam proses *profiling*?

Stakeholder dari berbagai kalangan telah terlibat dan berpartisipasi dalam proses penyusunan profil Teluk Balikpapan. Strategi yang diterapkan oleh PP KALTIM untuk mendorong partisipasi *stakeholder* ini adalah dengan cara:

- menciptakan kesan bahwa Proyek Pesisir adalah baik dan bermanfaat bagi *stakeholder* dengan memberikan pengertian bahwa proyek pesisir bukan pengawas lingkungan;
- menyamakan persepsi dan visi *stakeholder* terhadap perencanaan dan pengelolaan Teluk Balikpapan,
- membangun kemitraan dengan *stakeholder* dalam setiap proses *profiling*;
- diseminasi dan sosialisasi hasil yang diperoleh dalam setiap proses agar setiap *stakeholder*

m e n g e t a h u i
kemajuan yang
telah dicapai.

P e n d e k a t a n
yang sukses dilakukan
oleh PP KALTIM
dalam membangun
partisipasi *stakeholder*
dalam proses *profiling*
adalah meningkatkan

Pembelajaran dari *profiling* Teluk Balikpapan

1. Keterlibatan/partisipasi *stakeholder* yang luas dalam proses *profiling*
2. Penggunaan metode yang efektif dalam pengumpulan informasi.
3. Melakukan kajian-kajian teknis yang berbasis isu-isu.
4. Penggunaan dokumen/proses *profiling* sebagai acuan utama dalam proses perencanaan Teluk Balikpapan
5. Penggunaan media massa dalam proses *profiling*.

atau memperbanyak interaksi perorangan dan kelompok melalui pertemuan, dan menggunakan tokoh kunci (*key person*) yang tepat dari instansi atau organisasi yang mempunyai kepentingan dan perhatian terhadap pengelolaan pesisir. Untuk melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam proses *profiling*, strategi dan pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan informal dalam sosialisasi PP KALTIM, keterbukaan terhadap data dan informasi yang dimiliki PP KALTIM kepada LSM, melibatkan LSM secara aktif dalam setiap proses *profiling* seperti pertemuan, lokakarya, survei dan penelitian, memperlakukan LSM sama seperti *stakeholder* lainnya, dan memberdayakan LSM melalui program pelatihan, intern/magang dan relawan.

Strategi dan pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan keterlibatan dan koordinasi antar instansi dalam proses *profiling* adalah: a) membuat daftar *stakeholder* dan menentukan *stakeholder* kunci berdasarkan kesamaan tugas yang dipikul, program, dan kepentingan yang berkaitan dalam proses; b) membentuk forum komunikasi dan koordinasi seperti *Provincial Task Force* dan *Provincial Steering Committee* yang terdiri dari berbagai *stakeholder*; c) melibatkan lembaga terkait secara bersama-sama dalam proses *profiling*; dan d) memberikan kemudahan dalam perolehan data dan informasi yang dimiliki oleh PP KALTIM.

2) Bagaimana penggunaan metode pengumpulan dan verifikasi data secara efektif?

Untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi/data dalam proses *profiling* yang diperlukan sebagai bahan acuan rencana pengelolaan Teluk Balikpapan, PP KALTIM menerapkan strategi yang dinilai efektif, yaitu dengan: a) membuat spesifikasi data yang dibutuhkan sebelum melakukan pengumpulan data; b) melibatkan *stakeholder* atau tokoh kunci (*key person*) yang tepat dalam pengumpulan dan verifikasi data; c) melakukan perbandingan dan pemeriksaan silang (*cross-check*) terhadap data yang diperoleh dari instansi-instansi sumber data; d) membina hubungan baik secara formal maupun informal dengan *stakeholder* pemilik data atau informasi.

3) Bagaimana menggunakan hasil-hasil kajian-kajian teknis yang berbasis isu dalam proses *profiling*?

PP KALTIM melakukan kajian-kajian teknis yang digunakan sebagai alat dalam memverifikasi dan validasi isu yang teridentifikasi. Jenis kajian teknis untuk mengidentifikasi dan analisis isu ditentukan berdasarkan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan konsultan. Penggunaan kajian teknis untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu dilakukan dengan cara: a) mengikuti rekomendasi konsultan dan tenaga ahli untuk memperdalam analisis isu dan masalah; b) mendapatkan input/masukan dari pertemuan/diskusi/lokakarya yang membahas kajian teknis untuk menganalisis isu dan masalah; c) menggunakan ringkasan-ringkasan kajian teknis dan d) menggunakan foto/ gambar/ peta sebagai data pendukung kajian teknis.

4) Bagaimana proses *profiling* digunakan untuk memulai proses perencanaan yang bersifat partisipatif dan integratif?

Dokumen *profiling* digunakan sebagai data dasar/acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan, sumber data dasar kepada berbagai *stakeholder*, arahan perencanaan yang tepat; d) menggalang konsesus dan komitmen dari berbagai *stakeholder* dalam proses perencanaan pengelolaan Teluk Balikpapan.

5) Media apa yang digunakan dalam proses *profiling*?

Untuk membangun kesan positif masyarakat terhadap kegiatan (termasuk *profiling* Teluk Balikpapan) dan pengelolaan pesisir secara umum, PP KALTIM menggunakan media elektronik (TVRI) dan media cetak (koran, majalah, tabloid dan jurnal).

DAFTAR PUSTAKA

- Hopley, D. 1999. *Geological and geomorphological input into tropical coastal management with special reference to Balikpapan Bay, East Kalimantan*. Proyek Pesisir Publications TE-99/01-E. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Coastal Resources Management Project, Jakarta, Indonesia. 42p.
- Olsen, S.B., K. Lowry and J. Tobey. 1999. *The common methodology for learning: A manual for assessing progress in coastal management*. The University of Rhode Island, Coastal Resources Center, Graduate School of Oceanography, Narragansett, USA. 56 p..
- Proyek Pesisir Kalimantan Timur. 1999. *Desa Jenebora (Kabupaten Pasir)*. Makalah lokakarya partisipatif proses perencanaan pengelolaan Teluk Balikpapan, tanggal 27-28 Oktober 1999 di Balikpapan.
- Malik, R., M.Z. Mochtar, A.S. Dharmawan, A. Pirade, Farida HF, Kasmawaty, A. Yani, A. Mulyadi dan Mukti. 1999a. *Survey identifikasi isu dan masalah di Teluk Balikpapan-Kotamadya Balikpapan*. Publikasi Proyek Pesisir TE-98/08-I. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Coastal Resources Management Project, Jakarta, Indonesia.
- Malik, R., M.Z. Mochtar, A. Hamzah, A. Darma, A. Pirade, Farida HF, Kasmawaty, A. Yani, dan Mukti. 1999b. *Survey identifikasi isu dan masalah di Teluk Balikpapan-Kabupaten Pasir*. Publikasi Proyek Pesisir TE-98/07-I. Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Coastal Resources Management Project, Jakarta, Indonesia.
- Saunders, Lindsay. 1999. *Balikpapan bay an review of the economy and natural resources*. Preliminary draft.

Lampiran 1. Matriks Tahapan Perencanaan Pengelolaan Teluk Balikpapan

Tahap	Kegiatan	Hasil yang diharapkan	Indikator
Identifikasi dan Analisis Isu	• Identifikasi Isu dan Permasalahan di Teluk Balikpapan • Identifikasi stakeholder • Mendorong dan koordinasi antar lembaga • Pembahasan hasil kegiatan • Verifikasi data melalui lokakarya	• Untuk mengetahui isu dan permasalahan yang terdapat di Teluk Balikpapan • Untuk mengetahui stakeholder di Teluk Balikpapan • Untuk mendapatkan masukan dari stakeholder • Untuk mendapatkan konsensus dari stakeholder mengenai isu prioritas • Untuk mendapatkan persetujuan proses perencanaan	• Laporan isu • Video • Foto dan slide • Data isu dan masalah • Daftar stakeholder • Rekomendasi perencanaan berupa koordinasi tata ruang dan produk-produk perencanaan • Rekomendasi isu dan masalah definitif • Kriteria, kelembagaan dan stakeholder
	• Kajian teknis √ Survey sosial ekonomi √ Survey geomorfologi √ Valuasi ekonomi sumberdaya teluk √ Survey tata guna lahan √ Survey lingkungan (Ekosistem mangrove, perikanan, dan hidrooseanografi) √ Penyiapan peta dasar dan peta tematik	• Untuk menganalisis isu dan permasalahan lebih detail • Untuk mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap isu dan masalah.	• Laporan • Peta
	• Training ICM • Lokakarya valuasi ekonomi • Pertemuan dan diskusi	• Untuk mendapatkan kesamaan persepsi dan visi tentang ICM • Untuk mengetahui masyarakat terhadap penggunaan Teluk Balikpapan	• Jumlah peserta training lokakarya • Laporan training

Lanjutan lampiran 1.

Tahap	Kegiatan	Hasil yang diharapkan	Indikator
Perencanaan dan Penyusunan Program	Lokakarya II	- Memberikan gambaran kepada <i>stakeholder</i> tentang hasil-hasil PP - Mendapatkan persetujuan proses perencanaan - Mendapatkan masukan terhadap hasil temuan (penambahan atau pengurangan isu dan masalah) - Mendapatkan partisipasi aktif dari <i>stakeholder</i> dalam menganalisis isu dan masalah	- Jumlah peserta - Komposisi peserta
	<i>Early actions</i>		
	√ Air Bersih	- Untuk mendapatkan dukungan masyarakat terhadap Proyek Pesisir - Tersedianya sumber dan pengolahan air bersih bagi masyarakat - Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di Jenebora (RT 1, 2 dan 3)	- Dukungan masyarakat - Jumlah MCK - Adanya sistem air bersih
	√ Ekowisata Mangrove	- Untuk mendapatkan alternatif pariwisata di Balikpapan - Untuk alternatif pemanfaatan ekosistem mangrove - Konservasi mangrove	- Luas kawasan mangrove yang dimanfaatkan untuk wisata - Jumlah masyarakat yang terlibat - Jumlah fasilitas wisata mangrove - Terdapatnya pengelola
	√ Penanaman kembali hutan mangrove	Meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan mangrove	- Jumlah areal yang ditanami mangrove - Presentasi kehidupan mangrove

DISKUSI (KAMIS, 23 MARET 2000)

BAGIAN PERTAMA

PENGANTAR oleh Dietrich G. Bengen:

Diskusi ini merupakan interaksi antara para peserta lokakarya dan para penyaji/penulis makalah untuk menggali berbagai masukan guna penyempurnaan dan tukar menukar informasi agar lebih bermanfaat bagi semua pihak. Alur diskusi diatur berdasarkan termin; satu termin terdiri dari sesi pertanyaan dan komentar, kemudian sesi jawaban, tanggapan atau respons, dan masukan. Setelah termin pertama dilanjutkan dengan termin berikutnya sampai habis waktunya.

A. PERTANYAAN, KOMENTAR DAN MASUKAN

1. Ketut Sarjana Putra (WWF)

a. PP SULUT

- Dalam pendirian daerah perlindungan laut (DPL) di desa Blongko, aspek daratan tidak terlihat dimasukkan sebagai bagian dari daerah perlindungan laut. Bagaimana prospek daerah perlindungan laut ini?
- Perlu klarifikasi tentang Surat Keputusan (SK) Kepala Desa mengenai DPL; bagaimana SK tersebut akan diimplementasikan karena didalamnya terdapat kontradiksi antara pasal 6 ayat (4) dengan pasal 9 ayat (2): pasal 6 ayat (4) memperbolehkan kegiatan wisata dalam zona inti, sementara pada pasal 9 ayat (2) melarang melewati zona inti bagi angkutan laut. Padahal kedua kegiatan tersebut berpotensi merusak terumbu karang.

b. PP Lampung

- Percontohan pertambahan ramah lingkungan di Pantai Timur Lampung tidak secara jelas menunjukkan bagaimana masyarakat akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik sementara kualitas lingkungan tetap terjaga.

2. Yunita (Universitas Indonesia)

Penyajian perbandingan proses *profiling* di ketiga lokasi Proyek Pesisir sangat menarik. Namun proses hingga isu-isu teridentifikasi tersebut belum secara jelas didokumentasikan.

a. Kalimantan Timur

- Identifikasi isu dimulai dengan mengidentifikasi kondisi lingkungan atau ekologi, misalnya kerusakannya, setelah itu dilanjutkan dengan penetapan kriteria dan penentuan isu-isunya.

b. Lampung

- Proses *profiling* diawali dengan penyusunan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir. Bagaimana data dan informasi dalam atlas tersebut akan diperbaharui (*updating*), apa strategi pemantauan serta berapa lama jangka waktu berlakunya mengingat dalam kurun waktu yang tidak lama dapat terjadi banyak perubahan. Misalnya perubahan penduduk akibat mobilitas mereka yang tinggi, seperti dilakukan oleh masyarakat Bajo.
- Sangat sulit untuk membuat peta sosial jika waktu yang tersedia sangat singkat (2 bulan).

c. Sulawesi Utara

- Tidak terlihat secara jelas bagaimana proses masyarakat merumuskan isu, apakah berdasarkan perspektif masyarakat dan ilmuwan? Bagaimana

masyarakat menyadari dan mengidentifikasi adanya isu di lokasinya?

- Bagaimana terjadinya proses pembentukan kapasitas sosial (*social capacity*), mekanisme kontrol dari masyarakat, dan proses pembentukan *trust* (kepercayaan) dari masyarakat?
- Apa perbedaannya dalam proses memfasilitasi masyarakat antara versi pemerintah (melalui petugas penyluh lapangan) dengan versi PP SULUT?
- Dalam kondisi yang bagaimana pengalaman proses pendirian DPL Blongko ini dapat diterapkan di lokasi lain mengingat tingginya keragaman budaya masyarakat dan keragaman kapasitas pemerintahan antar lokasi di Indonesia. Tampaknya cukup sulit membuat generalisasi proses tersebut?
- Istilah penyuluhan dan pelatihan sebaiknya diganti dengan “belajar bersama” karena kedua istilah pertama terkesan sebagai arahan dari atas untuk dipatuhi oleh yang di bawah (*top down*).

3. Jacob Rais (Proyek Pesisir)

Ingin meluruskan istilah saja bahwa “penyusunan profil bukan penggalian data dasar untuk menghasilkan informasi” tetapi “penyusunan profil dilakukan untuk menghasilkan data dasar”.

B. TANGGAPAN-TANGGAPAN

Johnnes Tulungen (PP SULUT)

- Dalam SK Kepala Desa Blongko tentang DPL telah diatur mengenai zonasi, yaitu ada zona inti dan zona penyangga. Zona kedua mencakup kawasan darat, yaitu hutan mangrove.
- SK tersebut dapat diubah tergantung dari kesepakatan masyarakat. Hal ini konsisten dengan ciri dasar *community-based* bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan DPL ditetapkan atas kesepakatan masyarakat setempat.

Christovel Rotinsulu (PP SULUT)

- Proses penyusunan SK tersebut memakan waktu yang lama. Hal penting yang perlu diangkat dari pengalaman proses pendirian DPL ini adalah pembangunan kepedulian dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat setempat terhadap kelestarian sumberdaya alam setempat.

Hermawati (PP Lampung)

- Produksi tambak merupakan salah satu pertimbangan utama dalam pembuatan contoh tambak ramah lingkungan di Pantai Pesisir Lampung. Kondisi Pantai Timur saat ini sangat memprihatinkan dengan hilangnya sebagian besar hutan mangrove. Oleh karena itu langkah ke depan adalah bagaimana mempertahankan kesinambungan pemanfaatan dan terjaganya kelestarian lingkungan, kriteria yang diambil berdasarkan ekolabeling budidaya perikanan. Masyarakat telah melihat dan menyadari bahwa erosi pantai terjadi akibat hilangnya hutan mangrove, sangat mempengaruhi usaha tambak mereka. Oleh karena itu masyarakat sepakat untuk mempertahankan kondisi adanya mangrove sambil mengusahakan tambak.
- Sosialisasi ekolabeling kepada masyarakat dilakukan bersamaan dengan introduksi percontohan tambak ramah lingkungan sebagai sarana belajar bersama.

Supomo (PP Lampung)

- Produksi tambak udang di Pantai Timur Lampung sangat rendah sementara kondisi lingkungan pesisir sangat memprihatinkan dengan hilangnya hutan mangrove di lokasi tersebut. Melihat kondisi ini masyarakat lokal sangat antusias untuk menangani masalah ini dan kemudian membentuk kelompok peduli lingkungan. Percontohan tambak ramah lingkungan ini merupakan pesan penting bagi masyarakat setempat yang perlu didokumentasikan.

Fedi Sondita (*Learning Team*)

- Di Sulawesi Utara, isu-isu yang teridentifikasi dalam dokumen profil sebenarnya adalah perspektif masyarakat lokal yang juga sudah dikonfirmasi oleh para peneliti. Banyak kejadian di desa lokasi proyek sebenarnya adalah isu namun masyarakat setempat belum tentu mengetahui atau menyadarinya. Setelah berbagai kejadian setempat tersebut dikaji oleh peneliti dan hasilnya disajikan kepada masyarakat, masyarakat kemudian menentukan isu-isu tersebut.
- Untuk menyadarkan masyarakat bahwa sesuatu permasalahan merupakan suatu isu, serangkaian penyuluhan-penyuluhan dilaksanakan dengan menerapkan metode yang informatif agar masyarakat mudah mengerti melalui penyajian visual, seperti foto-foto dan gambar-gambar. Proses penyadaran masyarakat terhadap suatu isu juga dilakukan dengan melatih dan melibatkan masyarakat dalam monitoring kondisi lingkungan. Misalnya, masyarakat menyadari bahwa erosi adalah isu penting bagi mereka setelah masyarakat memahami perubahan garis pantai berdasarkan hasil pengukuran garis pantai yang mereka lakukan.

Johnnes Tulungen (PP SULUT)

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya isu-isu setempat terbentuk melalui proses yang terdiri dari pelaksanaan studi teknis oleh peneliti, pemaparan hasil studi kepada masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan data, dan pertemuan peneliti dan masyarakat untuk merangkum data dan menyimpulkan isu-isu tersebut. Sebagai contoh adalah isu bahwa Crown of Thorns (CoT atau sasanay) merusak terumbu karang. Pada mulanya masyarakat tidak mengetahui bahwa CoT merupakan isu penting di laut dekat desa namun setelah penyajian hasil studi CoT oleh tim peneliti kepada masyarakat setempat dalam bentuk gambar-gambar dan video, masyarakat kemudian mengambil keputusan untuk membersihkan CoT di sekitar perairan yang terdapat terumbu karang.

Christovel Rotinsulu (PP SULUT)

- Bukan hanya masyarakat yang tidak mengetahui isu-isu tersebut, tetapi juga pemerintah setempat. Pemerintah baru menyadari adanya isu-isu tersebut setelah masyarakat menyajikan isu-isu yang dihadapinya kepada perangkat pemerintah setempat. Tanggapan pemerintah setempat terhadap adanya isu-isu pengelolaan pesisir dan laut di daerahnya sangat positif. Hal ini terlihat dari tindakan pemerintah setempat untuk memasukan isu-isu sebagai permasalahan yang perlu ditangani dan komitmen untuk menanganinya.

Budy Wiryawan (PP Lampung)

- Di Lampung, penentuan isu tidak berangkat setelah adanya atlas, tetapi atlas merupakan produk fisik dari profiling. Penentuan isu dilakukan seperti lokasi proyek lainnya, yaitu dengan melibatkan *stakeholder* setempat.
- *Updating* atlas akan dilakukan oleh Bappeda sebagai pengelola pusat data karena *profiling* yang dilakukan bersama *stakeholder* merupakan upaya pengenalan bagi Bappeda tentang bagaimana menyusun profil wilayah pesisir dan lautan.
- Atlas adalah dokumen yang dinamis, maka perlu adanya revisi dan pembaharuan data profil secara cepat manakala terjadi perbedaan dan perubahan kondisi.
- Perhatian para antropolog dan sosiolog terhadap permasalahan di wilayah pesisir perlu ditingkatkan sehingga kapasitas sosial masyarakat terbina dan informasi tentang aspek sosial ini dapat terangkat dalam profil pesisir.
- Percontohan tambak yang diperkenalkan bukan hanya ramah lingkungan tetapi juga ramah sosial, yaitu memperhatikan kondisi sosial dan penerimaannya oleh masyarakat setempat. Pendokumentasian secara lengkap dapat dilakukan terhadap penerapan tambak ramah lingkungan yang sudah baik.

Ramli Malik (PP KALTIM)

- Perbedaan dalam proses penentuan isu-isu pengelolaan pesisir di antara ketiga lokasi Proyek Pesisir terutama disebabkan oleh skala atau cakupan wilayah lokasi kegiatan identifikasi isu. Cakupan wilayah PP SULUT adalah pada skala desa, PP KALIN adalah pada skala kawasan teluk dan PP Lampung adalah skala propinsi. Namun persamaan di antara ketiga lokasi tersebut adalah pada proses penentuan isu yang melibatkan *stakeholder*. Isu yang ada dalam profil ketiga lokasi tersebut meliputi potensi dan masalah pengelolaan pada masing-masing sumberdaya pesisir dan lautnya.

Fedi Sondita (*Learning Team*)

- Untuk menerapkan konsep DPL di lokasi lain perlu dilakukan secara hati-hati mengingat kondisi Blongko belum tentu sama dengan kondisi umum semua lokasi di Indonesia. Penyesuaian dengan kondisi lokal harus dilakukan jika diperlukan. Namun kriteria-kriteria pemilihan yang dipakai oleh masyarakat desa Blongko seyogyanya dapat diterapkan di tempat lain.

Christo Hutabarat (YABSHI)

- Peta seyogyanya memiliki kekuatan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Peta yang disusun berdasarkan pandangan masyarakat pada prinsipnya secara eksplisit menunjukkan cara pandang masyarakat terhadap ruang (misalnya kawasan konservasi). Cara pandang suatu masyarakat atau budaya tertentu terhadap ruang dapat berbeda dari masyarakat lain. Oleh karena itu dalam penyusunannya, pandangan masyarakat terhadap ruang atau kawasan perlu diperhatikan.
- Istilah “penyuluhan” sebaiknya diganti dengan “pendampingan”.

PENUTUP oleh Dietrich G. Bengen

- Prinsip atlas bersifat dinamis sehingga tidak bisa digunakan untuk selamanya, oleh karena itu perlu pembaharuan data (*updating*).

- Setiap kawasan pesisir di Indonesia memiliki karakteristik yang spesifik walaupun ada kesamaan umumnya. Oleh karena itu penerapan suatu konsep pengelolaan dapat berbeda sesuai dengan karakteristik lokasi. Sehingga contoh pengelolaan di suatu lokasi tidak bisa begitu saja diterapkan pada semua lokasi tanpa penyesuaian.

BAGIAN KEDUA

A. PERTANYAAN, KOMENTAR, MASUKAN

1. Iwan Gunawan (BPPT)

Lessons learned yang telah digali oleh PP pada dasarnya semuanya baik namun beberapa *lessons learned* yang sifatnya strategis belum tergali. *Lessons learned* yang strategis ini dapat dijadikan masukan untuk penyusunan kebijakan-kebijakan nasional.

- Seringkali kita lupa bahwa apa yang kita lakukan (yaitu proyek) adalah suatu bentuk intervensi kepada suatu sistem yang ada di masyarakat. Oleh karena itu *Learning Team* perlu mendokumentasikan strategi-strategi intervensi yang terbukti efektif dan tepat untuk suatu sistem masyarakat tersebut agar hasil tercapai secara optimum.
- Prinsip dasar dari partisipasi masyarakat adalah adanya diskusi publik yang melembaga. Sebenarnya di tengah masyarakat sudah ada mekanisme seperti ini, namun ada yang sudah hilang ataupun tidak berjalan. Oleh karena itu terhadap mekanisme partisipasi yang sudah ada dan tidak berjalan langkah yang perlu dilakukan adalah revitaliasi diskusi publik; untuk mekanisme partisipasi yang sudah terkubur perlu dibangkitkan kembali. Sedangkan pada masyarakat yang belum memiliki mekanisme partisipasi tentu perlu dibangun diskusi publik dari awal atau buat yang baru.
- Contoh-contoh upaya sukses yang terdokumentasi perlu diterapkan secara luas (*up-scaling*). Namun biasanya terjadi benturan-benturan antara *community-based practice* dengan model pengelolaan yang “modern”. Oleh karena itu sebaiknya penerapan *community-based* ini jangan sampai membuat

implikasi-implikasi yang terbalik dengan model pengelolaan yang “modern”. Langkah-langkah apa yang bisa ditempuh agar *community-based management* menjadi bersifat modern?

2. Hasto Pandito (Telapak)

- Persepsi masyarakat yang terdapat di tiga lokasi lapang, khususnya Lampung untuk kawasan pengembangan tambak ramah lingkungan, adalah masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi. Sifat masyarakat yang demikian merupakan kendala bagi kelangsungan (*sustainability*) program yang diperkenalkan dan dilaksanakan proyek.
- Dalam banyak hal yang menyangkut pengelolaan sumberdaya alam, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan. Sebagai contoh, dalam pengembangan tambak berwawasan lingkungan di Lampung tentu penggunaan pestisida akan ditinggalkan. Padahal kenyataannya masih ada masyarakat yang menggunakan pestisida. Oleh karena itu, Proyek Pesisir harus dapat menempatkan diri pada dua pilihan tersebut.

3. Budiono (Co-Fish Project)

- Apakah kelompok inti yang dibentuk dalam rangka mengelola Daerah Perlindungan Laut (*marine sanctuary*) di Blongko-Sulawesi Utara memiliki status hukum yang jelas? Misalkan secara resmi ada surat keputusannya? Biasanya lembaga yang sudah formal lengkap dengan SK dalam menjalankan misinya akan menerapkan pendekatan *top-down*.
- Apakah ada hambatan dalam menjalankan daerah perlindungan laut? Kawasan yang diproteksi biasanya akan menjadi milik masyarakat yang menjaganya. Padahal kawasan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat dari daerah lainnya.
- Proyek Co-Fish Project yang dibiayai oleh Asian Development Bank dan implementasinya dilaksanakan melalui instansi pemerintah. Sementara itu Proyek Pesisir melaksanakan kegiatannya langsung di tengah masyarakat atau lapangan. Bagaimana pandangan instansi-instansi pemerintah terkait terhadap program-program Proyek Pesisir?

- Pendekatan yang bagaimana yang diterapkan oleh Proyek Pesisir dalam kegiatan penanaman mangrove sehingga masyarakat mau berpartisipasi? Kegiatan yang sama pernah dilakukan oleh Proyek Segara Anakan namun kurang berhasil.

4. Priyanto Santoso (USAID)

- Berapa persentase jumlah kepala keluarga (KK) yang berpartisipasi dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Proyek Pesisir?
- Apabila ada gangguan dari pihak luar kawasan daerah perlindungan laut, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana aturan yang disepakati tersebut diterapkan?
- Dalam kaitannya dengan sifat masyarakat pesisir yang memiliki mobilitas tinggi, apakah masyarakat Pematang Pasir memiliki kesulitan untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi mangrove. Masyarakat tersebut memiliki jiwa eksploitasi yang tinggi sehingga untuk kegiatan yang bersifat konservasi dan memerlukan waktu lama kemungkinan tidak menarik perhatian mereka.
- Apakah PP Lampung dan PP KALTIM akan mengadopsi model yang dikembangkan oleh PP SULUT?

5. Yunita (Universitas Indonesia)

- Hasil pendokumentasian yang disajikan lebih banyak pada langkah-langkah/proses proyek pesisir yang bersifat teknis. Sementara proses yang terjadi di masyarakat belum terdokumentasi. Misalnya bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat? Bagaimana interaksi Proyek Pesisir dan respons masyarakat dalam setiap proses yang dilakukan?

6. Jan Steffen (Yayasan KEHATI)

- Bagaimana pengalaman Proyek Pesisir dalam memperkenalkan aturan yang memuat sanksi? KEHATI memiliki pengalaman sulitnya membuat aturan dan sanksi yang sifatnya *bottom up*. UU No 22/1999 memberi peluang

bagi daerah untuk menyusun aturan-aturan yang sifatnya bottom-up. Oleh karena itu UU ini dapat menjadi kendala bagi pelajaran yang diperkenalkan.

7. Boyke (Mahasiswa SPL IPB)

- Di dalam membangun kapasitas (*capacity building*), masyarakat jangan sampai berpartisipasi hanya selama proyek berlangsung. Apa yang dilakukan Proyek Pesisir agar masyarakat memiliki kapasitas kemandirian sehingga upaya yang diperkenalkan proyek dapat diterapkan seterusnya walaupun masa proyek sudah berakhir?
- Skenario apa yang akan dibangun oleh Proyek Pesisir dalam waktu 5-6 tahun ke depan.

8. Bob Wenno (Yayasan KEHATI)

- *Community-based management (CBM)* sudah merupakan program yang sudah umum. Praktek CBM sudah diterapkan oleh sebagian masyarakat, seperti di Maluku dengan penghargaan Kalpataru-nya. Namun sampai saat ini upaya penyebarluasan aplikasi atau *up-scaling* CBM di tempat masih sulit. Apa upaya yang perlu dilakukan agar program *up-scaling* ini dapat dengan mudah diadopsi secara formal dalam program pemerintah?

B. TANGGAPAN-TANGGAPAN

Fedi Sondita (*Learning Team*)

- Di dalam masyarakat sudah ada inisiatif-inisiatif pengelolaan yang perlu dikaji lebih lanjut agar inisiatif tersebut tetap berlangsung. Kalau “sasi” dianggap sebagai inisiatif pengelolaan, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat menggoyahkannya sehingga mudah mengantisipasinya.
- Pada dasarnya *public discussion* yang formal dalam masyarakat sudah ada dan pada puncaknya ada pada lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Untuk mendalami karakteristik mobilitas masyarakat dibutuhkan referensi antropologis.

- Proyek Pesisir membangun kapasitas masyarakat hingga mereka siap mengimplementasikan programnya. Strategi Proyek Pesisir adalah pengurangan intervensi proyek secara bertahap dengan menarik penyuluh lapangan dari lokasi proyek dan menempatkannya di kantor proyek. Sementara itu asisten penyuluh lapangan yang memang anggota masyarakat desa proyek sudah disiapkan untuk menjalankan fungsi-fungsi penyuluh lapangan bersama masyarakat.
- Meskipun Proyek Pesisir melaksanakan kegiatan langsung di lapangan, sebelum pelaksanaan setiap program Proyek Pesisir melakukan pendekatan dan konsultasi lebih awal dengan instansi pemerintah (lewat forum *Provincial Working Group* ataupun *Kabupaten Task Force*).
- Kunci keberhasilan Proyek Pesisir sangat tergantung pada persiapan yang dilakukan, yaitu adanya komitmen luas dari masyarakat dan pemerintah, peningkatan kapasitas, dan dukungan dari luar. Karena hal ini sangat penting, maka kegiatan Proyek Pesisir pada tahun pertama lebih banyak bersifat konsultatif dalam bentuk pertemuan, rapat dan sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat dan staf instansi pemerintah bahwa program pengelolaan pesisir adalah program mereka.
- Persetujuan pemerintah terhadap penerapan contoh pengelolaan yang diperkenalkan dan dicoba masyarakat sangat penting untuk *scaling-up*. Mungkin perlu semacam peraturan daerah (Perda).

Johnnes Tulungen (PP SULUT)

- Saat ini PP SULUT sudah memiliki strategi intervensi terhadap masyarakat dalam mengembangkan Proyek Pesisir, namun belum terdokumentasi dengan baik dalam makalah yang disajikan, sehingga perlu diuraikan lebih rinci dalam makalah.
- Pada awalnya PP SULUT memperkuat dan memberdayakan lembaga yang sudah ada di masyarakat, yaitu LKMD. Namun mekanisme ini berjalan tidak efektif. Lalu masyarakat berinisiatif untuk membentuk Badan Pengelola. Ditinjau dari struktur dan komponennya, badan ini pada

prinsipnya sama dengan LKMD, namun berbeda proses pemilihan dan personil yang terlibat. Anggota badan ini adalah orang-orang baru, bukan pengurus LKMD.

- Kelompok inti yang dibentuk dalam pembentukan DPL tidak dibuat berdasarkan Surat Keputusan. Tetapi anggota-anggotanya dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Meskipun kelompok ini tidak legal, namun kelompok ini memiliki legitimasi dan anggotanya memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugasnya.
- Memadukan ciri-ciri *community-based management* dengan manajemen modern seyogyanya diserahkan kepada masyarakat karena masyarakatlah yang akan menentukan model yang menurut mereka paling baik.
- Aturan tentang pengelolaan DPL dibuat oleh masyarakat kemudian Sknya dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. Apabila terjadi pelanggaran oleh pihak luar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang terdapat dalam aturan tersebut.
- Prosentasi KK yang terlibat dalam setiap proses partisipasi sangat besar.
- Strategi pendekatan yang digunakan adalah melibatkan seluruh instansi pemerintah, mulai dari tingkat propinsi sampai kabupaten.

Neviaty P. Zamani (*Learning Team*)

- Perlu tidaknya suatu aturan dijadikan Surat Keputusan pada kasus-kasus tertentu merupakan polemik. Sebagai contoh anggota *Steering Committee* yang berasal dari instansi pemerintahan mengusulkan perlunya sebuah Surat Keputusan sementara anggota yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat berpendapat bahwa SK tidak diperlukan.
- Masyarakat Pematang Pasir adalah masyarakat pendatang dari berbagai daerah sehingga dampaknya mungkin baru bisa diketahui sekitar 3-4 tahun ke depan.

Hermawati (PP Lampung)

- Pendekatan yang diterapkan di Pematang Pasir adalah pendekatan ke tokoh masyarakat dan masyarakat yang memiliki tambak. Untuk memberikan gambaran dan wawasan tentang pentingnya pengelolaan tambak berwawasan lingkungan mereka diikuti-sertakan dalam kegiatan studi wisata (*study tour*) ke Jawa Timur. Dengan kegiatan ini mereka melihat secara langsung manfaat dari kegiatan rehabilitasi mangrove, baik untuk kepentingan tambak maupun untuk perlindungan abrasi pantai.

Budy Wiryawan (PP Lampung)

- Model pengelolaan tambak di Pematang Pasir pada dasarnya adalah konservasi. Tekanan yang dialami oleh pesisir Lampung bersumber dari pemerintah dan masyarakat. Tekanan yang bersumber dari pemerintah seperti adanya kebijakan untuk mengejar target Program Peningkatan Ekspor Perikanan (PROTEKAN) sehingga banyak masyarakat membuka tambak.
- Hal-hal yang positif dari pengalaman PP SULUT dalam memperkenalkan model pengelolaan akan diadopsi oleh PP Lampung dengan melakukan modifikasi yang diperlukan sesuai dengan karakteristik pesisir, masyarakat dan pemerintah Lampung. Dengan demikian, PP Lampung tidak perlu memulai suatu kegiatan awal.

Christovel Rotinsulu (PP SULUT)

- Komitmen Pemda Sulawesi Utara untuk mendukung Program proyek Pesisir sangat kuat, hal ini terlihat dari adanya program-program pemerintah untuk mendukung program Proyek Pesisir, seperti alokasi anggaran pembangunan daerah untuk membangun jalan ke desa-desa lokasi lapang proyek Pesisir dan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) untuk satu desa yang proposalnya disetujui.

PENUTUP oleh Dietrich G. Begen

Rangkaian diskusi tidak difokuskan dalam satu topik tertentu, namun pembahasan yang dilakukan oleh para peserta hampir semuanya menyangkut semua topik (*profiling*, daerah perlindungan laut dan tambak ramah lingkungan). Implikasi *good practice* yang diangkat dari pengalaman Proyek Pesisir terhadap kebijakan nasional tampak dominan dibicarakan. Secara umum rangkaian diskusi hari ini dapat dirangkum sebagai berikut:

- ◆ Ada sejumlah masukan untuk perbaikan makalah dokumentasi, khususnya perlunya informasi mengenai ilustrasi atau contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana partisipasi *stakeholder* dapat berlangsung, bagaimana proses tersusunnya isu-isu pada saat terdapat perbedaan persepsi di antara masyarakat dan proyek ataupun ilmuwan, dan bagaimana respons pemerintah daerah terhadap proyek dan kegiatannya.
- ◆ Dalam sebuah peta yang disusun berdasarkan masukan dari masyarakat dan *stakeholder* seyogyanya tercermin juga pandangan masyarakat terhadap aspek ruang.
- ◆ Pengaruh faktor mobilitas masyarakat terhadap kelangsungan (*sustainability*) contoh upaya pengelolaan pesisir yang diperkenalkan perlu diperhatikan oleh proyek.
- ◆ Dalam rangka menyusun strategi penyebarluasan atau penerapan contoh pengelolaan di tempat lain (*scaling-up*), persyaratan yang mendukung keberhasilan diterimanya contoh tersebut perlu diketahui dengan pasti.
- ◆ Intervensi proyek dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat seyogyanya mencakup mempersiapkan masyarakat agar setelah proyek berakhir mereka mampu mengelola sumberdaya alam yang tersedia.
- ◆ Perlu dipikirkan bagaimana contoh upaya pengelolaan berciri ‘berbasis masyarakat’ atau ‘*community-based approach*’ yang diperkenalkan oleh Proyek Pesisir dapat menjadi upaya pengelolaan berciri ‘modern’;
- ◆ Partisipasi masyarakat sebenarnya terwujud dalam “*public discussion*” yang berfungsi sebagai forum yang membahas perencanaan dan implementasi rencana pengelolaan sumberdaya.
- ◆ Penerapan Undang Undang No.22/1999 mempunyai implikasi potensial yang positif terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir di daerah (tingkat lokal) sekaligus dapat menjadi kendala bagi kelangsungan upaya-upaya yang diperkenalkan, yaitu pengelolaan pesisir secara terpadu (*integrated coastal zone management*).

Lampiran 1. Daftar peserta lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir 1997 - 2000 yang diundang

No	Nama	Instansi
1	Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS	Dept. Eksplorasi Kelautan & Perikanan
2	Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MSc	PKSPL IPB
3	Ir. Darmawan, MA	PKSPL IPB
4	Dr. Ir. Dietrich G Bengen	PKSPL IPB
5	Brian R Crawford	CRC URI
6	Ian Dutton	Proyek Pesisir Jakarta
7	Tiene Gunawan	Proyek Pesisir Jakarta
8	Kun Hidayat	Proyek Pesisir Jakarta
9	Prof. DR. Jacub Rais	Proyek Pesisir Jakarta
10	Dr. Kemal Taruc	Proyek Pesisir Jakarta
11	Muhammad Yusuf	Proyek Pesisir Jakarta
12	Dr. Budy Wiryawan	Proyek Pesisir Lampung
13	Handoko Adi	Proyek Pesisir Lampung
14	Johnnes Tulungen	Proyek Pesisir Sulawesi Utara
15	Prof. Dr. Ali Kabul	Proyek Pesisir Lampung
16	Christovel Rotinsulu	Proyek Pesisir Sulawesi Utara
17	Ramli Malik	Proyek Pesisir Kalimantan Timur
18	Ary Setiabudi Darmawan	Proyek Pesisir Kalimantan Timur
19	M. Fedi A Sondita	Learning Team PKSPL IPB
20	Neviaty P Zamani	Learning Team PKSPL IPB
21	Bambang Haryanto	Learning Team PKSPL IPB
22	Amiruddin	Learning Team PKSPL IPB
23	Priyanto Santosa	Learning Team PKSPL IPB
24	Suhaesih R Basari	NRM II/EPIQ
25	Drs. Hadiat, MA	Kabag. Kelautan BAPPENAS
26	Dr. Dedi Setia Darma	LP3O LIPI/COREMAP
27	Dr. Yunita T. Winanto	FISIP UI
28	Agus Setiawan	SEAWATCH BPPT Jakarta
29	Rahmania A Darmawan	SEAWATCH BPPT Jakarta

No	Nama	Instansi
30	Nina Dwi Sasanti	WWF Bali
31	Ery Damayanti	Jaring PELA
32	Syahminan	Wetland International
33	M. Khazali	Weland International
34	M. Imran	Yayasan TELAPAK
35	Christo Hutabarat	YABSHI
36	Budi Suprianto	YABSHI
37	Radja Siregar	WALHI Jakarta
38	Christien Ismuranty	Yayasan KEHATI
39	Jan Henning Steffen	Yayasan KEHATI
40	Arief Wicaksono	BSP Kemala
41	Tries B Razak	Yayasan TERANGI
42	Marlina Nurlidiasari	Yayasan TERANGI
43	Timothy O'Brien	WCS Indonesia Program
44	Frida Mindasari Saanin	WCS Indonesia Program
45	Tim McClanahan	WCS Indonesia Program
46	Ellen Pitkitch	WCS Indonesia Program
47	Herman Ediyanto	BPPT Jakarta
48	Cliff Marlessy	Yayasan KEHATI
49	Dr. Iwan Gunawan	BPPT Jakarta
50	Bob J Wenno	Yayasan KEHATI
51	Wanda Kambey	WWF Jakarta
52	Sari Suryadi	Conservation International
53	Frida Nursanti	Proyek Pesisir PKSPL IPB
54	Vitri Karina	Proyek Pesisir PKSPL IPB
55	Pepen S Abdullah	Proyek Pesisir PKSPL IPB
56	Siti Nurwati Khodijah	Proyek Pesisir PKSPL IPB

Lampiran 2. Daftar peserta lokakarya Hasil Pendokumentasian Kegiatan Proyek Pesisir 1997 - 2000 yang hadir tgl 23 Maret 2000

No	Nama	Instansi
1	Dr. Alex Rertaubun	Dept. Eksplorasi Kelautan & Perikanan
2	Ir. Darmawan, MA	PKSPL IPB
3	Dr. Ir. Dietrich G Bengen	PKSPL IPB
4	Brian Crawford	CRC URI
5	Ian Dutton	Proyek Pesisir Jakarta
6	Tiene Gunawan	Proyek Pesisir Jakarta
7	Kun Hidayat	Proyek Pesisir Jakarta
8	Prof. DR. Jacob Rais	Proyek Pesisir Jakarta
9	Dr. Kemal Taruc	Proyek Pesisir Jakarta
10	Muhammad Yusuf	Proyek Pesisir Jakarta
11	Dr. Budy Wiryawan	Proyek Pesisir Lampung
12	Handoko Adi	Proyek Pesisir Lampung
13	Johnnes Tulungen	Proyek Pesisir Sulawesi Utara
14	Prof. Dr. Ali Kabul	Proyek Pesisir Lampung
15	Christovel Rotinsulu	Proyek Pesisir Sulawesi Utara
16	Ramli Malik	Proyek Pesisir Kalimantan Timur
17	Ary Setiabudi Darmawan	Proyek Pesisir Kalimantan Timur
18	Fedi A Sondita	Learning Team PKSPL IPB
19	Neviaty P Zamani	Learning Team PKSPL IPB
20	Bambang Haryanto	Learning Team PKSPL IPB
21	Amiruddin	Learning Team PKSPL IPB
22	Priyanto Santosa	Learning Team PKSPL IPB
23	Suhaesih R Basari	NRM II/EPIQ
24	Drs. Hadiat, MA	Kabag. Kelautan BAPPENAS
25	Dr. Dedi Setia Darma	LP3O LIPI/COREMAP
26	Dr. Yunita T. Winanto	FISIP UI
27	Agus Setiawan	SEAWATCH BPPT Jakarta
28	Rahmania A Darmawan	SEAWATCH BPPT Jakarta
29	Syahminan	Wetland International

No	Nama	Instansi
30	M. Khazali	Wetland International
31	Christo Hutabarat	YABSHI
32	Budi Suprianto	YABSHI
33	Jan Henning Steffen	Yayasan KEHATI
34	Bob J Wenno	Yayasan KEHATI
35	Tries B Razak	Yayasan TERANGI
36	Marlina Nurlidiasari	Yayasan TERANGI
37	Timothy O'Brien	WCS Indonesia Program
38	Frida Mindasari Saanin	WCS Indonesia Program
39	Tim McClanahan	WCS Indonesia Program
40	Ellen Pitkitch	WCS Indonesia Program
41	Iwan Gunawan	BPPT Jakarta
42	Wanda Kambey	WWF Jakarta
43	Frida Nursanti	Proyek Pesisir PKSPL IPB
44	Vitri Karina	Proyek Pesisir PKSPL IPB
45	Pepen S Abdullah	Proyek Pesisir PKSPL IPB
46	Siti Nurwati Khodijah	Proyek Pesisir PKSPL IPB



Gambar 1. Tim survei dan masyarakat desa Pematang Pasir, Lampung membuat peta pemilikan lahan tambak secara bersama-sama



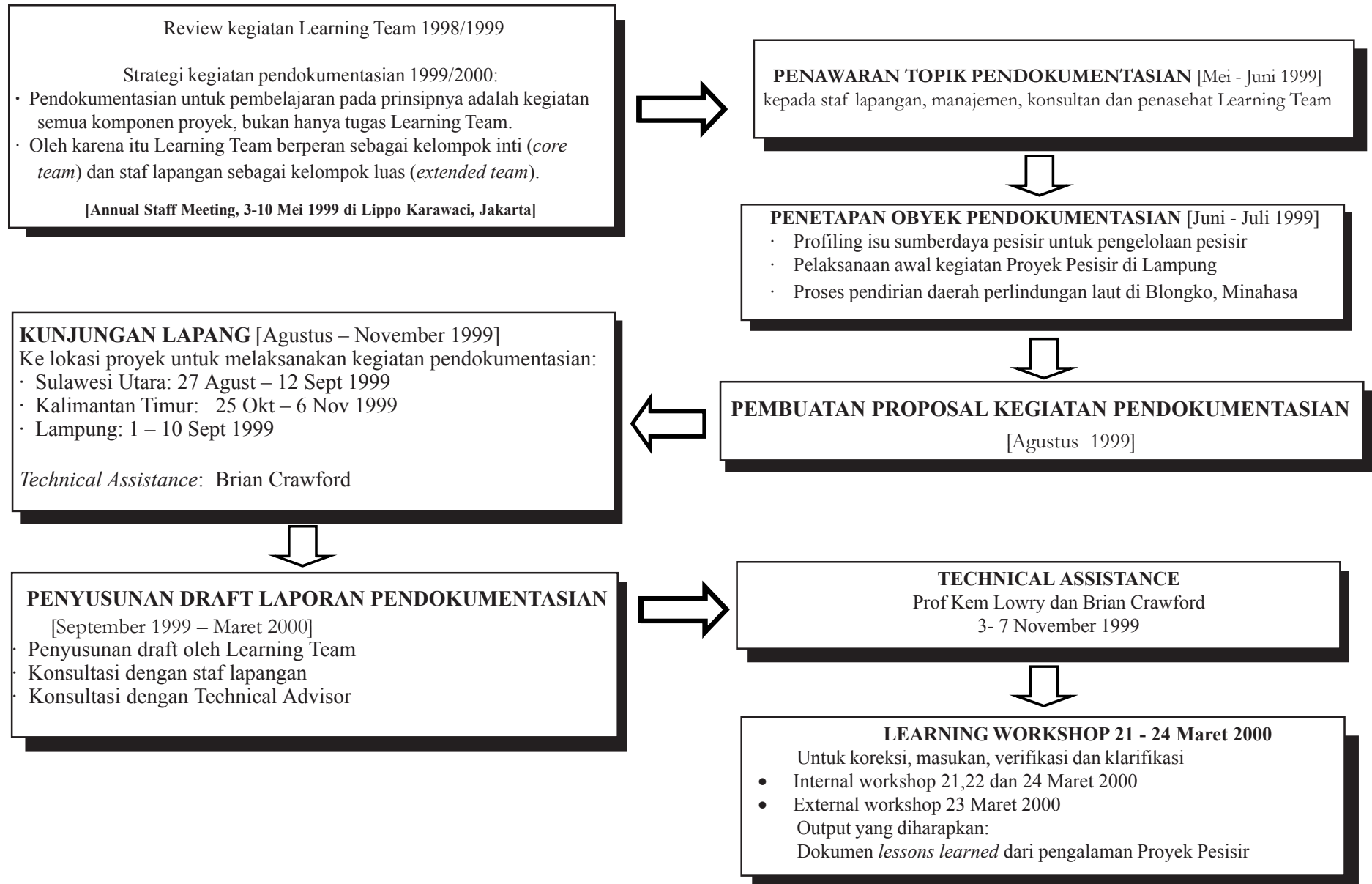
Gambar 2. *Learning workshop* yang membahas hasil kunjungan lapangan di desa lokasi Proyek Pesisir Sulawesi Utara



Gambar 3. Salah satu kondisi Teluk Balikpapan yang terdiri dari daerah industri



Gambar 4. Lokakarya hasil pendokumentasian kegiatan Proyek Pesisir yang diadakan di Bogor tanggal 21 - 24 Maret 2000



Gambar 1. PROSES PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN PROYEK PESISIR 1999/2000